



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah berusaha untuk terus menerus memenuhi tuntutan masyarakat untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, secara cepat dan tepat waktu. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbaru dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diharapkan dapat menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud serta untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran tagihan daerah.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diharapkan juga dapat mendukung percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk memberikan pelayanan prima kepada publik dan reformasi birokrasi yang lebih baik.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa SKPD harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan SAL;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas, serta
7. Catatan atas Laporan Keuangan.



1.2 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 214, salah satunya adalah menyusun laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan selama satu tahun pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan juga kinerja keuangan, yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan disusun adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi/pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; dan
7. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit - Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.



1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan



16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan Rekening /Akun

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Neraca
- 5.4. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

Lampiran



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Hasil Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan RPJMD dan RKPD yang dituangkan dalam APBD setiap tahunnya adalah merepresentasikan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi yang meliputi : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pertumbuhan Penduduk dan Pendapatan Perkapita serta Tingkat Inflasi.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB atau Pendapatan Regional (Regional Income) merupakan data statistik yang memuat nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tertentu dan periode tertentu.

Perkembangan PDRB Kabupaten Gresik dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2019 – 2023

Tahun	PDRB - ADHB (Rp)	PDRB - ADHK (Rp)
2019	138.893.600.000.000,00	101.346.550.000.000,00
2020	134.268.560.000.000,00	97.616.600.000.000,00
2021	144.656.070.000.000,00	101.318.690.000.000,00
2022*	163.907.910.000.000,00	108.796.880.000.000,00
2023**	176.071.090.000.000,00	113.825.430.000.000,00

*angka sementara

**angka sangat sementara

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi suatu negara atau daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang semakin baik. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga proses pengembangan wilayah juga akan semakin cepat dan baik.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor. Grafik proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat diuraikan sebagaimana berikut :



Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2019 – 2023

Indikator Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,42	-3,68	3,79	7,38	4,62

Sumber : BPS Kab Gresik

2.1.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 – 2024, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Kenaikan/(Penurunan)
2022	1.291.518	2,63
2023	1.296.688	0,40
2024	1.327.497	2,38

2.1.4 Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. Indeks Harga Konsumen adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut Inflasi (Kenaikan Harga) dan Deflasi (Penurunan Harga). Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

Dalam menyusun IHK, data harga konsumen diperoleh dari 82 kota, mencakup antara 225-462 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi.

Beberapa pasar tradisional, pasar modern, dan outlet di setiap kota dipilih untuk mewakili harga-harga dalam kota tersebut. Data harga masing-masing komoditi diperoleh melalui wawancara langsung dari 3 atau 4 pedagang eceran, yang didatangi oleh petugas pengumpul data. Penarikan sampel secara purposive digunakan untuk



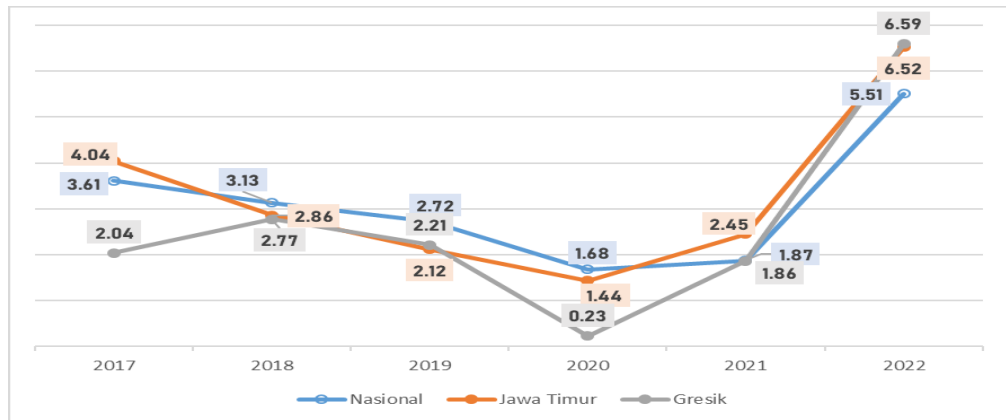
melakukan pemilihan kota, pasar, outlet, responden, komoditas dan kualitas dalam penghitungan IHK.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga pada satuan tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang baik adalah inflasi yang mampu dikendalikan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Inflasi dapat meningkatkan taraf hidup pertumbuhan karena inflasi memegang peran penting dalam kenaikan harga barang dan jasa selain investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi Kabupaten Gresik pada bulan Desember 2022 (yoy) mencapai 6,59 Persen atau lebih tinggi dari Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Nilai inflasi Tahun 2022 juga naik signifikan dari Tahun 2021 yang hanya sebesar 1,86 Persen. Secara umum sepanjang Tahun 2022 Laju Inflasi mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh tekanan harga global, gangguan supply pangan, kebijakan penyesuaian BBM, dan juga karena meningkatnya permintaan Masyarakat karena membaiknya kesejahteraan pasca pandemi. Beberapa komoditas yang mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan juga tarif angkutan udara. Secara Grafis perkembangan inflasi Kabupaten Gresik , Jawa Timur, dan Nasional ditunjukkan pada Grafik 1, sebagai berikut :



Grafik 1 Perkembangan Inflasi Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

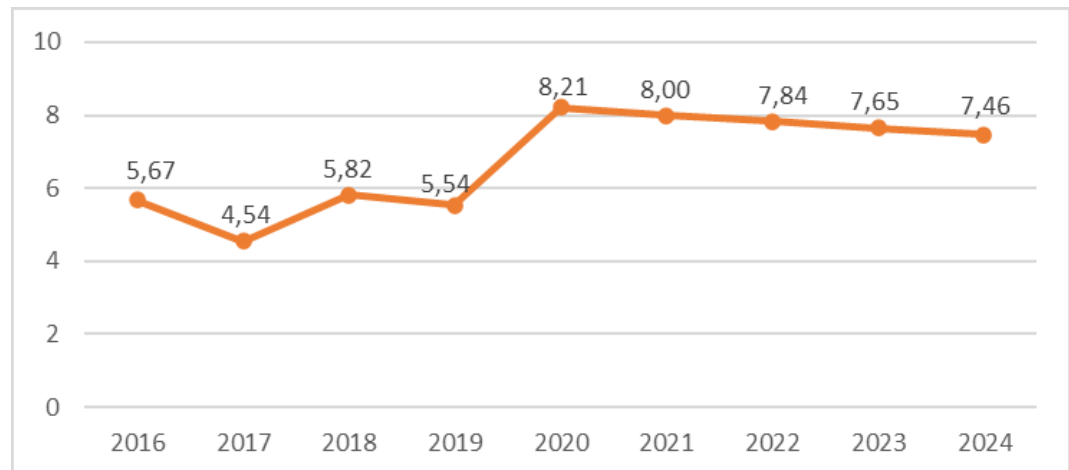


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2023

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran kabupaten Gresik selama sembilan tahun terakhir mengalami fluktuasi pada kisaran 4,54 – 8,21% dengan persentase terendah pada tahun 2017 mencapai 4,54% dan tertinggi 8,21% pada tahun 2020. Tingkat pengangguran sebesar 7,84% pada tahun 2022 dan diproyeksikan sebesar 7,65% pada tahun 2023 dan 7,46% pada 2024.

Grafik 2 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2024



Sumber : BPS Kab Gresik

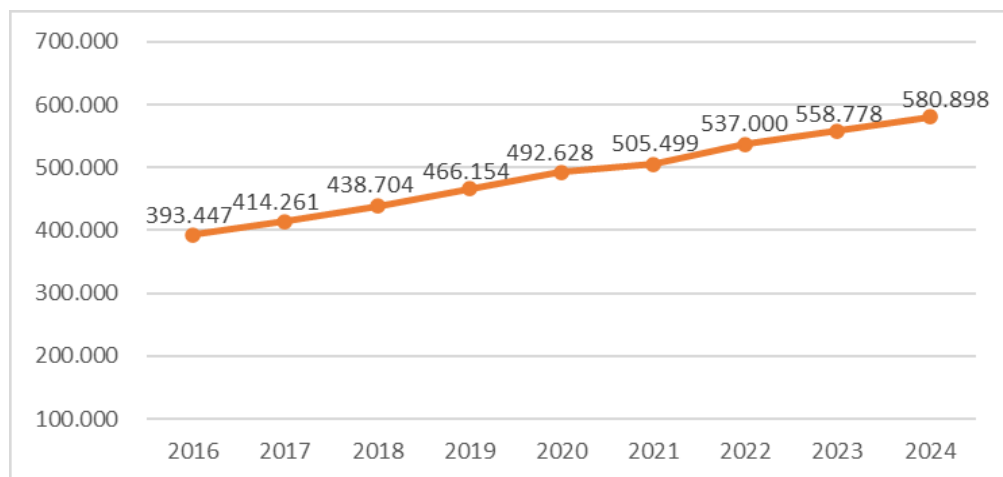
2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi multidimensional pada keterbatasan akses terhadap pemenuhan hak pada dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, sipil, politik, ketimpangan gender, kesenjangan geografis, maupun beban kependudukan. Kemiskinan di Indonesia saat ini masih diukur pada dimensi ekonomi dengan garis kemiskinan yang



mengacu pada harga kebutuhan makanan dan non makanan. Besaran garis kemiskinan di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir relatif mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021 garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) mencapai Rp505.499,00 per Kapita per Bulan dan kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai Rp537.000,00 per Kapita per Bulan. Pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp558.778,00 dan pada tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar Rp580.898,00. Kenaikan besaran garis kemiskinan menunjukkan beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk miskin juga semakin meningkat.

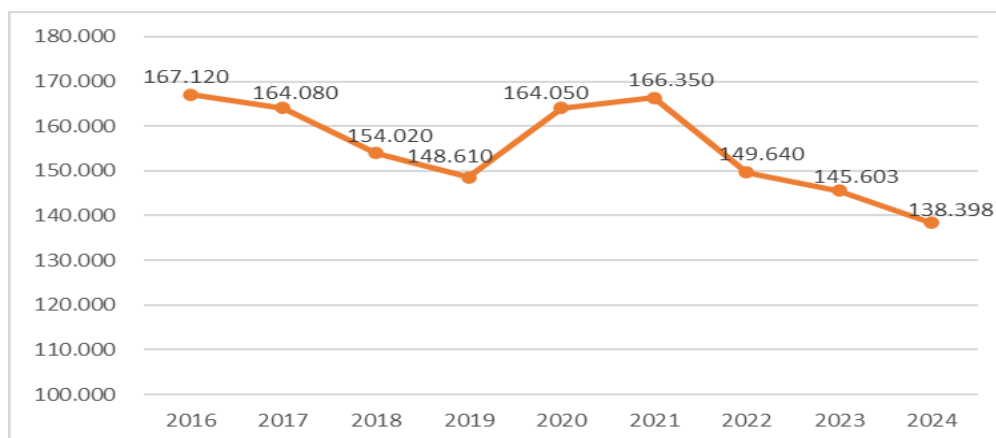
Grafik 3 Proyeksi Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik
Tahun 2016 – 2024



Sumber : BPS Kab Gresik

Peningkatan garis kemiskinan tidak selaras dengan jumlah penduduk miskin selama tahun 2017 sampai dengan 2022 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 164.080 jiwa turun sebesar 14.440 jiwa selama lima tahun terakhir mencapai 149.640 jiwa pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik diproyeksikan semakin berkurang pada tahun 2023 seiring dengan peningkatan perekonomian daerah, pengendalian laju inflasi, dan peningkatan pembangunan manusia yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik semakin berkurang hingga mencapai 149.640 jiwa pada tahun 2022, dan di proyeksikan pada tahun 2023 dan 2024 akan sebesar 145.603 jiwa dan 138.398.

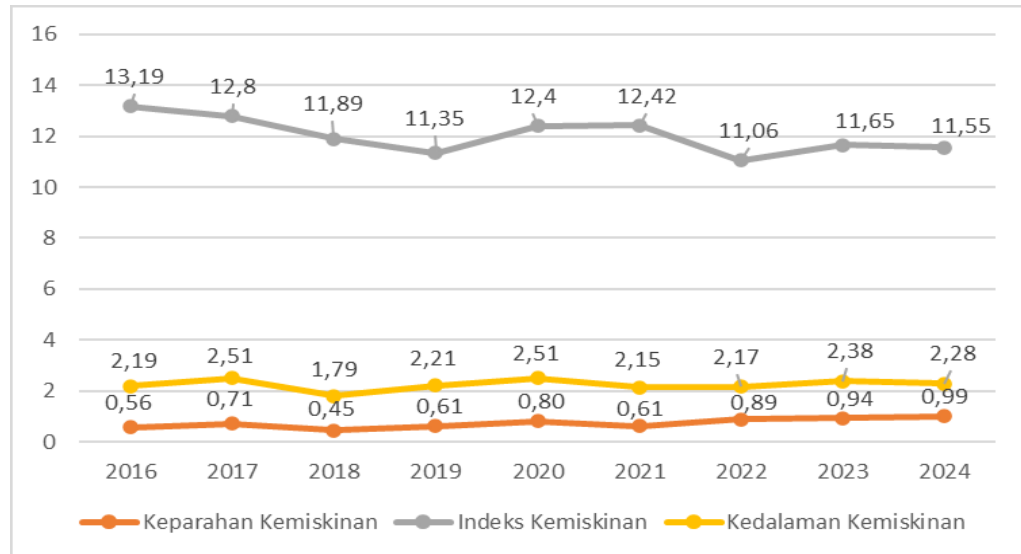
Grafik 4 Proyeksi Jumlah Penduduk Kemiskinan Kabupaten Gresik
Tahun 2016 – 2024



Sumber : BPS Kab Gresik

Penurunan jumlah penduduk miskin selaras dengan penurunan Persentase penduduk miskin (PO) hingga menyentuh level 11,06% pada tahun 2022 atau turun sebesar 1,74 basis poin dari tahun 2017 sebesar 12,8. Penurunan persentase penduduk miskin secara konsisten pada lima tahun terakhir namun cenderung melambat. Penurunan kemiskinan tidak selaras dengan kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung fluktuatif yang mengisyaratkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) dan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P2) masih belum sepenuhnya terentaskan. Kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 2,15 dari sebelumnya 2,51 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan mencapai 2,17 pada tahun 2022, diproyeksikan pada tahun 2023 menjadi 1,38 dan proyeksi tahun 2024 menjadi 2,28. Sementara itu, keparahan kemiskinan mengalami penurunan, yakni dari 0,80 pada tahun 2020 menjadi 0,61 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, keparahan kemiskinan mengalami kenaikan 0,89. Proyeksi pada tahun 2023 sebesar 0,94 dan tahun 2024 sebesar 0,99.

Grafik 5 Proyeksi Persentase penduduk miskin (PO), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2024



Sumber : BPS Kab Gresik

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup. Variabel dalam perhitungan IPM adalah :

a) Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy – e0*)

Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata – rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

b) Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Means Years of Schooling – MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal Rata-rata Lama Sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk



yang dihitung dalam penghitungan Rata-rata Lama Sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

c) Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Scholing* – EYS)

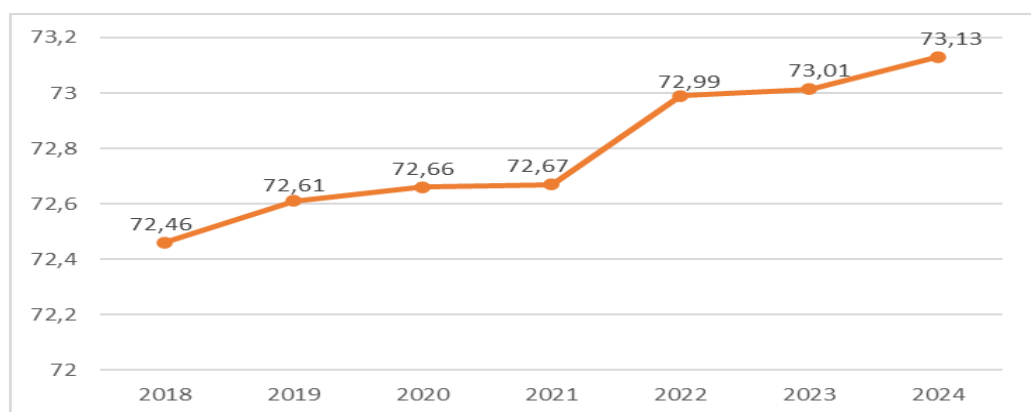
Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

d) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* – PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita ini digunakan BPS dalam menghitung standar hidup layak.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik selalu meningkat secara konsisten dalam 5 tahun yaitu sebesar 72,36 tahun pada tahun 2017 dan sebesar 72,99 tahun pada tahun 2022. Proyeksi Angka Harapan Hidup pada tahun 2023 diestimasikan menjadi 73,01 tahun sedangkan pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat kembali sebesar 73,13 tahun.

Grafik 6Proyeksi Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2023 - 2024



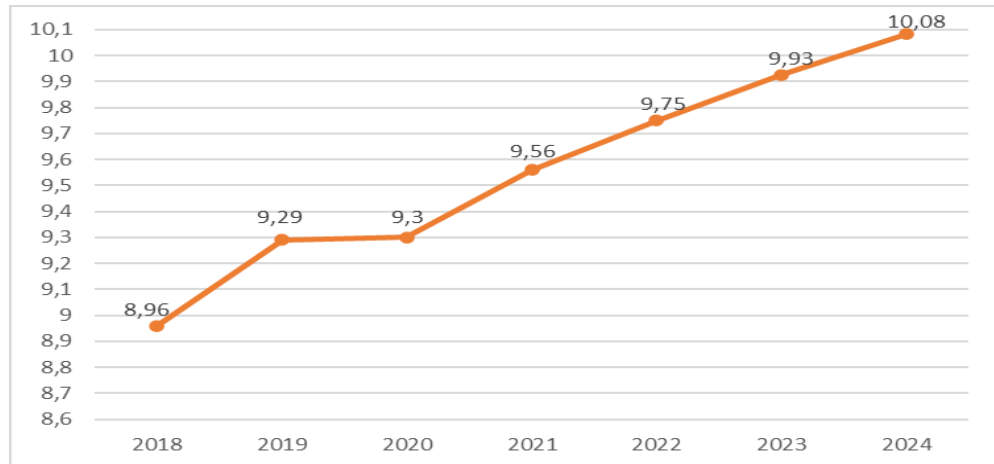
Sumber : BPS Kab Gresik

Berdasarkan angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Gresik tahun 2017 sampai dengan 2022, rata-rata angka harapan hidup adalah 72,63 tahun. Selain angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dapat diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dengan tahun rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama



Sekolah (RLS) adalah rata-rata tahun penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, sebagaimana tabel berikut:

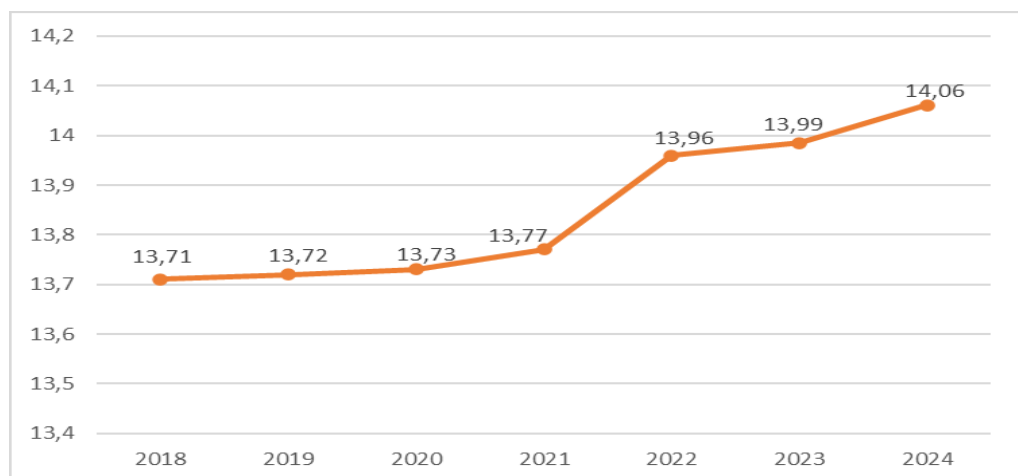
Grafik 7 Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2023 - 2024



Sumber : BPS Kab Gresik

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik menunjukkan *trendline* yang selalu meningkat selama lima tahun terakhir dengan data termutakhir tahun 2022 yaitu sebesar 9,75 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan bangku sekolah semakin tinggi, mengingat bahwa kualitas sumber daya manusia bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Pada tahun 2023 dan tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah diproyeksikan semakin meningkat mencapai 9,93 tahun dan 10,08 tahun. Selain Rata-rata Lama Sekolah, dimensi pengetahuan diukur dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,96 tahun pada tahun 2022 yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

**Grafik 8 Proyeksi Harapan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik
Tahun 2018 – 2024**



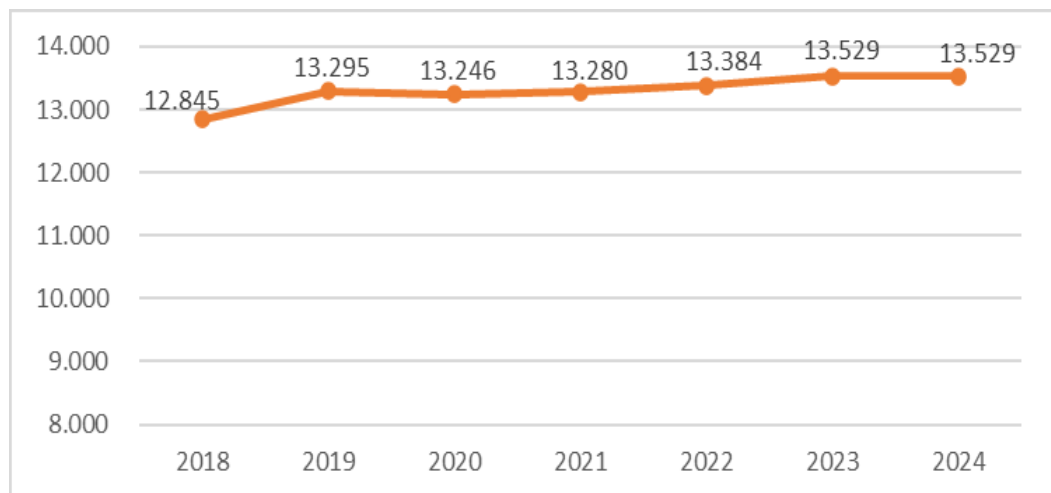
Sumber : BPS Kab Gresik



Harapan rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik selama tujuh tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,25 tahun dimana rata-rata lama sekolah bergerak pada kisaran 13,71 sampai dengan 13,96 tahun. Pada tahun 2023 harapan rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik diproyeksikan pada angka 13,99 tahun dan tahun 2023 sebesar 14,06 tahun. Proyeksi yang meningkat ini merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Harapan bersekolah yang semakin meningkat merupakan modal penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Gresik.

Dimensi yang terakhir merupakan standar hidup layak yang digambarkan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp13,3 juta per tahun naik sebesar 4,2 persen dibanding tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, pengeluaran per kapita naik 0,78 persen. Pendapatan masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran per kapita. Hubungan keduanya bersifat positif, yaitu apabila pendapatan naik maka tingkat pengeluaran untuk konsumsi masyarakat pun bertambah. Pada tahun 2023 diproyeksikan pengeluaran per kapita akan naik menjadi Rp13,529 juta per tahun dan tahun 2024 mejadi Rp13,529 juta per tahun.

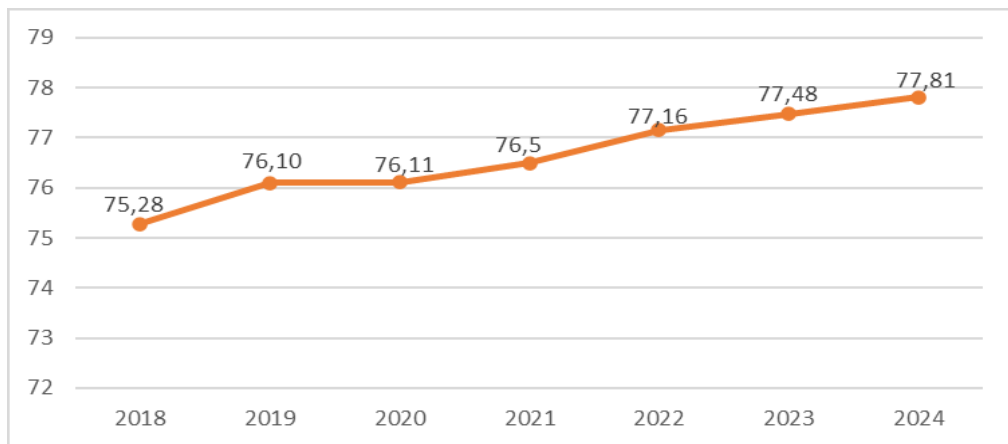
Grafik 9 Proyeksi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Gresik Tahun 2018 – 2024



Sumber : BPS Kab Gresik

Peningkatan pada setiap dimensi Indeks Pembangunan Manusia memberikan efek selaras terhadap pertumbuhan IPM di Kabupaten Gresik yang secara konsisten terus bertumbuh hingga mencapai 77,16 pada tahun 2022 dari 75,28 pada tahun 2018. IPM Kabupaten Gresik diproyeksikan kembali meningkat pada tahun 2023 mencapai 77,48 dan 77,81 pada tahun 2024.

Grafik 10 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik
Tahun 2018 – 2024



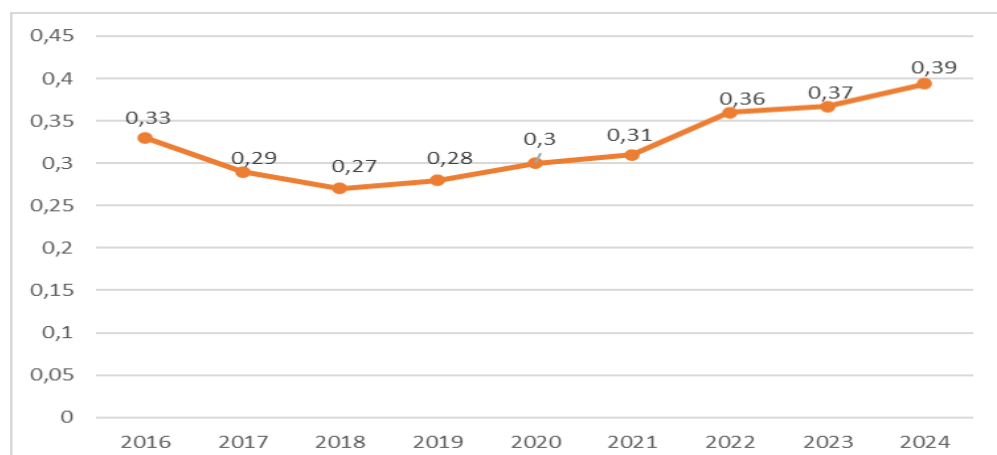
Sumber : BPS Kab Gresik

2.1.8 Gini Rasio

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan adalah menggunakan indeks gini. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). BPS menggunakan pendekatan pengeluaran dengan asumsi pengeluaran yang besar akan menghasilkan pendapatan yang besar.

Rasio Gini Kabupaten Gresik cenderung mengalami fluktuatif namun pada kisaran ketimpangan yang rendah. Rasio Gini pada tahun 2022 mencapai 0,36 dan diproyeksikan pada tahun 2023 sebesar 0,37 dan pada 2024 akan mencapai 0,39. Berikut merupakan rasio gini di Kabupaten Gresik.

Grafik 11 Rasio Gini Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2024



Sumber : BPS Kab Gresik



2.1.9 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.

Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. *Mandatory Spending* – Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Angaran Pendapatan dan belanja Daerah sesuai amanat Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Komponen perhitungan *Mandatory Spending* – Bidang Pendidikan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4 Komponen perhitungan *Mandatory Spending* – Bidang Pendidikan

KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1. a. Belanja pada Dinas Pendidikan	1.070.968.671.298,00	1.031.262.803.659,98	96,29
1) Belanja Operasi	1.024.380.546.746,00	985.870.696.442,47	96,24
a. Belanja Pegawai	532.396.012.915,13	523.826.458.143,43	98,39
b. Belanja Barang dan Jasa	202.706.478.190,87	185.535.253.979,04	91,53
c. Belanja Hibah	286.258.855.640,00	276.508.984.320,00	96,59
d. Belanja Bantuan Sosial	3.019.200.000,00	0,00	-
2) Belanja Modal	46.588.124.552,00	45.392.107.217,51	97,43
b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain :	10.082.500.000,00	10.012.500.000,00	99,31
1) Belanja Transfer	10.082.500.000,00	10.012.500.000,00	99,31
Belanja Bantuan Keuangan Untuk Olahraga	10.082.500.000,00	10.012.500.000,00	99,31
2) Sub Kegiatan pada SKPD lainnya.....	0,00	0,00	-
2. Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	1.081.051.171.298,00	1.041.275.303.659,98	96,32
3. Total Belanja Daerah	3.974.761.570.922,00	3.697.575.974.929,23	93,03
Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100 %	27,20	28,16	



2. *Mandatory Spending* – Bidang Kesehatan

Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Komponen perhitungan *Mandatory Spending* – Bidang Kesehatan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 5 Komponen perhitungan *Mandatory Spending* – Bidang Kesehatan

KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1. a. Belanja pada Dinas Kesehatan	758.428.652.559,00	710.547.619.525,10	93,69
1) Belanja Operasi	668.797.294.472,00	640.384.157.609,77	95,75
a. Belanja Pegawai	268.845.673.090,00	265.513.532.416,93	98,76
b. Belanja Barang dan Jasa	397.151.621.382,00	372.072.457.553,84	93,69
c. Belanja Hibah	2.800.000.000,00	2.798.167.639,00	99,93
d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2) Belanja Modal	89.631.358.087,00	70.163.461.915,33	78,28
b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain :	42.532.784.514,00	41.320.262.603,41	97,15
1) Belanja Transfer	680.000.000,00	656.000.000,00	96,47
Belanja Bantuan Keuangan Untuk Kesehatan	680.000.000,00	656.000.000,00	0,00
2) Sub Kegiatan pada SKPD	41.852.784.514,00	40.664.262.603,41	0,00
Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota pada SKPD Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.852.784.514,00	40.664.262.603,41	97,16
2. Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	800.961.437.073,00	751.867.882.128,51	93,87
3. Total Belanja Daerah	3.974.761.570.922,00	3.697.575.974.929,23	93,03
4. Gaji ASN	635.771.117.663,13	612.929.498.932,00	96,41
5. Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	3.338.990.453.258,87	3.084.646.475.997,23	92,38
Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	23,99	24,37	

3. *Mandatory Spending* – Bidang Infrastruktur

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Komponen perhitungan *Mandatory Spending* – Bidang Infrastruktur tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 6 Komponen perhitungan *Mandatory Spending* – Bidang Infrastruktur

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA			
KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1. Belanja Daerah	3.974.761.570.922,00	3.697.575.974.929,23	93,03
2. Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa	621.692.565.000,00	609.637.902.850,00	98,06
a. Belanja Bagi Hasil	127.468.390.000,00	115.413.727.850,00	90,54
b. Belanja Bantuan Keuangan	494.224.175.000,00	494.224.175.000,00	100,00
1. ADD	321.507.175.000,00	172.717.000.000,00	0,00
2. DD	172.717.000.000,00	321.507.175.000,00	186,15
3. Jumlah Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa	3.353.069.005.922,00	3.087.938.072.079,23	92,09
4. Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40 %)	1.341.227.602.368,80	1.235.175.228.831,69	92,09
B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH			
KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1. a. Belanja Modal	434.805.353.235,00	386.207.018.769,39	88,82
1. Tanah	9.517.500.000,00	1.727.306.005,00	18,15
2. Peralatan dan Mesin	71.398.379.001,00	57.800.831.495,00	80,96
3. Gedung dan Bangunan	134.290.136.174,00	118.169.885.080,81	88,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	219.599.338.060,00	208.508.996.188,58	94,95
5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6. Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Barang dan Jasa	91.916.279.681,00	84.757.664.782,41	92,21
1. Belanja Pemeliharaan	48.827.693.063,00	43.023.149.674,07	88,11
2. Belanja Barang dan Jasa Lainnya	43.088.586.618,00	41.734.515.108,34	96,86
Jumlah (a+b)	526.721.632.916,00	470.964.683.551,80	89,41
2. a. Belanja Hibah	73.050.870.835,00	0,00	0,00
b. Belanja Bantuan Sosial	8.022.047.500,00	62.728.270.951,32	781,95
c. Belanja Bantuan Keuangan	0,00	7.186.445.000,00	#DIV/0!
Jumlah (2)	81.072.918.335,00	69.914.715.951,32	86,24
3. Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	607.794.551.251,00	540.879.399.503,12	88,99
4. Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	18,13	17,52	



4. *Mandatory Spending* – Alokasi Dana Desa

Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Komponen perhitungan Alokasi dana Desa (ADD) tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 7 Komponen perhitungan Alokasi dana Desa (ADD)

KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1. Pendapatan Dana Perimbangan			
Dana Transfer Umum			
a. DBH	221.213.304.000,00	252.458.013.000,00	114,12
b. DAU	952.986.932.000,00	976.604.015.000,00	102,48
c. DAK	469.701.764.840,00	452.655.088.125,00	96,37
Jumlah Penerimaan	1.643.902.000.840,00	1.681.717.116.125,00	102,30
2. Pengurang			
Dana Transfer Umum			
a. DAK	469.701.764.840,00	452.655.088.125,00	96,37
Jumlah Pengurang	469.701.764.840,00	452.655.088.125,00	96,37
3. Jumlah Dana Transfer Umum setelah dikurangi DAK	1.174.200.236.000,00	1.229.062.028.000,00	104,67
4. Transfer kepada Desa (ADD)	172.717.000.000,00	172.717.000.000,00	100,00
5. Persentase Transfer kepada Desa (ADD)	14,71%	14,05%	

5. *Mandatory Spending* – Bagi Hasil Pajak kepada Desa

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2024.

Komponen perhitungan Bagi Hasil Pajak kepada Desa tahun 2024, sebagai berikut :



Tabel 8 Komponen perhitungan Bagi Hasil Pajak kepada Desa

KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1. Pendapatan Pajak Daerah			
a. Pajak Hotel	17.000.000.000,00	12.973.185.049,00	76,31
b. Pajak Restoran	42.000.000.000,00	39.355.268.944,00	93,70
c. Pajak Hiburan	4.500.000.000,00	4.058.945.384,00	90,20
d. Pajak Reklame	10.000.000.000,00	7.783.058.019,00	77,83
e. Pajak Penerangan Jalan	260.000.000.000,00	269.653.244.700,00	103,71
f. Pajak Parkir	3.500.000.000,00	3.346.693.618,00	95,62
g. Pajak Air Tanah	8.700.000.000,00	6.967.335.242,00	80,08
h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000,00	4.352.435.000,00	54,41
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	250.000.000.000,00	204.384.848.263,00	81,75
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	435.000.000.000,00	407.572.699.061,00	93,69
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	1.038.700.000.000,00	960.447.713.280,00	92,47
2 Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Desa	103.870.000.000,00	99.090.915.050,00	95,40
3. Persentase Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Desa	10,00%	10,32%	

6. *Mandatory Spending* – Bagi Hasil Retribusi kepada Desa

Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan retribusi daerah kabupaten/kota tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2024.

Komponen perhitungan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 9 Komponen perhitungan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa

KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1. Pendapatan Retribusi Daerah			
a. Retribusi Jasa Umum	24.935.000.000,00	6.705.549.162,00	26,89
b. Retribusi Jasa Usaha	110.770.900.000,00	60.928.805.772,00	55,00
c. Retribusi Perizinan Tertentu	100.440.000.000,00	50.374.398.170,60	50,15
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	236.145.900.000,00	118.008.753.104,60	49,97
2. Transfer Bagi Hasil Retribusi kepada Desa	23.598.390.000,00	16.322.812.800,00	69,17
3. Persentase Transfer Bagi Retribusi Pajak kepada Desa	9,99%	13,83%	



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah memuat gambaran tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik, dalam mencapai target pembangunan pada tahun 2024. Arah kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memuat fakta dan analisis terkait sumber dan besaran pendapatan, sebagai perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan pembangunan pada tahun 2024.

Jika pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka belanja dan pembiayaan merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan untuk pembangunan Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam konteks kerangka fiskal, Pendapatan Daerah mencapai 45,60% dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar 38,12% dimana Pajak Daerah telah menjangkau 39,27% dari target sementara Retribusi Daerah hanya 26,99%. Pendapatan Transfer telah mencapai 50,72%. Sedangkan realisasi Belanja Daerah mencapai 36,41%.

2.2.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut :

1. Inovasi Pemungutan Pajak melalui Media Elektronik;
2. Menambah media pembayaran non tunai untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah;
3. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah yang mengatur tata cara pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Kepada *stakeholder* dan masyarakat;
4. Pengiriman surat tagihan Kewajiban Pajak kepada wajib pajak yang jatuh tempo, terlambat atau terhutang pembayarannya dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum;
5. Menyesuaikan besaran dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
7. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
8. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, dengan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahn Pusat;



9. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah penerimaan maupun pengeluaran daerah yang mempunyai akibat pada keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya dan Pinjaman Daerah untuk menutup defisit anggaran daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan (fiskal)

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2024 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024. Seiring dengan dinamika yang terjadi dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan DPRD Kabupaten Gresik Nomor 180/2/437.12/2024 dan Nomor KPTS/4/PIM.DPRD/VII/2024 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024.



Tabel 10 APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD 2024	P-APBD 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	3.915.508.009.350,00	3.916.416.570.192,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.594.370.914.605,00	1.597.844.135.728,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.033.700.000.000,00	1.038.700.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	235.335.900.000,00	236.145.900.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	12.645.000.000,00	12.645.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	312.690.014.605,00	310.353.235.728,00
4.2	Pendapatan Transfer	2.321.137.094.745,00	2.318.572.434.464,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.965.666.507.000,00	2.001.794.953.840,00
4.2.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	355.470.587.745,00	316.777.480.624,00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	3.887.408.009.350,00	3.974.761.570.922,00
5.1	Belanja Operasi	2.614.370.321.755,00	2.697.303.910.674,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.128.724.766.210,00	1.127.045.955.366,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.257.150.951,00	1.143.117.115.411,87
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	964.120.371,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	392.747.864.594,00	398.709.272.025,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.640.540.000,00	27.467.447.500,00
5.2	Belanja Modal	380.394.968.398,00	483.004.325.065,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.956.500.000,00	9.517.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.396.080.279,00	108.896.637.327,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.859.780.011,00	134.290.136.174,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	143.258.156.853,00	220.349.338.060,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.318.391.255,00	8.626.438.504,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	606.060.000,00	1.324.275.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.221.807.986,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.221.807.986,00
5.4	Belanja Transfer	882.642.719.197,00	788.231.527.197,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	126.903.590.000,00	127.468.390.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	755.739.129.197,00	660.763.137.197,00



No.	Uraian	APBD 2024	P-APBD 2024
	Surplus / (Defisit)	28.100.000.000,00	(58.345.000.730,00)
6	PEMBIAYAAN	(28.100.000.000,00)	58.345.000.730,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	(28.100.000.000,00)	78.495.000.730,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0,00	78.495.000.730,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	28.100.000.000,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	8.100.000.000,00	150.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Cicilan Hutang	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	28.100.000.000,00	58.345.000.730,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00

2.3.2 Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 194 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Melalui laporan kinerja ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan kinerja ini, Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 bahwa Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan untuk meningkatkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian daerah.

Sedangkan untuk menutup kesenjangan fiskal, Pemerintah Kabupaten Gresik tetap menerima Dana Perimbangan dengan prinsip *money follow function*, Pemerintah Kabupaten Gresik juga menerima Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak serta Bantuan lainnya dari Provinsi Jawa Timur.

Capaian kinerja pendapatan daerah selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi pendapatan pada pada tahun pada tahun 2020 mencapai Rp2.939.477.566.194,07 atau turun sebesar 5,76% dari tahun 2019, pada tahun 2021 mencapai Rp3.133.574.194.041,41 atau naik sebesar 6,60% dari tahun 2020, pada tahun 2022 mencapai Rp3.366.654.984.393,29 atau naik sebesar 7,44% dari tahun 2021, pada tahun 2023 mencapai Rp3.416.390.957.965,09 atau naik sebesar 1,48% dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 mencapai Rp3.730.420.012.925,76 atau naik sebesar 9,19% dari tahun sebelumnya. Kinerja masing-masing kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini :

3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah. Perkembangan realisasi PAD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 11 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 - 2024

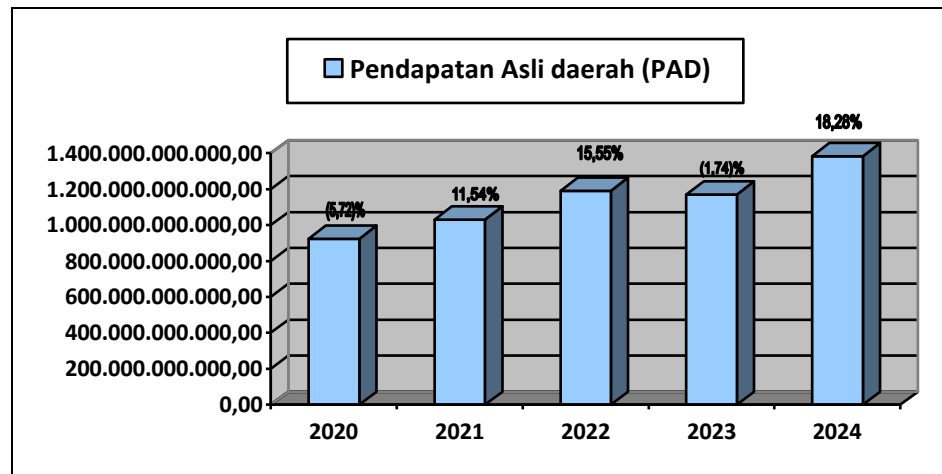
No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	816.960.832.514,35	924.657.913.563,07	106,15	(5,72)
2	2021	1.153.264.477.750,00	1.031.387.734.236,41	89,43	11,54
3	2022	1.381.671.641.242,00	1.191.799.202.154,29	86,26	15,55
4	2023	1.584.113.767.514,00	1.171.022.355.999,09	73,92	(1,74)
5	2024	1.597.844.135.728,00	1.385.028.684.600,76	86,68	18,28



Tabel 12 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 - 2024

No	Jenis P A D	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Daerah	590.087.765.850,15	721.867.807.058,57	783.844.086.372,06	793.322.673.442,23	960.468.393.710,00
2	Retribusi Daerah	65.623.474.229,50	62.608.242.760,50	90.871.466.103,00	87.430.225.680,00	401.465.003.530,69
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.222.126.583,09	11.328.944.934,50	13.132.195.395,70	13.425.554.336,30	12.267.234.269,30
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	256.724.546.900,33	235.582.739.482,84	303.951.454.283,53	276.843.902.540,56	10.828.053.090,77
	Jumlah	924.657.913.563,07	1.031.387.734.236,41	1.191.799.202.154,29	1.171.022.355.999,09	1.385.028.684.600,76

Grafik 12 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 – 2024



Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi PAD tahun tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,72%, pada tahun 2021 naik sebesar 11,54%, tahun 2022 naik sebesar 15,55%, pada tahun 2023 turun sebesar 1,74% dan pada tahun 2024 naik sebesar 18,28%.

3.1.1.2 Kinerja Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau Dana Perimbangan meliputi: (1) Penerimaan Bagi Hasil yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang, dan Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam diperoleh dari Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan



realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

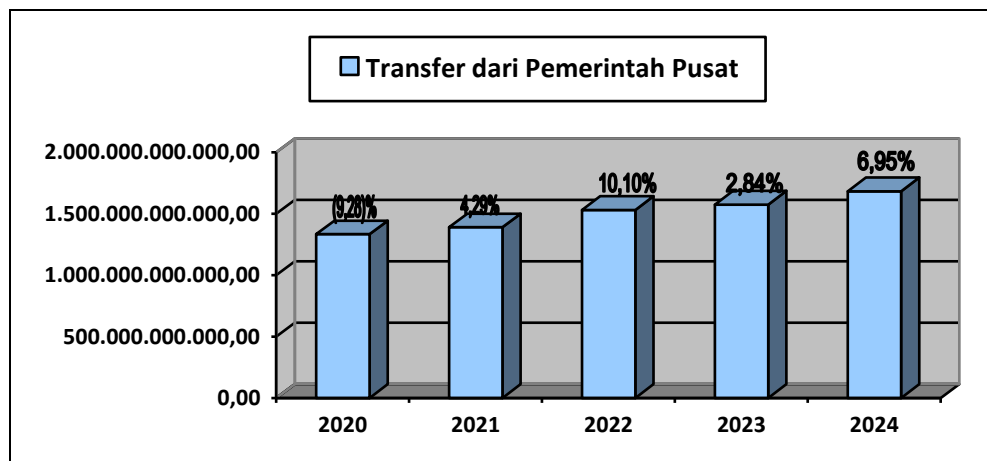
Tabel 13 Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Th 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	1.355.693.530.362,00	1.331.644.546.291,00	98,23	(9,28)
2	2021	1.371.116.496.469,00	1.388.743.965.408,00	101,29	4,29
3	2022	1.530.695.894.000,00	1.528.999.930.386,00	99,89	10,10
4	2023	1.571.820.216.422,00	1.572.411.245.945,00	100,04	2,84
5	2024	1.643.902.000.840,00	1.681.717.116.125,00	102,30	6,95

Tabel 14 Rincian Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Pendapatan Dana Transfer dari	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	184.917.706.092,00	251.983.689.364,00	253.383.149.961,00	1.115.793.995.309,00	252.458.013.000,00
2	Dana Alokasi Umum	871.987.860.000,00	870.446.047.000,00	864.287.717.761,00	122.396.553.183,00	976.604.015.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	274.738.980.199,00	266.314.229.044,00	411.329.062.664,00	334.220.697.453,00	452.655.088.125,00
	Jumlah	1.331.644.546.291,00	1.388.743.965.408,00	1.528.999.930.386,00	1.572.411.245.945,00	1.681.717.116.125,00

Grafik 13 Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 – 2024



Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi Dana Transfer tahun pada tahun 2020 turun sebesar 9,28%, pada tahun 2021 naik sebesar 4,29%, tahun 2022 naik sebesar 10,10%, pada tahun 2023 naik sebesar 2,84% dan pada tahun 2024 naik sebesar 6,95%.



3.1.1.3 Kinerja Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat, meliputi (1) Dana Insentif Daerah, dan (2) Dana Desa. Perkembangan realisasi Dana Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

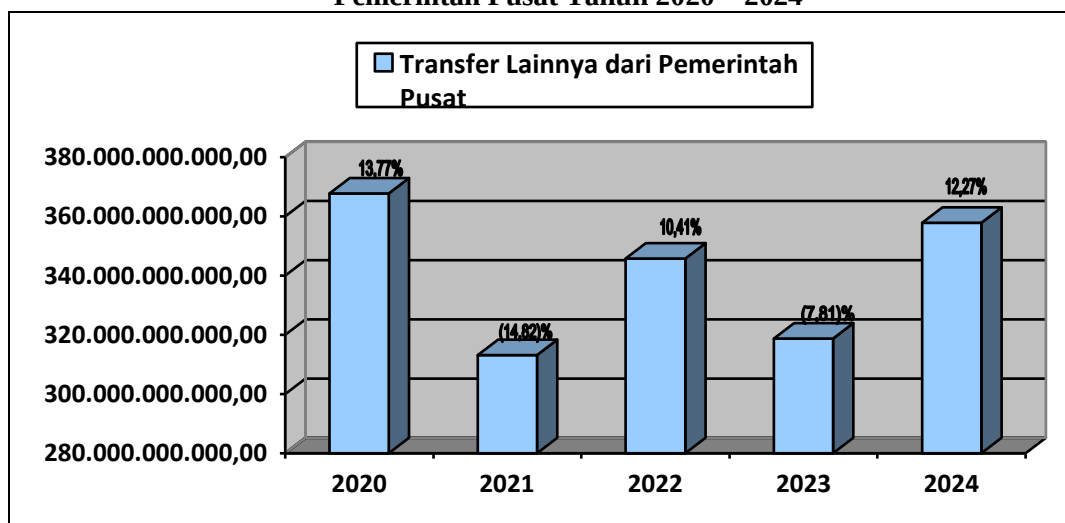
Tabel 15 Pendapatan Dana Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	357.834.778.000,00	367.707.457.000,00	100,00	13,77
2	2021	313.943.409.000,00	313.196.902.000,00	99,76	(14,82)
3	2022	346.208.100.000,00	345.809.012.600,00	99,88	10,41
4	2023	318.788.865.000,00	318.788.865.000,00	100,00	(7,81)
5	2024	357.892.953.000,00	357.892.953.000,00	100,00	12,27

Tabel 16 Rincian Pendapatan Dana Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Pendapatan Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dana Insentif Daerah	83.381.963.000,00	26.521.034.000,00	51.487.263.000,00	0,00	0,00
2	Dana Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	36.385.778.000,00
3	Dana Desa	284.325.494.000,00	286.675.868.000,00	294.321.749.600,00	318.788.865.000,00	321.507.175.000,00
	Jumlah	367.707.457.000,00	313.196.902.000,00	345.809.012.600,00	318.788.865.000,00	357.892.953.000,00

Grafik 14 Perkembangan Pendapatan Dana Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 – 2024





Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi dana transfer tahun 2020 naik sebesar 13,77% dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 turun sebesar 14,82%, tahun 2022 naik sebesar 10,41%, pada tahun 2023 turun sebesar 7,81% dan pada tahun 2024 naik sebesar 12,27%.

3.1.1.4 Kinerja Transfer dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi, (2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dan (3) Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur. Perkembangan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 17 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2020 – 2024

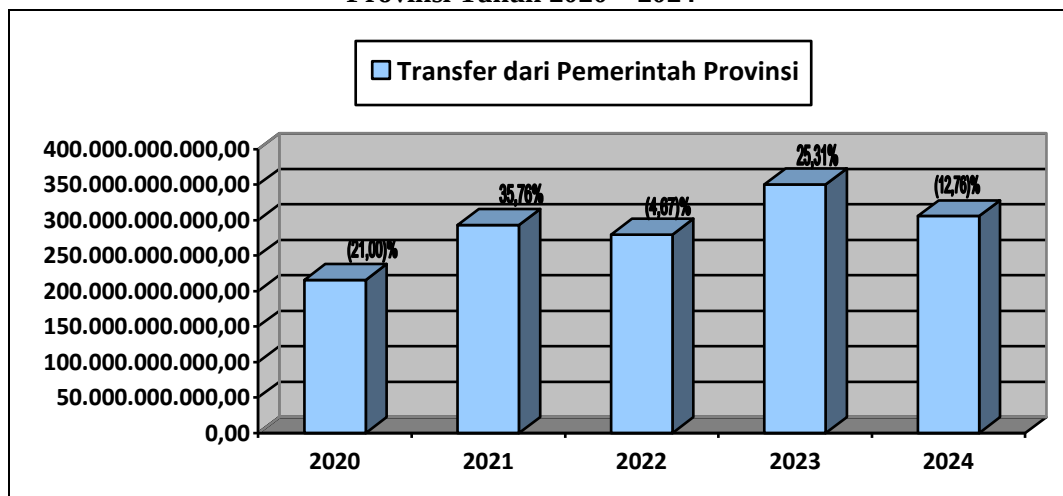
No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	229.911.542.350,00	215.982.353.835,00	109,67	(21,00)
2	2021	348.233.415.975,00	293.210.184.267,00	84,20	35,76
3	2022	402.750.278.226,00	279.531.717.585,00	69,41	(4,67)
4	2023	398.422.899.150,00	350.278.491.021,00	87,92	25,31
5	2024	316.777.480.624,00	305.595.259.200,00	96,47	(12,76)

**Tabel 18 Rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi
Tahun 2020 - 2024**

No	Jenis Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi	199.149.740.485,00	276.894.868.767,00	263.373.114.585,00	334.088.066.900,00	289.414.392.200,00
2	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur	16.832.613.350,00	16.315.315.500,00	16.158.603.000,00	16.190.424.121,00	16.180.867.000,00
	Jumlah	215.982.353.835,00	293.210.184.267,00	279.531.717.585,00	350.278.491.021,00	305.595.259.200,00



Grafik 15 Perkembangan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2020 – 2024



Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2020 turun sebesar 21,00%, tahun 2021 naik sebesar 35,76%, tahun 2022 turun sebesar 4,67%, tahun 2023 naik sebesar 25,31% dan tahun 2024 turun sebesar 12,76%.

3.1.1.5 Kinerja Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi (1) Pendapatan Hibah, (2) Pendapatan Dana Darurat, dan (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkembangan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

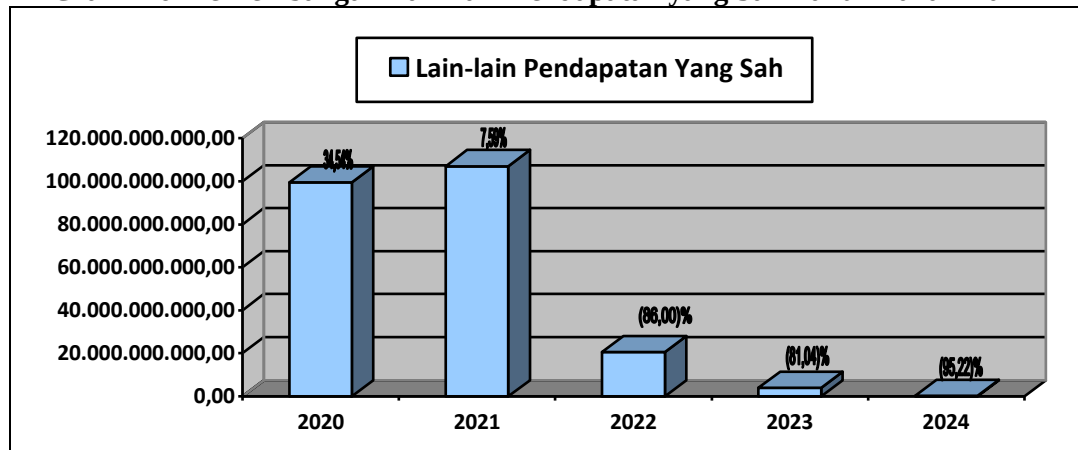
Tabel 19 Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	94.925.700.000,00	99.485.295.505,00	121,06	34,54
2	2021	105.439.323.068,00	107.035.408.130,00	101,51	7,59
3	2022	15.744.895.806,00	20.515.121.668,00	130,30	(80,83)
4	2023	0,00	3.890.000.000,00	0,00	(81,04)
5	2024	0,00	186.000.000,00	-	(95,22)

Tabel 20 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Lain-lain Pendapatan yang Sah	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Hibah	99,485,295,505.00	2,423,923,062.00	3,988,597,568.00	3,890,000,000.00	186,000,000.00
2	Pendapatan Lainnya	0.00	104,611,485,068.00	16,526,524,100.00	0.00	0.00
	Jumlah	99,485,295,505.00	107,035,408,130.00	20,515,121,668.00	3,890,000,000.00	186,000,000.00

Grafik 16 Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 - 2024



Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 34,54% dan 7,59% dari tahun sebelumnya, tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan masing-masing turun sebesar 80,83% dan 81,04% dan tahun 2024 turun sebesar 95,22%.

3.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Capaian kinerja belanja daerah selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 mencapai Rp3.095.541.249.535,02 atau mengalami kenaikan sebesar 3,85%, pada tahun 2021 mencapai Rp3.192.751.693.289,33 atau mengalami kenaikan sebesar 3,14%, pada tahun 2022 mencapai Rp3.554.078.352.827,67 atau mengalami kenaikan sebesar 11,32%, pada tahun 2023 mencapai Rp3.418.637.234.689,96 atau mengalami penurunan sebesar 3,81% dan pada tahun 2024 mencapai Rp3.697.575.974.929,23 atau mengalami kenaikan sebesar 8,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja masing-masing kelompok belanja sebagai berikut:

3.1.2.1 Kinerja Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja bunga, (4) belanja subsidi, (5) belanja hibah, (6) belanja bantuan sosial, dan (7) belanja bantuan keuangan. Perkembangan realisasi belanja operasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :



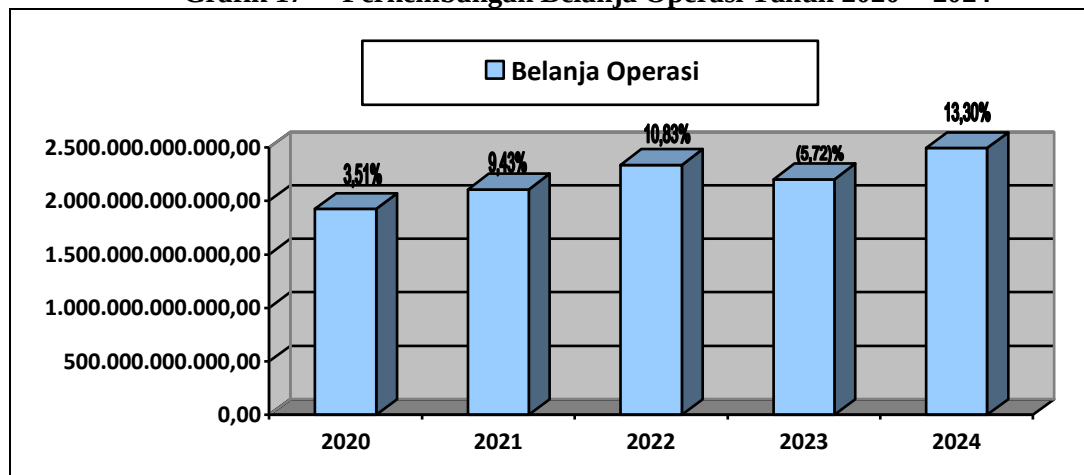
Tabel 21 Belanja Operasi Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	2.044.593.394.387,91	1.926.189.454.855,21	89,54	3,51
2	2021	2.328.481.818.896,00	2.107.828.823.192,18	90,52	9,43
3	2022	2.541.815.941.557,00	2.336.052.115.276,27	91,90	10,83
4	2023	2.421.801.655.328,00	2.202.478.442.330,61	90,94	(5,72)
5	2024	2.697.303.910.674,00	2.495.362.693.887,46	92,51	13,30

Tabel 22 Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Belanja Operasi	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Pegawai	822.901.100.907,16	944.573.454.546,04	978.449.069.438,48	1.009.787.854.448,88	1.085.548.797.241,45
2	Belanja Barang dan Jasa	738.658.919.090,04	867.782.534.353,15	1.077.667.277.560,61	868.397.712.028,13	1.010.692.655.425,09
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	964.120.370,60
4	Belanja Hibah	345.743.067.858,01	273.451.594.290,89	255.072.373.102,18	303.819.808.881,60	382.505.675.850,32
5	Belanja Bantuan Sosial	18.886.367.000,00	22.021.240.002,10	24.863.395.175,00	20.473.066.972,00	15.651.445.000,00
	Jumlah	1.926.189.454.855,21	2.107.828.823.192,18	2.336.052.115.276,27	2.202.478.442.330,61	2.495.362.693.887,46

Grafik 17 Perkembangan Belanja Operasi Tahun 2020 - 2024



Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja operasi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,58 %, 3,51%, 9,43% dan 10,83% dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 turun sebesar 5,72% dan pada tahun 2024 naik sebesar 13,30%.

3.1.2.2 Kinerja Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja



modal meliputi (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja modal aset tetap lainnya, dan (6) belanja modal aset lainnya. Perkembangan realisasi belanja operasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

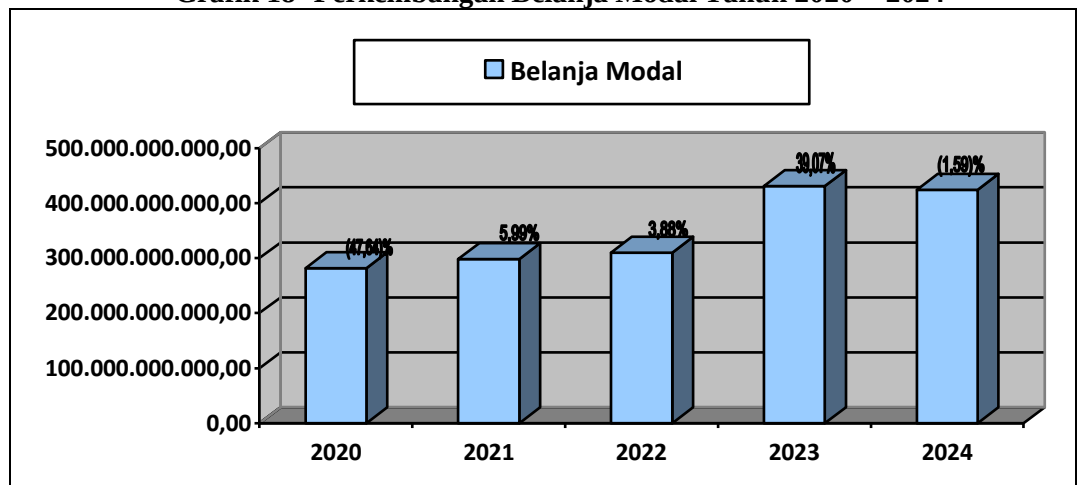
Tabel 23 Belanja Modal Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	315.158.206.223,66	281.697.688.881,65	82,46	(47,64)
2	2021	435.359.668.676,00	298.579.850.432,56	68,58	5,99
3	2022	459.274.455.452,00	310.157.730.143,40	67,53	3,88
4	2023	642.097.658.539,00	431.340.278.246,35	67,18	39,07
5	2024	483.004.325.065,00	424.461.947.578,39	87,88	(1,59)

Tabel 24 Rincian Belanja Modal Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Belanja Modal	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Tanah	1.250.000.000,00	21.417.109.595,00	18.343.184.523,00	11.021.176.466,00	1.727.306.005,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	95.086.404.369,57	111.170.853.408,45	102.990.160.802,94	123.664.589.654,00	86.126.274.741,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	45.571.848.967,08	55.196.329.005,19	36.726.692.945,17	149.832.834.297,05	118.169.885.080,81
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.864.070.268,90	105.085.089.741,49	147.378.850.812,69	133.679.243.538,30	208.508.996.188,58
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	361.461.970,13	5.590.360.432,43	4.637.798.059,60	10.702.434.291,00	8.617.485.563,00
	Belanja Aset Lainnya	563.903.305,97	120.108.250,00	81.043.000,00	2.440.000.000,00	1.312.000.000,00
	Jumlah	281.697.688.881,65	298.579.850.432,56	310.157.730.143,40	431.340.278.246,35	424.461.947.578,39

Grafik 18 Perkembangan Belanja Modal Tahun 2020 - 2024





Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2020 turun sebesar 47,64 %, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing naik sebesar 5,99%, 3,88% dan 39,15% dan pada tahun 2024 turun sebesar 1,59%.

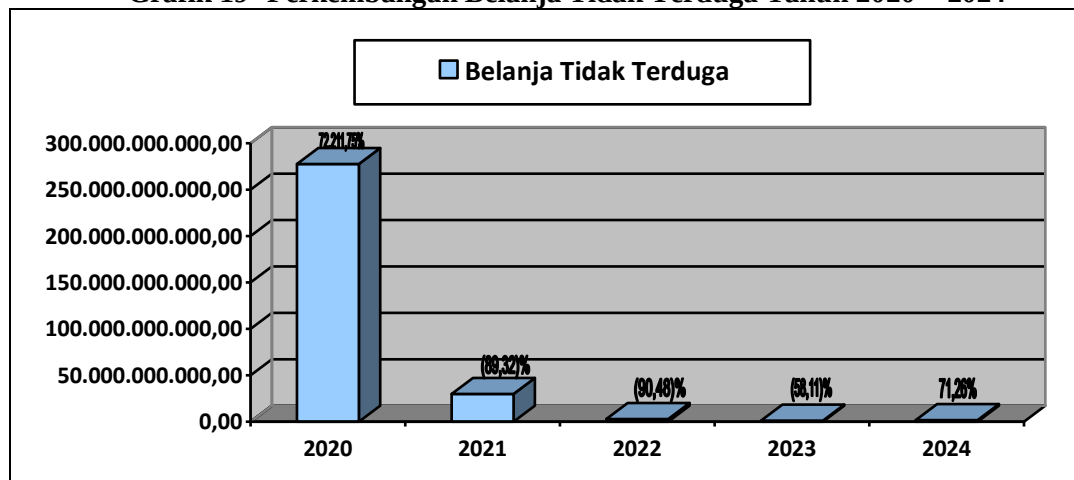
3.1.2.3 Kinerja Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Perkembangan realisasi belanja tidak terduga Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 25 Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	281.697.688.881,65	277.829.261.698,16	25,61	72.211,75
2	2021	67.969.199.493,00	29.684.216.764,59	43,67	(89,32)
3	2022	4.488.591.420,00	2.824.635.908,00	62,93	(90,48)
4	2023	7.759.464.674,00	1.183.127.722,00	15,25	(58,11)
5	2024	6.221.807.986,00	2.026.255.613,38	32,57	71,26

Grafik 19 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 - 2024



Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja tak terduga pada tahun 2020 naik sebesar 72.211,75%, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing turun sebesar 89,32%, 90,48% dan 58,11% dan pada tahun 2024 naik sebesar 71,26%.



3.1.2.4 Transfer

Belanja transfer terdiri dari belanja transfer bagi hasil pajak atau retribusi dan belanja bagi hasil pendapatan lainnya serta belanja transfer bantuan keuangan kepada desa dan bantuan keuangan lainnya. Perkembangan realisasi transfer Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel dan grafik berikut :

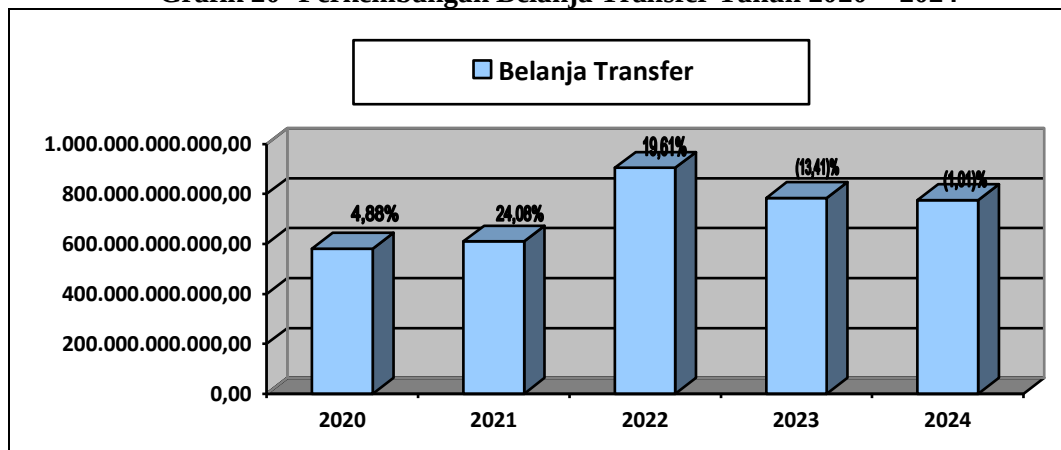
Tabel 26 Transfer Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	627.849.010.000,00	609.824.844.100,00	96,47	4,88
2	2021	766.126.903.400,00	756.658.802.900,00	98,76	24,08
3	2022	934.710.391.800,00	905.043.871.500,00	96,83	19,61
4	2023	880.489.505.000,00	783.635.386.391,00	89,00	(13,41)
5	2024	788.231.527.197,00	775.725.077.850,00	98,41	(1,01)

Tabel 27 Rincian Belanja Transfer Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Belanja Transfer	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Transfer Bagi Hasil	81.402.823.100,00	76.046.420.100,00	66.996.357.000,00	96.552.366.600,00	115.413.727.850,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	528.422.021.000,00	680.612.382.800,00	838.047.514.500,00	687.083.019.791,00	660.311.350.000,00
	Jumlah	609.824.844.100,00	756.658.802.900,00	905.043.871.500,00	783.635.386.391,00	775.725.077.850,00

Grafik 20 Perkembangan Belanja Transfer Tahun 2020 - 2024



Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja transfer pada tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya masing-masing sebesar 3,58%, 4,88%, 24,08% dan 19,61% dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 turun sebesar 13,41% dan pada tahun 2024 turun sebesar 1,01%.



3.1.3 Kinerja Pembiayaan

3.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi SilPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Perkembangan realisasi penerimaan pembiayaan 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel dan grafik berikut :

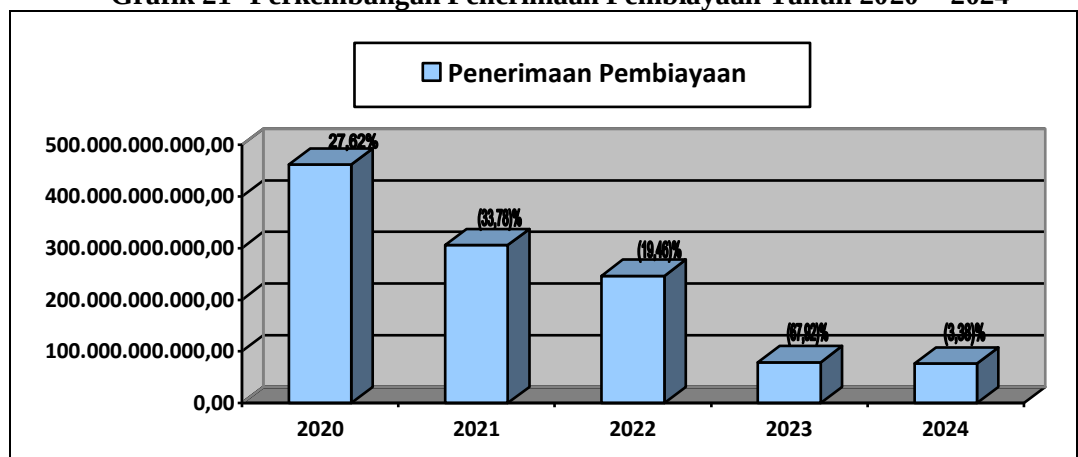
Tabel 28 Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	462.004.151.544,22	462.004.151.544,22	100,01	27,62
2	2021	305.940.468.203,00	305.955.960.203,27	100,01	(33,78)
3	2022	268.241.460.955,00	246.425.903.889,72	91,87	(19,46)
4	2023	79.002.535.455,00	79.048.460.455,34	100,06	(67,92)
5	2024	78.495.000.730,00	76.377.858.730,47	97,30	(3,38)

Tabel 29 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Penerimaan Pembiayaan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	462.004.151.544,22	305.940.468.203,27	246.409.984.889,72	59.002.535.455,34	76.370.858.730,47
2	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0,00	15.492.000,00	15.919.000,00	45.925.000,00	7.000.000,00
	Jumlah	462.004.151.544,22	305.955.960.203,27	246.425.903.889,72	79.048.460.455,34	76.377.858.730,47

Grafik 21 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 - 2024



Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 27,62%, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing turun sebesar 3,78%, 19,46% dan 67,92% dan pada tahun 2024 turun sebesar 3,38%.



3.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan meliputi penyertaan modal (investasi) dan pembayaran pokok utang. Perkembangan realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel dan grafik berikut :

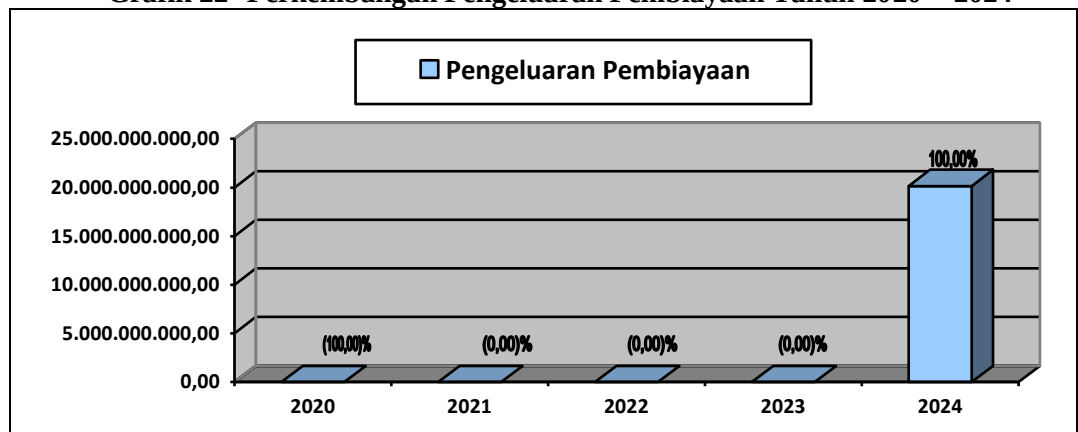
Tabel 30 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2020	0,00	0,00	0,00	(100,00)
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	5.022.890.000,00	0,00	0,00	0,00
4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2024	20.150.000.000,00	20.150.000.000,00	100,00	100,00

Tabel 31 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Penerimaan Pembiayaan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman DN- Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman DN- Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150.000.000,00

Grafik 22 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 - 2024





3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Keuangan

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja keuangan adalah adanya upaya meningkatkan Pendapatan melalui :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
5. Peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan fungsi penyertaan modal dan menargetkan pendapatan secara rasional;
7. Tingginya kepercayaan masyarakat atas pelayanan RSUD yang diimbangi dengan meningkatnya mutu pelayanan;
8. Kelancaran pencairan klaim pada program pelayanan jasa kapitasi dan non kapitasi juga pencairan tagihan yang lain;
9. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial;
10. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan provinsi;
11. Program sosialisasi perijinan kepada masyarakat dengan menggunakan brosur, baliho/billboard;
12. Adanya sistem informasi penanaman modal dan perijinan seperti KIOSK Informasi Perijinan;
13. Program Promosi Investasi;
14. Adanya beberapa alternatif cara pembayaran retribusi yaitu secara tunai melalui bendahara dan transfer via bank;
15. Adanya Verifikasi Perizinan Usaha; dan
16. Proses pembayaran melalui mekanisme transfer bank yang cukup baik.



3.2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Keuangan

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja keuangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih adanya sebagian wajib pajak yang belum sadar terhadap kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat yang mempunyai kewajiban membayar pajak;
2. Belum tertibnya pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat yang memanfaatkan pelayanan pemerintahan;
3. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sistem pengelolaan keuangan daerah;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya ijin mendirikan bangunan, ijin pemanfaatan kekayaan daerah;
5. Adanya pemohon ijin yang tidak tepat waktu dalam membayar retribusi;
6. Banyaknya pengusaha yang tidak mempunyai UKL/UPL ketika mengajukan ijin gangguan;
7. Belum optimalnya beberapa jenis pelayanan spesialis dan pelayanan penunjang medik karena kekurangan tenaga dan peralatan yang terbatas (RSUD);
8. Adanya perubahan undang-undang pertambangan mineral batu bara seperti peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) harus diperoleh dulu di Dirjen Minerba;
9. Penerimaan pembayaran retribusi/penatausahaan pendapatan masih dilakukan secara manual;
10. Adanya beberapa pemohon yang mengajukan keringanan dalam pembayaran Retribusinya;
11. Pelaksanaan fisik karena terganggu keadaan tertentu sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini tidak memuat seluruh isi kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik, tetapi hanya memuat paragraf-paragraf kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi yang terjadi pada entitas akuntansi berdasarkan basis akrual.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Laporan Keuangan entitas akuntansi meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening/Akun

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan

1. Paragraf 1 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, termasuk penerimaan yang berasal dari Dana BLUD, Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS serta penerimaan lain yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
2. Paragraf 2 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan, baik melalui Rekening Kas Umum Daerah ataupun tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS serta penerimaan lain yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. Paragraf 3 Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:



- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan Pendapatan

- 4. Paragraf 5 Pendapatan LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).
- 5. Paragraf 6 Pendapatan LRA diakui pada saat:
 - a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan; dan
 - c. Pengesahan oleh BUD atas Penerimaan Pendapatan

Pengukuran Pendapatan

- 6. Paragraf 8 Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 7. Paragraf 11 Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengungkapan Pendapatan

- 8. Paragraf 17 Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi dan Klasifikasi Beban dan Belanja

- 1. Paragraf 1 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2. Paragraf 2 Beban dapat juga diartikan sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.



3. Paragraf 3 Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
4. Paragraf 6 Beban diklasifikasikan menurut :
 - a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban luar biasa;
 - b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga; dan
 - c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah contohnya belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat kabupaten.

Pengakuan Beban dan Belanja:

5. Paragraf 9 Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (contohnya adalah Penyusutan atau amortisasi).
6. Paragraf 10 Belanja diakui pada saat:
 - a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;



- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pengukuran Beban dan Belanja;

- 7. Paragraf 13 Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 8. Paragraf 14 Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 9. Paragraf 15 Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- 10. Paragraf 17 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengukurannya sebesar pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 11. Paragraf 18 Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Pengungkapan Beban dan Belanja;

- 12. Paragraf 23 Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah :
 - a. Rincian beban per SKPD;
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 13. Paragraf 24 Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Rincian belanja per SKPD;
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

Definisi dan Klasifikasi Transfer

- 1. Paragraf 1 Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



2. Paragraf 2 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Paragraf 3 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.
4. Paragraf 4 Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan;
 - b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya;
 - c. Transfer Pemerintah Provinsi;
 - d. Transfer/Bagi hasil ke Desa; dan
 - e. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan Transfer

5. Paragraf 5 Transfer masuk diakui pada saat dan/atau diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden/Peraturan Gubernur maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
6. Paragraf 6 Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengukuran Transfer

7. Paragraf 7 Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
8. Paragraf 8 Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengungkapan Transfer

9. Paragraf 11 Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



10. Paragraf 12 Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - a. Transfer keluar harus dirinci;
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi dan Klasifikasi Pembiayaan

1. Paragraf 1 Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Paragraf 2 Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
3. Paragraf 3 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
4. Paragraf 4 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Paragraf 5 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
6. Paragraf 6 Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pengakuan Pembiayaan

7. Paragraf 7 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
8. Paragraf 8 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.



Pengukuran Pembiayaan

9. Paragraf 9 Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal berdasarkan nilai kas sekarang yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
10. Paragraf 10 Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
11. Paragraf 11 Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas

1. Paragraf 1 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
2. Paragraf 2 Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dalam neraca.
3. Paragraf 3 Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
4. Paragraf 5 Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) termasuk kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, BLUD, kas lainnya dan setara kas.

Pengakuan Kas dan Setara Kas

5. Paragraf 26 Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
 - c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas

6. Paragraf 33 Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



Pengungkapan Kas dan Setara Kas

7. Paragraf 37 Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kas dan setara kas;
 - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang

1. Paragraf 1 Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Paragraf 7 Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :
 - a. Pungutan pendapatan daerah
Piutang yang timbul dari akibat pungutan pendapatan daerah, terdiri atas:
 1. Piutang Pajak Daerah;
 2. Piutang Retribusi Daerah;
 3. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
 - b. Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
 1. Pemberian Pinjaman;
 2. Penjualan;
 3. Kemitraan;
 4. Pemberian fasilitas.
 - c. Transfer antar Pemerintahan
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
 1. Piutang Dana Bagi Hasil;
 2. Piutang Dana Alokasi Umum;
 3. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 4. Piutang Dana Otonomi Khusus;
 5. Piutang Transfer Lainnya;
 6. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
 7. Piutang Transfer Antar Daerah;
 8. Piutang Kelebihan Transfer.



d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

1. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
2. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
3. Paragraf 8 Piutang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagaimana paragraf 8 diklasifikasikan sebagai piutang lainnya seperti :
 1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
 2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada entitas lainnya
 3. Uang Muka

Pengakuan Piutang

4. Paragraf 10 Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
5. Paragraf 11 Piutang dapat diakui ketika :
 - a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Piutang

6. Paragraf 26 Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan SPTPD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Penilaian Piutang

7. Paragraf 40 Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
8. Paragraf 41 Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.



9. Paragraf 43 Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet
10. Paragraf 44 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari :
 - A. Kualitas lancar, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - B. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - C. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - D. Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang lebih dari lima tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya/tidak ditemukan; dan/atau



- d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
11. Paragraf 45 Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- A. Kualitas Lancar, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - B. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - C. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - D. Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang lebih dari lima tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya / tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
12. Paragraf 46 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang nol sampai dengan satu bulan dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;



- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu sampai dengan tiga bulan dan/atau apabila wajib retribusi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan 12 bulan dan/atau apabila wajib retribusi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan dan/atau apabila wajib retribusi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
13. Paragraf 47 Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan :
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
14. Paragraf 48 Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

Tabel 32 Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

15. Paragraf 49 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan



- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 16. Paragraf 50 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 17. Paragraf 51 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pengungkapan Piutang

- 18. Paragraf 59 Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 19. Paragraf 60 Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu



diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan

1. Paragraf 1 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Paragraf 2 Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan Persediaan

3. Paragraf 4 Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
4. Paragraf 5 Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset (metode Perpetual) dan pendekatan beban (metode periodik).
5. Paragraf 6 Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.
6. Paragraf 7 Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Pengukuran Persediaan

7. Paragraf 9 Persediaan disajikan sebesar :



- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
8. Paragraf 11 Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir.

Pengungkapan Persediaan

9. Paragraf 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan :
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

Definisi dan Klasifikasi Investasi

1. Paragraf 3 Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
2. Paragraf 26 Berdasarkan bentuknya Investasi pemerintah daerah meliputi:
 - a. Investasi surat berharga; seperti pembelian saham dan/atau pembelian surat utang.
 - b. Investasi langsung; meliputi penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman.



3. Paragraf 27 Berdasarkan jangka waktunya, investasi dikelompokkan menjadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.

Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya. Termasuk Investasi Jangka Pendek antara lain:

- 1) Investasi dalam Saham
- 2) Investasi dalam Deposito
- 3) Investasi dalam SUN
- 4) Investasi dalam SBI
- 5) Investasi dalam SPN
- 6) Investasi Jangka Pendek BLUD
- 7) Investasi Jangka Pendek Lainnya

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Termasuk Investasi Jangka Panjang Non permanen adalah:

- a) Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
- b) Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
- c) Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
- d) Investasi dalam Obligasi
- e) Investasi dalam Proyek Pembangunan
- f) Dana Bergulir
- g) Deposito Jangka Panjang



h) Investasi Non Permanen Lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Termasuk Investasi Jangka Panjang Permanen adalah:

- a) Penyertaan Modal Kepada BUMN
- b) Penyertaan Modal Kepada BUMD
- c) Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
- d) Investasi Permanen Lainnya

Pengakuan Investasi

4. Paragraf 40 Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya serta penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengakuan Hasil Investasi

5. Paragraf 45 Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi

6. Paragraf 66 Pengukuran investasi jangka pendek:
- a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.



7. Paragraf 67 Pengukuran investasi jangka panjang:
- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penilaian Investasi

8. Paragraf 70 Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a. Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan



digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

9. Paragraf 71 Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengungkapan Investasi

10. Paragraf 75 Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
 - c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
 - d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

1. Paragraf 1 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Paragraf 2 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.



c. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

3. Paragraf 3 Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
4. Paragraf 5 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
5. Paragraf 6 huruf e, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 33 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin , terdiri atas :	
1.1	Alat Besar:	10.000.000
1.2	Alat Angkutan:	1.500.000
1.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur:	500.000
1.4	Alat Pertanian:	500.000
1.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga:	500.000
1.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar:	1.000.000
1.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan:	1.500.000
1.8	Alat Laboratorium:	1.500.000
1.9	Alat Persenjataan:	500.000
1.10	Komputer:	1.000.000
1.11	Alat Eksplorasi:	500.000
1.12	Alat Pengeboran:	500.000
1.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian:	500.000
1.14	Alat Bantu Eksplorasi:	500.000
1.15	Alat Keselamatan Kerja:	500.000
1.16	Alat Praga:	1.500.000
1.17	Peralatan Proses/Produksi:	500.000
1.18	Rambu-Rambu	1.000.000
1.19	Peralatan Olahraga	500.000
2.	Gedung dan Bangunan , terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung:	25.000.000
2.2	Monumen:	10.000.000
2.3	Bangunan Menara:	10.000.000
2.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti:	10.000.000
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan:	
	➤ Jalan	25.000.000
	➤ Jembatan	25.000.000
3.2	Bangunan Air:	25.000.000
3.3	Instalasi:	25.000.000
3.4	Jaringan:	25.000.000
4.	Aset Tetap Lainnya , terdiri atas :	
4.1	Bahan Perpustakaan	100.000
4.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.000.000
4.3	Hewan	500.000
4.4	Biota Perairan	500.000
4.5	Tanaman	500.000
4.6	Barang Koleksi Non Budaya	1.000.000
5	Aset Renovasi	10.000.000



Pengukuran Aset Tetap

6. Paragraf 13 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
7. Paragraf 29 Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
8. Paragraf 30 Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu yang dapat dikapitalisasi baik yang bersifat renovasi maupun *overhaul*, sebagai berikut :

Tabel 34 Batasan Biaya Pemeliharaan yg Dapat Dikapitalisasi

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Paket (Rp)
	Peralatan dan Mesin:	
1.	Alat Besar:	
	➤ Alat besar darat:	10.000.000
	➤ Alat besar apung:	10.000.000
2.	Alat Angkutan:	
	➤ Alat Angkutan Darat Bermotor:	
	○ Kendaraan Bermotor Beroda Dua	750.000
	○ Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.000.000
	○ Kendaraan Bermotor Beroda empat	3.000.000
	➤ Alat Angkutan Apung Bermotor	
	○ Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	20.000.000
	○ Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang mesin permanen	20.000.000
	○ Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang mesin tempel	5.000.000
	Gedung dan Bangunan:	
1.	Bangunan Gedung:	25.000.000

9. Paragraf 31 Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* maupun renovasi disajikan pada tabel berikut :



Tabel 35 Tambahan Masa Manfaat Setelah Pemeliharaan

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Mesin			
Alat Besar :			
Alat Berat Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		31% s.d. 45%	3
		46% s.d 65%	5
Alat Berat Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		31% s.d. 45%	2
		46% s.d 65%	4
Alat Angkutan :			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	0% s/d 25%	1
		26% s/d 50%	2
		51% s/d 75%	3
		76% s/d 100%	4
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	0% s/d 25%	2
		26% s/d 50%	3
		51% s/d 75%	4
		76% s/d 100%	6
Bangunan Gedung :			
Bangunan gedung tempat kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>26% s.d. 50%	10
		>51% s.d. 75%	15
		76% s.d. 100%	50
Bangunan gedung tempat tinggal	Renovasi	>0% s.d 30%	5
		>31% s.d. 45%	10
		>46% s.d 65%	15
Monumen :			
Candi/Tugu peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d 30%	5
		>31% s.d. 45%	10
		>46% s.d 65%	15
Bangunan perambuan menara	Renovasi	>0% s.d 30%	5
		>31% s.d. 45%	10
		>46% s.d 65%	15
Jalan, Irigasi dan Jaringan :			
➤ Jalan dan Jembatan :			
Jalan	Overhaul	0% - 10%	0
		>10% - 40%	5
		>40% - 70%	7
		>70%	10
Jembatan	Overhaul	0% - 10%	0
		>10% - 30%	5



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% - 50%	10
		>50%	15
➤ Bangunan Air	Renovasi	0% - 10%	0
		>10% - 30%	2
		>30% - 50%	7
		>50%	10
➤ Instalasi	Renovasi	0% - 10%	0
		>10% - 30%	2
		>30% - 50%	7
		>50%	10
➤ Jaringan	Renovasi	0% - 10%	0
		>10% - 30%	2
		>30% - 50%	7
		>50%	10

Pengungkapan Aset Tetap

10. Paragraf 59 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.



Penyusutan

11. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
12. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
13. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Paragraf 1 Konstruksi dalam pengerjaan adalah semua jenis aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Paragraf 11 Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

3. Paragraf 18 Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
 - c. Telah terbit SP2D dengan melampirkan Berita Acara Progres Pekerjaan yang menjelaskan prosentasi progress pekerjaan; dan
 - d. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

4. Paragraf 32 Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Paragraf 33 Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
6. Paragraf 34 Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;



- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

7. Paragraf 54 Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
 - a. Rincian kontrak Konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan

1. Paragraf 1 Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Paragraf 4 Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan/dirinci menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah:

Tabel 36 Dana Cadangan

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
	Dst....

Pengakuan Dana Cadangan

3. Paragraf 7 Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.



Pengukuran Dana Cadangan

4. Paragraf 8 Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
5. Paragraf 11 Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
6. Paragraf 12 Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan Dana Cadangan

7. Paragraf 13 Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - e. Sumber dana cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya

1. Paragraf 1 Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Paragraf 5 Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:



Tabel 37 Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Franchise
	Hak Cipta
	Paten
	Royalti
	Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
	Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya
	Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

3. Paragraf 7 Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
 - a. Tagihan Jangka Panjang;
 - b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
 - c. Aset lain-lain.
4. Paragraf 8 Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
 - a. Aset Tak Berwujud; dan
 - b. Aset lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya

5. Paragraf 10 Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
 - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Aset Tidak Berwujud (ATB)
Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam



menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan dan/atau pemindahtanganan (proses penjualan, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

6. Paragraf 14 Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

7. Paragraf 15 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

c. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

8. Paragraf 16 Aset Tidak Berwujud

a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa



datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

- b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - i. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - ii. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - iii. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

9. Paragraf 18 Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

10. Paragraf 19 Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengungkapan Aset Lainnya

11. Paragraf 25 Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;



- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi dan Klasifikasi Kewajiban

1. Paragraf 1 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Paragraf 2 Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.
3. Paragraf 4 Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya menjadi :
 - 1) Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka Panjang
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
 - b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan Kewajiban

4. Paragraf 6 Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.



b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran Kewajiban

5. Peragraf 11 Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur



- g. Biaya pinjaman:
- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 KOMPONEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
<u>3.916.416.570.192,00</u>	<u>3.730.420.012.925,76</u>	<u>3.416.390.957.965,09</u>

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Gresik TA 2024 adalah sebesar Rp3.730.420.012.925,76 atau 95,25% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.916.416.570.192,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.416.390.957.965,09 maka terdapat kenaikan realisasi pendapatan sebesar 314.029.054.960,67 atau 9,19%, yaitu dari sektor Pendapatan Transfer naik sebesar 4,63% atau Rp103.726.726.359,00 dan Pendapatan Asli Daerah naik sebesar 18,28% atau Rp214.006.328.601,67. Sementara itu pada Lain-lain Pendapatan yang Sah terjadi penurunan pendapatan sebesar sebesar 95,22% atau Rp3.704.000.000,00.

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp3.730.420.012.925,76 dan TA 2023 sebesar Rp3.416.390.957.965,09 merupakan realisasi atas pendapatan yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD Puskesmas, Kas di BLUD RSUD Ibnu Sina, Kas di BLUD RSUD Umar Mas'ud, Kas di BLUD UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik (PLCD), Kas di Bendahara BOK Puskesmas, serta Kas di Bendahara BOSP BOS dan BOP.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
<u>1.597.844.135.728,00</u>	<u>1.385.028.684.600,76</u>	<u>1.171.022.355.999,09</u>



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.385.028.684.600,76 dan Rp1.171.022.355.999,09 terdiri atas:

Tabel 38 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Daerah	1.038.700.000.000,00	960.468.393.710,00	92,47	793.322.673.442,23
2	Retribusi Daerah	236.145.900.000,00	401.465.003.530,69	170,01	87.430.225.680,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.645.000.000,00	12.267.234.269,30	97,01	13.425.554.336,30
4	Lain-Lain PAD yang Sah	310.353.235.728,00	10.828.053.090,77	3,49	276.843.902.540,56
	Jumlah	1.597.844.135.728,00	1.385.028.684.600,76	86,68	1.171.022.355.999,09

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
1.038.700.000.000,00	960.468.393.710,00	793.322.673.442,23

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp960.468.393.710,00 atau 92,47% dari anggaran sebesar Rp1.038.700.000.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp960.468.393.710,00 dan Rp793.322.673.442,23 dirinci sebagai berikut :

Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Hotel	17.000.000.000,00	12.973.185.049,00	76,31	11.575.690.413,00
	- Hotel	16.700.000.000,00	12.831.135.211,00	76,83	11.430.013.728,00
	- Losmen	200.000.000,00	142.049.838,00	71,02	145.676.685,00
	- Rumah Penginapan dan sejenisnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	42.000.000.000,00	39.352.526.197,00	93,70	33.311.079.002,03
	- Restoran	37.000.000.000,00	31.776.430.939,00	85,88	24.590.577.050,03
	- Rumah Makan	0,00	0,00	-	3.442.942.771,00
	- Warung	0,00	0,00	-	20.775.846,00
	- Jasa Boga/Katering	5.000.000.000,00	7.576.095.258,00	151,52	5.256.783.335,00
3	Pajak Hiburan	4.500.000.000,00	4.058.945.384,00	90,20	3.171.687.573,00
	- Tontonan Film	3.580.000.000,00	2.369.182.915,00	66,18	1.840.270.583,00
	- Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	200.000.000,00	11.250.000,00	5,63	13.316.475,00
	- Pameran	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	-	5.250.000,00
	- Pacuan Kuda, Permainan Ketangkasan	50.000.000,00	834.052.582,00	1.668,11	296.947.978,00
	- Panti Pijat, Refleksi, Pusat Kebugaran	240.000.000,00	830.944.937,00	346,23	219.912.637,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	- Pertandingan Olah Raga	400.000.000,00	13.514.950,00	3,38	795.989.900,00
4	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	7.783.058.019,00	77,83	5.639.185.066,00
	- Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5.850.000.000,00	5.391.820.433,00	92,17	4.222.718.358,00
	- Reklame Kain	3.900.000.000,00	2.391.237.586,00	61,31	1.416.466.708,00
	- Reklame Berjalan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	260.000.000.000,00	269.653.244.700,00	103,71	246.524.138.974,00
	- Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000.000,00	19.355.822.691,00	129,04	13.545.422.738,00
	- Pajak Penerangan jalan Sumber Lain	245.000.000.000,00	250.297.422.009,00	102,16	232.978.716.236,00
6	Pajak Parkir	3.500.000.000,00	3.346.693.618,00	95,62	5.175.166.000,00
7	Pajak Air Tanah	8.700.000.000,00	6.967.335.242,00	80,08	6.705.992.427,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000,00	4.352.435.000,00	54,41	3.840.891.875,00
	- Batu Kapur	0,00	0,00	-	3.840.891.875,00
	- Dolomit	3.000.000.000,00	4.352.435.000,00	145,08	0,00
	- Marmer	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Phospat	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Tanah Liat	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.730.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	250.000.000.000,00	204.405.528.693,00	81,76	168.121.466.475,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	435.000.000.000,00	407.575.441.808,00	93,70	309.257.375.637,20
	Jumlah	1.038.700.000.000,00	960.468.393.710,00	92,47	793.322.673.442,23

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gresik didasari oleh:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan 21,07% atau sebesar Rp167.145.720.267,77. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan realisasi pada hampir pada seluruh obyek pajak, kecuali Pajak Rumah Makan dan Warung, Pajak Pertandingan Olahraga, Pajak Parkir dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kenaikan realisasi yang cukup tinggi dari tahun lalu tersebut terdapat pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan sendiri maupun Pajak Penerangan Jalan Sumber lain, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Beroperasinya Smelter Freeport menyebabkan kenaikan tingkat hunian kamar hotel yang secara langsung mendongkrak pendapatan Pajak Hotel dan secara tidak langsung juga berperan dalam kenaikan pada Pajak Restoran. Disamping itu, adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian atas obyek pajak serta adanya penambahan *Tapping Box* turut mendukung peningkatan tersebut. Adanya penambahan wajib pajak baru juga turut mendukung peningkatan pendapatan diantaranya pada Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Adanya penyesuaian Perda yang dipersamakan dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) ikut menyumbang peningkatan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri maupun Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain. Peningkatan Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikarenakan adanya beberapa terobosan diantaranya pelaksanaan operasi gabungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, pengendalian dan pengawasan oleh Petugas *Checker* serta sidak ke beberapa industri dan pergudangan.

Terdapat beberapa Pajak Daerah Tahun 2024 yang memenuhi target anggaran diantaranya adalah Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan, Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dan Pajak Dolomit yang sudah sesuai dengan rasionalisasi target pendapatan berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada, baik penyesuaian terhadap peraturan terbaru maupun kebutuhan pasar.

Pada tahun 2024 ini terdapat realisasi Pajak Daerah yang tidak memenuhi target pendapatan diantaranya Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak, tidak adanya ijin dari pihak terkait atas pajak tersebut serta adanya wajib pajak yang tutup.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
236.145.900.000,00	401.465.003.530,69	87.430.225.680,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp401.465.003.530,69 atau 170,01% dari anggaran sebesar Rp236.145.900.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp401.465.003.530,69 dan Rp87.430.225.680,00 dirinci sebagai berikut :

Tabel 40 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Jasa Umum	24.935.000.000,00	290.161.799.588,09	1.163,67	11.819.307.316,00
	Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	235.000.000,00	283.696.435.426,09	120.721,89	388.805.500,00
	Pelayanan Persampahan/kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	7.500.000.000,00	2.105.107.134,00	28,07	1.120.663.950,00
	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	15.000.000.000,00	2.656.840.508,00	17,71	3.178.541.068,00
	Pelayanan Pasar (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan)	2.200.000.000,00	1.694.556.520,00	77,03	1.491.562.930,00
	Pelayanan Pasar (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu)	0,00	8.860.000,00	-	92.198.368,00
	Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	0,00	0,00	-	3.548.255.000,00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman)	0,00	0,00	-	387.765.000,00
	Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan)	0,00	0,00	-	1.611.515.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	110.770.900.000,00	60.928.805.772,00	55,00	40.849.852.734,00
	Pemakaian Kekayaan Daerah :				
	- Penyewaan Tanah dan Bangunan (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	100.000.000.000,00	53.731.339.249,00	53,73	35.499.671.084,00
	- Penyewaan Tanah dan Bangunan (Dinas Perikanan)	0,00	0,00	-	12.500.000,00
	- Penyewaan Bangunan (Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1.095.900.000,00	953.525.000,00	87,01	1.020.495.000,00
	- Penyewaan Bangunan (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan)	0,00	81.778.500,00	-	0,00
	- Pemakaian Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum)	510.000.000,00	179.001.000,00	35,10	159.295.000,00
	- Pemakaian Laboratorium (Dinas Lingkungan Hidup)	1.100.000.000,00	1.469.639.000,00	133,60	826.876.850,00
	- Pemakaian Alat (Dinas Perhubungan)	4.000.000.000,00	212.000.000,00	5,30	0,00
	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan)	300.000.000,00	276.525.000,00	92,18	276.885.000,00
	Terminal (Dinas Perhubungan)	0,00	0,00	-	147.762.000,00
	Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)	2.500.000.000,00	2.675.902.000,00	107,04	1.050.556.600,00
	Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian)	115.000.000,00	177.624.000,00	154,46	121.648.000,00
	Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	850.000.000,00	786.621.023,00	92,54	1.409.275.000,00
	Penyeberangan di Air (Dinas Perhubungan)	300.000.000,00	384.851.000,00	128,28	324.888.200,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	100.440.000.000,00	50.374.398.170,60	50,15	34.761.065.630,00
	IMB (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu)	0,00	2.455.145.994,00	-	34.761.065.630,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu)	95.800.000.000,00	42.933.619.726,60	44,82	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu)	4.640.000.000,00	4.985.632.450,00	107,45	0,00
	Jumlah	236.145.900.000,00	401.465.003.530,69	170,01	87.430.225.680,00

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Gresik didasari oleh:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan 359,18% atau sebesar Rp314.034.777.850,69. Kenaikan paling besar pada Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan, kemudian Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) serta sebagian lagi pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Pemakaian Laboratorium, Retribusi Pemakaian Alat, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Adanya kenaikan yang sangat besar pada Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pendapatan pelayanan atas pasien umum dan pasien BPJS pada BLUD baik RSUD maupun Puskesmas harus dicatat pada akun Pendapatan Retribusi, sementara pada tahun ini pendapatan tersebut belum dianggarkan pada akun Retribusi Daerah yang berdampak realisasi melampaui jauh diatas anggaran yang ada. Pada realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan naik dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya sewa Hak Pemanfaatan Lahan oleh PT. Petrokimia Gresik dan PT. Maspion. Sedangkan pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mengalami realisasi yang cukup besar dikarenakan retribusi ini merupakan obyek retribusi baru menggantikan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun-tahun sebelumnya.



Setelah dilakukan penyesuaian target anggaran tahun 2024, terdapat beberapa Retribusi Daerah yang melampaui target diantaranya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Laboratorium, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Rumah Potong Hewan, Retribusi Penyebrangan di Air dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pemanfaatan jasa oleh Subyek Wajib Retribusi Daerah, juga kesadaran masyarakat pelaku usaha, serta peningkatan jumlah perusahaan yang mengajukan perijinan atas Retribusi Daerah.

Pada tahun 2024 terdapat realisasi Retribusi Daerah yang masih jauh dibandingkan dengan target pendapatan yang sudah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup
Retribusi tidak memenuhi target dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha serta minimnya sosialisasi tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan;
2. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemakaian Alat pada Dinas Perhubungan
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum tidak memenuhi target dikarenakan warung kopi atau café belum bisa ditarik parkir. Juga banyak kendaraan roda empat milik warga yang parkir menginap di tepi jalan umum serta beberapa titik lokasi parkir berhenti beroperasi. Retribusi Pemakaian Alat tidak memenuhi target dikarenakan adanya penghapusan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan tujuh pasar daerah berakibat kurang maksimalnya pelayanan kepada pedagang dan pengunjung pasar yang merupakan Obyek Retribusi. Disamping itu adanya persaingan dengan pasar online juga berdampak pada berkurangnya pendapatan retribusi tersebut.
4. Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
Realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi hal tersebut masih belum bisa melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)



Pada saat pelaksanaan pemungutan retribusi, ternyata target yang ditetapkan tidak berbanding lurus dengan pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tidak bisa diprediksi.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2022
Rp	Rp	Rp
<u>12.645.000.000,00</u>	<u>12.267.234.269,30</u>	<u>13.425.554.336,30</u>

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp12.267.234.269,30 atau sebesar 97,01% dari anggaran sebesar Rp12.645.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.267.234.269,30 dan Rp13.425.554.336,30 dirinci sebagai berikut :

Tabel 41 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	PD BPR Bank Gresik	638.000.000,00	284.581.953,00	44,61	728.838.141,00
3	PT Bank Jatim	11.000.000.000,00	11.977.394.316,30	108,89	11.691.117.195,30
4	PT BPR Jatim	7.000.000,00	5.258.000,00	75,11	5.599.000,00
2	PT Gresik Migas	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	12.645.000.000,00	12.267.234.269,30	97,01	13.425.554.336,30

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PD. BPR Bank Gresik sebesar Rp284.581.953,00 yaitu 55% dari Laba PD. BPR Gresik Tahun 2023.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PT. Bank Jatim sebesar Rp11.977.394.316,30, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Nomor 049/Not/II/2024.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PT. BPR Jatim sebesar Rp5.258.000,00 atau 75,11% dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
<u>310.353.235.728,00</u>	<u>10.828.053.090,77</u>	<u>276.843.902.540,56</u>

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp10.828.053.090,77 atau sebesar 3,49% dari anggaran sebesar Rp310.353.235.728,00. Realisasi Lain-lain PAD



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

yang Sah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.828.053.090,77 dan Rp276.843.902.540,56 terdiri dari:

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan :	0,00	405.992.630,76	-	810.889.868,00
	- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	0,00	308.578.200,00	-	519.209.859,00
	- Penjualan Gedung dan Bangunan (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	0,00	97.414.430,76	-	291.680.009,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (Dinas Perikanan)	165.000.000,00	234.407.800,00	142,07	157.765.000,00
3	Jasa Giro :	2.500.000.000,00	2.558.259.791,59	102,33	2.043.157.686,63
	- Jasa Giro Kas Daerah (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	2.500.000.000,00	1.788.423.811,72	71,54	1.848.050.532,89
	- Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	769.835.979,87	-	195.107.153,74
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	0,00	42.922.812,01	-	546.335.455,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	0,00	473.640.356,12	-	1.417.542.452,53
6	Pendapatan Denda Pajak (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	0,00	1.604.500.091,00	-	1.501.716.827,00
	- Denda Pajak Hotel	0,00	530.368,00	-	0,00
	- Denda Pajak Restoran	0,00	58.079.240,00	-	55.505.247,00
	- Denda Pajak Hiburan	0,00	1.051.287,00	-	110.674,00
	- Denda Pajak Reklame	0,00	12.631.901,00	-	2.744.488,00
	- Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	1.447.224,00	-	1.126.892,00
	- Denda Pajak Parkir	0,00	4.151.651,00	-	4.151.539,00
	- Denda Pajak Air Tanah	0,00	4.091.250,00	-	5.056.037,00
	- Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	54.208.080,00	-	983.900,00
	- Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	1.457.941.223,00	-	1.346.266.782,00
	- Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	10.367.867,00	-	85.771.268,00
7	Pendapatan Denda Retribusi :	0,00	269.940.496,76	-	511.644.521,78
	- Jasa Umum (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan)	0,00	9.307.351,00	-	10.967.336,00
	- Jasa Usaha (Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman)	0,00	5.415.900,00	-	4.596.200,00
	- Jasa Usaha (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan)	0,00	82.400,00	-	50.500,00
	- Jasa Usaha (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	0,00	58.607.269,00	-	158.250.046,00
	- Perijinan Tertentu (Dinas PM&PTSP)	0,00	196.527.576,76	-	337.780.439,78
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan :	0,00	346.946.769,00	-	801.141.371,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	- Pembongkaran Reklame (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	0,00	334.282.414,00	-	801.141.371,00
	- Pemeliharaan Pekerjaan (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	0,00	12.664.355,00	-	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	0,00	1.232.676.456,65	-	1.231.233.298,38
	- Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	312.570.723,00	-	438.190.701,00
	- Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	920.105.733,65	-	793.042.597,38
10	Pendapatan dari BLUD	307.688.235.728,00	3.657.265.886,88	1,19	267.686.535.960,24
	- BLUD Puskesmas Alun-Alun	3.146.071.499,88	4.806.939,51	0,15	2.889.932.802,56
	- BLUD Puskesmas Kebomas	2.580.957.661,40	2.351.018,55	0,09	2.425.171.926,59
	- BLUD Puskesmas Manyar	2.046.798.804,64	13.604.328,85	0,66	2.023.581.737,84
	- BLUD Puskesmas Sukomulyo	2.541.210.194,85	10.128.792,75	0,40	1.962.426.396,67
	- BLUD Puskesmas Duduksampeyan	2.943.409.554,14	2.910.533,15	0,10	2.708.959.199,15
	- BLUD Puskesmas Cerme	4.133.769.526,08	9.394.662,94	0,23	3.580.879.713,54
	- BLUD Puskesmas Balongpanggang	2.372.920.000,11	1.727.117,10	0,07	2.356.215.408,87
	- BLUD Puskesmas Benjeng	3.127.800.000,59	3.265.854,91	0,10	2.731.232.535,15
	- BLUD Puskesmas Metatu	1.994.562.428,40	642.585,21	0,03	1.753.587.409,47
	- BLUD Puskesmas Driyorejo	3.379.500.000,60	1.249.018,06	0,04	3.474.688.127,15
	- BLUD Puskesmas Wringinanom	2.514.780.000,84	1.950.074,97	0,08	2.204.788.590,58
	- BLUD Puskesmas Kesambenkulon	2.056.606.081,53	1.293.478,49	0,06	2.045.241.886,03
	- BLUD Puskesmas Bungah	4.144.833.000,10	3.441.703,03	0,08	3.881.271.830,55
	- BLUD Puskesmas Mentaras	2.384.565.857,08	15.697.263,37	0,66	2.414.546.394,30
	- BLUD Puskesmas Sidayu	3.225.889.445,53	2.577.763,25	0,08	2.922.043.665,78
	- BLUD Puskesmas Ujungpangkah	3.104.299.308,76	21.974.996,48	0,71	2.684.433.451,47
	- BLUD Puskesmas Panceng	4.415.168.303,40	32.727.030,48	0,74	4.117.696.060,07
	- BLUD Puskesmas Karangandong	1.966.150.000,61	1.306.563,28	0,07	1.727.984.203,83
	- BLUD Puskesmas Kedamean	2.274.861.503,87	1.090.678,63	0,05	1.910.343.510,66
	- BLUD Puskesmas Slempit	1.803.687.500,55	1.438.901,65	0,08	1.755.825.160,45
	- BLUD Puskesmas Menganti	4.186.633.841,32	3.481.676,96	0,08	4.164.389.019,86
	- BLUD Puskesmas Kepatihan	2.001.286.600,87	2.797.538,95	0,14	1.832.208.536,86
	- BLUD Puskesmas Dadapkuning	1.093.523.000,15	347.845,20	0,03	1.041.321.898,19
	- BLUD Puskesmas Dapet	1.247.790.677,86	1.159.768,12	0,09	1.149.330.168,96
	- BLUD Puskesmas Gending	1.592.127.623,98	1.084.800,47	0,07	1.297.004.390,09
	- BLUD Puskesmas Nelayan	1.297.607.577,03	1.237.418,58	0,10	1.107.958.785,95
	- BLUD Puskesmas Industri	1.396.820.003,14	940.698,68	0,07	1.289.046.229,36
	- BLUD Puskesmas Sembayat	1.669.175.857,04	416.836,79	0,02	1.578.626.621,81
	- BLUD Puskesmas Dukun	2.389.212.980,91	33.287.021,39	1,39	2.342.838.383,25
	- BLUD Puskesmas Sekapuk	1.324.500.000,72	667.048,97	0,05	1.333.105.745,98
	- BLUD Puskesmas Sangkapura	4.332.600.001,31	4.236.015,41	0,10	4.131.526.993,63
	- BLUD Puskesmas Tambak	2.363.288.194,10	8.566.943,72	0,36	2.088.318.737,90
	- BLUD RSUD Ibnu Sina	220.000.000.000,00	2.721.845.183,94	1,24	186.718.051.908,12
	- BLUD RSUD Umar Mas'ud Bawean	5.935.828.696,61	16.294.310,68	0,27	6.041.958.529,57



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	- BLUD Instalasi Pengelolaan Air Limbah	700.000.000,00	727.323.474,36	103,90	0,00
11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati	0,00	1.500.000,00	-	135.940.100,00
	Jumlah	310.353.235.728,00	10.828.053.090,77	3,49	276.843.902.540,56

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan 96,09% atau sebesar Rp266.015.849.449,79, penurunan tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan ke Retribusi Daerah. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
2.318.572.434.464,00	2.345.205.328.325,00	2.241.478.601.966,00

Pendapatan Transfer secara umum dibedakan dalam dua kategori yaitu:

1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat atau lazim disebut Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
2. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak maupun Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak serta Bantuan Keuangan.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.345.205.328.325,00 dan Rp2.241.478.601.966,00 terdiri atas :

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.643.902.000.840,00	1.681.717.116.125,00	102,30	1.572.411.245.945,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	357.892.953.000,00	357.892.953.000,00	100,00	318.788.865.000,00
3	Transfer Antar Daerah	316.777.480.624,00	305.595.259.200,00	96,47	350.278.491.021,00
	Jumlah	2.318.572.434.464,00	2.345.205.328.325,00	101,15	2.241.478.601.966,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan 4,63% atau sebesar Rp103.726.726.359,00. Transfer Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Pusat Dana Perimbangan terrealisasi sebesar Rp357.892.953.000,00 atau 102,30%, melebihi dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya realisasi Tunjang Profesi Guru THR dan Tambahan Penghasilan THR yang belum dianggarkan pada Pendapatan Daerah Tahun 2024. Sedangkan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terrealisasi penuh sesuai dengan anggaran berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
1.643.902.000.840,00	1.681.717.116.125,00	1.572.411.245.945,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.681.717.116.125,00 atau sebesar 102,30% dari anggaran sebesar Rp1.643.902.000.840,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.681.717.116.125,00 dan Rp1.572.411.245.945,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	221.213.304.000,00	252.458.013.000,00	114,12	200.617.875.334,00
	PBB	43.633.552.000,00	49.809.197.000,00	114,15	33.821.059.292,00
	PPh Pasal 21	87.626.980.000,00	101.330.965.000,00	115,64	80.316.944.858,00
	PPh Pasal 25 dan Pasal 29	2.741.616.000,00	3.082.838.000,00	112,45	1.769.177.621,00
	Cukai Hasil Tembakau	26.348.695.000,00	29.111.448.000,00	110,49	32.067.195.274,00
	SDA Minyak bumi	46.968.603.000,00	48.590.912.000,00	103,45	40.928.721.728,00
	SDA Gas Bumi	11.210.004.000,00	17.534.068.000,00	156,41	8.084.570.468,00
	SDA Pengusahaan Panas Bumi	15.995.000,00	20.933.000,00	130,87	15.800.320,00
	SDA Mineral dan Batubara - Landrent	3.602.000,00	74.529.000,00	2.069,10	21.779.000,00
	SDA Mineral dan Batubara - Royalty	692.136.000,00	931.002.000,00	134,51	953.517.811,00
	SDA Kehutanan - PSDH	144.581.000,00	144.581.000,00	100,00	277.909.751,00
	SDA Perikanan	1.827.540.000,00	1.827.540.000,00	100,00	2.361.199.211,00
2	Dana Alokasi Umum	952.986.932.000,00	976.604.015.000,00	102,48	915.176.119.975,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	102.267.487.000,00	98.720.516.184,00	96,53	122.396.553.183,00
	Bidang Pendidikan - Reguler PAUD	0,00	0,00	-	1.012.788.500,00
	Bidang Pendidikan - Reguler SD	0,00	0,00	-	2.280.187.000,00
	Bidang Pendidikan - Reguler SMP	0,00	0,00	-	1.776.247.818,00
	Bidang Kesehatan dan KB - Reguler KB	0,00	0,00	-	1.135.754.003,00
	Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	-	9.660.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	-	541.000.000,00
	Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	-	53.189.677.879,00
	Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	-	14.172.973.000,00
	Bidang Air Minum - Reguler	0,00	0,00	-	33.796.884.983,00
	Bidang Air Minum - Penugasan	14.999.999.000,00	14.526.425.008,00	96,84	0,00
	Bidang Sanitasi - Reguler	0,00	0,00	-	4.831.040.000,00
	Bidang Sanitasi - Penugasan	3.086.367.000,00	3.085.980.000,00	99,99	0,00
	Bidang Pendidikan-PAUD	872.333.000,00	871.326.560,00	99,88	0,00
	Bidang Pendidikan-SD	5.563.420.000,00	5.556.518.399,00	99,88	0,00
	Bidang Pendidikan-SMP	6.262.106.000,00	6.252.430.999,00	99,85	0,00
	Bidang Pendidikan-SKB	630.596.000,00	627.209.400,00	99,46	0,00
	Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	5.261.859.000,00	5.113.275.000,00	97,18	0,00
	Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	27.098.751.000,00	26.149.999.730,00	96,50	0,00
	Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.938.902.000,00	1.911.420.000,00	98,58	0,00
	Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	8.281.149.000,00	7.257.257.709,00	87,64	0,00
	Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	691.766.000,00	581.866.725,00	84,11	0,00
	Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	3.092.250.000,00	3.092.249.968,00	100,00	0,00
	Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	17.128.540.000,00	17.035.756.280,00	99,46	0,00
	Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	4.342.794.000,00	3.895.427.577,00	89,70	0,00
	Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	1.235.034.000,00	1.225.980.024,00	99,27	0,00
	Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	1.781.621.000,00	1.537.392.805,00	86,29	0,00
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	367.434.277.840,00	353.934.571.941,00	96,33	334.220.697.453,00
	BOS Reguler	0,00	0,00	-	129.328.113.293,00
	BOS Kinerja	0,00	0,00	-	4.655.000.000,00
	Tunjangan Profesi Guru - PNSD	0,00	0,00	-	128.420.144.000,00
	Tamsil Guru - PNSD	0,00	0,00	-	5.872.750.000,00
	BOP PAUD	0,00	0,00	-	38.547.480.000,00
	BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	-	3.640.230.000,00
	BOP Museum dan Taman Budaya	700.000.000,00	676.018.500,00	96,57	687.598.448,00
	BOKKB - BOK	0,00	0,00	-	13.976.521.582,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BOKKB - BOKB	0,00	0,00	-	7.760.715.062,00
	PK2UKM	0,00	0,00	-	376.751.900,00
	Fasilitasi Penanaman Modal	388.242.000,00	387.982.500,00	99,93	341.621.168,00
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.251.150.000,00	1.221.843.400,00	97,66	613.772.000,00
	Dana BOSP-BOS Reguler	129.610.620.000,00	129.514.710.022,00	99,93	0,00
	Dana BOSP-BOS Kinerja	4.225.000.000,00	4.225.000.000,00	100,00	0,00
	Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	38.326.320.000,00	38.181.402.000,00	99,62	0,00
	Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	555.000.000,00	525.000.000,00	94,59	0,00
	Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	4.167.740.000,00	4.088.550.000,00	98,10	0,00
	Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	0,00
	Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	13.542.460.000,00	10.721.786.620,00	79,17	0,00
	Dana BOK-BOK Puskesmas	16.084.079.000,00	15.239.951.878,00	94,75	0,00
	Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	142.548.294.000,00	134.492.873.272,00	94,35	0,00
	Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	4.256.029.840,00	4.067.250.000,00	95,56	0,00
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	11.238.343.000,00	10.051.203.749,00	89,44	0,00
	Jumlah	1.643.902.000.840,00	1.681.717.116.125,00	102,30	1.572.411.245.945,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp109.305.870.180,00 atau 6,95%. Penetapan penganggaran Dana Transfer tersebut berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
357.892.953.000,00	357.892.953.000,00	318.788.865.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp357.892.953.000,00 atau 100% dari anggaran Rp357.892.953.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp357.892.953.000,00 dan Rp318.788.865.000,00 dirinci sebagai berikut:



Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Desa	321.507.175.000,00	321.507.175.000,00	100,00	318.788.865.000,00
2	Insentif Fiskal	36.385.778.000,00	36.385.778.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	357.892.953.000,00	357.892.953.000,00	100,00	318.788.865.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp39.104.088.000,00 atau 12,27%. Penetapan penganggaran Dana Desa dan Insentif Fiskal tersebut berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dengan didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
316.777.480.624,00	305.595.259.200,00	350.278.491.021,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp305.595.259.200,00 atau 96,47% dari anggaran sebesar Rp316.777.480.624,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp305.595.259.200,00 dan Rp350.278.491.021,00 dirinci sebagai berikut :

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	300.596.613.624,00	289.414.392.200,00	96,28	334.088.066.900,00
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	95.800.215.622,00	88.657.318.300,00	92,54	95.170.082.800,00
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	35.950.000.000,00	52.242.611.000,00	145,32	54.004.788.200,00
	Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	89.818.980.802,00	82.558.168.100,00	91,92	109.044.883.800,00
	Pajak Air Permukaan	687.000.000,00	851.644.500,00	123,97	1.046.962.700,00
	Pajak Rokok	78.340.417.200,00	65.104.650.300,00	83,10	74.821.349.400,00
2	Bantuan Keuangan	16.180.867.000,00	16.180.867.000,00	100,00	16.190.424.121,00
	Jumlah	316.777.480.624,00	305.595.259.200,00	96,47	350.278.491.021,00

Realisasi Transfer Antar Daerah pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan 12,76% atau sebesar Rp44.683.231.821,00. Realisasi tersebut berdasar pada Keputusan Gubernur sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tanggal 6 Februari 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tanggal 26 April 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/219/KPTS/013/2024 tanggal 3 Mei 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/224/KPTS/013/2024 tanggal 6 Mei 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/391/KPTS/013/2024 tanggal 26 Juli 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/600/KPTS/013/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/780/KPTS/013/2024 tanggal 20 Desember 2024.

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023 pada Tabel 46, masing-masing sebesar Rp16.180.867.000,00 dan Rp16.190.424.121,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dirinci sebagai berikut :

Tabel 47 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	PENDIDIKAN		
	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Guru Swasta (BPPDGS)	10.005.000.000,00	10.005.000.000,00
	Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	676.800.000,00	676.800.000,00
	Honorarium Kinerja Guru Non PNS jenjang TK/SD/SMP	90.000.000,00	106.000.000,00
2	KESEHATAN		



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Honor Perawat Ponkesdes	3.031.800.000,00	3.163.550.000,00
	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	207.336.000,00	119.564.500,00
	Pendampingan Kunjungan Konseling Kesehatan	36.366.500,00	215.226.000,00
	Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat (Sajadah)	119.564.500,00	35.383.621,00
3	Program Jatim Puspa	80.000.000,00	70.300.000,00
4	Tambahan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa	1.934.000.000,00	1.798.600.000,00
Jumlah		16.180.867.000,00	16.190.424.121,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
0,00	186.000.000,00	3.890.000.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024 sebesar Rp186.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp186.000.000,00 dan Rp3.890.000.000,00 dan dirinci sebagai berikut:

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Pendapatan Hibah	0,00	186.000.000,00	-	3.890.000.000,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	186.000.000,00	-	3.890.000.000,00
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	-	0,00
B	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	0,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	-	0,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	-	0,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah		0,00	186.000.000,00	-	3.890.000.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.704.000.000,00 atau 95,22%.

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023 pada tabel 48, masing-masing sebesar Rp186.000.000,00 dan Rp3.890.000.000,00 dirinci sebagai berikut:



Tabel 49 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Hibah Sanitasi/Air Limbah Setempat	186.000.000,00	252.000.000,00
2	Hibah Air Minum Pedesaan	0,00	3.638.000.000,00
	Jumlah	186.000.000,00	3.890.000.000,00

5.1.2

BELANJA DAERAH

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
3.974.761.570.922,00	3.697.575.974.929,23	3.418.637.234.689,96

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengklasifikasikan Belanja Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi.
Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal.
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga.
Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer
Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dikelompokkan ke dalam 11 fungsi yaitu, Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan,



Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan sosial.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Pada Tahun 2024 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp3.974.761.570.922,00 terealisasi sebesar Rp3.697.575.974.929,23 atau sebesar 93,03%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun 2023, maka realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp278.938.740.239,27 atau sebesar 8,16%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun 2024 serta komparasinya dengan realisasi tahun 2023 berdasarkan masing-masing kelompok belanja dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Operasi	2.697.303.910.674,00	2.495.362.693.887,46	92,51	2.202.478.442.330,61
2	Belanja Modal	483.004.325.065,00	424.461.947.578,39	87,88	431.340.278.246,35
3	Belanja Tidak Terduga	6.221.807.986,00	2.026.255.613,38	32,57	1.183.127.722,00
3	Belanja Transfer	788.231.527.197,00	775.725.077.850,00	98,41	783.635.386.391,00
	Jumlah	3.974.761.570.922,00	3.697.575.974.929,23	93,03	3.418.637.234.689,96

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
<u>2.697.303.910.674,00</u>	<u>2.495.362.693.887,46</u>	<u>2.202.478.442.330,61</u>

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja Operasi pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.697.303.910.674,00 dan terealisasi sebesar Rp2.495.362.693.887,46 atau sebesar 92,51%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp2.202.478.442.330,61 maka realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2024 mengalami peningkatan senilai Rp292.884.251.556,85 atau sebesar 13,30%.

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.495.362.693.887,46 dan Rp2.202.478.442.330,61 terdiri atas :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	1.127.045.955.366,13	1.085.548.797.241,45	96,32	1.009.787.854.448,88
2	Belanja Barang	1.143.117.115.411,87	1.010.692.655.425,09	88,42	868.397.712.028,13
3	Belanja Bunga	964.120.371,00	964.120.370,60	100,00	0,00
4	Belanja Hibah	398.709.272.025,00	382.505.675.850,32	95,94	303.819.808.881,60
5	Belanja Bantuan Sosial	27.467.447.500,00	15.651.445.000,00	56,98	20.473.066.972,00
	Jumlah	2.697.303.910.674,00	2.495.362.693.887,46	92,51	2.202.478.442.330,61

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
1.127.045.955.366,13	1.085.548.797.241,45	1.009.787.854.448,88

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.085.548.797.241,45 atau 96,32% dari anggaran sebesar Rp1.127.045.955.366,13. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.085.548.797.241,45 dan Rp1.009.787.854.448,88 dirinci sebagai berikut:

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai berdasarkan Obyek Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Gaji dan Tunjangan ASN	638.251.792.419,13	614.847.619.658,00	96,33	567.443.097.216,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	163.991.580.134,00	157.962.187.072,66	96,32	164.227.380.248,24
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	287.916.186.956,00	278.040.880.795,80	96,57	242.271.527.012,97
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.271.065.857,00	30.777.494.108,00	98,42	31.251.217.759,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.871.690.000,00	1.436.075.606,99	50,01	1.824.537.212,67
6	Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.743.640.000,00	2.484.540.000,00	90,56	2.770.095.000,00
	Jumlah	1.127.045.955.366,13	1.085.548.797.241,45	96,32	1.009.787.854.448,88

Rincian obyek anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian Obyek Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<u>Gaji dan Tunjangan ASN</u>	638.251.792.419,13	614.847.619.658,00	96,33	567.443.097.216,00
1	Gaji Pokok ASN	476.410.760.228,13	464.332.417.035,00	97,46	423.813.433.269,00
2	Tunjangan Keluarga ASN	47.257.600.619,00	45.887.385.764,00	97,10	41.502.656.964,00
3	Tunjangan Jabatan ASN	6.429.975.672,00	5.874.910.000,00	91,37	5.825.886.030,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
4	Tunjangan Fungsional ASN	25.741.438.144,00	25.371.457.284,00	98,56	26.766.327.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	10.332.396.933,00	10.086.880.000,00	97,62	8.919.335.000,00
6	Tunjangan Beras ASN	26.414.869.811,00	26.080.667.639,00	98,73	25.195.111.688,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	789.474.356,00	719.120.296,00	91,09	395.694.632,00
8	Pembulatan Gaji ASN	9.193.450,00	6.567.841,00	71,44	6.012.768,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.342.715.340,00	32.675.396.993,00	80,99	31.527.403.152,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.130.845.217,00	953.550.694,00	84,32	872.242.628,00
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	3.392.522.649,00	2.859.266.112,00	84,28	2.618.994.085,00
Tambahan Penghasilan ASN		163.991.580.134,00	157.962.187.072,66	96,32	164.227.380.248,24
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	85.113.875.730,00	82.363.566.408,57	96,77	84.728.013.119,35
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.397.463.072,00	1.354.022.287,72	96,89	1.414.884.277,14
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	28.818.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	77.451.423.332,00	74.244.598.376,37	95,86	78.084.482.851,75
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		287.916.186.956,00	278.040.880.795,80	96,57	242.271.527.012,97
1	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	35.142.421.000,00	26.426.933.119,50	75,20	25.477.806.277,91
2	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	-	0,00
3	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	153.995.383.000,00	153.995.320.364,00	100,00	126.187.632.800,00
4	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.248.750.000,00	5.190.500.000,00	98,89	4.834.500.000,00
5	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	93.529.632.956,00	92.428.127.312,30	98,82	85.679.037.935,06
6	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	-	67.800.000,00
7	Honorarium Pengadaan Barang dan jasa	0,00	0,00	-	24.750.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		31.271.065.857,00	30.777.494.108,00	98,42	31.251.217.759,00
1	Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.111.845.000,00	99,78	1.114.260.000,00
2	Tunjangan Keluarga DPRD	156.009.000,00	146.715.000,00	94,04	156.009.000,00
3	Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00	159.975.780,00	92,04	173.808.000,00
4	Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.266.500,00	99,75	95.508.000,00
5	Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.612.175.250,00	99,78	1.615.677.000,00
6	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	196.463.400,00	111.721.050,00	56,87	134.649.900,00
7	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.088.000,00	14.829.150,00	81,98	28.074.900,00
8	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.775.900.000,00	99,50	8.820.000.000,00
9	Tunjangan Reses DPRD	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	100,00	2.175.600.000,00
10	Pembebanan PPh Pimpinan dan Anggota DPRD	559.263.025,00	383.547.504,00	68,58	450.115.471,00
11	Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	-	0,00
12	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.815.889.432,00	10.731.483.874,00	99,22	10.778.515.488,00
13	Tunjangan Transportasi DPRD	5.729.160.000,00	5.721.145.000,00	99,86	5.696.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
14	Uang Jasa Pengabdian DPRD	506.940.000,00	442.890.000,00	87,37	12.600.000,00
	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.871.690.000,00	1.436.075.606,99	50,01	1.824.537.212,67
1	Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
2	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.620.000,00	4.620.000,00	100,00	4.620.000,00
3	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.420.000,00	98.420.000,00	100,00	94.640.000,00
4	Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.084.000,00	6.083.280,00	99,99	6.083.280,00
5	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	231.000,00	230.513,00	99,79	266.144,00
6	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.120,00	56,00	1.120,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	110.187.000,00	11.067.408,00	10,04	5.253.600,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	132.000,00	112.320,00	85,09	112.320,00
9	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	394.000,00	336.960,00	85,52	336.960,00
10	Insentif Bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah	2.422.000.000,00	1.085.644.005,99	44,82	1.483.104.890,67
11	Insentif Bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah	175.020.000,00	174.960.000,00	99,97	175.518.898,00
	Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.743.640.000,00	2.484.540.000,00	90,56	2.770.095.000,00
1	Dana Operasional Pimpinan DPRD	353.640.000,00	353.640.000,00	100,00	393.120.000,00
2	Dana Operasional KDH/WKDH	2.390.000.000,00	2.130.900.000,00	89,16	2.376.975.000,00
	Jumlah	1.127.045.955.366,13	1.085.548.797.241,45	96,32	1.009.787.854.448,88

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per OPD pada Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OPD Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan	522.465.946.309,13	514.333.879.269,96	98,44	460.814.012.515,96
2	Dinas Kesehatan	268.845.673.090,00	265.513.532.416,93	98,76	240.677.866.603,06
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.942.697.553,00	12.609.796.110,03	97,43	12.443.406.836,03
4	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.517.398.022,00	10.382.126.935,87	98,71	10.744.206.779,27
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.239.915.398,00	14.034.511.385,54	98,56	14.084.937.422,27
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.294.016.000,00	4.043.034.248,62	94,16	3.679.073.852,75
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.993.460.000,00	2.874.106.709,02	96,01	3.109.182.638,78
8	Dinas Sosial	3.933.910.794,00	3.719.768.321,01	94,56	3.796.165.944,24
9	Dinas Tenaga Kerja	4.832.006.000,00	4.703.196.377,15	97,33	5.074.853.022,93
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.135.965.489,00	8.914.487.747,55	97,58	8.855.028.721,49
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.738.026.438,00	4.495.494.523,64	94,88	4.565.681.539,58
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.438.718.086,00	4.321.131.817,40	97,35	4.310.858.414,39
13	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.066.998.946,00	3.917.264.986,06	96,32	4.055.419.810,56
14	Dinas Perhubungan	7.429.787.958,00	7.144.322.581,11	96,16	7.080.128.232,62
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.679.530.695,00	4.622.795.184,30	98,79	4.287.477.716,50
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,	7.556.688.000,00	7.238.383.421,98	95,79	7.299.856.254,75



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Perindustrian dan Perdagangan				
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.032.118.497,00	6.810.235.465,83	96,84	6.779.930.890,51
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.093.506.606,00	3.881.830.513,52	94,83	3.997.656.017,58
19	Dinas Perikanan	4.341.352.832,00	4.088.829.622,18	94,18	5.069.398.634,06
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	5.836.560.000,00	5.610.748.359,95	96,13	6.014.058.643,90
21	Dinas Pertanian	12.622.414.999,00	12.442.692.652,67	98,58	12.665.702.300,73
22	Sekretariat Daerah	24.989.948.000,00	22.558.838.766,23	90,27	21.662.295.748,06
23	Sekretariat DPRD	36.307.109.901,00	35.676.678.960,05	98,26	36.342.689.250,15
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	5.975.097.000,00	5.782.853.561,31	96,78	6.127.154.366,34
25	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	52.005.539.154,00	34.873.332.870,50	67,06	34.110.729.086,58
26	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	6.800.056.816,00	6.639.173.044,99	97,63	6.637.628.923,92
27	Inspektorat	7.977.808.768,00	7.573.117.708,94	94,93	7.848.176.042,62
28	Kecamatan Gresik	14.054.547.354,00	12.211.139.298,18	86,88	11.592.588.153,94
29	Kecamatan Kebomas	8.933.244.000,00	7.698.272.500,57	86,18	8.082.919.013,06
30	Kecamatan Manyar	2.807.923.655,00	2.731.704.807,02	97,29	2.606.958.611,72
31	Kecamatan Cerme	2.404.917.056,00	2.302.467.080,02	95,74	2.364.828.172,68
32	Kecamatan Benjeng	3.386.554.000,00	3.245.753.480,37	95,84	3.200.020.246,47
33	Kecamatan Balongpanggang	3.477.712.820,00	3.339.353.042,69	96,02	3.584.716.113,78
34	Kecamatan Dudusampeyan	2.737.333.246,00	2.710.916.436,47	99,03	2.738.307.874,47
35	Kecamatan Driyorejo	2.622.427.000,00	2.507.547.773,87	95,62	2.646.264.304,63
36	Kecamatan Wringinanom	2.782.177.944,00	2.658.120.459,86	95,54	2.837.638.803,21
37	Kecamatan Kedamean	2.334.029.873,00	2.304.674.836,76	98,74	2.350.713.988,14
38	Kecamatan Menganti	2.737.252.000,00	2.661.934.255,49	97,25	2.632.540.498,07
39	Kecamatan Sidayu	2.947.449.000,00	2.602.743.352,10	88,30	3.013.006.956,83
40	Kecamatan Ujungpangkah	2.680.452.464,00	2.520.562.678,32	94,03	2.607.274.289,10
41	Kecamatan Panceng	2.975.268.820,00	2.911.848.119,63	97,87	2.980.717.772,56
42	Kecamatan Bungah	3.280.889.250,00	3.092.187.813,15	94,25	3.136.713.522,36
43	Kecamatan Dukun	3.335.889.000,00	3.233.567.588,99	96,93	3.108.746.959,76
44	Kecamatan Sangkapura	2.624.149.797,00	2.521.555.087,43	96,09	2.473.488.737,49
45	Kecamatan Tambak	2.481.384.950,00	2.263.665.234,41	91,23	2.499.162.057,92
46	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.350.101.786,00	3.224.619.833,78	96,25	3.197.672.163,06
Jumlah		1.127.045.955.366,13	1.085.548.797.241,45	96,32	1.009.787.854.448,88

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan 7,50% atau sebesar Rp75.760.942.792,57.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
1.143.117.115.411,87	1.010.692.655.425,09	868.397.712.028,13

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp1.010.692.655.425,09 atau 88,42% dari anggaran sebesar Rp1.143.117.115.411,87. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.010.692.655.425,09 dan Rp868.397.712.028,13 dan dirinci sebagai berikut:

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	319.666.582.115,87	281.131.984.628,66	87,95	248.688.695.686,20
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	81.227.500,00	45.870.000,00	56,47	136.213.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	253.222.984,00	174.798.155,00	69,03	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	384.831.778.514,00	356.820.414.642,50	92,72	355.048.060.933,86
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	157.608.242.887,00	155.506.586.553,96	98,67	91.720.582.615,00
6	Belanja Sewa Tanah	95.700.000,00	91.700.000,00	95,82	172.100.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.831.495.185,00	9.732.455.637,00	82,26	8.541.401.823,00
8	Belanja Sewa Gedung dan bangunan	256.027.250,00	188.153.950,00	73,49	270.488.750,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	755.000,00	752.900,00	99,72	4.575.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.594.295.182,00	10.402.922.995,30	89,72	9.232.390.590,67
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	16.945.799.344,00	14.857.013.543,88	87,67	11.877.860.048,50
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.132.000.000,00	620.800.000,00	54,84	342.900.000,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.365.187.018,00	9.612.775.056,00	77,74	7.382.427.962,00
14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.341.984.240,00	1.203.572.905,00	89,69	840.100.952,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	119.214.000,00	119.214.000,00	100,00	44.855.100,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.263.271.018,00	21.129.829.652,00	77,50	20.190.599.735,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.302.347.731,00	21.342.667.375,18	87,82	25.170.220.269,07
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.878.699.716,00	15.755.133.628,65	93,34	6.527.218.956,83
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	330.876.357,00	328.129.107,00	99,17	109.585.259,00
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	6.660.000,00	6.660.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.247.148.570,00	67.876.281.353,96	62,70	47.000.870.940,00
22	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	614.790.900,00	0,00	0,00	130.652.287,00
23	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.926.087.000,00	26.261.746.000,00	97,53	15.780.989.000,00
24	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.423.722.900,00	17.483.193.341,00	85,60	19.184.923.120,00
	Jumlah	1.143.117.115.411,87	1.010.692.655.425,09	88,42	868.397.712.028,13



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan 16,39% atau sebesar Rp142.294.943.396,96. Kenaikan tersebut sebagian besar dari Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Pemeliharaan Jalan, jaringan dan Irigasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Uang atau Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 tersebut termasuk realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp76.571.757.522,00 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan dan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp163.806.105.761,03 yang tidak melalui Kas Daerah. Berikut rincian Belanja Barang dan Jasa BOS yang tidak melalui Kas Daerah:

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	29.310.790.420,00	29.309.241.774,00	99,99	31.749.125.147,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	34.900.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	-	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	38.599.172.924,00	38.596.382.213,00	99,99	37.677.281.799,00
5	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	0,00	0,00	-	0,00
6	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	-	0,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	525.385.000,00	525.305.121,00	99,98	629.911.799,00
8	Belanja Sewa Gedung dan bangunan	0,00	0,00	-	0,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	-	0,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	-	0,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	-	0,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	5.550.000,00
14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	-	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	-	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.533.632.683,00	1.533.107.080,00	99,97	1.915.595.237,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.833.233.398,00	5.829.066.227,00	99,93	4.995.324.327,00
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	-	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	286.020.107,00	286.020.107,00	100,00	103.606.800,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.742.836.000,00	468.635.000,00	12,52	647.454.400,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	-	0,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	-	0,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah		79.855.070.532,00	76.571.757.522,00	95,89	77.758.749.509,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Berikut rincian Anggaran dan Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2024.

Tabel 57 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	95.225.050.284,00	77.879.785.042,55	81,78	87.048.795.478,38
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	-	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	18.280.513,00	16.388.400,00	89,65	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	60.740.782.132,00	68.437.805.197,22	112,67	69.389.797.661,66
5	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	2.685.511.487,00	3.189.282.576,00	118,76	2.967.323.084,00
6	Belanja Sewa Tanah	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	75.000.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.231.381.850,00	832.628.350,00	67,62	799.380.199,00
8	Belanja Sewa Gedung dan bangunan	4.800.000,00	3.200.000,00	66,67	3.600.000,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	755.000,00	752.900,00	99,72	4.575.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.745.714,00	13.472.769,00	98,01	16.750.450,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	159.000.000,00	158.048.989,50	99,40	274.500.000,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	-	0,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.504.294.518,00	3.314.880.620,00	94,59	2.728.618.400,00
14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	209.057.000,00	190.109.800,00	90,94	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	-	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.644.104.301,00	4.878.973.442,00	56,44	6.490.717.682,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.406.695.779,00	2.825.583.103,95	82,94	4.954.563.506,32
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.959.241,00	137.751.128,81	69,24	162.757.845,00
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	5.978.459,00
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	6.660.000,00	6.660.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.028.960.250,00	1.810.835.542,00	89,25	1.761.792.014,00
22	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	-	0,00
23	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	-	0,00
24	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	73.687.900,00	70.947.900,00	96,28	228.490.000,00
	Jumlah	178.193.225.969,00	163.806.105.761,03	91,93	176.912.639.779,36

Rincian obyek anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Obyek Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
BELANJA BARANG		320.001.032.599,87	281.352.652.783,66	87,92	248.824.908.686,20
<u>Belanja Barang Pakai Habis</u>		319.666.582.115,87	281.131.984.628,66	87,95	248.688.695.686,20
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.703.515.988,00	13.429.669.826,75	98,00	12.849.379.965,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.032.251.975,00	3.795.216.233,00	94,12	3.708.684.223,88
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	16.177.528.115,00	14.287.640.877,00	88,32	14.602.014.784,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	806.407.792,00	427.566.574,00	53,02	422.377.400,00
5	Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	116.980.200,00	81.606.940,00	69,76	83.918.560,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
6	Belanja Bahan Isi Tabung Gas	435.283.968,00	333.917.550,00	76,71	341.825.916,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	104.425.000,00	97.848.000,00	93,70	0,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	45.482.538.804,00	36.899.437.390,18	81,13	11.654.632.586,26
9	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	1.291.945.859,00	1.194.007.478,00	92,42	862.089.329,00
10	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	149.912.800,00	139.496.250,00	93,05	114.154.000,00
11	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	332.331.176,00	281.225.548,00	84,62	516.427.566,00
12	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium	225.741.855,00	218.898.210,00	96,97	436.213.658,00
13	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	68.507.833,00	64.989.510,00	94,86	47.946.290,00
14	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	1.682.100,00	1.604.375,00	95,38	24.925.000,00
15	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	30.247.908,00	28.121.500,00	92,97	7.482.000,00
16	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	58.971.200,00	49.662.200,00	84,21	10.088.500,00
17	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - ATK	10.034.856.438,00	9.684.001.620,74	96,50	10.891.717.423,00
18	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Kertas dan Cover	6.972.931.987,00	6.800.491.036,00	97,53	4.825.524.530,75
19	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Bahan Cetak	37.444.721.875,87	33.931.442.951,00	90,62	24.492.624.490,00
20	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Benda Pos	581.110.601,00	521.990.550,00	89,83	492.406.880,00
21	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Bahan Komputer	7.837.391.567,00	7.123.477.523,00	90,89	4.969.427.185,00
22	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Perabot Kantor	13.020.046.029,00	11.976.402.116,50	91,98	9.278.179.232,00
23	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Alat Listrik	6.996.424.508,00	6.034.289.209,50	86,25	7.196.339.713,00
24	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Perlengkapan Dinas	3.521.027.305,00	2.955.443.608,00	83,94	7.737.466.200,00
25	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.263.427.668,00	1.160.417.666,00	91,85	433.399.248,00
26	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Souvenir / Cendera Mata	2.808.441.682,00	2.081.051.397,00	74,10	2.194.693.472,00
27	Belanja Alat/Bahan Utk Keg. Kantor - Lainnya	503.142.575,00	406.297.285,00	80,75	29.262.792.022,58
28	Belanja Obat-Obatan - Obat	45.528.527.786,00	39.902.995.965,62	87,64	33.845.456.537,71
29	Belanja Obat-Obatan - Obat Obatan Lainnya	4.940.163.260,00	2.995.113.250,00	60,63	11.983.999.115,18
30	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.073.680.618,00	33.680.436.803,12	96,03	9.304.600.612,14
31	Belanja Natura dan Pakan - Natura	9.444.903.458,00	8.534.369.591,00	90,36	5.636.433.457,00
32	Belanja Natura dan Pakan - Pakan	47.857.500,00	46.437.000,00	97,03	8.700.000,00
33	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan lainnya	8.000.000,00	7.960.600,00	99,51	715.106.000,00
34	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	71.505.000,00	57.873.900,00	80,94	9.760.800,00
35	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.681.925.227,00	24.305.834.623,00	81,89	22.273.460.260,00
36	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	4.985.353.448,00	4.401.602.191,00	88,29	3.050.436.446,00
37	Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.357.954.100,00	3.348.126.100,00	99,71	4.383.941.260,00
38	Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.478.738.645,00	4.798.120.497,25	74,06	5.015.617.121,70
39	Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	265.575.000,00	97.990.000,00	36,90	62.500.000,00
40	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.405.907.100,00	2.912.378.468,00	85,51	2.923.064.027,00
41	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	576.000.000,00	571.030.000,00	99,14	0,00
42	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	-	100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
43	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	79.708.050,00	38.250.000,00	47,99	511.853.725,00
44	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	227.139.400,00	170.651.400,00	75,13	675.347.450,00
45	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	904.699.875,00	756.116.560,00	83,58	10.140.000,00
46	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.375.000,00	3.100.000,00	91,85	0,00
47	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	522.000,00	521.600,00	99,92	0,00
48	Belanja Pakaian Adat Daerah	140.650.000,00	118.722.555,00	84,41	32.467.500,00
49	Belanja Pakaian Batik Tradisional	79.472.300,00	78.752.300,00	99,09	593.302.450,00
50	Belanja Pakaian Olahraga	363.129.540,00	299.387.800,00	82,45	95.778.750,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai		81.227.500,00	45.870.000,00	56,47	136.213.000,00
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu Rambu	11.349.500,00	11.260.000,00	99,21	35.169.400,00
2	Belanja Komponen-Komponen lainnya	0,00	0,00	-	99.633.600,00
3	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pipa-Pipa Baja	8.760.000,00	5.760.000,00	65,75	0,00
5	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	29.453.000,00	28.850.000,00	97,95	1.410.000,00
6	Belanja Pipa-Pipa lainnya	27.825.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		253.222.984,00	174.798.155,00	69,03	0,00
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	23.970.000,00	23.780.000,00	99,21	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	4.144.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	7.981.875,00	6.137.500,00	76,89	0,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.913.500,00	98,27	0,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	59.271.750,00	41.124.000,00	69,38	0,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	499.500,00	499.500,00	100,00	0,00
8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	754.025,00	750.000,00	99,47	0,00
9	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	8.299.130,00	8.150.000,00	98,20	0,00
10	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	18.621.863,00	13.949.900,00	74,91	0,00
11	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	73.305.000,00	33.750.000,00	46,04	0,00
12	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	19.235.000,00	18.435.000,00	95,84	0,00
14	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	10.000.000,00	9.013.000,00	90,13	0,00
15	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.171.341,00	8.159.000,00	99,85	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
16	Belanja Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman	5.469.000,00	5.386.755,00	98,50	0,00
BELANJA JASA		598.003.264.620,00	559.037.148.183,64	93,48	485.432.888.675,03
Belanja Jasa Kantor		384.831.778.514,00	356.820.414.642,50	92,72	355.048.060.933,86
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.785.050.938,00	17.029.848.688,00	78,17	21.056.298.927,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.168.944.600,00	2.590.465.500,00	81,75	2.599.706.600,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	208.100.000,00	185.900.000,00	89,33	159.800.000,00
4	Honorarium Penyuluh dan Pemdampingan	490.248.000,00	461.800.000,00	94,20	9.226.757.130,00
5	Honorarium Rohaniwan	846.420.000,00	791.520.000,00	93,51	629.870.000,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	6.230.000,00	6.230.000,00	100,00	60.580.000,00
7	Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	-	1.200.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.473.089.200,00	10.473.089.200,00	100,00	24.400.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	524.400.000,00	477.500.000,00	91,06	519.200.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	59.800.227.600,00	50.136.627.600,00	83,84	45.078.269.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	71.708.287.065,00	75.011.451.606,74	104,61	82.833.273.806,18
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.451.643.368,00	1.195.256.615,00	82,34	379.133.010,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sarana dan Prasarana Umum	5.159.577.940,00	5.058.853.433,00	98,05	2.255.514.800,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.880.750.000,00	3.848.500.000,00	99,17	3.448.600.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00	184.800.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.823.200.000,00	1.609.400.000,00	88,27	913.300.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	37.203.000,00	36.953.000,00	99,33	82.879.400,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian Dan Kebudayaan	694.150.000,00	554.139.459,00	79,83	591.940.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52.442.770.000,00	51.137.515.545,00	97,51	52.996.272.652,00
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.377.920.000,00	2.371.730.180,00	99,74	70.500.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.836.787.267,00	2.182.062.267,00	118,80	1.727.334.274,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.053.070.000,00	1.692.108.389,00	82,42	1.736.498.150,00
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.568.682.192,00	22.301.794.485,00	98,82	26.450.690.919,10
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.715.110.000,00	12.315.350.000,00	96,86	8.942.534.355,00
25	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.338.759.000,00	3.204.042.980,42	95,97	3.044.027.356,10
26	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	106.076.500,00	100.126.610,00	94,39	285.779.120,00
28	Belanja Jasa Tenaga Audit/Surveillance ISO	577.500.000,00	571.589.197,00	98,98	132.946.000,00
29	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	432.600.000,00	419.050.000,00	96,87	194.550.000,00
30	Belanja Jasa Tata Rias	27.400.000,00	16.680.000,00	60,88	29.600.000,00
31	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	-	5.989.000,00
32	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4.945.050,00	4.945.050,00	100,00	0,00
33	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	18.271.624,00	10.600.538,48	58,02	4.859.231,48
34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	12.860.000,00	10.666.000,00	82,94	0,00
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	157.655.000,00	140.200.000,00	88,93	126.500.000,00
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
37	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	16.940.000,00	13.230.500,00	78,10	13.859.100,00
38	Belanja Jasa Kalibrasi	667.053.050,00	596.802.689,00	89,47	616.756.576,00
39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	366.062.381,00	351.558.222,00	96,04	299.344.520,00
40	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	167.850.000,00	153.826.089,00	91,64	125.018.897,00
41	Belanja Jasa Pengukuran tanah	617.540.000,00	82.629.094,00	13,38	144.216.025,00
42	Belanja Jasa Jalan/ Tol	560.594.000,00	539.295.000,00	96,20	198.957.000,00
43	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan	8.484.884.980,00	7.530.292.500,00	88,75	7.477.235.157,00
44	Belanja Tagihan Telepon	1.056.885.675,00	848.463.067,00	80,28	1.373.626.744,00
45	Belanja Tagihan Air	2.535.956.882,00	1.960.095.831,10	77,29	2.270.616.806,00
46	Belanja Tagihan Listrik	63.938.744.831,00	55.667.377.961,76	87,06	55.730.603.310,00
47	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	830.399.728,00	761.792.268,00	91,74	712.560.250,00
48	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	12.790.696.621,00	12.162.445.706,00	95,09	11.703.363.931,00
49	Belanja Paket/Pengiriman	931.921.200,00	730.520.621,00	78,39	718.084.422,00
50	Belanja Penambahan daya	42.050.000,00	35.391.697,00	84,17	109.462.626,00
51	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	1.656.267.900,00	1.166.165.183,00	70,41	726.183.547,00
52	Belanja Pengolahan Air Limbah	124.810.000,00	97.900.318,00	78,44	152.935.004,00
53	Belanja Lembur	8.910.542.500,00	7.830.842.702,00	87,88	6.646.684.263,00
54	Belanja Medical Check Up	113.000.000,00	54.497.100,00	48,23	19.414.700,00
55	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	120.650.422,00	120.291.750,00	99,70	176.534.325,00
Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi		157.608.242.887,00	155.506.586.553,96	98,67	91.720.582.615,00
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.233.120.000,00	6.995.339.840,00	96,71	6.684.830.415,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	144.439.470.200,00	142.615.176.200,00	98,74	79.838.575.600,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	3.219.412.587,00	3.661.405.760,00	113,73	3.519.592.880,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1.238.836.800,00	1.001.096.117,07	80,81	751.885.077,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.473.440.400,00	1.229.605.736,89	83,45	915.429.943,00
6	Belanja Asuransi Barang Milik daerah	3.962.900,00	3.962.900,00	100,00	10.268.700,00
Belanja Sewa Tanah		95.700.000,00	91.700.000,00	95,82	172.100.000,00
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	95.700.000,00	91.700.000,00	95,82	172.100.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		11.831.495.185,00	9.732.455.637,00	82,26	8.541.401.823,00
1	Belanja Sewa Alat Pengangkat	0,00	0,00	-	14.048.000,00
2	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	59.100.000,00	53.947.500,00	91,28	12.000.000,00
3	Belanja Sewa Floating Excavator	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Electric Generating Set	76.200.000,00	59.415.000,00	77,97	13.090.000,00
5	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	12.690.000,00	12.690.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.009.817.750,00	697.638.220,00	69,09	401.117.500,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.032.388.750,00	1.478.467.117,00	72,75	840.628.350,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	38.360.000,00	34.256.800,00	89,30	139.175.000,00
9	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.835.000,00	840.000,00	29,63	1.020.000,00
10	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	-	78.746.400,00
11	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.722.064.350,00	5.231.497.001,00	91,43	5.414.066.684,00
12	Belanja Sewa Mebel	592.971.350,00	453.888.428,00	76,54	226.948.000,00
13	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	-	2.476.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
14	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	749.734.535,00	663.659.121,00	88,52	487.653.900,00
15	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	-	2.500.000,00
16	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	168.673.450,00	71.273.450,00	42,26	162.889.990,00
17	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	-	4.999.999,00
18	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	2.775.000,00
19	Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata	126.000.000,00	125.208.000,00	99,37	0,00
20	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.044.000.000,00	658.515.000,00	63,08	733.915.000,00
21	Belanja Sewa Peralatan Umum	960.000,00	960.000,00	100,00	2.372.000,00
22	Belanja Sewa Photo and Film Equipment	0,00	0,00	-	980.000,00
23	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	190.300.000,00	189.200.000,00	99,42	0,00
<u>Belanja Sewa Gedung dan bangunan</u>		256.027.250,00	188.153.950,00	73,49	270.488.750,00
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	-	31.990.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	198.227.250,00	132.783.950,00	66,99	234.898.750,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	53.000.000,00	52.170.000,00	98,43	0,00
4	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	-	3.600.000,00
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.800.000,00	3.200.000,00	66,67	0,00
<u>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</u>		755.000,00	752.900,00	99,72	4.575.000,00
1	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	-	2.800.000,00
2	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	755.000,00	752.900,00	99,72	1.775.000,00
<u>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</u>		11.594.295.182,00	10.402.922.995,30	89,72	9.232.390.590,67
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.679.081.080,00	2.115.621.955,98	78,97	1.857.620.457,27
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	200.652.000,00	198.655.749,00	99,01	9.229.650,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	58.052.279,00	58.052.278,51	100,00	17.782.200,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	893.493.303,00	777.140.679,04	86,98	2.121.589.912,04
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.885.924.000,00	3.801.466.672,50	97,83	54.480.482,76
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	41.436.000,00	39.904.500,00	96,30	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	102.827.903,00	102.827.902,50	100,00	676.208.948,50
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.283.710.245,00	1.082.557.916,97	84,33	901.795.531,05
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	516.123.877,00	326.011.388,85	63,17	294.450.329,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	744.943.590,00	744.670.140,00	99,96	208.549.303,05
11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	986.090.905,00	954.095.676,95	96,76	2.546.428.177,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-	200.000.000,00	199.998.135,00	100,00	543.261.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Jasa Pembuatan Peta				
13	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	1.960.000,00	1.920.000,00	97,96	994.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	16.945.799.344,00	14.857.013.543,88	87,67	11.877.860.048,50
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	578.089.200,00	502.357.029,00	86,90	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.482.013.699,00	1.397.013.699,00	94,26	838.148.790,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	4.252.015.334,00	3.890.515.513,27	91,50	2.361.371.095,50
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	87.115.400,00	86.352.450,00	99,12	163.336.500,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	266.000.000,00	262.989.000,00	98,87	823.338.945,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	689.996.432,00	689.353.232,00	99,91	429.460.618,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	128.000.000,00	127.479.060,00	99,59	74.980.500,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	73.409.600,00	70.841.000,00	96,50	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	259.758.679,00	126.093.222,78	48,54	5.224.213.710,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.067.410.000,00	4.644.279.648,00	91,65	547.954.310,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.170.032.200,00	1.061.664.216,00	90,74	1.415.055.580,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.591.958.800,00	1.913.437.973,83	73,82	0,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	214.000.000,00	84.637.500,00	39,55	0,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.132.000.000,00	620.800.000,00	54,84	342.900.000,00
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.132.000.000,00	620.800.000,00	54,84	342.900.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.365.187.018,00	9.612.775.056,00	77,74	7.382.427.962,00
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.648.227.018,00	8.173.578.474,00	76,76	7.076.762.562,00
2	Belanja Sosialisasi	225.120.000,00	203.339.082,00	90,32	157.275.400,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.491.840.000,00	1.235.857.500,00	82,84	148.390.000,00
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.341.984.240,00	1.203.572.905,00	89,69	840.100.952,00
1	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	617.020.225,00	501.963.105,00	81,35	97.415.552,00
2	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	724.964.015,00	701.609.800,00	96,78	742.685.400,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	68.901.068.822,00	58.681.633.762,83	85,17	52.042.479.319,90
	Belanja Pemeliharaan Tanah	119.214.000,00	119.214.000,00	100,00	44.855.100,00
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	119.214.000,00	119.214.000,00	100,00	44.855.100,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.263.271.018,00	21.129.829.652,00	77,50	20.190.599.735,00
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.810.383.912,00	1.246.877.746,00	68,87	1.231.465.462,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	266.312.500,00	217.267.160,00	81,58	79.487.100,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	226.750.000,00	192.141.600,00	84,74	17.551.850,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	244.835.000,00	174.231.300,00	71,16	199.405.450,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	738.319.000,00	738.319.000,00	100,00	557.419.040,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	235.988.500,00	221.593.100,00	93,90	230.421.090,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.018.220.811,00	8.079.725.407,00	89,59	6.337.499.704,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	124.380.000,00	101.728.748,00	81,79	539.841.433,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	461.420.000,00	342.770.643,00	74,29	48.511.500,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	315.630.000,00	244.398.972,00	77,43	123.243.810,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	-	2.021.500,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	396.220.258,00	116.470.100,00	29,40	195.817.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	53.796.969,00	50.922.450,00	94,66	68.124.408,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	87.480.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	26.100.000,00	25.580.000,00	98,01	41.285.050,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	152.400.000,00	149.500.000,00	98,10	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	1.100.360,00	1.100.000,00	99,97	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	-	63.050.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	8.100.000,00	8.075.250,00	99,69	8.850.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	-	13.960.000,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	70.843.000,00	70.843.000,00	100,00	123.916.950,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	115.876.200,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.173.333.679,00	817.144.993,00	69,64	1.354.215.444,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	421.150.875,00	401.608.100,00	95,36	414.075.895,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	52.254.000,00	26.665.750,00	51,03	156.775.217,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.113.594.224,00	2.624.258.483,00	84,28	2.294.527.445,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	350.110.350,00	292.875.881,00	83,65	99.094.665,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	254.921.000,00	181.899.550,00	71,36	133.797.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
29	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	1.800.000,00	18,00	7.552.500,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.800.000,00	780.000,00	20,53	1.800.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	88.133.500,00	66.971.349,00	75,99	154.929.895,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	37.355.500,00	27.690.000,00	74,13	38.834.600,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	28.980.000,00	27.158.962,00	93,72	16.398.600,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.015.275.000,00	1.549.265.824,00	38,58	3.103.477.903,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	78.105.050,00	68.015.161,00	87,08	6.123.738,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	2.000.000,00	825.000,00	41,25	1.200.000,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	-	1.110.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	69.797.800,00	69.797.800,00	100,00	84.230.897,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	224.565.561,00	205.511.500,00	91,52	364.280.673,00
41	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.365.865.676,00	1.253.837.385,00	91,80	783.792.434,00
42	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	45.000.000,00	41.490.844,00	92,20	30.105.600,00
43	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	892.614.875,00	770.165.480,00	86,28	776.505.929,00
44	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	178.294.128,00	160.722.214,00	90,14	106.673.890,00
45	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	217.528.900,00	176.078.900,00	80,95	204.348.913,00
46	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	396.410.590,00	380.822.000,00	96,07	59.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		24.302.347.731,00	21.342.667.375,18	87,82	25.170.220.269,07
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.506.074.598,00	11.465.613.849,89	91,68	9.084.368.862,66
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	300.259.419,00	295.203.360,00	98,32	143.077.324,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	130.518.170,00	129.907.890,00	99,53	283.944.600,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.382.308.779,00	2.801.474.343,95	82,83	5.184.399.589,32



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	235.399.116,00	109.650.000,00	46,58	148.302.800,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	318.383.704,00	316.899.022,65	99,53	1.771.541.883,37
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.248.948.678,00	1.247.822.030,00	99,91	5.718.463.950,72
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	108.190.200,00	57.517.200,00	53,16	47.195.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	207.277.855,00	97.391.400,00	46,99	82.468.044,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	54.406.800,00	54.279.000,00	99,77	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	147.602.700,00	147.602.700,00	100,00	162.320.320,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	347.100.555,00	344.067.675,29	99,13	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	-	198.929.760,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	57.520.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	907.712.996,00	284.701.398,40	31,36	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	62.230.000,00	61.969.457,00	99,58	567.559.291,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	30.226.000,00	30.175.000,00	99,83	34.789.280,00
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	170.445.900,00	170.445.900,00	100,00	164.555.300,00
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.047.969.130,00	691.865.450,00	66,02	371.265.844,00
20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.662.263.131,00	2.662.168.131,00	100,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	86.000.000,00	85.510.182,00	99,43	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	0,00	-	1.159.619.220,00
23	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	51.480.000,00	51.203.045,00	99,46	47.419.200,00
24	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/ Tanda Batas Lainnya	240.030.000,00	237.200.340,00	98,82	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		16.878.699.716,00	15.755.133.628,65	93,34	6.527.218.956,83



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.529.299.742,00	7.216.687.324,69	95,85	2.405.244.620,62
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0,00	0,00	-	167.834.880,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.796.562.993,00	1.796.198.397,47	99,98	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	562.805.281,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	6.248.687.849,00	6.098.063.385,81	97,59	1.969.015.998,75
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	389.518.150,00	387.308.270,00	99,43	1.461.596.356,06
7	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.300.000,00	6.296.000,00	99,94	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	2.000.000,00	737.000,00	36,85	17.960.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	10.000.000,00	3.885.000,00	38,85	31.459.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	0,00	0,00	-	2.000.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	42.661.460,00	12.411.200,00	29,09	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	0,00	-	345.772.756,40
13	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	1.905.000,00	1.741.300,00	91,41	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	150.000.000,00	146.052.170,68	97,37	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	123.959.241,00	75.574.300,00	60,97	112.084.310,00
16	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	15.000.000,00	10.179.280,00	67,86	14.251.035,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		330.876.357,00	328.129.107,00	99,17	109.585.259,00
1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	286.020.107,00	286.020.107,00	100,00	103.606.800,00
2	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	42.356.250,00	42.109.000,00	99,42	5.978.459,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		6.660.000,00	6.660.000,00	100,00	0,00
1	Belanja Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.660.000,00	6.660.000,00	100,00	0,00
BELANJA PERJALANAN DINAS		108.861.939.470,00	67.876.281.353,96	62,35	47.131.523.227,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		108.247.148.570,00	67.876.281.353,96	62,70	47.000.870.940,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.821.649.870,00	44.763.938.654,00	59,83	27.495.602.604,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	67.377.140,00	51.080.000,00	75,81	104.108.400,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.665.629.615,00	18.319.549.292,96	74,27	14.432.287.859,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	934.178.000,00	699.665.500,00	74,90	1.156.537.500,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.758.313.945,00	4.042.047.907,00	52,10	3.812.334.577,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		614.790.900,00	0,00	0,00	130.652.287,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	614.790.900,00	0,00	0,00	130.652.287,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/ MASYARAKAT	47.349.809.900,00	43.744.939.341,00	92,39	34.965.912.120,00
	<u>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</u>	<u>26.926.087.000,00</u>	<u>26.261.746.000,00</u>	<u>97,53</u>	<u>15.780.989.000,00</u>
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.374.300.000,00	1.369.959.000,00	99,68	891.450.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.004.000.000,00	9.954.000.000,00	99,50	50.500.000,00
3	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	15.547.787.000,00	14.937.787.000,00	96,08	14.839.039.000,00
	<u>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</u>	<u>20.423.722.900,00</u>	<u>17.483.193.341,00</u>	<u>85,60</u>	<u>19.184.923.120,00</u>
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	257.900,00	257.900,00	100,00	227.500.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	20.423.465.000,00	17.482.935.441,00	85,60	18.957.423.120,00
	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	1.143.117.115.411,87	1.010.692.655.425,09	88,42	868.397.712.028,13

Anggaran dan realisasi Belanja Barang per OPD pada Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan	180.687.802.673,87	164.606.606.219,00	91,10	156.265.563.857,52
2	Dinas Kesehatan	397.151.621.382,00	372.072.457.553,84	93,69	326.143.484.324,36
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	58.410.020.358,00	53.815.258.777,64	92,13	37.678.132.758,67
4	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.149.604.645,00	30.127.411.895,58	93,71	31.248.448.779,14
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.631.657.263,00	12.499.568.704,00	98,95	8.107.418.017,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.976.677.788,00	5.234.069.890,95	87,57	4.234.398.106,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.931.297.811,00	3.362.414.181,53	85,53	3.808.955.850,00
8	Dinas Sosial	13.888.233.424,00	11.594.369.916,00	83,48	11.763.496.994,00
9	Dinas Tenaga Kerja	5.843.274.604,00	5.134.513.315,00	87,87	4.294.997.533,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	28.254.293.413,00	25.532.978.893,67	90,37	23.103.409.606,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.533.608.849,00	5.593.925.824,00	85,62	4.863.554.075,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.587.791.419,00	13.436.419.253,00	92,11	11.301.028.515,00
13	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.723.113.631,00	18.251.744.644,00	92,54	17.974.938.248,25
14	Dinas Perhubungan	59.550.188.592,00	51.441.717.439,00	86,38	52.349.148.802,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.570.530.045,00	14.340.857.077,00	98,42	7.918.538.903,60
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	4.646.392.625,00	3.491.718.568,00	75,15	3.790.827.367,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.020.504.935,00	4.500.876.076,00	89,65	2.829.567.812,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.785.578.506,00	2.610.093.669,00	93,70	2.024.539.135,00
19	Dinas Perikanan	6.914.266.117,00	4.313.655.065,72	62,39	2.007.803.210,00
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	20.893.131.775,00	19.537.850.706,87	93,51	10.445.312.498,15
21	Dinas Pertanian	32.651.575.015,00	30.534.859.382,27	93,52	8.994.717.221,83
22	Sekretariat Daerah	52.482.138.358,00	45.003.586.449,85	85,75	43.549.002.924,29
23	Sekretariat DPRD	71.406.126.158,00	46.873.693.854,31	65,64	44.339.390.286,08
24	Badan Perencanaan	7.692.212.025,00	6.937.498.682,00	90,19	4.735.391.324,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
25	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.478.429.905,00	13.318.582.249,55	68,38	10.255.612.278,78
26	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	9.275.587.086,00	6.651.457.165,00	71,71	2.750.112.347,00
27	Inspektorat	16.041.468.421,00	5.494.819.997,00	34,25	5.319.262.549,40
28	Kecamatan Gresik	10.478.317.285,00	9.570.537.002,35	91,34	7.275.153.384,56
29	Kecamatan Kebomas	7.450.305.253,00	6.833.311.958,00	91,72	6.898.490.514,00
30	Kecamatan Manyar	1.051.319.614,00	1.018.852.152,00	96,91	745.126.108,00
31	Kecamatan Cerme	905.043.570,00	865.571.994,00	95,64	695.768.005,00
32	Kecamatan Benjeng	967.354.098,00	897.468.030,00	92,78	592.213.103,00
33	Kecamatan Balongpanggang	795.351.700,00	758.936.577,00	95,42	552.934.260,00
34	Kecamatan Dudusampeyan	1.022.326.550,00	979.681.111,00	95,83	743.864.704,00
35	Kecamatan Driyorejo	751.396.625,00	738.942.113,00	98,34	541.354.377,00
36	Kecamatan Wringinanom	824.301.713,00	803.803.685,00	97,51	465.806.277,00
37	Kecamatan Kedamean	1.005.516.175,00	944.690.573,00	93,95	697.049.304,00
38	Kecamatan Menganti	893.895.641,00	864.548.973,00	96,72	637.417.354,00
39	Kecamatan Sidayu	1.022.781.450,00	986.045.863,00	96,41	632.389.315,00
40	Kecamatan Ujungpangkah	805.707.964,00	804.885.597,00	99,90	492.576.541,00
41	Kecamatan Panceng	936.484.571,00	927.625.092,00	99,05	701.711.378,00
42	Kecamatan Bungah	947.992.992,00	919.345.039,00	96,98	549.095.711,00
43	Kecamatan Dukun	963.995.200,00	962.581.413,00	99,85	504.220.881,00
44	Kecamatan Sangkapura	1.063.462.471,00	734.893.050,00	69,10	667.329.080,00
45	Kecamatan Tambak	882.861.367,00	758.668.488,00	85,93	488.537.346,00
46	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.171.574.349,00	4.009.261.264,96	55,90	2.419.621.062,50
Jumlah		1.143.117.115.411,87	1.010.692.655.425,09	88,42	868.397.712.028,13

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dan terjadi pada hampir semua OPD. Beberapa OPD dengan kenaikan realisasi cukup besar diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pertanian. Penurunan realisasi terjadi hanya pada sebagian kecil OPD diantaranya pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan Kecamatan Kebomas. Sedangkan dilihat dari rekening sub rincian, kenaikan cukup signifikan terjadi pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa



5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
964.120.371,00	964.120.370,60	0,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp964.120.370,60 atau 100% dari anggaran sebesar Rp964.120.371,00. Realisasi belanja tersebut merupakan Belanja Bunga atas pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Ibnu Sina.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
398.709.272.025,00	382.505.675.850,32	303.819.808.881,60

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp382.505.675.850,32 atau 95,94% dari anggaran sebesar Rp398.709.272.025,00. Realisasi Belanja Hibah selama Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.180.500.000,00	14.016.529.703,32	98,84	11.448.219.330,98
2	Hibah kepada Badan /Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.158.526.808,00	284.387.804.848,00	94,75	251.625.372.878,62
3	Hibah Dana BOS	0,00	0,00	-	36.531.756.672,00
4	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.767.045.217,00	5.767.045.100,00	100,00	4.214.460.000,00
5	Hibah Dana BOSP	78.603.200.000,00	78.334.296.199,00	99,66	0,00
	Jumlah	398.709.272.025,00	382.505.675.850,32	95,94	303.819.808.881,60

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 naik sebesar Rp78.685.866.968,72 atau 25,90% dibandingkan Tahun 2023. Kenaikan terjadi pada realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan juga pada Belanja Hibah dana BOSP. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dapat dilihat lebih lanjut pada **Lampiran 1**.



5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
27.467.447.500,00	15.651.445.000,00	20.473.066.972,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp15.651.445.000,00 atau 56,98% dari anggaran sebesar Rp27.467.447.500,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial selama Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	27.150.400.000,00	15.420.000.000,00	56,79	20.315.200.000,00
2	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	317.047.500,00	231.445.000,00	73,00	157.866.972,00
	Jumlah	27.467.447.500,00	15.651.445.000,00	56,98	20.473.066.972,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2024 turun sebesar Rp4.821.621.972,00 atau 23,55% jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 lebih lanjut pada **Lampiran 2**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
483.004.325.065,00	424.461.947.578,39	431.340.278.246,35

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp424.461.947.578,39 dan Rp431.340.278.246,35 terdiri atas:

Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Tanah	9.517.500.000,00	1.727.306.005,00	18,15	11.021.176.466,00
2	Belanja Peralatan Mesin	108.896.637.327,00	86.126.274.741,00	79,09	123.664.589.654,00
3	Belanja Gedung Bangunan	134.290.136.174,00	118.169.885.080,81	88,00	149.832.834.297,05
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	220.349.338.060,00	208.508.996.188,58	94,63	133.679.243.538,30
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.626.438.504,00	8.617.485.563,00	99,90	10.702.434.291,00
6	Belanja Aset Lainnya	1.324.275.000,00	1.312.000.000,00	99,07	2.440.000.000,00
	Jumlah	483.004.325.065,00	424.461.947.578,39	87,88	431.340.278.246,35

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 turun sebesar Rp6.878.330.67,96 atau 1,59% jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Sebagian besar penurunan realisasi terjadi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal per OPD pada Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per OPD Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan	45.910.762.733,00	44.794.571.666,55	97,57	40.852.979.406,23
2	Dinas Kesehatan	89.631.358.087,00	70.163.461.915,33	78,28	148.575.823.944,24
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	192.693.114.961,00	176.615.268.735,86	91,66	89.569.063.180,42
4	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	106.394.586.588,00	102.542.419.978,03	96,38	112.716.779.497,97
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.564.325,00	2.564.000,00	99,99	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	379.977.858,00	255.197.283,00	67,16	605.266.350,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	-	415.259.000,00
8	Dinas Sosial	174.601.576,00	164.553.000,00	94,24	329.303.999,00
9	Dinas Tenaga Kerja	865.495.296,00	811.744.044,07	93,79	165.724.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	11.117.296.424,00	6.895.053.262,89	62,02	20.492.250.735,89
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	260.116.900,00	228.125.000,00	87,70	1.190.576.100,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	67.622.850,00	56.275.000,00	83,22	14.925.000,00
13	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.995.282.400,00	1.911.420.000,00	95,80	371.104.483,08
14	Dinas Perhubungan	3.347.477.557,00	2.206.942.920,00	65,93	5.650.931.047,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.406.372.355,00	4.601.807.000,00	85,12	2.534.470.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	737.692.975,00	0,00	0,00	113.153.100,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93.073.515,00	67.556.087,15	72,58	31.274.400,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	401.683.494,00	399.191.960,00	99,38	334.087.250,00
19	Dinas Perikanan	2.352.177.908,00	751.006.585,95	31,93	15.285.000,00
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	290.678.325,00	213.343.590,96	73,40	144.000.870,00
21	Dinas Pertanian	2.640.668.525,00	727.350.000,00	27,54	106.970.000,00
22	Sekretariat Daerah	2.322.887.547,00	2.049.670.646,00	88,24	2.851.196.610,00
23	Sekretariat DPRD	2.390.735.842,00	1.524.197.950,00	63,75	141.964.200,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	141.761.875,00	137.550.000,00	97,03	73.220.000,00
25	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	639.548.325,00	566.526.322,00	88,58	867.476.077,00
26	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	697.219.915,00	575.959.000,00	82,61	149.080.000,00
27	Inspektorat	5.159.038.190,00	322.211.000,00	6,25	461.055.100,00
28	Kecamatan Gresik	3.073.446.091,00	2.637.779.293,00	85,82	1.073.025.594,72
29	Kecamatan Kebomas	2.952.088.095,00	2.673.618.533,60	90,57	1.267.130.300,80
30	Kecamatan Manyar	0,00	0,00	-	0,00
31	Kecamatan Cerme	80.897.400,00	29.341.800,00	36,27	0,00
32	Kecamatan Benjeng	60.343.164,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Balongpanggang	19.237.500,00	19.225.000,00	99,94	22.666.000,00
34	Kecamatan Duduksampeyan	23.917.450,00	22.830.000,00	95,45	0,00
35	Kecamatan Driyorejo	26.260.875,00	25.850.000,00	98,44	8.264.000,00
36	Kecamatan Wringinanom	27.868.400,00	27.729.000,00	99,50	0,00
37	Kecamatan Kedamean	14.241.825,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Menganti	45.662.400,00	34.500.000,00	75,55	3.382.000,00
39	Kecamatan Sidayu	6.613.650,00	6.613.000,00	99,99	19.000.000,00
40	Kecamatan Ujungpangkah	26.031.375,00	26.025.000,00	99,98	0,00
41	Kecamatan Panceng	76.667.175,00	76.559.200,00	99,86	27.204.000,00
42	Kecamatan Bungah	109.214.625,00	108.342.750,00	99,20	8.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
43	Kecamatan Dukun	24.840.000,00	24.840.000,00	100,00	10.247.000,00
44	Kecamatan Sangkapura	82.343.628,00	14.704.055,00	17,86	21.890.000,00
45	Kecamatan Tambak	57.428.633,00	55.897.999,00	97,33	0,00
46	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	183.426.433,00	94.125.000,00	51,31	105.950.000,00
Jumlah		483.004.325.065,00	424.461.947.578,39	87,88	431.340.278.246,35

Jumlah Realisasi Belanja Modal sebesar Rp424.461.947.578,39 didalamnya termasuk konversi realisasi Belanja Modal BOS dan BOSP Dinas Pendidikan serta Belanja Modal BLUD Dinas Kesehatan dan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak melalui Kas Daerah. Konversi Realisasi Belanja Modal BOS, BOSP maupun BLUD Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BOS, BOSP dan BLUD Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BOS	20.080.613.361,00	20.057.366.422,00	99,88	20.421.372.783,00
1	Belanja Peralatan Mesin	11.723.291.006,00	11.702.603.992,00	99,82	9.929.344.142,00
2	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.357.322.355,00	8.354.762.430,00	99,97	10.492.028.641,00
	BOSP	100.279.700,00	100.279.700,00	100,00	0,00
1	Belanja Peralatan Mesin	39.367.000,00	39.367.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Aset Tetap Lainnya	60.912.700,00	60.912.700,00	100,00	0,00
	BLUD RSUD dan Puskesmas	28.203.766.498,00	18.395.755.154,58		68.437.984.494,78
1	Belanja Peralatan Mesin	6.816.766.498,00	4.382.067.911,00	64,28	5.218.664.081,00
2	Gedung dan Bangunan	21.387.000.000,00	14.013.687.243,58	65,52	63.219.320.413,78
	BLUD Pengolahan Limbah Cair Domestik (PLCD)	62.558.650,00	45.050.000,00		0,00
1	Belanja Peralatan Mesin	62.558.650,00	45.050.000,00	72,01	0,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
9.517.500.000,00	1.727.306.005,00	11.021.176.466,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp1.727.306.005,00 atau 18,15% dari anggaran sebesar Rp9.517.500.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023 sebesar Rp1.727.306.005,00 dan Rp11.021.176.466,00 merupakan realisasi pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 2024 yang didalamnya termasuk biaya atribusi dan pengurusan sertifikat.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
108.896.637.327,00	86.126.274.741,00	123.664.589.654,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 sebesar Rp86.126.274.741,00 atau 79,09% dari anggaran sebesar Rp108.896.637.327,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 dan 2023 sebesar Rp86.126.274.741,00 dan Rp123.664.589.654,00 merupakan pengadaan belanja peralatan dan mesin selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Alat besar darat	2.794.700.000,00	1.799.910.000,00	64,40	3.265.559.000,00
2	Alat bantu	4.766.013.000,00	4.412.765.000,00	92,59	1.770.212.000,00
3	Alat angkutan darat bermotor	11.761.123.769,00	7.879.044.000,00	66,99	4.205.802.000,00
4	Alat angkutan darat tak bermotor	134.690.000,00	127.332.010,00	94,54	1.050.000.000,00
5	Alat angkut apung tak bermotor	170.242.337,00	0,00	0,00	0,00
6	Alat bengkel bermesin	506.674.403,00	428.128.200,00	84,50	89.443.782,00
7	Alat bengkel tak bermesin	24.241.500,00	23.163.000,00	95,55	1.948.000,00
8	Alat ukur	0,00	0,00	-	227.044.000,00
9	Alat pengolahan	1.870.842.647,00	224.908.406,00	12,02	8.478.247.200,00
10	Alat kantor	9.231.825.557,00	8.184.503.994,00	88,66	5.364.195.846,00
11	Alat rumah tangga	9.829.538.441,00	8.216.945.802,00	83,59	6.346.089.902,00
12	Meja dan Kursi Kerja	55.235.800,00	48.140.000,00	87,15	39.208.370,00
13	Alat studio	2.595.030.728,00	2.427.671.950,00	93,55	983.525.000,00
14	Alat komunikasi	281.563.000,00	160.809.000,00	57,11	131.086.900,00
15	Alat komunikasi navigasi	277.033.500,00	233.950.000,00	84,45	0,00
16	Alat kedokteran	38.200.320.858,00	29.134.122.564,00	76,27	78.293.532.579,00
17	alat Kesehatan umum	12.562.000,00	11.091.800,00	88,30	1.180.485,00
18	Unit alat laboratorium	2.459.746.075,00	2.319.633.774,00	94,30	543.394.000,00
19	Alat peraga/praktek sekolah	1.722.675.300,00	1.711.792.627,00	99,37	320.503.180,00
21	Alat proteksi radiasi	0,00	0,00	-	0,00
22	Alat lab lingkungan hidup	353.500.000,00	351.367.500,00	99,40	8.433.000,00
23	Komputer Unit	13.538.464.081,00	10.868.886.037,00	80,28	7.358.513.919,00
24	Peralatan Komputer	3.873.460.657,00	3.289.666.667,00	84,93	3.318.626.826,00
25	Alat pengolahan dan pemurnian	3.000.000.000,00	2.996.000.000,00	99,87	0,00
26	Alat pelindung	0,00	0,00	-	2.886.000,00
27	Alat SAR	0,00	0,00	-	21.671.640,00
28	Alat peraga pelatihan dan percontohan	107.189.000,00	106.889.030,00	99,72	12.500.000,00
29	Pengadaan unit peralatan proses/produksi	0,00	0,00	-	965.100,00
30	Rambu - rambu lalu lintas darat	1.106.773.714,00	948.465.420,00	85,70	1.614.790.000,00
31	Rambu - rambu lalu lintas laut	0,00	0,00	-	0,00
32	Alat olahraga	223.190.960,00	221.087.960,00	99,06	215.230.925,00
	Jumlah	108.896.637.327,00	86.126.274.741,00	79,09	123.664.589.654,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 per OPD sebagai berikut:

Tabel 66 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD
Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan	15.147.292.578,00	15.053.757.992,00	99,38	11.954.807.642,00
2	Dinas Kesehatan	61.070.228.087,00	50.347.957.927,00	82,44	84.352.546.671,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.029.497.275,00	793.445.784,00	77,07	2.323.741.520,00
4	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	541.509.925,00	520.802.478,00	96,18	1.052.604.620,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.564.325,00	2.564.000,00	99,99	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	354.690.425,00	230.099.850,00	64,87	605.266.350,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	-	415.259.000,00
8	Dinas Sosial	174.601.576,00	164.553.000,00	94,24	329.303.999,00
9	Dinas Tenaga Kerja	607.679.096,00	557.807.000,00	91,79	147.520.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	6.226.831.271,00	3.804.116.656,00	61,09	13.387.924.500,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	260.116.900,00	228.125.000,00	87,70	1.190.576.100,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	67.622.850,00	56.275.000,00	83,22	14.925.000,00
13	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.966.282.400,00	1.911.420.000,00	97,21	188.313.440,00
14	Dinas Perhubungan	1.583.932.533,00	1.127.556.420,00	71,19	2.173.844.682,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.082.097.355,00	3.289.807.000,00	80,59	94.470.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	7.692.975,00	0,00	0,00	14.130.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.614.515,00	40.253.020,00	61,35	3.048.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	391.835.994,00	389.591.960,00	99,43	156.931.000,00
19	Dinas Perikanan	599.677.908,00	173.750.000,00	28,97	15.285.000,00
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	76.334.325,00	0,00	0,00	117.417.820,00
21	Dinas Pertanian	917.532.525,00	727.350.000,00	79,27	106.970.000,00
22	Sekretariat Daerah	1.911.844.818,00	1.645.707.000,00	86,08	2.491.270.290,00
23	Sekretariat DPRD	2.390.735.842,00	1.524.197.950,00	63,75	128.400.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	141.761.875,00	137.550.000,00	97,03	73.220.000,00
25	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	535.814.325,00	482.476.900,00	90,05	846.431.920,00
26	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	511.117.915,00	390.589.000,00	76,42	149.080.000,00
27	Inspektorat	5.159.038.190,00	322.211.000,00	6,25	461.055.100,00
28	Kecamatan Gresik	1.558.208.929,00	1.203.293.000,00	77,22	370.213.000,00
29	Kecamatan Kebomas	730.153.495,00	514.263.000,00	70,43	273.131.000,00
30	Kecamatan Manyar	0,00	0,00	-	0,00
31	Kecamatan Cerme	80.897.400,00	29.341.800,00	36,27	0,00
32	Kecamatan Benjeng	60.343.164,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Balongpanggang	19.237.500,00	19.225.000,00	99,94	22.666.000,00
34	Kecamatan Duduksameyan	23.917.450,00	22.830.000,00	95,45	0,00
35	Kecamatan Driyorejo	26.260.875,00	25.850.000,00	98,44	8.264.000,00
36	Kecamatan Wringinanom	27.868.400,00	27.729.000,00	99,50	0,00
37	Kecamatan Kedamean	14.241.825,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
38	Kecamatan Menganti	45.662.400,00	34.500.000,00	75,55	3.382.000,00
39	Kecamatan Sidayu	6.613.650,00	6.613.000,00	99,99	19.000.000,00
40	Kecamatan Ujungpangkah	26.031.375,00	26.025.000,00	99,98	0,00
41	Kecamatan Panceng	76.667.175,00	76.559.200,00	99,86	27.204.000,00
42	Kecamatan Bungah	53.834.625,00	53.513.750,00	99,40	8.300.000,00
43	Kecamatan Dukun	24.840.000,00	24.840.000,00	100,00	10.247.000,00
44	Kecamatan Sangkapura	82.343.628,00	14.704.055,00	17,86	21.890.000,00
45	Kecamatan Tambak	57.428.633,00	55.897.999,00	97,33	0,00
46	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	158.139.000,00	69.125.000,00	43,71	105.950.000,00
Jumlah		108.896.637.327,00	86.126.274.741,00	79,09	123.664.589.654,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan 30,35% atau sebesar Rp37.538.314.913,00. Penurunan terbesar pada Belanja Modal Alat Kedokteran pada Dinas Kesehatan. Disamping itu ada kenaikan Belanja Modal diantaranya Alat Bantu, Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah, Komputer Unit serta Alat Pengolahan dan Pemurnian. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sudah termasuk konversi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dan BOSP pada Dinas Pendidikan serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Dinas Kesehatan dan Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
134.290.136.174,00	118.169.885.080,81	149.832.834.297,05

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp118.169.885.080,81 atau 88% dari anggaran sebesar Rp134.290.136.174,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp118.169.885.080,81 dan Rp149.832.834.297,05 merupakan pengadaan gedung dan bangunan selama tahun 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bangunan gedung tempat kerja	132.953.847.443,00	116.833.908.009,52	87,88	147.545.304.515,32
2	Bangunan gedung tmpat tinggal	37.634.700,00	37.634.475,00	100,00	933.267.299,84
3	Candi/Tugu Peringatan/prasasti	0,00	0,00	-	0,00
4	Tugu/tanda batas	1.298.654.031,00	1.298.342.596,29	99,98	1.354.262.481,89
	Jumlah	134.290.136.174,00	118.169.885.080,81	88,00	149.832.834.297,05

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 per OPD sebagai berikut:

Tabel 68 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan	22.230.622.100,00	21.210.525.544,55	95,41	18.405.996.923,23
2	Dinas Kesehatan	27.811.130.000,00	19.815.503.988,33	71,25	64.223.277.273,24
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.927.172.631,00	1.304.896.027,69	67,71	0,00
4	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	71.105.125.763,00	69.271.627.835,82	97,42	61.903.331.583,50
7	Dinas Tenaga Kerja	257.816.200,00	253.937.044,07	98,50	18.204.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	4.279.108.908,00	2.483.580.361,89	58,04	633.437.487,00
10	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29.000.000,00	0,00	0,00	182.791.043,08
11	Dinas Perhubungan	1.763.545.024,00	1.079.386.500,00	61,21	3.477.086.365,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan perdagangan	730.000.000,00	0,00	0,00	99.023.100,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.459.000,00	27.303.067,15	99,43	28.226.400,00
14	Dinas Perikanan	1.690.000.000,00	515.099.906,75	30,48	0,00
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	214.344.000,00	213.343.590,96	99,53	20.929.050,00
16	Dinas Pertanian	199.136.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	380.304.646,00	378.863.646,00	99,62	354.991.320,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	103.734.000,00	84.049.422,00	81,02	21.044.157,00
19	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	186.102.000,00	185.370.000,00	99,61	0,00
20	Kecamatan Gresik	956.171.902,00	949.739.622,00	99,33	397.555.935,00
21	Kecamatan Kebomas	343.984.000,00	341.829.523,60	99,37	66.939.660,00
22	Kecamatan Bungah	55.380.000,00	54.829.000,00	99,01	0,00
	Jumlah	134.290.136.174,00	118.169.885.080,81	88,00	149.832.834.297,05

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan 21,13% atau sebesar Rp31.662.949.216,24. Penurunan realisasi terbesar terjadi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Dinas Kesehatan disusul kemudian oleh Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk kenaikan



realisasi terjadi pada OPD Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 didalamnya termasuk realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD Dinas Kesehatan yang tidak melalui Kas Daerah sebesar Rp14.013.687.243,58.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
220.349.338.060,00	208.508.996.188,58	133.679.243.538,30

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp208.508.996.188,58 atau 94,63% dari anggaran sebesar Rp220.349.338.060,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp208.508.996.188,58 dan Rp133.679.243.538,30 merupakan pengadaan jalan, jaringan dan irigasi selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Tahun 2024 dan Tahun 2023**

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Jalan	153.531.373.799,00	146.424.942.641,68	95,37	68.178.071.376,73
2	Jembatan	15.319.653.431,00	14.988.507.513,21	97,84	10.976.305.891,08
3	Bangunan air irigasi	16.878.027.899,00	14.978.590.886,10	88,75	2.058.735.092,86
4	Bangunan air kotor	8.407.606.494,00	7.880.386.159,97	93,73	4.223.678.135,72
5	Instalasi air bersih	19.134.644.600,00	18.150.597.213,83	94,86	32.287.124.420,47
6	Instalasi air kotor	324.000.000,00	320.000.000,00	98,77	0,00
7	Instalasi pengolahan sampah	594.505.745,00	467.818.125,00	78,69	6.470.888.748,89
8	Jaringan air minum	5.409.526.092,00	5.298.153.648,79	97,94	9.484.439.872,55
9	Jaringan listrik	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	220.349.338.060,00	208.508.996.188,58	94,63	133.679.243.538,30

Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 per OPD sebagai berikut:

**Tabel 70 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
per OPD Tahun 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Kesehatan	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	180.218.945.055,00	172.789.620.919,17	95,88	76.224.145.194,42
3	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.747.950.900,00	32.749.989.664,21	94,25	49.760.843.294,47
4	Dinas Lingkungan Hidup	611.356.245,00	607.356.245,00	99,35	6.470.888.748,89



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5	Dinas Perikanan	62.500.000,00	62.156.679,20	99,45	0,00
6	Dinas Pertanian	1.524.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kecamatan Gresik	559.065.260,00	484.746.671,00	86,71	305.256.659,72
8	Kecamatan Kebomas	1.875.520.600,00	1.815.126.010,00	96,78	918.109.640,80
Jumlah		220.349.338.060,00	208.508.996.188,58	94,63	133.679.243.538,30

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 secara keseluruhan mengalami kenaikan 55,98% atau sebesar Rp74.829.752.650,28, dimana kenaikan realisasi yang cukup tinggi ditunjukkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
8.626.438.504,00	8.617.485.563,00	10.702.434.291,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp8.617.485.563,00 atau 99,9% dari anggaran sebesar Rp8.626.438.504,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.617.485.563,00 dan Rp10.702.434.291,00 merupakan pengadaan aset tetap lainnya selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya
Tahun 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Buku/bahan pustaka	8.548.146.205,00	8.539.888.130,00	99,90	10.693.484.291,00
2	Barang bercorak kesenian	78.292.299,00	77.597.433,00	99,11	8.950.000,00
3	Tanaman	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah		8.626.438.504,00	8.617.485.563,00	99,90	10.702.434.291,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan komparasinya Tahun 2023 per OPD sebagai berikut:

**Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya per
OPD Tahun 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan	8.532.848.055,00	8.530.288.130,00	99,97	10.492.174.841,00
2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25.287.433,00	25.097.433,00	99,25	0,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.847.500,00	9.600.000,00	97,49	177.156.250,00
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	-	5.654.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5	Sekretariat Daerah	30.738.083,00	25.100.000,00	81,66	4.935.000,00
6	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	-	13.564.200,00
7	Kecamatan Kebomas	2.430.000,00	2.400.000,00	98,77	8.950.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.287.433,00	25.000.000,00	98,86	0,00
Jumlah		8.626.438.504,00	8.617.485.563,00	99,90	10.702.434.291,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 didalamnya termasuk konversi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dan BOSP pada Dinas Pendidikan yang tidak melalui Kas Daerah, masing-masing sebesar Rp8.354.762.430,00 dan Rp60.912.700,00.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset lainnya

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
1.324.275.000,00	1.312.000.000,00	2.440.000.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp1.312.000.000,00 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp1.324.275.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.312.000.000,00 dan Rp2.440.000.000,00 merupakan pengadaan aset tidak berwujud selama tahun 2024 dan 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
6.221.807.986,00	2.026.255.613,38	1.183.127.722,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp2.026.255.613,38 atau 32,57% dari anggaran sebesar Rp6.221.807.986,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.026.255.613,38 dan Rp1.183.127.722,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 dan 2023

OPD	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
	Alokasi Usulan (Rp)	Realisasi (Rp)	Penggunaan	
BPPKAD	1.921.734.642,38	1.921.734.642,38	Pengerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rehab ruang kelas SD	0,00
	1.200.000,00	1.200.000,00	Pengembalian kelebihan penyetoran TGR	0,00
	103.320.971,00	103.320.971,00	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023	895.968.522,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

OPD	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
	Alokasi Usulan (Rp)	Realisasi (Rp)	Penggunaan	
	-	-	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan guna penanganan perbaikan/pembangunan rumah terdampak banjir, longsor, pergerakan tanah dan ROB di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak	287.159.200,00
	4.195.552.372,62	-	Lain-lain	0,00
JUMLAH	6.221.807.986,00	2.026.255.613,38		1.183.127.722,00

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
788.231.527.197,00	775.725.077.850,00	783.635.386.391,00

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya dan kejadiannya diklasifikasikan antara lain :

- Transfer pemerintah pusat dana perimbangan.
- Transfer pemerintah pusat lainnya.
- Transfer pemerintah provinsi.
- Transfer/bagi hasil ke desa.
- Transfer/bantuan keuangan.

Realisasi Transfer TA 2024 sebesar Rp775.725.077.850,00 atau 98,41% dari anggaran sebesar Rp788.231.527.197,00. Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp775.725.077.850,00 dan Rp783.635.386.391,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Alokasi dan Realisasi Transfer Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	103.870.000.000,00	99.090.915.050,00	95,40	84.525.792.400,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	23.598.390.000,00	16.322.812.800,00	69,17	12.026.574.200,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah	660.763.137.197,00	660.311.350.000,00	99,93	687.083.019.791,00
	Jumlah	788.231.527.197,00	775.725.077.850,00	98,41	783.635.386.391,00



5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
<u>103.870.000.000,00</u>	<u>99.090.915.050,00</u>	<u>84.525.792.400,00</u>

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp99.090.915.050,00 atau 95,40% dari anggaran sebesar Rp103.870.000.000,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp99.090.915.050,00 dan Rp84.525.792.400,00 merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan desa. Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2024 tidak sesuai dengan SK dikarenakan adanya pemotongan atas kelebihan bayar tahun sebelumnya.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan 17,23% atau sebesar Rp14.565.122.650,00.

5.1.2.4.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
<u>23.598.390.000,00</u>	<u>16.322.812.800,00</u>	<u>12.026.574.200,00</u>

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp16.322.812.800,00 atau 69,17% dari anggaran sebesar Rp23.598.390.000,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.322.812.800,00 dan Rp12.026.574.200,00 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa. Anggaran Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024 tidak terserap secara maksimal dikarenakan terdapat kelebihan salur pada tahun sebelumnya sehingga kelebihan tersebut diperhitungkan pada realisasi/penyaluran tahun 2024.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan 35,72% atau sebesar Rp4.296.238.600,00.



5.1.2.4.3 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
660.763.137.197,00	660.311.350.000,00	687.083.019.791,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp660.311.350.000,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp660.763.137.197,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp660.311.350.000,00 dan Rp687.083.019.791,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Anggaran dan Realisasi Transfer bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
	- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	166.538.962.197,00	166.087.175.000,00	99,73	195.577.200.000,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	321.507.175.000,00	321.507.175.000,00	100,00	318.788.865.000,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	172.717.000.000,00	172.717.000.000,00	100,00	172.716.954.791,00
	Jumlah	660.763.137.197,00	660.311.350.000,00	99,93	687.083.019.791,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan 3,90% atau sebesar Rp26.771.669.791,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 lebih lanjut pada **Lampiran 3**.

5.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
(58.345.000.730,00)	32.844.037.996,53	(2.246.276.724,87)

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit LRA Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp32.844.037.996,53 dan (Rp2.246.276.724,87). Surplus LRA Tahun 2024 terjadi dikarenakan sebagian besar target pendapatan terpenuhi sementara penyerapan anggaran belanja masih belum mencapai maksimal.



5.1.4 PEMBIAYAAN

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
58.345.000.730,00	56.227.858.730,47	79.048.460.455,34

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dalam sistem penganggaran, pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Dalam Pelaksanaan APBD TA. 2024, Realisasi Pembiayaan (Netto) adalah sebesar Rp56.227.858.730,47 atau 96,37% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp58.345.000.730,00.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
78.495.000.730,00	76.377.858.730,47	79.048.460.455,34

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp76.377.858.730,47 atau 97,30% dari anggaran sebesar Rp78.495.000.730,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp76.377.858.730,47 dan Rp79.048.460.455,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	SiLPA Tahun Lalu	78.495.000.730,00	76.370.858.730,47	97,29	59.002.535.455,34
2	Pinjaman Daerah - Lembaga keuangan Bank	0,00	0,00	-	20.000.000.000,00
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	7.000.000,00	-	45.925.000,00
	Jumlah	78.495.000.730,00	76.377.858.730,47	97,30	79.048.460.455,34

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 mengalami penurunan 3,38% atau sebesar Rp2.670.601.724,87 dari Tahun 2023.



a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
<u>78.495.000.730,00</u>	<u>76.370.858.730,47</u>	<u>59.002.535.455,34</u>

Realisasi SILPA tahun sebelumnya TA 2024 sebesar Rp76.370.858.730,47 atau 97,29% dari anggarannya. Realisasi SILPA Tahun TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp76.370.858.730,47 dan Rp59.002.535.455,34 merupakan saldo SILPA tahun sebelumnya.

Realisasi SILPA tahun sebelumnya TA 2024 sebesar Rp76.370.858.730,47 jika dibandingkan dengan SILPA LRA *audited* Tahun 2023 sebesar Rp76.802.183.730,47, maka terdapat selisih sebesar Rp431.325.000,00. Selisih tersebut merupakan koreksi saldo awal Dana BOP PAUD Swasta sebesar Rp106.325.000,00 dan koreksi saldo awal dana BOS Kinerja SMP sebesar Rp80.000.000,00, koreksi tersebut merupakan pengembalian BOP PAUD Swasta dan saldo BOS Kinerja SMP tahun 2022 yang disetorkan kembali ke RKUN melalui RKUD pada tahun 2023 dan Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Swasta Tahun 2023 yang bersumber dari Dana BOS Kinerja SMP Swasta yang tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dikarenakan anggarannya tidak cukup tersedia.

b. Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000.000.000,00</u>

Realisasi Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp20.000.000.000,00 merupakan realisasi Pinjaman Daerah oleh BLUD RSUD Ibnu Sina Gresik kepada PT. Bank Jatim Cabang Gresik.

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
<u>0,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>45.925.000,00</u>

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2024 sebesar Rp7.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.000.000,00 dan Rp45.925.000,00 merupakan realisasi Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat dari PD. BPR Bank Gresik.



5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2024
Rp	Rp	Rp
<u>20.150.000.000,00</u>	<u>20.150.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp20.150.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp20.150.000.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20.150.000.000,00 merupakan nilai penyertaan modal kepada PT Gresik Migas sebesar Rp150.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo RSUD Ibnu Sina kepada Lembaga Keuangan – Bank sebesar Rp20.000.000.000,00.

5.1.5 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN/SiLPA

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
<u>0,00</u>	<u>89.071.896.727,00</u>	<u>76.802.183.730,47</u>

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Realisasi SiLPA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp89.071.896.727,00 dan Rp76.802.183.730,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Rincian SiLPA Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	81.791.696.381,85	60.404.790.019,78
2	Kas di bendahara pengeluaran	0,00	3.591.652,00
3	Kas di bendahara penerimaan	0,00	200.000,00
4	Kas di BLUD RSUD Ibnu Sina	206.421.546,90	9.768.721.146,22
5	Kas di BLUD RSUD Umar Mas'ud	376.690.337,49	490.678.383,39
7	Kas di BLUD Puskesmas	5.318.607.494,88	4.734.791.443,25
8	Kas di BLUD PLCD	68.567.601,05	0,00
9	Kas di Dana BOK	1.277.352.222,00	844.127.122,00
10	Kas di Dana BOS	32.561.142,83	555.283.963,83
	Jumlah	89.071.896.727,00	76.802.183.730,47



5.2 KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Saldo Anggaran Lebih	89.071.896.727,00	76.370.858.730,47

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp89.071.896.727,00 dan Rp76.370.858.730,47 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 78 Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	76.370.858.730,47	59.002.535.455,34
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(76.370.858.730,47)	(59.002.535.455,34)
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Sebelumnya	89.071.896.727,00	76.802.183.730,47
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(186.325.000,00)
5	Lain-lain	0,00	(245.000.000,00)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	89.071.896.727,00	76.370.858.730,47

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
SAL Awal	76.370.858.730,47	59.002.535.455,34

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp76.370.858.730,47 merupakan SiLPA Tahun 2023, dari Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp76.370.858.730,47.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp76.370.858.730,47 merupakan nilai anggaran penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit pada tahun anggaran berjalan.



5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA tahun berjalan sebesar Rp89.071.896.727,00 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 79 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Uraian		31 Desember 2024	31 Desember 2023
a)	Pendapatan LRA	3.730.420.012.925,76	3.416.390.957.965,09
b)	Belanja dan Transfer LRA	3.697.575.974.929,23	3.418.637.234.689,96
c)	Penerimaan Pembiayaan	76.377.858.730,47	79.048.460.455,34
d)	Pengeluaran Pembiayaan	20.150.000.000,00	0,00
e)	SiLPA (a-b) + (c-d)	89.071.896.727,00	76.802.183.730,47

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Sedangkan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada tahun 2023 sebesar Rp186.325.000,00 terdiri dari koreksi saldo awal Dana BOP PAUD Swasta sebesar Rp106.325.000,00 dan koreksi saldo awal dana BOS Kinerja SMP sebesar Rp80.000.000,00, koreksi tersebut merupakan pengembalian BOP PAUD Swasta dan saldo BOS Kinerja SMP tahun 2022 yang disetorkan kembali ke RKUN melalui RKUD pada tahun 2023.

5.2.5 Lain-lain

Lain-lain pada tahun 2024 sebesar Rp0,00. Sedangkan lain-lain pada tahun 2023 sebesar (Rp245.000.000,00) merupakan Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Swasta yang bersumber dari Dana BOS Kinerja SMP Swasta yang tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan anggarannya tidak cukup tersedia.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp89.071.896.727,00 merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu dan SiLPA tahun berjalan.



5.3 KOMPONEN NERACA

5.3.1 ASET

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
ASET	7.244.064.023.051,83	7.010.685.151.285,10

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diakui :

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

5.3.1.1 ASET LANCAR

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Aset Lancar	303.288.760.006,45	290.570.208.120,02

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kas di Kas Daerah	81.791.696.382,11	60.404.790.020,04

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.



Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggung jawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp81.791.696.382,11 dan Rp60.404.790.020,04 merupakan saldo kas yang tersimpan di Bank, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo rekening giro Rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan di Bank Jatim Nomor rekening 0271000014 per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.932.542.174,11, didalamnya terdiri atas :

1. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp81.791.696.382,11, saldo tersebut merupakan sisa dana spesifik dengan rincian sebagai berikut:

Sisa dana spesifik Tahun 2024 sebesar Rp35.669.931.800,00, diperoleh dari perhitungan sisa dana spesifik TA 2023 sebesar Rp63.514.414.321,99 dikurangi koreksi saldo awal sebesar Rp27.797.521.137,99 ditambah dengan penyaluran dana spesifik TA 2024 sebesar Rp470.076.960.123,00, maka total dana yang tersedia sebesar Rp505.793.853.307,00. Dari total dana tersebut telah digunakan untuk membiayai belanja sesuai petunjuk teknis sebesar Rp470.123.921.507,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Tabel Sisa Dana Spesifik di Rekening Kas Umum Daerah

Uraian	Sisa Tahun Lalu	Koreksi Saldo Awal	Penyaluran	Penyerapan Belanja	Sisa s/d Tahun Ini
DAK Fisik	28.224.442.188,24	(27.694.200.166,24)	98.720.516.184,00	98.536.782.725,00	713.975.481,00
DAK Non Fisik	8.508.231.459,00		162.024.958.041,00	149.989.351.781,00	20.543.837.719,00
Dana Cukai Hasil Tembakau	5.634.598.094,75	(0,75)	29.111.448.000,00	30.966.520.294,00	3.779.525.800,00
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur	2.141.454.136,00	(103.320.971,00)	16.180.867.000,00	15.436.322.351,00	2.782.677.814,00
DAU yang ditentukan penggunaannya	19.005.688.444,00	0,00	106.691.806.898,00	120.100.465.596,00	5.597.029.746,00
Insentif Fiskal	0,00	0,00	36.385.778.000,00	34.132.892.760,00	2.252.885.240,00
DBH Tambahan TDF	0,00	0,00	20.961.586.000,00	20.961.586.000,00	0,00
Jumlah	63.514.414.321,99	(27.797.521.137,99)	470.076.960.123,00	470.123.921.507,00	35.669.931.800,00

2. Uang titipan sebesar Rp3.140.845.792,00, yang dicatat pada kas yang dibatasi penggunaannya.



5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	200.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp200.000,00.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kas di BLUD	5.970.286.980,32	14.994.190.972,86

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.970.286.980,32 dan Rp14.994.190.972,86 merupakan saldo kas yang dikelola BLUD RSUD Ibnu Sina, BLUD RSUD Umar Mas'ud, 32 BLUD Puskesmas dan BLUD UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik (PLCD) Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas CKPKP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81 Kas di BLUD

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
BLUD RSUD Ibnu Sina :	206.421.546,90	9.768.721.146,22
- Saldo rekening koran Bank Jatim	206.421.568,48	9.768.721.167,80
- Pembulatan Pengembalian uang panjar dari PPK (tahun 2021)	(21,58)	(21,58)
BLUD RSUD Umar Mas'ud	376.690.337,49	490.678.383,39
BLUD Puskesmas	5.318.607.494,88	4.734.791.443,25
BLUD UPT PLCD Dinas CKPKP	68.567.601,05	0,00
Jumlah	5.970.286.980,32	14.994.190.972,86



Tabel 82 Kas di BLUD RSUD Ibnu Sina

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	9.768.721.146,22
Pendapatan BLUD RSUD Ibnu Sina	Rp	198.770.087.736,03
Penerimaan Pembiayaan BLUD RSUD Ibnu Sina	Rp	
Pengeluaran		
a) Belanja Pegawai	Rp	(52.100.477.841,51)
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	(120.942.382.458,44)
c) Belanja Modal	Rp	(14.325.406.664,80)
d) Pembiayaan (pembayaran pokok utang dan bunga)	Rp	(20.964.120.370,60)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	206.421.546,90

Saldo Kas di BLUD RSUD Ibnu Sina pada Neraca dicatat sebesar Rp206.421.546,90, sedangkan saldo pada rekening koran Bank Jatim sebesar Rp206.421.568,58 sehingga terdapat selisih sebesar Rp21,58, selisih tersebut merupakan pembulatan atas pengembalian uang panjar dari PPTK pada tahun anggaran 2021.

Tabel 83 Kas di BLUD RSUD Umar Mas'ud

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	490.678.383,39
Pendapatan BLUD RSUD Umar Mas'ud	Rp	6.223.423.296,68
Pengeluaran		
a) Belanja Pegawai	Rp	(1.484.122.763,14)
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	(4.641.840.579,44)
c) Belanja Modal	Rp	(211.448.000,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	376.690.337,49

Tabel 84 Kas di BLUD Puskesmas

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	4.734.791.443,25
Pendapatan BLUD Puskesmas	Rp	81.392.681.805,90
Pengeluaran		
a) Belanja Pegawai	Rp	(39.341.788.414,65)
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	(37.608.176.849,84)
c) Belanja Modal	Rp	(3.858.900.489,78)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	5.318.607.494,88



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 85 Kas pada Rekening BLUD per Puskesmas

No	Puskesmas	No. Rek Giro	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir		
						Rek Giro	Tunai	Total
1	Alun-alun	0271022018	424.154.246,12	3.284.838.358,51	3.283.909.548,00	425.083.056,63	0,00	425.083.056,63
2	Kebomas	0271022026	293.135.303,60	2.677.781.244,55	2.763.055.226,53	207.861.321,62	0,00	207.861.321,62
3	Manyar	0271022042	137.747.472,36	2.186.973.357,85	2.048.929.662,88	275.791.167,33	0,00	275.791.167,33
4	Sukomulyo	0271022069	31.290.495,15	2.540.140.941,75	2.523.324.213,00	48.107.223,90	0,00	48.107.223,90
5	Duduksampeyan	0271022077	233.140.445,86	2.938.475.065,15	2.986.811.163,00	184.804.348,01	0,00	184.804.348,01
6	Cerme	0881000989	817.416.978,92	4.153.175.366,94	4.458.058.512,00	512.533.833,86	0,00	512.533.833,86
7	Balongpanggang	0271022093	170.801.117,89	2.620.941.777,10	2.495.471.279,00	296.271.615,99	0,00	296.271.615,99
8	Benjeng	0881001012	247.757.166,41	3.035.652.334,91	3.109.297.798,00	174.111.703,32	0,00	174.111.703,32
9	Metatu	0881001021	13.389.350,24	2.005.187.737,21	1.964.514.803,00	54.062.284,45	0,00	54.062.284,45
10	Driyorejo	1031000277	163.427.135,40	3.588.683.160,06	3.532.651.917,00	219.458.378,46	0,00	219.458.378,46
11	Wringinanom	1031000234	105.290.733,16	2.478.579.368,97	2.387.101.018,14	196.769.083,99	0,00	196.769.083,99
12	Kesamben Kulon	1031000251	193.193.918,47	2.039.246.362,49	2.132.530.922,75	99.909.358,21	0,00	99.909.358,21
13	Bungah	0271022085	148.407.567,90	4.015.300.988,03	4.045.271.438,00	118.437.117,93	0,00	118.437.117,93
14	Mentaras	0801000193	247.801.597,92	2.500.117.534,37	2.439.523.285,00	308.395.847,29	0,00	308.395.847,29
15	Sidayu	0801000207	98.890.723,47	3.126.451.037,25	2.955.807.488,96	269.534.271,76	0,00	269.534.271,76
16	Ujungpangkah	0801000215	11.936.115,24	2.964.253.790,48	2.918.502.296,50	57.687.609,22	0,00	57.687.609,22
17	Panceng	0801000223	137.414.246,60	4.505.813.313,48	4.289.300.532,34	353.927.027,74	0,00	353.927.027,74
18	Karangandong	1031000269	91.144.009,39	1.871.726.540,28	1.959.703.294,87	3.167.254,80	0,00	3.167.254,80
19	Kedamean	1031000242	40.817.433,13	2.106.053.788,63	2.092.893.833,68	53.977.388,08	0,00	53.977.388,08
20	Slempit	0271022140	89.834.210,45	1.982.051.049,65	1.874.632.408,00	197.252.852,10	0,00	197.252.852,10
21	Menganti	0271022131	78.672.312,68	4.380.891.117,96	4.129.136.993,12	330.426.437,52	0,00	330.426.437,52
22	Kepatih	0271022107	83.417.035,13	2.089.988.414,95	1.986.667.067,53	186.738.382,55	0,00	186.738.382,55
23	Dadap Kuning	0881000997	42.305.024,85	1.112.458.496,20	1.099.404.179,00	55.359.342,05	0,00	55.359.342,05
24	Dapet	0881001004	128.772.873,14	1.215.805.045,12	1.274.489.590,62	70.088.327,64	0,00	70.088.327,64
25	Gending	0271022034	69.069.376,02	1.570.791.611,47	1.581.091.692,00	58.769.295,49	0,00	58.769.295,49
26	Nelayan	0271022158	110.892.422,97	1.208.937.384,58	1.147.351.149,00	172.478.658,55	0,00	172.478.658,55
27	Industri	0271022123	46.399.814,86	1.414.193.467,68	1.409.151.283,00	51.441.999,54	0,00	51.441.999,54
28	Sembayat	0881002051	25.316.205,96	1.678.976.209,79	1.676.338.830,00	27.953.585,75	0,00	27.953.585,75
29	Dukun	0271022115	72.787.019,09	2.387.072.933,39	2.363.859.050,00	96.000.902,48	0,00	96.000.902,48
30	Sekapuk	0801000185	102.333.989,28	1.341.577.645,97	1.407.135.252,00	36.776.383,25	0,00	36.776.383,25
31	Sangkapura	0361001338	211.848.873,69	4.030.355.366,41	4.122.746.041,25	119.458.198,85	0,00	119.458.198,85
32	Tambak	0361001311	65.986.227,90	2.340.190.994,72	2.350.203.986,10	55.973.236,52	0,00	55.973.236,52
	Jumlah		4.734.791.443,25	81.392.681.805,90	80.808.865.754,27	5.318.607.494,88	0,00	5.318.607.494,88

Sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 *audited* selesai disusun, hasil audit dari Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas, BLUD RSUD Umar Mas'ud dan BLUD RSUD Ibnu Sina belum diterima oleh Dinas Kesehatan, sehingga pada Laporan ini masih menggunakan angka Laporan Keuangan BLUD tahun 2024 *unaudited*.



Tabel 86 Kas di BLUD UPT PLCD Dinas CKPKP

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	0,00
Pendapatan BLUD	Rp	727.323.474,36
Pengeluaran		
a) Belanja Pegawai	Rp	0,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	(613.705.873,31)
c) Belanja Modal	Rp	(45.050.000,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	68.567.601,05

5.3.1.1.5 Kas di Dinas Kesehatan (Dana Kapitasi)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kas Dana Kapitasi	0,00	0,00

Rekening Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.6 Kas BOK Puskesmas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kas BOK Puskesmas	1.277.352.222,00	844.127.122,00

Rekening Kas BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.277.352.222,00 dan Rp844.127.122,00, merupakan saldo kas per 31 Desember 2024 pada Bendahara BOK Puskesmas.

Tabel 87 Kas BOK Puskesmas

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	844.127.122,00
Pendapatan BOK	Rp	15.239.951.878,00
Pengeluaran		
a) Belanja Pegawai	Rp	(1.419.859.019,00)
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	(13.386.867.759,00)
c) Belanja Modal	Rp	
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	1.277.352.222,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 88 Kas pada Rekening Kas BOK per Puskesmas

No	Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir		
					Rek Giro	Tunai	Total
1	Alun-alun	73.441.063,00	439.064.937,00	336.358.280,00	176.147.720,00	0,00	176.147.720,00
2	Kebomas	32.746.724,00	551.585.276,00	499.825.099,00	84.506.901,00	0,00	84.506.901,00
3	Manyar	3.450.808,00	466.435.192,00	346.109.584,00	123.776.416,00	0,00	123.776.416,00
4	Sukomulyo	20.064.827,00	469.561.673,00	452.131.283,00	37.495.217,00	0,00	37.495.217,00
5	Dudusampeyan	25.849.350,00	604.788.650,00	592.395.481,00	38.242.519,00	0,00	38.242.519,00
6	Cerme	19.383.819,00	605.504.181,00	603.639.931,00	21.248.069,00	0,00	21.248.069,00
7	Balongpanggang	6.688.657,00	502.612.343,00	508.618.071,00	682.929,00	0,00	682.929,00
8	Benjeng	28.471.630,00	488.596.370,00	503.464.902,00	13.603.098,00	0,00	13.603.098,00
9	Metatu	25.844.139,00	395.637.861,00	395.219.126,00	26.262.874,00	0,00	26.262.874,00
10	Driyorejo	26.433.430,00	628.278.570,00	579.100.913,00	75.611.087,00	0,00	75.611.087,00
11	Wringinanom	20.943.026,00	566.727.974,00	546.718.706,00	40.952.294,00	0,00	40.952.294,00
12	Kesamben Kulon	41.505.990,00	347.762.010,00	292.965.461,00	96.302.539,00	0,00	96.302.539,00
13	Bungah	8.157.172,00	641.177.328,00	646.791.078,00	2.543.422,00	0,00	2.543.422,00
14	Mentaras	29.161.821,00	456.629.179,00	459.816.904,00	25.974.096,00	0,00	25.974.096,00
15	Sidayu	44.254.318,00	618.612.682,00	586.374.424,00	76.492.576,00	0,00	76.492.576,00
16	Ujungpangkah	23.813.206,00	412.628.794,00	412.712.991,00	23.729.009,00	0,00	23.729.009,00
17	Panceng	32.662.612,00	504.620.388,00	528.500.226,00	8.782.774,00	0,00	8.782.774,00
18	Karangandong	74.782.361,00	411.840.639,00	408.123.082,00	78.499.918,00	0,00	78.499.918,00
19	Kedamean	39.961.907,00	389.135.593,00	409.816.201,00	19.281.299,00	0,00	19.281.299,00
20	Slempit	17.492.750,00	403.116.250,00	396.166.837,00	24.442.163,00	0,00	24.442.163,00
21	Menganti	20.326.303,00	606.747.697,00	598.701.600,00	28.372.400,00	0,00	28.372.400,00
22	Kepatihan	33.319.017,00	441.842.483,00	419.892.500,00	55.269.000,00	0,00	55.269.000,00
23	Dadap Kuning	6.232.813,00	382.996.187,00	350.050.031,00	39.178.969,00	0,00	39.178.969,00
24	Dapet	25.198.278,00	361.198.722,00	353.251.505,00	33.145.495,00	0,00	33.145.495,00
25	Gending	31.810.975,00	486.703.025,00	502.487.000,00	16.027.000,00	0,00	16.027.000,00
26	Nelayan	9.841.664,00	340.525.336,00	331.347.803,00	19.019.197,00	0,00	19.019.197,00
27	Industri	1.000,00	451.194.000,00	430.730.982,00	20.464.018,00	0,00	20.464.018,00
28	Sembayat	15.757.660,00	363.511.840,00	351.919.393,00	27.350.107,00	0,00	27.350.107,00
29	Dukun	6.719.175,00	482.352.325,00	484.020.053,00	5.051.447,00	0,00	5.051.447,00
30	Sekapuk	42.543.220,00	350.876.780,00	366.309.132,00	27.110.868,00	0,00	27.110.868,00
31	Sangkapura	9.666.931,00	641.055.069,00	645.467.699,00	5.254.301,00	0,00	5.254.301,00
32	Tambak	47.600.476,00	426.632.524,00	467.700.500,00	6.532.500,00	0,00	6.532.500,00
	Jumlah	844.127.122,00	15.239.951.878,00	14.806.726.778,00	1.277.352.222,00	0,00	1.277.352.222,00

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOS, BOP PAUD dan Kesetaraan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kas di Bendahara BOS	32.561.142,83	123.958.963,83

Kas di Bendahara BOS, BOP PAUD dan Kesetaraan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.561.142,83 dan Rp123.958.963,83, uang tersebut merupakan saldo Dana BOS (SD dan SMP Negeri), BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.



Tabel 89 Kas di Bendahara BOS

Saldo Awal Dana BOS per 1 Januari 2024	Rp	123.958.963,83
Koreksi saldo awal Dana BOP PAUD	Rp	0,00
Kreksi saldo awal Dana BOS	Rp	0,00
Pendapatan Dana BOS (SD/SMP Negeri)	Rp	97.907.815.823,00
Pendapatan Dana BOS (Swasta)	Rp	35.831.894.199,00
Pendapatan Dana BOP PAUD	Rp	38.706.402.000,00
Pendapatan Dana BOP Kesetaraan	Rp	4.223.550.000,00
Pengeluaran		
Belanja Dana BOS (SD/SMP Negeri)	Rp	(97.999.403.644,00)
Belanja Dana BOS (Swasta)	Rp	(35.831.894.199,00)
Belanja Dana BOP PAUD	Rp	(38.706.402.000,00)
Belanja Dana BOP Kesetaraan	Rp	(4.223.360.000,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	32.561.142,83

Rincian saldo Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.561.142,83 dapat dilihat pada **lampiran 4**.

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp
Kas Lainnya	0,00	3.591.652,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.591.652,00.

Tabel 90 Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
1	Pengembalian Belanja 2023 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum disetor ke Kasda	0.00	1,400,000.00
2	Pengembalian Belanja 2023 Kecamatan sangkapura yang belum disetor ke Kasda	0.00	2,191,652.00
	Jumlah	0.00	3,591,652.00



5.3.1.1.9 Piutang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Piutang	163.959.236.848,83	160.663.422.734,61

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyajian Piutang di neraca harus dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*/NRV), yaitu piutang brutto dikurangi penyisihan piutang yang perhitungannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Gresik.

Saldo piutang netto per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.295.814.114,22 atau 2,05% dari saldo per 31 Desember 2023. Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri atas:

Tabel 91 Piutang

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Piutang Pajak	274.545.862.435,58	251.464.276.133,38
Penyisihan Piutang Pajak	(145.526.979.729,05)	(132.258.930.765,29)
Piutang Retribusi	46.452.910.289,92	11.871.191.066,34
Penyisihan Piutang Retribusi	(13.685.780.791,26)	(8.600.554.267,08)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	55.632.005.796,16	79.869.968.500,15
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(53.493.223.125,27)	(41.737.041.654,59)
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	34.615.047,99	54.787.660,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan	(173.075,24)	(273.938,30)
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	163.959.236.848,83	160.663.422.734,61

Rincian Nilai Piutang berdasarkan NRV per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



5.3.1.1.9.1 Piutang Pajak

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Piutang Pajak	274.545.862.435,58	251.464.276.133,38

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp274.545.862.435,58 dan Rp251.464.276.133,38 merupakan nilai pajak daerah yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) namun sampai dengan akhir tahun belum dibayar oleh wajib pajak. Rincian saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 92 Piutang Pajak

No	Jenis Piutang	Nilai Tagihan Piutang Per 31 Des 2023	Penambahan			Pengurangan		Nilai Tagihan Piutang Per 31 Des 2024
			Ketetapan Tahun Berjalan	Non Ketetapan Tahun Berjalan	Koreksi	Pembayaran Th Sebelumnya	Pembayaran Tahun Berjalan	
1	Pajak Hotel	163.752,00	12.973.185.049,00	0,00	0,00	0,00	12.973.185.049,00	163.752,00
2	Pajak Restoran	152.743.860,16	39.352.526.197,00	0,00	0,00	0,00	39.352.526.197,00	152.743.860,16
3	Pajak Hiburan	1.196.225.700,90	4.058.945.384,00	0,00	0,00	0,00	4.058.945.384,00	1.196.225.700,90
4	Pajak Reklame	787.040.598,51	7.957.893.350,00	0,00	0,00	142.689.339,00	7.646.552.020,00	955.692.589,51
5	Pajak Penerangan Jalan	802.503.054,25	269.653.244.700,00	0,00	0,00	0,00	269.653.244.700,00	802.503.054,25
6	Pajak Parkir	30.058.000,00	3.346.693.618,00	0,00	0,00	0,00	3.346.693.618,00	30.058.000,00
7	Pajak sarang Burung Walet	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	185.156.112,96	7.030.363.231,20	0,00	0,00	41.977.742,00	6.925.804.500,00	247.737.102,16
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.843.725,60	4.352.435.000,00	0,00	0,00	0,00	4.352.435.000,00	40.843.725,60
10	PBB	248.264.090.829,00	225.434.928.566,00	0,00	1.485.040.916,00	28.024.065.583,00	176.045.550.577,00	271.114.444.151,00
11	BPHTB	5.000.500,00	407.706.944.808,00	0,00	0,00	0,00	407.706.944.808,00	5.000.500,00
	Jumlah	251.464.276.133,38	981.867.159.903,20	0,00	1.485.040.916,00	28.208.732.664,00	932.061.881.853,00	274.545.862.435,58

- Piutang PBB P2 Tahun 2024 sebesar Rp271.114.444.151,00 belum dikurangi dengan realisasi pembayaran PBB P2 sebesar Rp335.912.533,00. Nilai tersebut merupakan pembayaran cicilan PBB P2 PT Raya Bumi Nusantara sebesar Rp226.566.126,00 atas ketetapan PBB P2 sebesar Rp679.698.211,00 dan cicilan sebesar Rp97.919.944,00 atas ketetapan PBB P2 sebesar Rp146.879.916,00, sedangkan untuk pembayaran sebesar Rp11.426.463,00 belum dapat ditelusuri atas pembayaran Wajib Pajak dan tagihan pajak yang mana.

➤ **Penyisihan Piutang Pajak Dan Saldo Piutang Pajak (Net Realizable Value/NRV)**

Daftar Penyisihan Piutang Pajak dan Saldo Piutang Pajak (NRV) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 93 Penyisihan Piutang Pajak dan Saldo Piutang Pajak (NRV)

Uraian	Nilai Tagihan Piutang Per 31 Desember 2024	Penyisihan	Saldo Piutang NRV
Pajak Hotel	163.752,00	163.752,00	0,00
Pajak Restoran	152.743.860,16	152.743.860,16	0,00
Pajak Hiburan	1.196.225.700,90	1.196.225.700,90	0,00
Pajak Reklame	955.692.589,51	506.224.599,58	449.467.989,93
Pajak Penerangan Jalan	802.503.054,25	802.503.054,25	0,00
Pajak Parkir	30.058.000,00	30.058.000,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	450.000,00	450.000,00	0,00
Pajak Air Tanah	247.737.102,16	53.273.122,71	194.463.979,45
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	40.843.725,60	40.843.725,60	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan	271.114.444.151,00	142.741.993.663,85	128.372.450.487,16
BPHTB	5.000.500,00	2.500.250,00	2.500.250,00
Jumlah	274.545.862.435,58	145.526.979.729,05	129.018.882.706,53

Tabel 94 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Hotel (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Hotel	> 5 tahun	Macet	163.752,00	163.752,00	0,00
	Jumlah			163.752,00	163.752,00	0,00

Tabel 95 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Restoran (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Restoran	> 5 tahun	Macet	152.743.860,16	152.743.860,16	0,00
	Jumlah			152.743.860,16	152.743.860,16	0,00

Tabel 96 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Hiburan (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Hiburan	> 5 tahun	Macet	1.196.225.700,90	1.196.225.700,90	0,00
	Jumlah			1.196.225.700,90	1.196.225.700,90	0,00

Tabel 97 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Reklame (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Reklame	> 5 tahun	Macet	470.120.584,24	470.120.584,24	0,00
		< 2-5 tahun	Diragukan	42.810.602,90	21.405.301,45	21.405.301,45
		1-2 tahun	Kurang Lancar	131.420.072,37	13.142.007,24	118.278.065,13
		< 1 tahun	Lancar	311.341.330,00	1.556.706,65	309.784.623,35
	Jumlah			955.692.589,51	506.224.599,58	449.467.989,93



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 98 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Penerangan Jalan	> 5 tahun	Macet	802.503.054,25	802.503.054,25	0,00
	Jumlah			802.503.054,25	802.503.054,25	0,00

Tabel 99 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Parkir (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Parkir	> 5 tahun	Macet	30.058.000,00	30.058.000,00	0,00
	Jumlah			30.058.000,00	30.058.000,00	0,00

Tabel 100 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Sarang Burung Walet	> 5 tahun	Macet	450.000,00	450.000,00	0,00
	Jumlah			450.000,00	450.000,00	0,00

Tabel 101 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Air Tanah (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Air Tanah	> 5 tahun	Macet	37.868.770,00	37.868.770,00	0,00
		< 2-5 tahun	Diragukan	10.876.497,40	5.438.248,70	5.438.248,70
		1-2 tahun	Kurang Lancar	94.433.103,56	9.443.310,36	84.989.793,20
		< 1 tahun	Lancar	104.558.731,20	522.793,66	104.035.937,54
	Jumlah			247.737.102,16	53.273.122,71	194.463.979,45

Tabel 102 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	> 5 tahun	Macet	40.843.725,60	40.843.725,60	0,00
	Jumlah			40.843.725,60	40.843.725,60	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 103 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pajak Bumi dan Bangunan	> 5 tahun	Macet	111.253.512.581,00	111.253.512.581,00	0,00
		< 2-5 tahun	Diragukan	50.485.947.087,00	25.242.973.543,50	25.242.973.543,50
		1-2 tahun	Kurang Lancar	59.985.606.494,00	5.998.560.649,40	53.987.045.844,60
		< 1 tahun	Lancar	49.389.377.989,00	246.946.889,95	49.142.431.099,06
	Jumlah			271.114.444.151,00	142.741.993.663,85	128.372.450.487,16

Tabel 104 Penyisihan dan Saldo Piutang Pajak BPHTB (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	BPHTB	1-2 tahun	Kurang Lancar	5.000.500,00	2.500.250,00	2.500.250,00
	Jumlah			5.000.500,00	2.500.250,00	2.500.250,00

5.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi

	31 Desember 2024	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Piutang Retribusi	46.452.910.289,92	11.871.191.066,34

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp46.452.910.289,92 dan Rp11.871.191.066,34 merupakan nilai retribusi daerah yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah) namun sampai dengan akhir tahun belum dibayar oleh wajib pajak. Rincian saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 105 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Dinas Kesehatan	32.658.484.530,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.680.385.617,92	2.618.759.318,84
Dinas Koperasi, UM, Perindag	2.767.964.793,00	2.087.384.613,00
Dinas Penanaman Modal & PTSP	4.093.936.717,00	5.999.639.145,00
Dinas Perikanan	0,00	33.500.000,00
Badan PPKAD	4.252.138.632,00	1.131.907.989,50
Jumlah	46.452.910.289,92	11.871.191.066,34



➤ **Penyisihan Piutang Retribusi Dan Saldo Piutang Retribusi (NRV)**

Daftar Penyisihan Piutang Retribusi dan Saldo Piutang Retribusi (NRV) per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

Tabel 106 Penyisihan Piutang Retribusi dan Saldo Retribusi Pajak (NRV)

Piutang Retribusi	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang NRV
Dinas Kesehatan	32.658.484.530,00	2.927.360.085,41	29.731.124.444,59
Dinas Perhubungan	2.680.385.617,92	2.680.385.617,92	0,00
Dinas Koperasi, UM, Perindag	2.767.964.793,00	2.114.145.264,00	653.819.529,00
Dinas Penanaman Modal & PTSP	4.093.936.717,00	3.442.761.852,43	651.174.864,57
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
Badan PPKAD	4.252.138.632,00	2.521.127.971,50	1.731.010.660,50
Jumlah	46.452.910.289,92	13.685.780.791,26	32.767.129.498,66

Rincian piutang per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan

Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan merupakan Piutang Pendapatan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.

Sesuai dengan kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp32.658.484.530,00 pada tahun 2024 merupakan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang direklasifikasi menjadi Piutang Retribusi.

Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan terdiri atas :

Piutang Retribusi pada BLUD Puskesmas	1.647.479.400,00
Piutang Retribusi pada BLUD RSUD Umar Mas'ud	1.182.802.887,00
Piutang Retribusi pada BLUD RSUD Ibnu Sina	29.828.202.243,00
Jumlah	32.658.484.530,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- Piutang Retribusi pada BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.647.479.400,00 dan 0,00 merupakan piutang atas klaim ke BPJS, dengan rincian:

Tabel 107 Piutang BLUD Puskesmas

No	Puskesmas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang NRV
1	ALUN-ALUN	62.117.500,00	310.587,50	61.806.912,50
2	NELAYAN	5.526.000,00	27.630,00	5.498.370,00
3	INDUSTRI	15.350.000,00	76.750,00	15.273.250,00
4	KEBOMAS	50.450.000,00	252.250,00	50.197.750,00
5	GENDING	16.880.000,00	84.400,00	16.795.600,00
6	MANYAR	34.882.500,00	174.412,50	34.708.087,50
7	SEMBAYAT	19.156.500,00	95.782,50	19.060.717,50
8	SUKOMULYO	29.820.000,00	149.100,00	29.670.900,00
9	BUNGAH	105.890.000,00	529.450,00	105.360.550,00
10	DUKUN	39.481.500,00	197.407,50	39.284.092,50
11	MENTARAS	21.714.500,00	108.572,50	21.605.927,50
12	PANCENG	164.060.000,00	820.300,00	163.239.700,00
13	UJUNG PANGKAH	93.915.000,00	469.575,00	93.445.425,00
14	SEKAPUK	15.162.500,00	75.812,50	15.086.687,50
15	SIDAYU	95.295.000,00	476.475,00	94.818.525,00
16	CERME	172.487.000,00	862.435,00	171.624.565,00
17	DADAPKUNING	11.737.500,00	58.687,50	11.678.812,50
28	BENJENG	66.167.500,00	330.837,50	65.836.662,50
26	METATU	9.027.500,00	45.137,50	8.982.362,50
27	DUDUKSAMPEYAN	28.770.000,00	143.850,00	28.626.150,00
24	BALONGPANGGANG	55.275.000,00	276.375,00	54.998.625,00
25	DAPET	10.675.000,00	53.375,00	10.621.625,00
22	KEDAMEAN	9.611.000,00	48.055,00	9.562.945,00
23	SLEMPIT	10.741.000,00	53.705,00	10.687.295,00
20	MENGANTI	40.920.000,00	204.600,00	40.715.400,00
18	KEPATIHAN	17.092.500,00	85.462,50	17.007.037,50
19	DRIYOREJO	91.457.500,00	457.287,50	91.000.212,50
21	KARANGANDONG	27.194.500,00	135.972,50	27.058.527,50
29	WRINGIN ANOM	55.725.000,00	278.625,00	55.446.375,00
30	KESAMBEN KULON	41.702.400,00	208.512,00	41.493.888,00
31	SANGKAPURA	86.660.000,00	433.300,00	86.226.700,00
32	TAMBAK	142.535.000,00	712.675,00	141.822.325,00
	Jumlah	1.647.479.400,00	8.237.397,00	1.639.242.003,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- Piutang Retribusi pada BLUD RSUD Umar Mas'ud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.182.802.887,00 dan Rp0,00 merupakan piutang atas klaim ke BPJS.

Tabel 108 Piutang BLUD RSUD Umar Mas'ud

No	Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang NRV
1	RSUD Umar Mas'ud	1.182.802.887,00	5.914.014,44	1.176.888.872,57
	Jumlah	1.182.802.887,00	5.914.014,44	1.176.888.872,57

- Piutang Retribusi pada BLUD RSUD Ibnu Sina per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp29.828.202.243,00 dan Rp0,00 merupakan tunggakan atas kegiatan operasional RSUD Ibnu Sina, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 109 Piutang BLUD RSUD Ibnu Sina

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir
			Ketetapan Tahun Berjalan	Koreksi	Pembayaran Th Sebelumnya	Pembayaran Tahun Berjalan	Koreksi	
1	Pasien Umum	0,00	120.842.587,00	2.451.244.147,00	0,00	78.634.186,00	0,00	2.493.452.548,00
2	BPJS	0,00	173.861.936.197,00	15.664.952.799,00	15.664.952.799,00	148.873.050.503,00	0,00	24.988.885.694,00
3	Jamsostek TC	0,00	2.973.950.289,00	216.676.317,00	113.806.161,00	2.973.950.289,00	0,00	102.870.156,00
4	Putang Perusahaan	0,00	2.595.477.021,00	1.537.677.006,00	2.167.717.027,00	1.054.500.862,00	0,00	910.936.138,00
5	KRSU Farmasi	0,00	0,00	18.665.685,00	0,00	0,00	0,00	18.665.685,00
6	P2TP2A	0,00	120.530.613,00	22.108.017,00	22.108.017,00	93.821.090,00	0,00	26.709.523,00
7	Pelayanan LPSK	0,00	2.111.300,00	1.601.601,00	0,00	2.111.300,00	0,00	1.601.601,00
8	DPRD Gresik	0,00	33.578.000,00	0,00	0,00	33.578.000,00	0,00	0,00
9	Covid APBN	0,00	0,00	48.432.860,00	0,00	0,00	0,00	48.432.860,00
10	Askes Swasta (inhealth)	0,00	46.260.995,00	15.533.118,00	12.967.619,00	41.422.222,00	0,00	7.404.272,00
11	Biakes	0,00	0,00	21.943.685,00	0,00	0,00	0,00	21.943.685,00
12	Jampersal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Global Fund (TB MDR)	0,00	1.227.585.886,00	778.534.580,00	778.534.580,00	822.958.472,00	0,00	404.627.414,00
14	Jasa Raharja	0,00	4.484.031.789,00	445.879.066,00	445.879.066,00	3.730.817.968,00	0,00	753.213.821,00
15	BKPSDM	0,00	20.919.100,00	0,00	0,00	20.919.100,00	0,00	0,00
16	Dinas Kesehatan Kresik	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Kesehatan Prov Jatim	0,00	49.455.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.455.946,00
18	Dinas Sosial/IKF	0,00	18.202.900,00	0,00	0,00	18.200.000,00	0,00	2.900,00
	Jumlah	0,00	185.555.237.623,00	21.223.248.881,00	19.205.965.269,00	157.744.318.992,00	0,00	29.828.202.243,00

Daftar Penyisihan Piutang BLUD RSUD Ibnu Sina dan Saldo Piutang (NRV) per 31 Desember 2024 pada BLUD RSUD Ibnu Sina adalah sebagai berikut:



Tabel 110 Daftar Penyisihan Piutang BLUD RSUD Ibnu Sina dan Saldo Piutang (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
	Piutang Lain-lain	2008	Macet	5.494.861,00	5.494.861,00	0,00
		2009	Macet	583.671.301,00	583.671.301,00	0,00
		2010	Macet	738.841.392,00	738.841.392,00	0,00
		2011	Macet	726.069.493,00	726.069.493,00	0,00
		2012	Macet	78.201.215,00	78.201.215,00	0,00
		2013	Macet	28.301.111,00	28.301.111,00	0,00
		2014	Macet	1.830.145,00	1.830.145,00	0,00
		2015	Macet	7.285.233,00	7.285.233,00	0,00
		2016	Macet	23.243.465,00	23.243.465,00	0,00
		2017	Macet	88.028.626,00	88.028.626,00	0,00
		2018	Macet	121.576.331,00	121.576.331,00	0,00
		2019	Macet	74.056.857,00	74.056.857,00	0,00
		2020	Macet	46.554.748,00	46.554.748,00	0,00
		2021	Macet	24.834.154,00	24.834.154,00	0,00
		2022	Macet	137.944.076,00	137.944.076,00	0,00
		2023	Macet	90.764.944,00	90.764.944,00	0,00
		2024	Macet	792.498,00	792.498,00	0,00
		2024	Lancar	27.050.711.793,00	135.718.223,97	26.914.993.569,03
	Jumlah			29.828.202.243,00	2.913.208.673,97	26.914.993.569,03



2. Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan

Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan terdiri atas :

Tabel 111 Piutang Retribusi Dinas Perhubungan

No	jenis piutang	Saldo Awal		Penambahan			Pengurangan			Saldo Akhir
		(\$ dolar)	Rp	Ketetapan Tahun Berjalan	Tanpa penetapan	Koreksi	pembayaran/koreksi tahun sebelumnya	Pembayaran Tahun Berjalan	Koreksi	
1	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum		436.975.000,00	2.656.840.508,00	0,00	0,00	0,00	2.656.840.508,00	0,00	436.975.000,00
2	Retribusi Pengend Menara Telekomunikasi		264.182.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.182.700,28
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		3.750.000,00	212.000.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000.000,00	0,00	3.750.000,00
4	Retribusi Jasa Kepelabuhanan		130.072.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.072.976,00
		22.971,76	354.132.652,16	0,00	0,00	17.136.932,96	0,00	0,00	0,00	371.269.585,12
	Jasa Tambat		265.971.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.971.025,40
		59.637,22	919.367.383,52	0,00	0,00	44.489.366,12	0,00	0,00	0,00	963.856.749,64
	Jasa Dermaga		237.502.581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.502.581,48
5	Retribusi Penyeberangan		6.805.000,00	384.851.000,00	0,00	0,00	0,00	384.851.000,00	0,00	6.805.000,00
	Jumlah		2.618.759.318,84	3.253.691.508,00	0,00	61.626.299,08	0,00	3.253.691.508,00	0,00	2.680.385.617,92

Daftar Penyisihan Piutang Retribusi dan Saldo Piutang Retribusi (NRV) per 31 Desember 2024 pada Dinas Perhubungan sebagai berikut :



Tabel 112 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perhubungan dan Saldo Piutang Retribusi (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	2011	Macet	24.875.000,00	24.875.000,00	0,00
		2012	Macet	130.050.000,00	130.050.000,00	0,00
		2013	Macet	243.750.000,00	243.750.000,00	0,00
		2014	Macet	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
2	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2014	Macet	4.152.681,00	4.152.681,00	0,00
		2015	Macet	260.030.019,28	260.030.019,28	0,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2015	Macet	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
		2016	Macet	650.000,00	650.000,00	0,00
		2017	Macet	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	2007	Macet	11.844.462,08	11.844.462,08	0,00
		2008	Macet	108.634.688,32	108.634.688,32	0,00
		2009	Macet	3.371.420,00	3.371.420,00	0,00
		2010	Macet	47.902.081,60	47.902.081,60	0,00
		2011	Macet	72.863.330,88	72.863.330,88	0,00
		2012	Macet	137.079.283,52	137.079.283,52	0,00
		2013	Macet	117.231.530,72	117.231.530,72	0,00
		2014	Macet	2.415.764,00	2.415.764,00	0,00
	Jasa Tambat	2007	Macet	37.411.898,10	37.411.898,10	0,00
		2008	Macet	284.278.076,02	284.278.076,02	0,00
		2009	Macet	4.856.432,40	4.856.432,40	0,00
		2010	Macet	44.376.874,70	44.376.874,70	0,00
		2011	Macet	37.449.498,60	37.449.498,60	0,00
		2012	Macet	151.136.716,56	151.136.716,56	0,00
		2013	Macet	187.817.280,74	187.817.280,74	0,00
		2014	Macet	66.275.597,88	66.275.597,88	0,00
		2015	Macet	416.225.400,04	416.225.400,04	0,00
	Jasa Dermaga	2010	Macet	4.039.727,12	4.039.727,12	0,00
		2011	Macet	8.070.724,30	8.070.724,30	0,00
		2012	Macet	3.091.428,60	3.091.428,60	0,00
		2013	Macet	28.474.106,06	28.474.106,06	0,00
		2014	Macet	34.147.885,93	34.147.885,93	0,00
		2015	Macet	159.678.709,47	159.678.709,47	0,00
5	Retribusi Penyebrangan di atas Air	2011	Macet	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00
	Jumlah			2.680.385.617,92	2.680.385.617,92	0,00

➤ Piutang Jasa Kepelabuhanan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.968.672.917,64 dan Rp1.907.046.618,56 merupakan tunggakan atas pendapatan jasa kepelabuhanan, jasa tambat (30%) serta jasa dermaga yang terjadi sejak Tahun 2007. Karena transaksi untuk kapal asing menggunakan USD, maka pengakuan dan pengukuran piutangnya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per periode laporan, dengan perhitungan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang dalam bentuk Rupiah	633.546.582,88	633.546.582,88
Piutang dalam bentuk Dollar	\$ 82.608,98	\$ 82.608,98
Nilai Kurs Tengah BI	Rp 16.162,00	Rp 15.416,00
Nilai setara Rupiah	1.335.126.334,76	1.273.500.035,68
Jumlah Piutang	1.968.672.917,64	1.907.046.618,56

3. Piutang Retribusi pada Dinas Koperasi, UM dan Perindag

Piutang Retribusi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag terdiri atas:

Tabel 113 Piutang Retribusi Dinas Koperasi, UM, Perindag

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir
			Dengan Ketetapan dan Tanpa Ketetapan Tahun Berjalan	Koreksi	Pembayaran Th Sebelumnya	Pembayaran Tahun Berjalan	Koreksi	
1	Retribusi Pelayanan Pasar	2.025.878.613,00	2.378.661.700,00		303.125.220,00	1.391.431.300,00		2.709.983.793,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	61.506.000,00	273.000.000,00		3.525.000,00	273.000.000,00		57.981.000,00
	Jumlah	2.087.384.613,00	2.651.661.700,00	0,00	306.650.220,00	1.664.431.300,00	0,00	2.767.964.793,00

Daftar Penyisihan Piutang Retribusi dan Saldo Piutang Retribusi (NRV) per 31 Desember 2024 pada Dinas Koperasi, UM, Perindag adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 114 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Koperasi, UM, Perindag dan Saldo Piutang Retribusi

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Retribusi Pelayanan Pasar	2000	Macet	99.710.783,00	99.710.783,00	0,00
		2003	Macet	891.000,00	891.000,00	0,00
		2004	Macet	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
		2005	Macet	2.324.500,00	2.324.500,00	0,00
		2006	Macet	3.055.625,00	3.055.625,00	0,00
		2007	Macet	3.533.500,00	3.533.500,00	0,00
		2008	Macet	3.915.000,00	3.915.000,00	0,00
		2009	Macet	4.873.000,00	4.873.000,00	0,00
		2010	Macet	7.525.100,00	7.525.100,00	0,00
		2011	Macet	9.050.700,00	9.050.700,00	0,00
		2012	Macet	11.719.450,00	11.719.450,00	0,00
		2013	Macet	13.955.700,00	13.955.700,00	0,00
		2014	Macet	18.486.575,00	18.486.575,00	0,00
		2015	Macet	39.483.600,00	39.483.600,00	0,00
		2016	Macet	52.776.100,00	52.776.100,00	0,00
		2017	Macet	77.583.600,00	77.583.600,00	0,00
		2018	Macet	112.127.440,00	112.127.440,00	0,00
		2019	Macet	153.043.420,00	153.043.420,00	0,00
		2020	Macet	159.247.470,00	159.247.470,00	0,00
		2021	Macet	264.820.960,00	264.820.960,00	0,00
		2022	Macet	311.296.610,00	311.296.610,00	0,00
		2022	Macet	371.820.760,00	371.820.760,00	0,00
		2024	Diragukan	611.566.400,00	305.783.200,00	305.783.200,00
		2024	Kurang Lancar	271.045.800,00	27.104.580,00	243.941.220,00
		2024	Lancar	104.618.200,00	523.091,00	104.095.109,00
2	Retribusi Kekayaan Daerah	2003	Macet	282.500,00	282.500,00	0,00
		2004	Macet	687.500,00	687.500,00	0,00
		2005	Macet	993.000,00	993.000,00	0,00
		2006	Macet	2.255.500,00	2.255.500,00	0,00
		2007	Macet	3.118.000,00	3.118.000,00	0,00
		2008	Macet	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00
		2009	Macet	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00
		2010	Macet	3.948.500,00	3.948.500,00	0,00
		2011	Macet	5.609.000,00	5.609.000,00	0,00
		2012	Macet	6.877.000,00	6.877.000,00	0,00
		2013	Macet	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
		2014	Macet	17.173.000,00	17.173.000,00	0,00
	Jumlah			2.767.964.793,00	2.114.145.264,00	653.819.529,00



4. Piutang Retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Piutang Retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri atas:

Tabel 115 Piutang Retribusi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir
			Ketetapan Tahun Berjalan	Koreksi	Pembayaran Th Sebelumnya	Pembayaran Tahun Berjalan	Koreksi	
2	IMB	5.870.653.986,00	0,00	0,00	2.455.127.994,00	0,00	324.308,00	3.415.201.684,00
4	PBG	128.985.159,00	49.816.821.455,20	0,00	128.985.159,00	42.804.329.856,20	6.333.756.566,00	678.735.033,00
	Jumlah	5.999.639.145,00	49.816.821.455,20	0,00	2.584.113.153,00	42.804.329.856,20	6.334.080.874,00	4.093.936.717,00

Daftar Penyisihan Piutang Retribusi dan Saldo Piutang Retribusi (NRV) per 31 Desember 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 116 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Saldo Piutang Retribusi (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2012	Macet	104.945,00	104.945,00	0,00
		2013	Macet	3.936.100,00	3.936.100,00	0,00
		2014	Macet	205.554.021,00	205.554.021,00	0,00
		2015	Macet	138.035.813,00	138.035.813,00	0,00
		2016	Macet	36.623.569,00	36.623.569,00	0,00
		2017	Macet	888.844.111,00	888.844.111,00	0,00
		2018	Macet	202.556.429,00	202.556.429,00	0,00
		2019	Macet	894.434.055,00	894.434.055,00	0,00
		2020	Macet	426.422.118,00	426.422.118,00	0,00
		2021	Macet	57.564.445,00	57.564.445,00	0,00
		2022	Macet	180.876.685,00	180.876.685,00	0,00
		2023	Macet	380.249.393,00	380.249.393,00	0,00
2	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	2024	Diragukan	100.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024	Kurang Lancar	253.863.087,00	25.386.308,70	228.476.778,30
		2024	Lancar	424.771.946,00	2.123.859,73	422.648.086,27
	Jumlah			4.093.936.717,00	3.442.761.852,43	651.174.864,57



5. Piutang Retribusi pada Dinas Perikanan

Piutang Retribusi pada Dinas Perikanan terdiri atas :

Tabel 117 Piutang Retribusi Dinas Perikanan

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir
			Ketetapan Tahun Berjalan	Koreksi	Pembayaran Th Sebelumnya	Pembayaran Tahun Berjalan	Koreksi	
1	Retribusi Kekayaan Daerah	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00
	Jumlah	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00

Piutang Retribusi pada Dinas Perikanan sebesar Rp 33.500.000,00 pada tahun 2024 direklasifikasi menjadi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

6. Piutang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Piutang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

Tabel 118 Piutang Retribusi Badan PPKAD

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir
			Ketetapan Tahun Berjalan	Koreksi	Pembayaran Piutang Th Sebelumnya	Pembayaran Tahun Berjalan	Koreksi	
1	Retribusi Kekayaan Daerah	1.131.907.989,50	56.856.957.405,00	0,00	336.403.165,00	53.394.936.084,00	5.387.513,50	4.252.138.632,00
	Jumlah	1.131.907.989,50	56.856.957.405,00	0,00	336.403.165,00	53.394.936.084,00	5.387.513,50	4.252.138.632,00

Daftar Penyisihan Piutang Retribusi dan Saldo Piutang Retribusi (NRV) per 31 Desember 2024 pada Badan PPKAD adalah sebagai berikut.

Tabel 119 Penyisihan Piutang Retribusi Badan PPKAD dan Saldo Piutang Retribusi (NRV)

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	>12 bulan	Macet	790.117.311,00	790.117.311,00	0,00
		4-12 bulan	Diragukan	3.462.021.321,00	1.731.010.660,50	1.731.010.660,50
		2-3 bulan	Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00
		1 bulan	Lancar	0,00	0,00	0,00
	Jumlah			4.252.138.632,00	2.521.127.971,50	1.731.010.660,50



5.3.1.1.9.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	55.632.005.796,16	79.869.968.500,15

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp55.632.005.796,16 dan Rp79.869.968.500,15 merupakan saldo piutang lain-lain PAD yang sah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 120 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Piutang BLUD Puskesmas	0,00	1.473.420.000,00
Piutang BLUD RSUD Umar Mas'ud	0,00	1.098.469.651,00
Piutang BLUD RSUD Ibnu Sina	0,00	21.223.248.881,00
Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD Dinas Perikanan	40.000.000,00	26.666.666,67
Piutang Denda Pajak yang jatuh tempo pada BPPKAD	51.930.026.384,64	52.409.482.100,64
Piutang Denda Retribusi Perijinan Tertentu pada Dinas PM dan PTSP	3.605.261.699,26	3.596.933.508,58
Piutang Denda Retribusi pada Dinas Koperasi, UM, Perindag	56.717.712,26	41.747.692,26
Jumlah	55.632.005.796,16	79.869.968.500,15

Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah (NRV) per 31 Desember 2024 pada adalah sebagai berikut :

Tabel 121 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (NRV)

Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang NRV
Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD Dinas Perikanan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Piutang Denda Pajak yang jatuh tempo pada BPPKAD	51.930.026.384,64	50.120.846.283,51	1.809.180.101,13
Piutang Denda Retribusi Perijinan Tertentu pada Dinas PM & PTSP	3.605.261.699,26	3.288.735.520,08	316.526.179,18
Piutang Denda Retribusi pada Dinas Koperasi, UM, Perindag	56.717.712,26	43.641.321,68	13.076.390,58
Jumlah	55.632.005.796,16	53.493.223.125,27	2.138.782.670,89



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.374.234.000,00 merupakan piutang atas klaim ke BPJS.
- Piutang BLUD RSUD Umar Mas'ud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.098.469.657,00 merupakan piutang atas klaim ke BPJS.
- Piutang BLUD RSUD Ibnu Sina per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp21.223.248.881,00 merupakan tunggakan atas kegiatan operasional RSUD Ibnu Sina.

Sesuai dengan kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD Puskesmas, BLUD RSUD Umar Mas'ud dan BLUD RSUD Ibnu Sina sebesar Rp0,00 pada tahun 2024 dikarenakan Piutang Lain-lain PAD yang Sah direklasifikasi menjadi Piutang Retribusi.

- Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp26.666.666,67.

Koreksi Piutang Retribusi pada Dinas Perikanan sebesar Rp33.500.000,00 pada tahun 2024 merupakan Piutang Retribusi yang direklasifikasi menjadi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Tabel 122 Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir
			Ketetapan Tahun Berjalan	Koreksi	Pembayaran Th Sebelumnya	Pembayaran Tahun Berjalan	Koreksi	
1	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	26.666.666,67	145.878.333,33	33.500.000,00	28.500.000,00	137.545.000,00	0,00	40.000.000,00
	Jumlah	26.666.666,67	145.878.333,33	33.500.000,00	28.500.000,00	137.545.000,00	0,00	40.000.000,00

Tabel 123 Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	2018	Macet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
		2023	Macet	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Jumlah			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

- Piutang denda pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp51.930.026.384,64 dan Rp52.409.482.100,64 merupakan pengenaan denda atas piutang pajak yang telah jatuh tempo.



Tabel 124 Piutang Denda Pajak pada Badan PPKAD

Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan (Rp)	Saldo Piutang NRV (Rp)
Denda Pajak Hotel	78.600,96	0,00	78.600,96
Denda Pajak Restoran	72.257.560,05	0,00	72.257.560,05
Denda Pajak Hiburan	574.188.336,43	0,00	574.188.336,43
Denda Pajak Reklame	222.156.628,26	0,00	222.156.628,26
Denda Pajak Penerangan Jalan	776.352.410,54	0,00	776.352.410,54
Denda Pajak Parkir	14.427.840,00	0,00	14.427.840,00
Denda Pajak Sarang Burung Walet	216.000,00	0,00	216.000,00
Denda Pajak Air Tanah	94.905.772,60	0,00	94.905.772,60
Denda Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	54.596.952,29	0,00	54.596.952,29
Denda PBB	50.120.846.283,51	50.120.846.283,51	0,00
Jumlah	51.930.026.384,64	50.120.846.283,51	1.809.180.101,13

- Piutang denda retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.605.261.699,26 dan Rp3.596.933.508,58, dari piutang denda sebesar Rp3.605.261.699,26 yang dihitung penyisihannya hanya piutang yang sudah atau pernah dilakukan penagihan, sedangkan atas piutang yang tidak atau belum ditagih tidak dihitung nilai penyisihannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 125 Piutang Denda Retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Jenis Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
	Denda Retribusi	Macet	3.078.795.641,54	3.078.795.641,54	0,00
	Perizinan Tertentu	Diragukan	398.617.496,44	199.308.748,22	199.308.748,22
		Kurang Lancar	106.311.303,16	10.631.130,32	95.680.172,84
		Tidak disisihkan (tanpa tagihan)	21.537.258,12	0,00	21.537.258,12
	Jumlah		3.605.261.699,26	3.288.735.520,08	316.526.179,18

- Piutang denda retribusi pada Dinas Koperasi, UM, Perindag per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp56.717.712,26 dan Rp41.747.692,26.



Tabel 126 Piutang Denda Retribusi pada Dinas Koperasi, UM, Perindag

No	Jenis Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang (NRV)
1	Denda Retribusi Jasa Umum	Macet	35.825.384,26	35.825.384,26	0,00
		Diragukan	12.231.328,00	6.115.664,00	6.115.664,00
		Kurang Lancar	5.420.916,00	542.091,60	4.878.824,40
		Lancar	2.092.364,00	10.461,82	2.081.902,18
2	Denda Retribusi Jasa Usaha	Macet	1.147.720,00	1.147.720,00	0,00
	Jumlah		56.717.712,26	43.641.321,68	13.076.390,58

5.3.1.1.9.4 Belanja dibayar dimuka

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00

Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.9.5 Piutang Dana Bagi Hasil

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.9.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	34.615.047,99	54.787.660,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp34.615.047,99 dan Rp54.787.660,00 merupakan piutang tuntutan ganti rugi atas kehilangan kendaraan dinas roda dua yang belum jatuh tempo, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 127 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	2024	2023
1	Nur Masillah, Amd. Keb.	0,00	2.336.000,00
2	Diana Meiwati, Amd.Kes.	1.326.400,00	9.280.000,00
3	Afandi, AMK.	1.712.486,00	8.562.494,00
4	Annisatul Habibah	3.996.500,00	10.872.500,00
5	Muhammad Arhan	4.100.500,00	11.132.500,00
6	Muhammad Ubaidillah, S.Kep.Ns.	5.729.162,00	12.604.166,00
7	Sri Hermiyati, S.Si.,Apt.	7.000.000,00	0,00
8	Nurul Napiah, S.ST.	10.749.999,99	0,00
Jumlah		34.615.047,99	54.787.660,00

Daftar Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (NRV) per 31 Desember 2024 pada adalah sebagai berikut :

Tabel 128 Daftar Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang NRV
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	34.615.047,99	173.075,24	34.441.972,75
	34.615.047,99	173.075,24	34.441.972,75

5.3.1.1.9.7 Piutang Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.10 Persediaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Persediaan	50.257.626.430,36	53.535.926.654,68

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp50.257.626.430,36 dan Rp53.535.926.654,68 merupakan nilai persediaan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) periode pelaporan, terdiri atas :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 129 Persediaan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Persediaan Bahan Pakai Habis		
Bahan Bangunan dan Kontruksi	1.285.834.818,00	2.746.812.768,00
Bahan Kimia	312.636.469,00	51.699.920,00
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	2.300.000,00
Bahan Bakar dan Pelumas	76.463.280,00	0,00
Isi Tabung Gas	6.974.000,00	585.000,00
Bahan Lainnya	3.124.814.942,17	3.218.588.894,00
Suku Cadang Alat Angkutan	5.537.500,00	0,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	33.374.046,00	103.197.998,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	14.124.477,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	721.596.457,36	1.051.598.083,38
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.063.151,00	293.369.351,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	433.778.292,07	908.118.500,07
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.340.000,00	6.981.115,92
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	813.299.719,00	762.179.987,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	179.559.456,00	410.903.016,50
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat listrik	251.128.373,00	215.624.402,57
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	22.644.000,00	0,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.625.300,00	22.880.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	168.047.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	72.423.827,00	123.111.131,00
Obatan-Obat	16.253.043.488,74	19.522.748.050,31
Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.487.672,00	3.846.688,00
Persediaan untuk Dijual /Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.416.542.354,00	8.864.115.576,28
Persediaan untuk Dijual /Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	22.518.219.965,02	15.016.574.152,65
Natura	341.114.843,00	42.645.020,00
Pakan	0,00	0,00
Jumlah	50.257.626.430,36	53.535.926.654,68

Rincian persediaan per 31 Desember 2024 per OPD dapat dilihat pada **Lampiran**

6.



5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Investasi Non Permanen	0,00	0,00

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Gresik adalah berbentuk Dana Bergulir.

Pengelolaan Dana bergulir kabupaten Gresik dilaksanakan secara mandiri/ dikelola sendiri dan dikerjasamakan dengan PD BPR Bank Gresik dan Bank UMKM Jatim (BPR Jatim) dengan sistem *Chanelling Agency* yaitu Bank ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130 Saldo Dana Bergulir

SKPD	Saldo Awal		Pembayaran Kembali		Koreksi	Saldo per 31 Desember 2024 Rp
	<i>Chanelling</i> Rp	Dikelola sendiri Rp	<i>Chanelling</i> Rp	Dikelola sendiri Rp		
Dinas Koperasi, UM, Perindag	511.813.775,00	207.000.000,00	0,00	0,00	0,00	718.813.775,00
Bagian Perekonomian	701.478.242,00	233.782.748,00	7.000.000,00	0,00	0,00	928.260.990,00
Dinas Perikanan	507.167.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.167.452,00
Dinas Pertanian	764.414.366,00	576.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.954.366,00
Dinas PMD	134.824.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.824.517,00
Jumlah	2.619.698.352,00	1.017.322.748,00	7.000.000,00	0,00	0,00	3.630.021.100,00

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dan secara periodik dilakukan penyesuaian, sehingga nilai dana bergulir yang tercatat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.630.021.100,00 dan Rp3.637.021.100,00 dicatat sebesar harga perolehan dan secara periodik dilakukan penyesuaian, sehingga nilai dana bergulir yang tercatat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.



Dana bergulir berdasarkan harga perolehan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 131 Saldo Dana Bergulir Berdasarkan Harga Perolehan

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo awal	3.637.021.100,00	3.825.065.100,00
- Koreksi	0,00	(142.119.000,00)
- Realisasi pembayaran	(7.000.000,00)	(45.925.000,00)
Jumlah	3.630.021.100,00	3.637.021.100,00
Penyisihan	(3.630.021.100,00)	(3.637.021.100,00)
NRV Investasi Non Permanen	0,00	0,00

Tabel 132 Saldo Dana Bergulir per SKPD

SKPD	Saldo Awal Dana Bergulir Rp	Koreksi Saldo Awal Rp	Pengembalian dari Nasabah Rp	Saldo Akhir Dana Bergulir Rp
Dinas Koperasi, UM, Perindag	718.813.775,00	0,00	0,00	718.813.775,00
Bagian Perekonomian	935.260.990,00	0,00	7.000.000,00	928.260.990,00
Dinas Perikanan	507.167.452,00	0,00	0,00	507.167.452,00
Dinas Pertanian	1.340.954.366,00	0,00	0,00	1.340.954.366,00
Kantor PMD	134.824.517,00	0,00	0,00	134.824.517,00
Jumlah	3.637.021.100,00	0,00	7.000.000,00	3.630.021.100,00

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Investasi Permanen	113.680.151.263,00	173.994.497.911,44

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp113.680.151.263,00 dan Rp173.994.497.911,44 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 133 Investasi Permanen

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Perumda Giri Tirta	(11.843.122.507,00)	50.407.122.405,00
Perumda BPR Bank Gresik	25.219.879.830,00	24.731.685.374,00
PT Gresik Migas	45.025.989.376,00	43.578.285.567,64
PT Gresik Samudra	23.112.064,80	23.112.064,80
BPR Jatim	201.000.000,00	201.000.000,00
Bank Jatim	55.053.292.500,00	55.053.292.500,00
Jumlah	113.680.151.263,80	173.994.497.911,44

1. Perumda Giri Tirta

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Perumda Giri Tirta	(11.843,122.507,00)	50.407.122.405,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Perumda Giri Tirta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp11.843.122.507,00) dan Rp50.407.122.405,00, merupakan nilai penyertaan modal yang menggunakan dasar penilaian investasi berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan 100%.

Tabel 134 Penyertaan Modal kepada Perumda Giri Tirta berdasarkan Metode Ekuitas

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
a. Saldo Investasi awal tahun	50.407.122.405,00	100.257.133.620,47
b. Koreksi atas saldo awal	0,00	(0,47)
c. Koreksi L/R tahun lalu	(873.354.868,00)	(369.478.964,00)
d. Deviden yang disetor ke Kasda	0,00	0,00
e. Deviden yang dibagi :		
- Dana Pembangunan Daerah	0,00	0,00
- Jasa Produksi	0,00	0,00
- Dana Sosial dan Pendidikan	0,00	0,00
- Dana Pensiun	0,00	0,00
f. Laba (rugi)	(61.376.890.044,00)	(48.251.508.229,00)
g. Mutasi		
- Cadangan dan Dana	0,00	0,00
- Pengukuran kembali kewajiban dana pensiun	0,00	(1.408.024.022,00)
h. Tambahan Penyertaan Modal	0,00	0,00
i. Bantuan/Hibah	0,00	179.000.000,00
Jumlah	(11.843.122.507,00)	50.407.122.405,00

Nilai penyertaan tersebut sesuai dengan surat Perumda Giri Tirta Nomor 900/114/437.82.303/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Penyampaian Data



Ikhtisar Laporan Keuangan (*unaudited*) BUMD Perumda Giri Tirta Tahun Buku 2024, dikarenakan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perumda Giri Tirta masih dalam proses penyelesaian.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Perumda Giri Tirta baik dalam bentuk modal disetor maupun aset secara real per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp97.145.900.700,00 dan Rp97.145.900.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Penyertaan Modal kepada Perumda Giri Tirta

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Penyerahan aset dari Dinas PU berupa jaringan pipa Tahun 2009	19.977.216.150,00	19.977.216.150,00
Penyertaan Aset Tanah	142.429.336,00	142.429.336,00
Penyertaan dari Pelimpahan Pemerintah	10.900.826.926,00	10.900.826.926,00
Penyertaan Aset dari Pihak Ketiga	6.696.453.520,00	6.696.453.520,00
Penyertaan Modal Tahun 2009	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2010	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2011	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2012	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2016	19.428.974.768,00	19.428.974.768,00
Penyertaan Modal Tahun 2019	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Jumlah	97.145.900.700,00	97.145.900.700,00

2. Perumda BPR Bank Gresik

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Perumda BPR Bank Gresik	25.219.879.830,00	24.731.685.374,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik pada Perumda BPR Bank Gresik per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp25.219.879.830,00 dan Rp24.731.685.374,00 merupakan nilai penyertaan modal yang menggunakan dasar penilaian investasi metode ekuitas dengan kepemilikan sebesar 100%. Uraian perhitungan sebagai berikut :



Tabel 136 Penyertaan Modal kepada Perumda BPR Bank Gresik
berdasarkan Metode Ekuitas

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
a. Saldo Investasi awal tahun		
1) Penyertaan Modal sampai dengan tahun sebelumnya	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2) Akumulasi Dana Cadangan sampai dengan tahun sebelumnya	4.214.263.642,00	3.949.231.591,11
3) Laba (rugi) tahun sebelumnya	517.421.735,00	1.325.160.256,00
b. Koreksi atas saldo awal	0,00	(0,11)
c. Koreksi L/R tahun lalu	0,00	0,00
d. Deviden yang disetor ke Kasda	(284.581.954,00)	(728.838.141,00)
Pembulatan atas deviden yang disetor ke Kasda	0,00	0,00
e. Deviden yang dibagi :		
1) Dana Kesejahteraan (10%)	(51.742.174,00)	(132.516.026,00)
2) Jasa Produksi (8%)	(41.393.739,00)	(106.012.820,00)
3) Dana Cadangan (20%)	(103.484.348,00)	(265.032.050,00)
4) Tantiem (4%)	(20.696.869,00)	(53.006.410,00)
5) CSR (3%)	(15.522.653,00)	(39.754.808,00)
g. Penambahan Akumulasi Dana Cadangan	103.484.348,00	265.032.050,00
h. Laba (rugi) Tahun Berjalan	902.131.842,00	517.421.732,00
i. Tambahan Penyertaan Modal		
Jumlah	25.219.879.830,00	24.731.685.374,00

Nilai penyertaan tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nur Shodiq dan Rekan Nomor 00019/2.1427/AU.207/1263-1/1/II/2025 atas Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Gresik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Perumda BPR Bank Gresik dalam bentuk modal disetor secara riil per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Rp20.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 137 Penyertaan Modal kepada Perumda BPR Bank Gresik

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Penyertaan Modal Tahun 2002	512.500.000,00	512.500.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2003	300.000.000,00	300.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2008	187.500.000,00	187.500.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2019	500.000.000,00	500.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2010	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2011	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2019	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00
Jumlah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00



3. PT Gresik Migas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
PT Gresik Migas	45.025.989.376,00	43.578.285.567,44

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik kepada PT. Gresik Migas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp45.025.989.376,00 dan Rp43.578.285.567,64 merupakan nilai penyertaan modal yang menggunakan dasar penilaian investasi metode ekuitas dengan kepemilikan sebesar 100,00% (mulai tahun 2024), dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 138 Penyertaan Modal kepada PT Gresik Migas berdasarkan Metode Ekuitas

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
a. Saldo Investasi awal tahun	43.578.285.567,64	44.350.952.392,71
b. Koreksi atas saldo awal	0,00	0,00
c. Koreksi laba rugi tahun lalu	0,00	130.632.914,26
d. Koreksi saldo awal atas pembelian saham PKPRI (1,85%)	671.394.073,36	0,00
e. Kelebihan atas deviden yang disetor	0,00	0,00
f. Kekurangan atas deviden yang disetor	0,00	(72.445.075,47)
g. Deviden yang disetor	0,00	(1.000.000.000,00)
h. Hutang Deviden	0,00	0,00
i. Dana Cadangan	18.796.992,00	(197.138.090,09)
j. Penggunaan Laba	(7.723.844,00)	0,00
k. Laba (rugi) tahun berjalan	615.236.587,00	366.283.426,23
l. Tambahan Penyertaan Modal	150.000.000,00	0,00
Jumlah	45.025.989.376,00	43.578.285.567,64

Nilai penyertaan tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen KAP Razikun Tarkosunaryo Nomor 00006/3.0499/AU.2/02/1198-1/III/2025 atas Laporan Keuangan PT Gresik Migas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Sedangkan nilai penyertaan modal kepada PT. Gresik Migas dalam bentuk modal disetor secara real per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp8.130.000.000,00 dan Rp7.980.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 139 Penyertaan Modal kepada PT Gresik Migas

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Penyertaan Modal s.d Tahun 2011	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2013	1.810.000.000,00	1.810.000.000,00
Koreksi Penyertaan Modal	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
Tambahan Modal disetor Tahun 2013	4.180.000.000,00	4.180.000.000,00
Tambahan Modal disetor Tahun 2024	150.000.000,00	0,00
Jumlah	8.130.000.000,00	7.980.000.000,00

4. PT Gresik Samudra

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
PT Gresik Samudra	23.112.064,80	23.112.064,80

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik kepada PT Gresik Samudra per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp23.112.064,80 dan Rp23.112.064,80 merupakan nilai penyertaan modal yang menggunakan dasar penilaian investasi metode ekuitas dengan kepemilikan 60%.

Tabel 140 Penyertaan Modal kepada PT Gresik Samudra berdasarkan Metode Ekuitas

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Saldo Investasi awal tahun	23.112.064,80	23.112.064,80
b. Koreksi atas saldo awal	0,00	0,00
c. Koreksi atas laba (rugi) tahun lalu	0,00	0,00
d. Tambahan Modal disetor	0,00	0,00
e. Deviden yang disetor	0,00	0,00
f. Laba (rugi) Tahun Berjalan	0,00	0,00
Jumlah	23.112.064,80	23.112.064,80

Nilai penyertaan tersebut sesuai dengan Laporan Keuangan BUMD PT Gresik Samudra Tahun 2018 (*unaudited*). PT Gresik Samudra berdasarkan surat No. 004/GS/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang surat pemberitahuan Pemberhentian Operasional PT Gresik Samudra, menyatakan bahwa terhitung mulai 1 Maret 2017 PT.Gresik Samudra berhenti operasi tetapi tidak dibubarkan menunggu hasil RUPS.

Sedangkan nilai penyertaan modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah



Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Gresik Samudra.

5. BPR Jatim

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
BPR Jatim	201.000.000,00	201.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik kepada BPR Jatim per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp201.000.000,00 dan Rp201.000.000,00 merupakan nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode biaya dengan kepemilikan saham di bawah 20%. Nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2010.

6. PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)	55.053.292.500,00	55.053.292.500,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik kepada PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp55.053.292.500,00 dan Rp55.053.292.500,00 merupakan nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode biaya dengan kepemilikan saham sebesar 1,47%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141 Penyertaan Modal kepada PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berdasarkan Metode Biaya

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Penyertaan Modal s.d Tahun 2010	3.211.304.243,11	3.211.304.243,11
Penyertaan Modal Tahun 2011	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2012	45.289.000.000,00	45.289.000.000,00
Cadangan umum yang dikonversi menjadi saham	5.053.292.500,00	5.053.292.500,00
Koreksi Pengakuan Dividen	(304.243,11)	(304.243,11)
Jumlah	55.053.292.500,00	55.053.292.500,00

Nilai Saham sebesar Rp5.053.292.500,00 merupakan Cadangan Umum yang dikonversi dalam bentuk Saham pada saat PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)



meluncurkan IPO (*Initial Public Offering*), sesuai hasil RUPS Luar Biasa No. 19 tanggal 11 Maret 2012.

Nilai Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan yang terakumulasi sebesar Rp60.240.822.539,34 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 142 Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi Permanen

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan) Rp	Ket
PDAM Kab Gresik	(11.843.122.507,00)	50.407.122.405,00	(62.250.244.912,00)	turun
PD BPR Bank Gresik	25.219.879.830,00	24.731.685.374,00	488.194.456,00	naik
PT Gresik Migas	45.025.989.376,00	43.578.285.567,64	1.447.703.808,36	naik
PT Gresik Samudra	23.112.064,80	23.112.064,80	0,00	tetap
BPR Jatim	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	tetap
Bank Jatim	55.053.292.500,00	55.053.292.500,00	0,00	tetap
Jumlah	113.680.151.263,80	173.994.497.911,44	(60.314.346.647,64)	

5.3.1.3 ASET TETAP

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Aset Tetap	5.880.603.454.828,53	5.619.363.537.057,25

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.880.603.454.828,53 dan Rp5.619.363.537.057,25 terdiri atas:

Tabel 143 Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	2.805.133.580.094,78	2.538.970.196.388,78
Peralatan dan Mesin	1.468.695.647.399,15	1.304.851.027.425,64
Gedung dan Bangunan	2.051.052.225.454,81	1.914.557.446.745,54
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.370.714.762.852,91	4.300.114.701.909,73
Aset Tetap Lainnya	22.610.370.045,82	21.563.786.031,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	82.566.626.843,42	161.111.446.349,75
Jumlah	10.800.773.212.690,90	10.241.168.604.851,20
Akumulasi Penyusutan	(4.920.169.757.862,36)	(4.621.805.067.793,93)
Jumlah setelah Penyusutan	5.880.603.454.828,53	5.619.363.537.057,25



5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Tanah	2.805.133.580.094,78	2.538.970.196.388,78

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.805.133.580.094,78 dan Rp2.538.970.196.388,78 merupakan nilai aset tetap tanah dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 144 Tanah

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	2.538.970.196.388,78	2.259.930.113.322,78
Penambahan :	371.463.128.523,00	607.323.336.621,00
Realisasi Belanja Modal	1.727.306.005,00	11.021.176.466,00
Hibah	347.959.063.365,00	561.700.697.600,00
Mutasi Tambah antar SKPD	6.488.844.817,00	34.255.718.555,00
Inventarisasi Tanah pada Badan PPKAD	15.287.914.336,00	345.744.000,00
Pengurangan :	105.299.744.817,00	328.283.253.555,00
Penghapusan	1.986.900.000,00	0,00
Reklasifikasi	96.824.000.000,00	294.027.535.000,00
Mutasi Kurang antar SKPD	6.488.844.817,00	34.255.718.555,00
Jumlah	2.805.133.580.094,78	2.538.970.196.388,78

Penambahan Aset tetap Tanah :

Penambahan aset tetap tanah tahun 2024 sebesar Rp371.463.128.523,00, terdiri dari :

1. Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp1.727.306.005,00
2. Hibah sebesar Rp347.959.063.365,00, terdiri atas :
 - a. Hibah dari Pengembang Perumahan Pongangan Indah PT Aneka Jasa Grhadika berupa Tanah PSU pada Perumahan Pongangan Indah di Desa Pongangan, Desa Suci dan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar seluas 121.353,51 m² dengan nilai sebesar Rp190.889.063.365,00 sesuai dengan BAST Nomor 5098/09/TU.04.05/AJG.05/2024 tanggal 23 September 2024.
 - b. Hibah dari Pengembang Perumahan Bukit Randu Agung Indah PT Trimurti Nusaperdana berupa Tanah PSU pada Perumahan Bukit Randu Agung Indah di Desa Randuagung Kecamatan Kebomas seluas 121.353,51 m² dengan nilai sebesar Rp60.246.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 03/FASUM/XI/2024 tanggal 18 November 2024.
 - c. Hibah dari PT Maspion Industrial Estate berupa Tanah Hasil Reklamasi seluas 52.000 m² dengan nilai sebesar Rp96.824.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 109/SK.MP/U.V/GEN/VII/23 tanggal 17 Juli 2024.
3. Mutasi antar OPD sebesar Rp6.88.844.817,00.



4. Inventarisasi tanah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp15.287.914.336,00 terdiri atas :
 - a. Inventarisasi Berupa Tanah Pasar Tambak di Desa Tambak Kecamatan Tambak Senilai Rp707.190.336,00
 - b. Inventarisasi Berupa Tanah Gedung PMI di Kecamatan Kebomas Senilai Rp16.950.000,00
 - c. Inventarisasi Berupa Tanah Gedung Pramuka di Kecamatan Kebomas Senilai Rp7.719.852.000,00
 - d. Inventarisasi Berupa 4 Tanah untuk Rumah Dinas di Kecamatan Gresik Senilai Rp536.802.000,00
 - e. Inventarisasi Berupa Tanah Kali Lamong di Desa Tambak Beras Kecamatan Cerme Senilai Rp6.307.120.000,00 yang terdiri atas dua luasan, antara lain :
 - Seluas 65.100 m² dengan nilai sebesar Rp2.343.600.000,00, dan
 - Seluas 24.772 m² dengan nilai sebesar Rp 3.963.520.000,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah :

Pengurangan aset tetap tanah tahun 2024 sebesar Rp105.299.744.817,00 terdiri dari:

1. Penghapusan Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.968.900.000,00, tanah tersebut dihapus karena dihibahkan ke Provinsi Jatim untuk Jalan Desa Petiyin, Karangcangkring Kecamatan Dukun.
2. Reklasifikasi aset Tanah ke Aset Lain-lain pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp96.824.000.000,00. Tanah tersebut adalah Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 455 milik Pemda seluas 52.000 m² yang sedang dimanfaatkan oleh PT Maspion Industrial Estate berdasarkan Addendum Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT. Maspion Industrial Estate Nomor : 593/1345/437.11/2024 dan Nomor 117/SK.MP/U.V/GEN/VIII/2024 tentang Pemanfaatan Tanah Hasil Reklamasi oleh PT. Maspion Industri Estate di Wilayah Perairan Kabupaten Gresik Nomor 248/SK.MP/UV/GEN/XII/2015 dan Nomor 180/6520/437.12/2015.
3. Mutasi antar OPD sebesar Rp6.88.844.817,00.

Penambahan dan pengurangan selama Tahun 2024 sebesar Rp371.463.128.523,00 dan Rp105.299.744.817,00 dirinci dalam **Lampiran 7**.

Aset Tetap Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sejumlah sejumlah 2.440 bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Telah bersertifikat sebanyak 1.152 dengan luasan 6.570.234 m²
2. Belum bersertifikat sebanyak 1.288 dengan luasan 13.539.157 m²
3. Tanah yang belum bersertifikat dikarenakan :



- Surat Keterangan Riwayat Tanah yang belum lengkap
- Terdapat Tanah Kas Desa yang di atasnya berdiri Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Gresik
- Adanya perubahan proses bisnis dalam pengurusan sertifikat

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Peralatan dan Mesin	<u>1.468.695.647.399,15</u>	<u>1.304.851.027.425,64</u>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.468.695.647.399,15 dan Rp1.304.851.027.425,64, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 145 Peralatan dan Mesin

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Alat-alat Berat	58.645.128.951,18	9.905.186.677,00	78.923.120,92	68.471.392.507,26
Alat-alat Angkutan	229.407.773.229,04	10.520.893.610,00	2.948.072.327,99	236.980.594.511,05
Alat-alat Bengkel dan Ukur	13.915.169.368,06	834.234.120,00	200.499.656,00	14.548.903.832,06
Alat-alat Pertanian/Peternakan	14.809.761.083,00	360.251.806,00	286.269.000,00	14.883.743.889,00
Alat-alat Kantor dan RT	205.276.079.709,44	25.618.905.503,38	12.312.013.457,92	218.582.971.754,90
Alat-alat Studio dan Komunikasi	40.312.385.252,62	5.000.553.504,00	1.248.308.911,60	44.064.629.845,02
Alat-alat Kedokteran	439.304.074.074,69	107.483.373.569,00	24.075.478.586,01	522.711.969.057,68
Alat-alat Laboratorium	81.810.407.870,49	10.006.546.240,00	5.927.456.364,98	85.889.497.745,51
Komputer	199.575.609.195,07	15.418.115.505,40	3.502.228.692,88	211.491.496.007,59
Alat-alat Keamanan	659.634.900,00	113.496.200,00	0,00	773.131.100,00
Rambu-rambu	20.186.853.067,05	28.871.171.888,53	165.125.301,50	48.892.899.654,08
Peralatan Olahraga	948.150.725,00	663.814.730,00	207.547.960,00	1.404.417.495,00
Jumlah	1.304.851.027.425,64	214.796.543.353,31	50.951.923.379,80	1.468.695.647.399,15
Akumulasi Penyusutan	(1.092.876.401.298,81)			(1.219.942.743.832,82)
Jumlah setelah Penyusutan	211.974.626.126,83			248.752.903.566,33

Penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama Tahun 2024 disajikan dalam **Lampiran 8**.

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp214.796.543.353,31 dan pengurangan sebesar Rp50.951.923.379,80 berasal atas :



Tabel 146 Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	1.304.851.027.425,64	1.253.059.162.470,49
Penambahan :	214.796.543.353,31	137.520.902.571,32
Belanja Modal	86.126.274.741,00	123.664.589.654,00
Mutasi Tambah antar OPD	2.616.127.750,00	1.908.490.817,31
Reklasifikasi	88.764.165.707,56	3.903.941.080,01
Pengakuan aset atas utang belanja BLUD tahun 2024	334.808.598,00	1.731.825.081,00
Hibah	36.933.552.873,62	6.312.055.939,00
Inventarisasi	21.613.683,13	0,00
Pengurangan :	50.951.923.379,80	85.729.037.616,17
Mutasi Kurang antar OPD	2.616.127.750,00	1.908.490.817,31
Penghapusan	31.114.530.640,43	9.468.826.196,87
Reklasifikasi	10.977.262.645,00	52.819.566.890,53
Koreksi ke Ekstrakomptabel	4.513.508.344,37	20.758.068.711,46
Utang Belanja Modal Tahun 2023	1.730.494.000,00	774.085.000,00
Jumlah	1.468.695.647.399,15	1.304.851.027.425,64

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp214.796.543.353,31, terdiri dari :

1. Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp86.126.274.741,00
2. Mutasi antar OPD sebesar Rp2.616.127.750,00
3. Reklasifikasi sebesar Rp88.764.165.707,56 terdiri atas :
 - a. Reklasifikasi antar bidang sebesar Rp81.082.029.836,91 terdiri atas :
 - 1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.004.813.433,91
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp389.864.403,00
 - 3) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp50.687.352.000,00
 - b. Reklasifikasi Subbidang sebesar Rp7.217.039.915,00
 - c. Koreksi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp465.095.955,65, yang terdiri atas :
 - 1) Koreksi dari Barang dan Jasa sebesar Rp134.638.389,20
 - 2) Koreksi kembali dari Ekstrakomptabel sebesar Rp330.457.566,45
4. Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal tahun 2024 pada RSUD Ibnu Sina sebesar Rp334.808.598,00
5. Hibah sebesar Rp36.933.552.873,62 terdiri atas :
 - a. Hibah kepada Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa Alat Bantu, Alat Rumah Tangga, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium dan Komputer sebesar Rp32.140.603.698,00 sesuai dengan :
 - BAST Nomor KN.02.07/I.3/0933/2020 tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp6.732.000.000,00



- BAST Nomor KN.02.07/I.3/0935/2020 tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp7.365.600.000,00
 - BAST Nomor KN.02.07/I.3/6955/2020 tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp8.287.400.000,00
 - BAST Nomor KN.02.07/I.3/7069/2020 tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp7.742.645.651,00
 - BAST Nomor KN.01.08/C.I/4861.344/2023 tanggal 7 Juni 2024 sebesar Rp1.755.405.299,00
 - SK Hibah Nomor HK.02.03/B.I/2492/2024 tanggal 23 April 2024 sebesar Rp257.552.748,00.
- b. Hibah kepada Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berupa Kendaraan Roda 4 sebesar Rp214.549.500,00 sesuai dengan BAST Nomor 000.1.7/16284/402.1/2024 tanggal 24 September 2024.
- c. Hibah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa satu set Instrumen Alat Peringatan Dini Bencana Banjir sebesar Rp320.701.200,00 sesuai dengan BAST Nomor BAST.462/BNPB/DII/RT.03.03/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.
- d. Hibah kepada Dinas Sosial dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI sebesar Rp496.120.100,00, yang terdiri atas :
- Mobil Dapur Umum Lapangan (DUM LAP) sebesar Rp465.693.000,00 sesuai dengan BAST Nomor /3.2/KS.01.02/2023 tanggal 20 Mei 2023; dan
 - Sepeda Motor Trail sebesar Rp30.427.100,00 sesuai dengan BAST Nomor /3.2/KS.01.02/05/2023 tanggal 22 Mei 2023.
- e. Hibah kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dari PT Smelting, Tbk berupa Alat Angkutan sebesar Rp90.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Donasi Mobil antara PT Smelting dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor SAD-1921/OL-O/IV/2024 tanggal 7 Mei 2024.
- f. Hibah kepada Dinas Perhubungan dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi berupa PJU sebesar Rp3.477.357.901,62 sesuai dengan Naskah Hibah Nomor 269/NH/BN.07/KPB/2024 tanggal 8 November 2024.
- g. Hibah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa Pojok Baca Digital (POCADI) sebesar Rp194.220.474,00 sesuai dengan BAST Nomor 5672/4.02/PLK.03.07/XI.2022 tanggal 30 November 2022.



6. Inventarisasi sebesar Rp21.613.683,13 terdiri dari :
 - a. Inventarisasi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.245.445,00
 - b. Inventarisasi pada Badan PPKAD sebesar Rp20.368.238,13.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp50.951.923.379,80 terdiri dari :

1. Mutasi antar OPD sebesar Rp2.616.127.750,00
2. Penghapusan aset sebesar Rp31.114.530.640,43, terdiri atas :
 - a. Penghapusan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp30.636.400.281,70
 - b. Penghapusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp3.600.000,00
 - c. Penghapusan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp90.885.000,00
 - d. Penghapusan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp285.650.000,00
 - e. Penghapusan pada Kecamatan Benjeng sebesar Rp97.995.358,73
3. Reklasifikasi sebesar Rp10.977.262.645,00, terdiri atas :
 - a. Reklasifikasi antar bidang sebesar Rp3.453.740.730,00, terdiri atas :
 - 1) Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.996.000.000,00
 - 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp401.145.730,00
 - 3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp56.595.000,00
 - b. Reklasifikasi Subbidang sebesar Rp7.217.039.915,00
 - c. Koreksi ke Barang dan Jasa sebesar Rp306.482.000,00
4. Koreksi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp4.513.508.344,37, terdiri atas :
 - a. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp141.158.500,00
 - b. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Kesehatan sebesar Rp3.739.749.889,41
 - c. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.947.500,00
 - d. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.625.000,00
 - e. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Sosial sebesar Rp771.792,61
 - f. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.564.000,00
 - g. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp12.345.000,00
 - h. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp19.992.500,00



- i. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp30.184.091,00
 - j. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Perhubungan sebesar Rp199.999.701,50
 - k. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp580.000,00
 - l. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Sekretariat Daerah sebesar Rp222.492.500,00
 - m. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Sekretariat DPRD sebesar Rp97.799.000,00
 - n. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp20.523.869,85
 - o. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp570.000,00
 - p. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Kecamatan Dudusampeyan sebesar Rp1.320.000,00
 - q. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Kecamatan Sangkapura sebesar Rp1.190.000,00, dan
 - r. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Kecamatan Tambak sebesar Rp7.795.000,00
 - s. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp900.000,00
5. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 sebesar Rp1.730.494.000,00, terdiri atas :
- a. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp566.215.000,00
 - b. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp160.018.000,00
 - c. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp699.500.000,00, dan
 - d. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Inspektorat sebesar Rp304.761.000,00.



5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Gedung dan Bangunan	2.051.052.225.454,81	1.914.557.446.745,54

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.051.052.225.454,81 dan Rp1.914.557.446.745,54, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 147 Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bangunan Gedung	1.817.144.225.926,31	241.295.861.136,28	79.075.978.930,13	1.979.364.108.132,46
Bangunan Monumen	97.413.220.819,23	1.817.432.596,32	27.542.536.093,20	71.688.117.322,35
Jumlah	1.914.557.446.745,54	243.113.293.732,60	106.618.515.023,33	2.051.052.225.454,81
Akumulasi Penyusutan	(374.844.992.418,41)			(407.558.328.604,69)
Jumlah setelah Penyusutan	1.539.712.454.327,13			1.643.493.896.850,12

Tabel 148 Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	1.914.557.446.745,54	1.846.394.489.694,04
Penambahan :	243.113.293.732,60	240.151.189.523,09
Belanja Modal	118.169.885.080,81	149.832.834.297,05
Mutasi Tambah antar OPD	17.081.395.605,34	43.656.399.105,00
Reklasifikasi	100.772.340.821,50	11.798.194.375,77
Pengakuan Aset atas Utang Belanja Modal Tahun 2024	7.089.672.224,95	30.493.079.767,80
Hibah/Inventarisasi	0,00	4.370.681.977,47
Pengurangan :	106.618.515.023,33	171.988.232.471,59
Mutasi Kurang antar OPD	17.081.395.605,34	43.656.399.105,00
Penghapusan	37.066.400,00	5.460.301.528,50
Reklasifikasi	58.911.013.250,19	118.674.958.584,55
Koreksi ke Ekstrakomptabel	95.960.000,00	2.130.280.800,80
Utang Belanja Modal Tahun 2023	30.493.079.767,80	2.066.292.452,74
Jumlah	2.051.052.225.454,81	1.914.557.446.745,54

Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan selama Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp243.113.293.732,60 dan Rp106.618.515.023,33 dirinci dalam **Lampiran 9**.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan :

Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp243.113.293.732,60

1. Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp118.169.885.080,81
2. Mutasi antar OPD sebesar Rp118.169.885.080,81



3. Reklasifikasi sebesar Rp100.772.340.821,50, terdiri atas :
 - a. Reklasifikasi antar bidang sebesar Rp97.691.790.190,75, terdiri atas :
 - 1) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp94.391.585,00
 - 2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp97.597.398.605,75
 - b. Reklasifikasi Subbidang sebesar Rp2.773.879.851,60
 - c. Koreksi dari Barang Jasa sebesar Rp306.670.777,93 terdiri atas :
 - 1) Koreksi dari Barang Jasa sebesar Rp277.769.577,93
 - 2) Koreksi kembali dari Ekstrakomptabel sebesar Rp28.901.200,00
 - d. Koreksi nilai aset sebesar Rp1,22
4. Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal tahun 2024 pada RSUD Ibnu Sina sebesar Rp7.089.672.224,95.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan :

Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp106.618.515.023,33 terdiri dari :

1. Mutasi antar OPD sebesar Rp118.169.885.080,81
2. Penghapusan sebesar Rp37.066.400,00, terdiri atas:
 - a. Penghapusan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.322.000,00, dan
 - b. Penghapusan pada Badan PPKAD sebesar Rp26.744.400,00
3. Reklasifikasi sebesar Rp58.911.013.250,19 terdiri atas:
 - a. Reklasifikasi antar bidang sebesar Rp55.650.138.628,54 terdiri atas :
 - 1) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.839.475.242,76
 - 2) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.820.313.237,68
 - 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp480.733.000,00
 - 4) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp509.617.148,10
 - b. Reklasifikasi Subbidang sebesar Rp2.773.879.851,60
 - c. Koreksi ke Barang dan Jasa sebesar Rp486.994.769,15
 - d. Koreksi nilai aset sebesar Rp0,90
4. Koreksi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp95.960.000,00, terdiri atas :
 - a. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.877.500,00
 - b. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.390.000,00, dan
 - c. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Kecamatan Gresik sebesar Rp29.692.500,00
5. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 sebesar Rp30.493.079.767,80, terdiri atas:
 - a. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.219.454.027,69



- b. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp28.878.458.192,11
- c. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp184.724.646,00, dan
- d. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Kecamatan Gresik sebesar Rp210.442.902,00.

Penambahan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.3.3.1 Bangunan Gedung

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Bangunan Gedung	1.979.364.108.132,46	1.817.096.425.926,31

Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.979.364.108.132,46 dan Rp1.817.096.425.926,31, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 149 Bangunan Gedung

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	1.817.144.225.926,31	1.748.841.726.277,11
Penambahan :	241.295.861.136,28	236.031.879.739,22
Belanja Modal	116.871.542.484,52	148.545.511.475,16
Mutasi Tambah antar OPD	17.081.395.605,34	42.381.769.135,00
Reklasifikasi	100.253.250.821,47	11.660.241.411,48
Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal tahun 2024	7.089.672.224,95	29.273.625.740,11
Hibah/Inventarisasi	0,00	4.170.731.977,47
Pengurangan :	79.075.978.930,13	167.729.380.090,02
Mutasi Kurang antar OPD	17.081.395.605,34	42.381.769.135,00
Penghapusan	37.066.400,00	3.914.343.803,50
Reklasifikasi	32.637.321.184,68	117.338.529.853,78
Koreksi ke Ekstrakomptabel	46.570.000,00	2.028.444.845,00
Utang Belanja Modal tahun 2023	29.273.625.740,11	2.066.292.452,74
Jumlah	1.979.364.108.132,46	1.817.144.225.926,31

5.3.1.3.3.2 Bangunan Monumen

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Bangunan Monumen	71.688.117.322,35	97.461.020.819,23

Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp71.688.117.322,35 dan Rp97.461.020.819,23, dengan rincian mutasi sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 150 Bangunan Monumen

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	97.413.220.819,23	97.552.763.416,93
Penambahan :	1.817.432.596,32	4.119.309.783,87
Belanja Modal	1.298.342.596,29	1.287.322.821,89
Mutasi antar OPD	0,00	1.274.629.970,00
Reklasifikasi	519.090.000,03	137.952.964,29
Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal Tahun 2024	0,00	1.219.454.027,69
Hibah/Inventarisasi	0,00	199.950.000,00
Pengurangan :	27.542.536.093,20	4.258.852.381,57
Mutasi antar OPD	0,00	1.274.629.970,00
Penghapusan	0,00	1.545.957.725,00
Reklasifikasi	26.273.692.065,51	1.336.428.730,77
Koreksi ke Ekstrakomptabel	49.390.000,00	101.835.955,80
Utang Belanja Modal Tahun 2023	1.219.454.027,69	0,00
Jumlah	71.688.117.322,35	97.413.220.819,23

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.370.714.762.852,91	4.300.114.701.909,73

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.370.714.762.852,91 dan Rp4.300.114.701.909,73 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 151 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Jalan dan Jembatan	3.477.921.266.463,20	166.867.874.405,40	138.654.880.147,92	3.506.134.260.720,68
Bangunan Air dan Irigasi	488.081.665.435,08	25.195.861.571,67	5.157.836.210,31	508.119.690.796,44
Instalasi	210.133.412.124,75	18.331.059.093,83	928.790.237,01	227.535.680.981,57
Jaringan	123.978.357.886,70	9.724.856.277,04	4.778.083.809,52	128.925.130.354,22
Jumlah	4.300.114.701.909,73	220.119.651.347,94	149.519.590.404,76	4.370.714.762.852,91
Akumulasi Penyusutan	(3.146.422.061.213,77)			(3.284.379.109.327,43)
Jumlah setelah Penyusutan	1.153.692.640.695,96			1.086.335.653.525,48



Tabel 152 Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	4.300.114.701.909,73	4.050.985.698.712,49
Penambahan :	220.119.651.347,94	307.332.664.516,52
Belanja Modal	208.508.996.188,58	133.679.243.538,30
Mutasi Tambah antar OPD	0,00	12.901.293.663,40
Reklasifikasi	10.970.243.283,12	29.849.725.640,86
Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal Tahun 2024	640.411.876,24	125.975.545.640,06
Hibah/Inventarisasi	0,00	4.926.856.033,90
Pengurangan :	149.519.590.404,76	58.203.661.319,28
Mutasi Kurang antar OPD	0,00	12.901.293.663,40
Penghapusan	14.666.058.943,00	728.533.210,00
Reklasifikasi	8.699.481.881,70	21.173.162.947,67
Koreksi ke Ekstrakomptabel	178.503.940,00	16.493.873.386,30
Utang Belanja Modal Tahun 2023	125.975.545.640,06	6.906.798.111,91
Jumlah	4.370.714.762.852,91	4.300.114.701.909,73

Penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi selama Tahun 2024 sebesar Rp220.119.651.347,94 dan Rp149.519.590.404,76 dirinci dalam **Lampiran 10**.

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp220.119.651.347,94 terdiri dari :

1. Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp208.508.996.188,58
2. Mutasi antar OPD sebesar Rp125.975.545.640,06
3. Reklasifikasi sebesar Rp10.970.243.283,12, terdiri atas :
 - a. Reklasifikasi antar bidang sebesar Rp10.292.392.531,11 terdiri atas :
 - 1) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.996.000.000,00
 - 2) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.820.313.237,68
 - 3) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp3.476.079.293,43
 - b. Reklasifikasi subbidang sebesar Rp677.850.752,01
4. Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal tahun 2024 pada RSUD Ibnu Sina sebesar Rp640.411.876,24.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp149.519.590.404,76 terdiri dari :

1. Mutasi antar OPD sebesar Rp125.975.545.640,06
2. Penghapusan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp14.666.058.943,00



3. Reklasifikasi sebesar Rp8.699.481.881,70, terdiri atas :
 - a. Reklasifikasi antar bidang sebesar Rp1.278.771.020,00, terdiri atas :
 1. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp94.391.585,00
 2. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Bangunan sebesar Rp1.184.379.435,00
 - b. Reklasifikasi subbidang sebesar Rp677.850.752,01
 - c. Koreksi ke Barang dan Jasa sebesar Rp6.742.860.109,69
4. Koreksi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp178.503.940,30
 - a. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp23.122.500,00
 - b. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp18.967.440,00
 - c. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Perhubungan sebesar Rp125.640.000,00
 - d. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Kecamatan Kebomas sebesar Rp10.774.000,00
5. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 sebesar Rp125.975.545.640,06 terdiri atas :
 - a. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp118.721.939.952,13
 - b. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.708.918.142,93
 - c. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp287.356.245,00
 - d. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Kecamatan Gresik sebesar Rp237.058.260,00
 - e. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 pada Kecamatan Kebomas sebesar Rp20.273.040,00.

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.4.1 Jalan dan Jembatan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Jalan dan Jembatan	3.506.134.260.720,68	3.477.921.266.463,20

Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.506.134.260.720,68 dan Rp3.477.921.266.463,20, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 153 Jalan dan Jembatan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	3.477.921.266.463,20	3.268.052.227.801,08
Penambahan :	166.867.874.405,40	220.707.562.792,09
Belanja Modal OPD	161.413.450.154,89	79.154.377.267,81
Mutasi Tambah antar OPD	0,00	0,00
Reklasifikasi	5.454.424.250,51	22.161.313.606,26
Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal Tahun 2024	0,00	116.474.327.508,02
Hibah/Inventarisasi	0,00	2.917.544.410,00
Pengurangan :	138.654.880.147,92	10.838.524.129,97
Mutasi Kurang antar OPD	0,00	0,00
Penghapusan	14.666.058.943,00	679.016.710,00
Reklasifikasi	7.491.371.196,90	4.965.845.813,43
Koreksi ke Ekstrakomptabel	23.122.500,00	774.291.191,00
Utang Belanja Modal Tahun 2023	116.474.327.508,02	4.419.370.415,54
Jumlah	3.506.134.260.720,68	3.477.921.266.463,20

5.3.1.3.4.2 Bangunan Air

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Bangunan Air	507.799.690.796,44	488.081.665.435,08

Saldo Bangunan Air per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp507.799.690.796,44 dan Rp477.470.935.262,92, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 154 Bangunan Air

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	488.081.665.435,08	477.470.935.262,92
Penambahan :	24.588.505.326,67	15.852.494.807,22
Belanja Modal	22.858.977.046,07	6.282.413.228,58
Mutasi Tambah antar OPD	0,00	2.822.335.121,76
Reklasifikasi	1.729.528.280,60	567.175.315,46
Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal Tahun 2024	0,00	4.171.259.517,52
Hibah/Inventarisasi	0,00	2.009.311.623,90
Pengurangan :	4.870.479.965,31	5.241.764.635,06
Mutasi Kurang antar OPD	0,00	2.822.335.121,76
Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi	699.220.447,79	0,00
Koreksi ke Ekstrakomptabel	0,00	2.419.429.513,30
Utang Belanja Modal Tahun 2023	4.171.259.517,52	0,00
Jumlah	507.799.690.796,44	488.081.665.435,08



5.3.1.3.4.3 Instalasi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Instalasi	227.855.680.981,57	210.133.412.124,75

Saldo Instalasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp227.855.680.981,57 dan Rp210.133.412.124,75, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 155 Instalasi

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	210.133.412.124,75	182.810.093.712,18
Penambahan :	18.938.415.338,83	51.720.916.930,36
Belanja Modal	18.938.415.338,83	38.758.013.169,36
Mutasi antar OPD	0,00	5.158.384.796,86
Reklasifikasi	0,00	7.121.236.719,14
Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal Tahun 2024	0,00	683.282.245,00
Hibah/Inventarisasi	0,00	0,00
Pengurangan :	1.216.146.482,01	24.397.598.517,79
Mutasi Keluar antar OPD	0,00	5.158.384.796,86
Reklasifikasi	508.890.237,01	6.621.044.455,93
Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	23.974.000,00	12.618.169.265,00
Utang Belanja Modal Tahun 2023	683.282.245,00	0,00
Jumlah	227.855.680.981,57	210.133.412.124,75

5.3.1.3.4.4 Jaringan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Jaringan	128.925.130.354,22	123.978.357.886,70

Saldo Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp128.925.130.354,22 dan Rp123.978.357.886,70, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 156 Jaringan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	123.978.357.886,70	122.652.441.936,31
Penambahan :	9.724.856.277,04	19.051.689.986,85
Belanja Modal	5.298.153.648,79	9.484.439.872,55
Mutasi Masuk antar OPD	0,00	4.920.573.744,78
Reklasifikasi	3.786.290.752,01	0,00
Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal Tahun 2024	640.411.876,24	4.646.676.369,52
Pengurangan :	4.778.083.809,52	17.725.774.036,46
Mutasi Keluar antar OPD	0,00	4.920.573.744,78
Penghapusan	0,00	49.516.500,00
Reklasifikasi	0,00	9.586.272.678,31
Koreksi ke Ekstrakomptabel	131.407.440,00	681.983.417,00
Utang Belanja Modal Tahun 2023	4.646.676.369,52	2.487.427.696,37
Jumlah	128.925.130.354,22	123.978.357.886,70

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Aset Tetap Lainnya	22.610.370.045,82	21.563.786.031,74

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.610.370.045,82 dan Rp21.563.786.031,74, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 157 Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Buku dan Perpustakaan	7.939.463.440,11	9.405.464.266,96	8.209.831.687,92	9.135.096.019,15
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1.623.542.250,24	521.446.768,00	714.524.332,96	1.430.464.685,28
Hewan, ternak dan Tumbuhan	10.171.752.733,29	0,00	436.704.000,00	9.735.048.733,29
Aset Renovasi	1.829.027.608,10	480.733.000,00	0,00	2.309.760.608,10
Jumlah	21.563.786.031,74	10.407.644.034,96	9.361.060.020,88	22.610.370.045,82
Akumulasi Penyusutan	(7.661.612.862,94)			(8.289.576.097,42)
Jumlah setelah penyusutan	13.902.173.168,80			14.320.793.948,40



Tabel 158 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	21.563.786.031,74	23.896.064.239,93
Penambahan :	10.407.644.034,96	12.232.935.664,12
Belanja Modal	8.617.485.563,00	10.702.434.291,00
Mutasi Tambah antar OPD	0,00	102.650.350,00
Reklasifikasi	1.790.158.471,96	1.425.776.023,12
Pengakuan aset atas Utang Belanja Modal Tahun 2024	0,00	0,00
Hibah/Inventarisasi	0,00	2.075.000,00
Pengurangan :	9.361.060.020,88	14.565.213.872,31
Mutasi Kurang antar OPD	0,00	102.650.350,00
Penghapusan	436.704.000,00	503.093.557,00
Reklasifikasi	1.067.894.937,96	177.414.000,00
Koreksi ke Ekstrakomptabel	7.856.461.082,92	13.782.055.965,31
Utang Belanja Modal Tahun 2023	0,00	0,00
Jumlah	22.610.370.045,82	21.563.786.031,74

Penambahan Aset Tetap Lainnya :

Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp10.407.644.034,96 terdiri dari :

1. Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp8.617.485.563,00
2. Reklasifikasi sebesar Rp1.790.158.471,96, terdiri atas :
 - a. Reklasifikasi antar bidang sebesar Rp881.878.730,00 terdiri atas :
 - 1) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp401.145.730,00
 - 2) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp480.733.000,00
 - b. Reklasifikasi antar subbidang sebesar Rp674.730.534,96
 - c. Koreksi ke Barang dan Jasa sebesar Rp233.549.207,00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya :

Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp9.361.060.020,88 terdiri dari :

1. Penghapusan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pertanian sebesar Rp436.704.000,00
2. Reklasifikasi sebesar Rp1.067.894.937,96, terdiri atas :
 - a. Reklasifikasi antar bidang sebesar Rp393.164.403,00, terdiri atas :
 - 1) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp389.864.403,00
 - 2) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp3.300.000,00
 - b. Reklasifikasi subbidang sebesar Rp674.730.534,96
3. Koreksi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp7.856.461.082,92 terdiri dari :
 - a. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.798.330.825,00
 - b. Koreksi ke Ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan sebesar Rp58.130.257,92



Penambahan dan pengurangan selama Tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 159 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Buku dan Perpustakaan	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Hewan, Ternak dan Tumbuhan	Aset Renovasi
Saldo Awal	7.939.463.440,11	1.623.542.250,24	10.171.752.733,29	1.829.027.608,10
Penambahan	9.405.464.266,96	521.446.768,00	0,00	480.733.000,00
Realisasi Belanja Modal	8.539.888.130,00	77.597.433,00	0,00	0,00
Mutasi Masuk antar OPD	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi	865.576.136,96	443.849.335,00	0,00	480.733.000,00
Inventarisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan	8.209.831.687,92	714.524.332,96	436.704.000,00	0,00
Mutasi Keluar antar OPD	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00	436.704.000,00	0,00
Reklasifikasi	391.603.105,00	676.291.832,96	0,00	0,00
Koreksi ke Ekstrakomptabel	7.818.228.582,92	38.232.500,00	0,00	0,00
Jumlah	9.135.096.019,15	1.430.464.685,28	9.735.048.733,29	2.309.760.608,10

Penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya selama Tahun 2024 dirinci dalam **Lampiran 11**.

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Konstruksi Dalam Pengerjaan	82.566.626.843,42	161.111.446,349,75

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp82.566.626.843,42 dan Rp161.111.446.349,75 dengan rincian mutasi sebagai berikut:



Tabel 160 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	161.111.446.349,75	62.795.771.304,68
Penambahan :	22.528.658.392,85	149.024.603.119,98
Mutasi Tambah OPD	0,00	28.984.279.429,00
Reklasifikasi		
Reklas dari Gedung dan Bangunan	21.344.278.957,85	114.024.857.424,31
Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.184.379.435,00	5.820.179.526,67
Koreksi dari Belanja Barang Jasa	0,00	195.286.740,00
Pengurangan :	101.073.477.899,18	50.708.928.074,91
Mutasi Kurang antar OPD	0,00	28.984.279.429,00
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	97.597.398.605,75	115.889.406,70
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.476.079.293,43	21.608.759.239,20
Koreksi nilai aset	0,00	0,01
Jumlah	82.566.626.843,42	161.111.446.349,75

Daftar rincian KDP dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Akumulasi Penyusutan	(4.920.169.757.862,36)	(4.621.805.067.793,93)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp4.920.169.757.862,36) dan (Rp4.621.805.067.793,93) dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 161 Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(1.219.942.743.832,82)	(1.092.876.401.298,81)
Gedung dan Bangunan	(407.558.328.604,69)	(374.844.992.418,41)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.284.379.109.327,43)	(3.146.422.061.213,77)
Aset Tetap Lainnya	(8.289.576.097,42)	(7.661.612.862,94)
Jumlah	(4.920.169.757.862,36)	(4.621.805.067.793,93)

Rincian akumulasi penyusutan Tahun 2024 dirinci dalam **Lampiran 13**.



5.3.1.4 ASET LAINNYA

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Aset Lainnya	946.491.656.953,05	926.756.908.196,39

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp946.491.656.953,05 dan Rp926.756.908.196,39 terdiri atas:

Tabel 162 Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset yang dibatasi penggunaannya	2.141.821.572,00	1.652.995.123,00	581.660.903,00	3.213.155.792,00
Tuntutan Ganti Rugi	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00
Aset Tak Berwujud	7.852.620.833,37	1.315.300.000,00	0,00	9.167.920.833,37
Aset Lain-lain	935.814.499.886,71	120.653.044.000,00	108.297.858.502,00	948.169.685.384,71
Jumlah	945.812.582.292,08	123.621.339.123,00	108.879.519.405,00	960.554.402.010,08
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(3.640.000,00)			(3.640.000,00)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.795.609.577,84)			(4.614.774.770,88)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(15.256.424.517,85)			(9.444.330.286,15)
Jumlah setelah penyusutan	926.756.908.196,39			946.491.656.953,05

5.3.1.4.1 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Kas yang dibatasi penggunaannya	3.213.155.792,00	2.141.821.572,00

Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya, disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.213.155.792,00 dan Rp2.141.821.572,00, rincian jumlah kas yang dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut:



Tabel 163 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Uang Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan	560.826.624,00	729.568.613,00
Uang Titipan Jaminan Bongkar Reklame Dinas PM dan PTSP	579.435.968,00	773.162.259,00
Uang jaminan atas sewa rusunawa pada Dinas CKPKP	154.960.000,00	156.795.000,00
Uang Titipan OPD BPPKAD (BPHTB)	65.778.600,00	65.778.600,00
Uang Titipan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur	364.997.100,00	364.997.100,00
Uang Titipan Kejaksaan Negeri Gresik	1.414.847.500,00	0,00
Uang Titipan Pasien RSUD Ibnu Sina	72.310.000,00	51.520.000,00
Jumlah	3.213.155.792,00	2.141.821.572,00

5.3.1.4.2 Tuntutan Ganti Rugi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Tuntutan Ganti Rugi	3.640.000,00	3.640.000,00

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.640.000,00 dan Rp3.640.000,00 merupakan bagian dari Tuntutan Ganti Rugi yang masuk kategori jangka panjang.

Tabel 164 Rincian Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	2024	2023
1	SKTJM a.n. Suryo Wibowo (kehilangan kendaraan roda dua)	2.000.000,00	2.000.000,00
2	SKTJM a.n. Hari Subagio (kehilangan kendaraan roda dua)	1.640.000,00	1.640.000,00
Jumlah		3.640.000,00	3.640.000,00

Daftar Penyisihan Piutang Lainnya dan Saldo Piutang Lainnya (NRV) per 31 Desember 2024 pada adalah sebagai berikut :



Tabel 165 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo Piutang NRV
Piutang Lainnya - TGR	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
Jumlah	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00

Saldo Tuntutan Ganti Rugi - Aset Lainnya merupakan nilai yang belum terbayar atas tuntutan ganti rugi yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang telah jatuh tempo.

- Saldo kerugian daerah berdasarkan SKTJM sebesar Rp58.427.660,00 yang terdiri atas:
 1. Saldo kerugian daerah berdasarkan SKTJM yang telah jatuh tempo dan dicatat pada Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp3.640.000,00.
 2. Saldo kerugian daerah berdasarkan SKTJM yang telah jatuh tempo dan dicatat pada Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi – Aset Lancar sebesar Rp34.615.047,99.
- Saldo kerugian daerah berdasarkan informasi BPK sebesar Rp1.666.489.718,34
 - ✓ Saldo atas Informasi kerugian Tahun 2004 sebesar Rp1.275.527.000,00
 - ✓ Saldo atas Informasi kerugian Tahun 2006 sebesar Rp241.789.400,00
 - ✓ Saldo atas Informasi kerugian Tahun 2010 sebesar Rp56.008.000,00
 - ✓ Saldo atas Informasi kerugian Tahun 2015 sebesar Rp33.600.000,00
 - ✓ Saldo atas Informasi kerugian Tahun 2022 sebesar Rp59.565.318,24
- Saldo kerugian daerah berdasarkan informasi APIP sebesar Rp11.593.500,00, saldo tersebut merupakan saldo atas kerugian daerah Tahun 2016.
- Sehingga total saldo kerugian daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.716.338.266,33.

5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Aset Tak Berwujud	9.167.920.833,37	7.852.620.833,37

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.167.920.833,37 dan Rp7.852.620.833,27 berupa pengadaan software aplikasi komputer, dengan rincian mutasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 166 Aset Tak Berwujud

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tak Berwujud	7.852.620.833,37	1.315.300.000,00	0,00	9.167.920.833,37
Jumlah	7.852.620.833,37	1.315.300.000,00	0,00	9.167.920.833,37
Amortisasi	(3.795.609.577,84)			(4.614.774.770,88)
Jumlah setelah amortisasi	4.057.011.255,53			4.553.146.062,49

Tabel 167 Penambahan dan Pengurangan Aset tak Berwujud

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	7.852.620.833,37	5.229.791.008,97
Penambahan :	1.315.300.000,00	2.622.829.824,40
Belanja Modal OPD	1.312.000.000,00	2.440.000.000,00
Mutasi Masuk antar OPD	0,00	0,00
Reklasifikasi	3.300.000,00	182.829.824,40
Pengakuan aset atas Utang Belanja Moda Tahun 2024	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00
Mutasi Keluar antar OPD	0,00	0,00
Reklasifikasi	0,00	0,00
Utang Belanja Moda Tahun 2023	0,00	0,00
Jumlah	9.167.920.833,37	7.852.620.833,37

Penambahan Aset Tak Berwujud :

1. Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp1.312.000.000,00
2. Reklasifikasi antar bidang dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.300.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Amortisasi	(4.614.774.770,88)	(3.795.609.577,84)

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp4.614.774.770,88) dan (Rp3.795.609.577,84).

Penambahan dan pengurangan aset tak berwujud Tahun 2024 dirinci dalam **Lampiran 14**.



5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Aset Lain-Lain	948.169.685.384,71	935.814.499.886,71

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp948.169.5.384,71 dan Rp935.814.499.886,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 168 Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Rusak Berat	3.774.315.136,13	3.774.315.136,13
Nilai di bawah Kapitalisasi	104.343.188,94	104.343.188,94
Ganti Rugi Pelepasan Aset	73.531.500,00	73.531.500,00
Proses Hibah	5.750.185,00	5.750.185,00
Reklas atas Tanah BGS dan Tanah Jalan Desa Kramat Inggil	1.462.723.903,00	1.462.723.903,00
Pinjam Pakai	6.287.547.486,63	6.287.547.486,63
Pinjam Pakai Kepala Desa	16.993.633.497,29	16.993.633.497,29
Lampu LED Dinas Perhubungan	1.025.326.512,00	1.025.326.512,00
Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dipergunakan lagi	63.800.000,00	7.423.485.502,00
Tanah HPL	894.084.125.000,00	797.260.125.000,00
Aset TGR	203.711.975,72	165.981.975,72
Instalasi Dinas Perikanan	318.428.000,00	318.428.000,00
Aset Lain-lain atas DBH yang disalurkan melalui rekening TDF	23.772.449.000,00	48.481.956.000,00
Alat Kedokteran BLUD RSUD Ibnu Sina yang belum diuji dan belum bisa digunakan	0,00	50.687.352.000,00
Tanah Waduk Boteng yang masih dalam proses penghapusan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan	0,00	1.750.000.000,00
Jumlah	948.169.685.384,71	935.814.499.886,71

Saldo Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp948.169.685.384,71 didalamnya terdapat Tanah HPL sebesar Rp894.084.125.000,00 yang merupakan aset yang disewakan kepada pihak ketiga dan termasuk dalam kategori akun Properti Investasi. Akun Properti Investasi pada tahun 2024 belum disajikan secara terpisah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Gresik karena belum ditetapkannya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik yang mengatur terkait Properti Investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 169 Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	935.814.499.886,71	566.777.057.661,28
Penambahan :	120.653.044.000,00	393.215.708.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin atas aset yang hilang	56.595.000,00	18.865.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin RSUD Ibnu Sina	0,00	50.687.352.000,00
Reklasifikasi dari Tanah	96.824.000.000,00	294.027.535.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Aset lain-lain atas DBH yang disalurkan melalui rekening TDF Tahun 2024	23.772.449.000,00	48.481.956.000,00
Pengurangan :	108.297.858.502,00	24.178.265.774,57
Penghapusan Aset TGR	18.865.000,00	678.025.440,57
Penghapusan Tanah Waduk Boteng yang masih dalam proses penghapusan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan	1.750.000.000,00	0,00
Penghapusan Aset Rusak Berat	0,00	3.200.000,00
Penghapusan Aset Tak Berwujud yang sudah tidak digunakan lagi	7.359.685.502,00	0,00
Reklas Aset Lain-lain ke Peralatan dan Mesin	50.687.352.000,00	537.000.000,00
Aset lain-lain atas DBH yang disalurkan melalui rekening TDF Tahun 2023	48.481.956.000,00	22.960.040.334,00
Jumlah	948.169.685.384,71	935.814.499.886,71

Penambahan dan pengurangan aset lain-lain Tahun 2024 dirinci dalam **Lampiran 15**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(9.444.330.286,15)	(15.256.424.517,85)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp9.444.330.286,15) dan (Rp15.256.424.517,85) dengan rincian mutasi sebagai berikut:



Tabel 170 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(9.159.544.362,65)	(9.121.814.362,65)
Gedung dan Bangunan	(5.562.867,35)	(5.562.867,35)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(66.723.601,00)	(66.723.601,00)
Aset Tetap Lainnya	(197.489.455,15)	(197.489.455,15)
Amortisasi	(15.010.000,00)	(5.864.834.231,70)
Jumlah	(9.444.330.286,15)	(15.256.424.517,85)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan hasil reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain .

5.3.2 KEWAJIBAN

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
KEWAJIBAN	75.718.521.968,50	281.779.469.062,65

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam neraca daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Kewajiban Jangka Pendek	75.718.521.968,50	281.779.469.062,65

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp75.718.521.968,50 dan Rp281.779.469.062,65, terdiri atas:

Tabel 171 Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.213.155.792,26	2.141.821.572,26
Pendapatan Diterima Dimuka	21.448.053.077,67	49.386.715.444,64
Utang Belanja	50.312.768.449,57	210.147.611.074,75
Utang Jangka Pendek Lainnya	744.544.649,00	20.103.320.971,00
Jumlah	75.718.521.968,50	281.779.469.062,65



5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	3.213.155.792,26	2.141.821.572,26

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.213.155.792,26 dan Rp2.141.821.572,26, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 172 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Uang Titipan IWP	0,26	0,26
Uang Titipan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan	560.826.624,00	729.568.613,00
Uang Titipan Jaminan Bongkar Reklame	579.435.968,00	773.162.259,00
Uang Titipan atas jaminan sewa rusunawa	154.960.000,00	156.795.000,00
Uang Titipan OPD BPPKAD (BPHTB)	65.778.600,00	65.778.600,00
Uang Titipan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur	364.997.100,00	364.997.100,00
Uang Titipan Dinas Koperasi, UM, Perindag (Kejaksaan Negeri Gresik)	1.414.847.500,00	0,00
Uang Titipan Pasien pada RSUD Ibnu Sina	72.310.000,00	51.520.000,00
Jumlah	3.213.155.792,26	2.141.821.572,26

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.213.155.792,26, terdiri dari :

1. Uang Titipan IWP

Saldo Uang Titipan Taperum dan IWP Tahun 2024 sebesar Rp0,26 merupakan akumulasi dari sisa Titipan IWP sampai dengan tahun 2023.

Tabel 173 Uang Titipan IWP

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	0,26	108.876.537,26
Penambahan		
Penerimaan	71.622.330.319,00	68.746.316.682,00
Pengurangan		
Pengeluaran	71.622.330.319,00	68.855.193.219,00
Saldo Akhir	0,26	0,26



2. Uang Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan

Saldo Uang Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan sebesar Rp560.826.624,00 merupakan akumulasi dari sisa Jaminan Pemeliharaan sampai dengan Tahun 2024.

Mutasi Uang Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 174 Mutasi Uang Jaminan Pemeliharaan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	729.568.613,00	729.568.613,00
Penambahan		
Penerimaan Jaminan Pemeliharaan	0,00	0,00
Pengurangan		
Pengeluaran Jaminan Pemeliharaan	156.077.634,00	0,00
Pengakuan Pendapatan	12.664.355,00	0,00
Saldo Akhir	560.826.624,00	729.568.613,00

Tabel 175 Rincian Saldo Uang Jaminan Pemeliharaan per tahun

SKPD	Tahun	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2016	29.795.280,00
	2017	309.777.833,00
	2018	189.675.715,00
	2019	25.463.391,00
Dinas Perhubungan	2016	2.383.150,00
Sekretariat Daerah	2018	3.731.255,00
Saldo Titipan Jaminan Pemeliharaan per 31 Desember 2024		560.826.624,00

3. Uang Titipan Jaminan Bongkar

Saldo Uang Titipan Jaminan Bongkar Tahun 2024 sebesar Rp579.435.968,00 merupakan akumulasi dari sisa Jaminan Bongkar Reklame sampai dengan tahun 2024.

Mutasi Uang Titipan Jaminan Bongkar selama Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 176 Mutasi Uang Jaminan Bongkar Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	773.162.259,00	1.480.671.898,00
Penambahan		
Penerimaan Jaminan Bongkar	148.942.623,00	102.401.732,00
Pengurangan		
Pengembalian Jaminan Bongkar	8.386.500,00	8.770.000,00
Pengakuan Pendapatan	334.282.414,00	801.141.371,00
Saldo Akhir	579.435.968,00	773.162.259,00

4. Uang Titipan atas Jaminan Sewa Rusunawa

Uang Titipan atas Jaminan Sewa Rusunawa pada UPT Rusunawa Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp154.960.000,00.

Tabel 177 Mutasi Uang Jaminan Sewa Rusunawa Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	156.795.000,00	153.719.106,28
Penambahan		
Penerimaan Jaminan Sewa Rusunawa	16.895.000,00	13.025.000,00
Pengurangan		
Pengembalian Jaminan Sewa Rusunawa	18.730.000,00	1.040.000,00
Koreksi	0,00	8.909.106,28
Saldo Akhir	154.960.000,00	156.795.000,00

5. Uang Titipan Badan PPKAD

Uang Titipan Badan PPKAD merupakan uang titipan dari Wajib Pajak dalam rangka Pengurusan BPHTB sebesar Rp65.778.600,00.

6. Uang Titipan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur

Uang Titipan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sebesar Rp364.997.100,00, uang tersebut merupakan pengembalian dana bergulir Provinsi Jawa Timur yang dibayarkan oleh KPKNL ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Gresik, uang tersebut belum disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2024 belum ada surat balasan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur atas surat yang dikirimkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.



7. Uang Titipan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

Uang Titipan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atas kasus hukum yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum sebesar Rp1.414.847.500,00

8. Uang Titipan Pasien pada RSUD Ibnu Sina

Uang Titipan Pasien pada RSUD Ibnu Sina per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.310.000,00.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Pendapatan Diterima Dimuka	21.448.053.077,67	49.386.715.444,64

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.448.053.077,67 dan Rp49.386.715.444,64 terdiri atas:

Tabel 178 Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame pada Badan PPKAD	1.881.035.765,81	1.225.769.518,83
Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah pada Badan PPKAD	1.062.979.498,68	28.272.901.293,00
Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	0,00	679.434.583,33
Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	24.191.263,18	51.341.266,15
Bagian lancar atas penerimaan sewa tanah hasil reklamasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	18.419.022.800,00	18.968.148.200,00
Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Trayek pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	546.000,00	2.890.500,00
Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perikanan	23.750.000,00	28.750.000,00
Pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan usaha lainnya pada RSUD Ibnu Sina	0,00	58.333.333,33
Pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, UM, Perindag	36.527.750,00	99.146.750,00
Jumlah Total	21.448.053.077,67	49.386.715.444,64



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 179 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

No	jenis piutang	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir
			Ketetapan Pendapatan	Koreksi	Diakui pendapatan LO	Koreksi	
1	Pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame pada Badan PPKAD	1.225.769.518,83	7.951.710.010,00	0,00	7.296.443.763,02	0,00	1.881.035.765,81
2	Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah pada Badan PPKAD	28.272.901.293,00	56.856.957.405,00	0,00	84.066.879.199,32	0,00	1.062.979.498,68
3	Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	679.434.583,33	0,00	0,00	679.434.583,33	0,00	0,00
4	Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas PM dan PTSP	51.341.266,15	8.860.000,00	0,00	36.010.002,97	0,00	24.191.263,18
5	Bagian lancar atas penerimaan sewa tanah hasil reklamasi pada Dinas PM dan PTSP	18.968.148.200,00	0,00	0,00	549.125.400,00	0,00	18.419.022.800,00
6	Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Trayek pada Dinas PM dan PTSP	2.890.500,00	0,00	0,00	2.344.500,00	0,00	546.000,00
7	Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perikanan	28.750.000,00	137.545.000,00	0,00	142.545.000,00	0,00	23.750.000,00
8	Pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan usaha lainnya pada RSUD Ibnu Sina	58.333.333,33	0,00	0,00	58.333.333,33	0,00	0,00
9	Pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, UM, Perindag	99.146.750,00	2.020.707.600,00	0,00	2.083.326.600,00	0,00	36.527.750,00
	Jumlah	49.386.715.444,64	66.975.780.015,00	0,00	94.914.442.381,97	0,00	21.448.053.077,67

5.3.2.1.3 Utang Belanja

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Utang Belanja	50.312.768.449,57	210.147.611.074,75

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp50.312.768.449,57 dan Rp210.147.611.074,75 adalah merupakan utang belanja pada OPD yang terdiri atas :

		2024	2023
Utang SPM	Rp	0,00	186.832.877.037,38
Utang Belanja BLUD	Rp	46.484.819.796,57	19.338.096.412,37
Utang atas Beban Jasa OPD	Rp	3.827.948.653,00	3.976.637.625,00
Jumlah	Rp	50.312.768.449,57	210.147.611.074,75



Tabel 180 Utang Belanja berdasarkan SPM Tahun 2024 dan 2023

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
UTANG BELANJA MELALUI SPM		
Dinas Pendidikan	0,00	566.215.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	142.493.539.945,25
Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	38.288.662.040,27
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	659.506.229,53
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	287.356.245,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	97.391.400,00
Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0,00	64.349.999,83
Sekretariat Daerah	0,00	2.155.419.191,50
Sekretariat DPRD	0,00	648.042.000,00
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	341.913.650,00
Inspektorat	0,00	438.276.334,00
Kecamatan Gresik	0,00	599.837.562,00
Kecamatan Kebomas	0,00	181.267.440,00
Kecamatan Tambak	0,00	11.100.000,00
Jumlah Utang SPM	0,00	186.832.877.037,38

Utang SPM Belanja tahun 2023 pada 14 OPD sebesar Rp186.832.877.037,38 telah diselesaikan pembayarannya pada tahun 2024.



Tabel 181 Utang Belanja BLUD Tahun 2024 dan 2023

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
UTANG BELANJA BLUD		
RSUD Ibnu Sina		
Utang Belanja Pegawai	5.053.974.109,27	11.786.111.872,17
Utang Belanja Barang	25.520.264.064,81	6.214.366.516,20
Utang Belanja Belanja Jasa	2.074.421.733,30	234.387.425,00
Utang Belanja Pemeliharaan	3.282.827.843,00	120.133.430,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	370.000,00
Utang Belanja Modal	8.064.892.699,19	0,00
Jumlah	43.996.380.449,57	18.355.369.243,37
RSUD Umar Mas'ud		
Utang Belanja Belanja Pegawai	640.884.377,82	312.138.626,34
Utang Belanja Belanja Barang	234.034.111,00	137.801.057,00
Utang Belanja Belanja Jasa	469.188.308,18	300.014.542,66
Utang Belanja Belanja Modal	0,00	0,00
Jumlah	1.344.106.797,00	749.954.226,00
Puskesmas		
Utang Belanja Belanja Pegawai	667.687.844,00	2.493.450,00
Utang Belanja Belanja Barang	37.594.131,00	0,00
Utang Belanja Belanja Jasa	439.050.575,00	228.948.412,00
Utang Belanja Belanja Modal	0,00	1.331.081,00
Jumlah	1.144.332.550,00	232.772.943,00
Jumlah Utang Belanja BLUD	46.484.819.796,57	19.338.096.412,37

Utang Belanja BLUD pada tahun 2023 sebesar Rp19.338.096.412,37 210.147.611.074,75 telah diselesaikan pembayarannya pada tahun 2024, sedangkan Utang Belanja BLUD tahun 2024 sebesar Rp46.484.819.796,57 sudah terbayar sebesar Rp22.223.564.170,92 pada triwulan pertama tahun 2025 dan sisanya sebesar Rp24.261.255.625,65 akan diselesaikan pada triwulan kedua tahun 2025.



Tabel 182 Utang Belanja berdasarkan SPM Tahun 2024 dan 2023

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PENGAKUAN UTANG ATAS BEBAN JASA OPD		
Utang Beban Tagihan Jasa Telepon	21.509.882,00	22.534.140,00
Utang Beban Tagihan Jasa Air	55.666.065,00	48.466.521,00
Utang Beban Tagihan Jasa Listrik	3.689.536.305,00	3.833.917.721,00
Utang Beban Tagihan Jasa Kawat/Faksimilie/Langgan TV	61.236.401,00	71.719.243,00
Jumlah Utang atas Beban Jasa OPD	3.827.948.653,00	3.976.637.625,00

Pengakuan utang atas Beban Jasa OPD sebesar Rp3.827.948.653,00 merupakan Beban Jasa atas Tagihan Jasa Telepon, Tagihan Jasa Air, Tagihan Jasa Listrik dan Tagihan Jasa Kawat/Faksimilie/Langgan TV atas pemakaian bulan Desember 2024, tagihan tersebut terbit dan telah diselesaikan pada bulan Januari 2025.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Utang Jangka Pendek Lainnya	744.544.649,00	20.103.320.971,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp744.544.649,00 dan Rp20.103.320.971,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 183 Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang RSUD Ibnu Sina kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	20.000.000.000,00
Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur yang harus dikembalikan	744.544.649,00	103.320.971,00
Jumlah	744.544.649,00	20.103.320.971,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.103.320.971,00 telah diselesaikan pada tahun 2024 melalui belanja tidak terduga, sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp744.544.649,00 akan dibayarkan melalui belanja tidak terduga yang akan dianggarkan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025.



5.3.2.1.5 Utang Kepada Pihak Ketiga

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan pendapatan diterima dimuka untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

5.3.3 EKUITAS

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Ekuitas	7.168.345.501.083,33	6.728.905.682.222,45

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.168.345.501.083,33 dan Rp6.728.905.682.222,45 atau mengalami kenaikan sebesar Rp439.439.818.860,88 atau 6,53% jika dibandingkan per 31 Desember 2023.



5.4 KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari operasi, Kegiatan non operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan surplus/Defisit-LO.

5.4.1 PENDAPATAN

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan LO	3.831.045.808.278,91	3.704.353.109.318,95

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.831.045.808.278,91 mengalami kenaikan sebesar Rp126.692.698.959,96 atau 3,42 % dari pendapatan-LO per 31 Desember 2023.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3.831.045.808.278,91 dan Rp3.704.353.109.318,95 tersebut terdiri dari:

Tabel 184 Rincian Pendapatan-LO

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Asli Daerah - LO	1.446.541.157.085,29	1.186.708.861.003,58	259.832.296.081,71
Pendapatan Transfer - LO	1.998.244.101.676,00	1.936.263.122.261,00	61.980.979.415,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	386.260.549.517,62	581.381.126.054,37	(195.120.576.536,75)
Jumlah	3.831.045.808.278,91	3.704.353.109.318,95	126.692.698.959,96

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	1.446.541.157.085,29	1.186.708.861.003,58

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.446.541.157.085,29 mengalami kenaikan sebesar Rp259.832.296.081,71 atau 21,90% dari jumlah PAD-LO pada tahun lalu.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.446.541.157.085,29 dan Rp1.186.708.861.003,58 terdiri dari:

Tabel 185 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Pajak Daerah-LO	981.409.672.849,22	817.381.578.603,96	164.028.094.245,26
2	Retribusi Daerah-LO	440.759.765.025,31	63.629.177.450,94	377.130.587.574,37
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO	14.171.414.818,66	12.723.671.303,79	1.447.743.514,87
4	Lain-lain PAD yg Sah-LO	10.200.304.392,10	292.974.433.644,89	(282.774.129.252,79)
	Jumlah	1.446.541.157.085,29	1.186.708.861.003,58	259.832.296.081,71

Terdapat perbedaan sebesar Rp61.512.472.484,53 antara Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional dan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 186 Perbedaan PAD pada LO dan LRA Tahun 2024

Uraian	LO	LRA	Selisih
Pajak Daerah-LO	981.409.672.849,22	960.468.393.710,00	20.941.279.139,22
Retribusi Daerah-LO	440.759.765.025,31	401.465.003.530,69	39.294.761.494,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO	14.171.414.818,66	12.267.234.269,30	1.904.180.549,36
Lain2 PAD yg Sah-LO	10.200.304.392,10	10.828.053.090,77	(627.748.698,67)
	1.446.541.157.085,29	1.385.028.684.600,76	61.512.472.484,53

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Pendapatan pajak daerah	981.409.672.849,22	817.381.578.603,96

Pendapatan Pajak Daerah LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp981.409.672.849,22 mengalami kenaikan sebesar Rp164.028.094.245,26 atau 20,07% dari jumlah pendapatan pajak daerah-LO per 31 Desember 2023.

Pendapatan pajak daerah-LO terdiri atas pendapatan pajak yang diperoleh dengan secara *Official Assesment* sebesar Rp240.423.414.307,20 dan secara *Self Assessment* sebesar Rp741.443.974.756,00 dengan penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 187 Realisasi Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	OFFICE	SELF	HAK 2024 ATAS PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN SEBELUMNYA	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KETETAPAN TAHUN BERJALAN	LEBIH KURANG/ RESTITUSI	PENDAPATAN-LO
1	Pajak Hotel	0,00	12.973.185.049,00	0,00	0,00	0,00	12.973.185.049,00
2	Pajak Restoran	0,00	39.352.526.197,00	0,00	0,00	0,00	39.352.526.197,00
3	Pajak Hiburan	0,00	4.058.945.384,00	0,00	0,00	0,00	4.058.945.384,00
4	Pajak Reklame	7.958.122.510,00	0,00	1.225.769.518,83	1.881.035.765,81	(6.412.500,00)	7.296.443.763,02
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	269.653.244.700,00	0,00	0,00	0,00	269.653.244.700,00
6	Pajak Parkir	0,00	3.346.693.618,00	0,00	0,00	0,00	3.346.693.618,00
7	Pajak Air Tanah	7.030.363.231,20	0,00	0,00	0,00	(447.000,00)	7.029.916.231,20
8	Pajak Mineral Bukan Logam	0,00	4.352.435.000,00	0,00	0,00	0,00	4.352.435.000,00
9	PBB	225.434.928.566,00	0,00	0,00	0,00	335.912.533,00	225.770.841.099,00
10	BPHTB	0,00	407.706.944.808,00	0,00	0,00	(131.503.000,00)	407.575.441.808,00
		240.423.414.307,20	741.443.974.756,00	1.225.769.518,83	1.881.035.765,81	197.550.033,00	981.409.672.849,22

Apabila dibandingkan dengan pendapatan pajak-LRA yang sebesar Rp960.468.393.710,00 maka terdapat selisih lebih kecil sebesar Rp20.941.279.139,22 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 188 Penjelasan Selisih Pajak Daerah-LRA dan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO	981.409.672.849,22
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	960.468.393.710,00
Selisih	20.941.279.139,22
Penjelasan Selisih :	
a. Saldo Piutang Akhir	274.545.862.435,58
Saldo Piutang Awal	251.464.276.133,38
Sub total (a)	23.081.586.302,20
b. Koreksi piutang PBB	1.485.040.916,00
Sub total (b)	1.485.040.916,00
c. Pendapatan diterima tahun 2024	1.881.035.765,81
Pendapatan diterima tahun 2023	1.225.769.518,83 -
Sub total (c)	655.266.246,98
Jumlah (a-b-c)	20.941.279.139,22
Selisih	0,00



5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	440.759.765.025,31	63.629.177.450,94

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp440.759.765.025,31 terdiri atas:

- Retribusi Jasa Umum Rp300.478.454.352,39
- Retribusi Jasa Usaha Rp 91.809.946.122,32
- Retribusi Perijinan Tertentu Rp 48.471.364.550,60

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp440.759.765.025,31 mengalami kenaikan sebesar Rp377.130.587.574,37 atau 592,70% apabila dibandingkan pendapatan retribusi daerah-LO per 31 Desember 2023.

RETRIBUSI JASA UMUM :

Pendapatan retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp300.478.454.352,39 terdiri atas pendapatan retribusi yang pemungutannya didahului dengan penetapan sebesar Rp296.901.994.261,06 dan tanpa penetapan sebesar Rp3.576.460.091,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 189 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Berdasar Penetapan per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN BERDASARKAN KETETAPAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA UTK TAHUN 2024	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA UTK TAHUN BERIKUTNYA	LEBIH BAYAR	PENDAPATAN-LO
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD	292.319.596.424,09	0,00	0,00	0,00	292.319.596.424,09
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.105.107.134,00	0,00	0,00	0,00	2.105.107.134,00
Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, UM, Perindag	2.378.661.700,00	62.619.000,00	0,00	0,00	2.441.280.700,00
Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas PM dan PTSP	8.860.000,00	27.150.002,97		0,00	36.010.002,97
	296.812.225.258,09	89.769.002,97	0,00	0,00	296.901.994.261,06



Tabel 190 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tanpa Penetapan per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH YG HARUS DIBAYAR	HAK TAHUN INI ATAS SKR TAHUN SEBELUMNYA	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA UTK TAHUN BERIKUTNYA	PENDAPATAN-LO
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	240.185.000,00	0,00	0,00	240.185.000,00
2	Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum	2.656.840.508,00	0,00	0,00	2.656.840.508,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	679.434.583,33	0,00	679.434.583,33
		2.897.025.508,00	679.434.583,33	0,00	3.576.460.091,33

RETRIBUSI JASA USAHA :

Pendapatan retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.809.946.122,32 terdiri atas pendapatan retribusi yang pemungutannya didahului dengan penetapan sebesar Rp86.872.264.622,32 dan tanpa penetapan sebesar Rp4.937.681.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 191 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Berdasar Penetapan per 31 Desember 2024

NO	URAIAN PENDAPATAN	OPD	JUMLAH KETETAPAN	HAK TAHUN 2024 ATAS PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA UTK TAHUN BERIKUTNYA	PENDAPATAN LO
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas LH	1.469.639.000,00	0,00	0,00	1.469.639.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BPPKAD	56.856.957.405,00	28.224.164.177,75	1.014.242.383,43	84.066.879.199,32
3	Retribusi Pelayan Kepelabuhanan	Dinas PM PTSP	0,00	549.125.400,00	0,00	549.125.400,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Parekrafbudpora	786.621.023,00	0,00	0,00	786.621.023,00
Jumlah			59.113.217.428,00	28.773.289.577,75	1.014.242.383,43	86.872.264.622,32



Tabel 192 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tanpa Penetapan per 31 Desember 2024

No.	Uraian Pendapatan	OPD	Nilai yg Harus Dibayar	Piutang Akhir	Piutang Awal	Pendapatan-LO
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas PUTR	179.001.000,00	0,00	0,00	179.001.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas CKPKP	953.525.000,00	0,00	0,00	953.525.000,00
3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di lingk.Terminal	Dinas Perhubungan	212.000.000,00	0,00	0,00	212.000.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Koperasi, UM, Perindag	81.778.500,00	0,00	0,00	81.778.500,00
5	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Dinas Koperasi, UM, Perindag	273.000.000,00	0,00	0,00	273.000.000,00
6	Retribusi Tempat khusus parkir	Dinas Perhubungan	2.675.902.000,00	0,00	0,00	2.675.902.000,00
7	Retribusi Rumah potong hewan	Dinas Pertanian	177.624.000,00	0,00	0,00	177.624.000,00
8	Retribusi Penyebrangan diatas air	Dinas Perhubungan	384.851.000,00	0,00	0,00	384.851.000,00
Jumlah			4.937.681.500,00	0,00	0,00	4.937.681.500,00

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU :

Pendapatan retribusi Perijinan Tertentu-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.471.364.550,60 merupakan pendapatan retribusi yang pemungutannya didahului dengan penetapan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 193 Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu-LO Berdasar Penetapan per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	KETETAPAN	HAK TH 2024 ATAS PENDAPATAN DITERIMA	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS SKR 2024	LEBIH BAYAR	PENDAPATAN-LO
1	Retribusi IMB	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2	Retribusi Izin Trayek	0,00	2.344.500,00	0,00	0,00	2.344.500,00
3	Retribusi PBG	43.483.064.889,20	0,00	0,00	304.711,40	43.483.369.600,60
4	Retribusi Penggunaan TKA	4.985.632.450,00	0,00	0,00		4.985.632.450,00
Jumlah		48.468.697.339,20	2.362.500,00	0,00	304.711,40	48.471.364.550,60

Apabila Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp148.440.168.601,22 dibandingkan dengan pendapatan retribusi-LRA yang sebesar Rp118.008.753.104,60 maka terdapat selisih lebih besar sebesar Rp30.431.415.496,62 dengan penjelasan sebagai berikut :



Tabel 194 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi-LRA dan Retribusi-LO

Uraian	Jumlah	
Pendapatan Retribusi Daerah - LO		440.759.765.025,31
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		401.465.003.530,69
Selisih	Selisih	39.294.761.494,62
Penjelasan selisih :		
a. Saldo Piutang Akhir	46.452.910.289,92	
Saldo Piutang Awal	11.871.191.066,34	
sub total (a)	34.581.719.223,58	
b. Koreksi Saldo Awal Piutang		
Piutang Retribusi Dinas Perhubungan	61.626.299,08	
Piutang Retribusi IMB Dinas PMPTSP	(324.308,00)	
Piutang Retribusi Dinas Perikanan	(33.500.000,00)	
Piutang Badan PPKAD	(5.387.513,50)	
sub total (b)	22.414.477,58	
c. Pendapatan diterima dimuka tahun 2024	19.543.267.311,86	
Pendapatan diterima dimuka tahun 2023	48.073.862.592,48	
sub total (c)	(28.530.595.280,62)	
d. Reklasifikasi Piutang BLUD	23.795.138.532,00	
Jumlah (a-b-c-d)		39.294.761.494,62
Selisih		0,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LO	14.171.414.818,66	12.723.671.303,79

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO diakui sebesar ketetapan tahun 2024 yang direalisasi dan adanya penyesuaian dari laporan keuangan BUMD atas kenaikan atau penurunan investasi pemerintah daerah yang penghitungannya berdasarkan metode ekuitas.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.171.414.818,66 mengalami kenaikan sebesar Rp1.447.743.514,87 atau 11,38% dari jumlah pendapatan per 31 Desember 2024, merupakan bagian laba yang diterima oleh Pemda atas penyertaan modal, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 195 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO per 31 Desember 2024

URAIAN	Pendapatan LRA	Penyesuain dari LK BUMD	Jumlah Pendapatan - LO
PDAM Giri Tirta	0,00	0,00	0,00
PD BPR Bank Gresik	284.581.953,00	617.549.889,00	902.131.842,00
PT. Gresik Migas	11.977.394.316,30	1.286.630.660,36	13.264.024.976,66
PT. BPD Jawa Timur Tbk	0,00	0,00	0,00
BPR Jatim	5.258.000,00	0,00	5.258.000,00
	12.267.234.269,30	1.904.180.549,36	14.171.414.818,66

Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA yang sebesar Rp12.267.234.269,30 maka terdapat selisih lebih besar sebesar Rp1.904.180.549,36 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 196 Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan - LRA dan LO

Uraian	Jumlah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	14.171.414.818,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	12.267.234.269,30
selisih	1.904.180.549,36
<u>Penjelasan Selisih :</u>	
Koreksi atas Laba PDAM Giri Tirta	0,00
Selisih atas laba/rugi tahun berjalan dengan deviden yang disetor Perumda BPR Bank Gresik	617.549.889,00
Selisih atas laba/rugi tahun berjalan dengan deviden yang disetor PT Gresik Migas	615.236.587,00
Penambahan nilai ekuitas atas pembelian saham PKPRI (1,85%) PT Gresik Migas	671.394.073,36 +
	1.904.180.549,36
Selisih	0,00

5.4.1.1.4 Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	10.200.304.392,10	292.974.433.644,89

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.200.304.392,10 mengalami penurunan sebesar Rp282.774.129.252,79 atau 96,52% dari jumlah pendapatan per 31 Desember 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LO terdiri atas pendapatan yang pemungutannya didahului dengan penetapan sebesar Rp1.183.651.644,00 dan tanpa penetapan sebesar Rp9.016.652.748,10 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 197 Pendapatan Lain2 PAD yg Sah-LO Berdasarkan Penetapan per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	NILAI YG DITETAPKAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2024	LEBIH BAYAR	PENDAPATAN-LO
1	Denda Pajak Hotel	530.368,00	0,00	0,00	530.368,00
2	Denda pajak restoran	58.079.240,00	0,00	0,00	58.079.240,00
3	Denda pajak hiburan	1.051.287,00	0,00	0,00	1.051.287,00
4	Denda pajak reklame	12.631.901,00	0,00	0,00	12.631.901,00
5	Denda pajak penerangan jalan	1.447.224,00	0,00	0,00	1.447.224,00
6	Denda pajak parkir	4.151.651,00	0,00	0,00	4.151.651,00
7	Denda pajak air tanah	4.091.250,00	0,00	0,00	4.091.250,00
8	Denda pajak batu mineral	54.208.080,00	0,00	0,00	54.208.080,00
9	Denda PBB	978.485.507,00	0,00	0,00	978.485.507,00
10	Denda BPHTB	10.367.867,00	0,00	0,00	10.367.867,00
11	Denda Retribusi	58.607.269,00	0,00	0,00	58.607.269,00
Jumlah		1.183.651.644,00	0,00	0,00	1.183.651.644,00

Tabel 198 Pendapatan Lain2 PAD yg Sah-LO Tanpa Penetapan per 31 Desember 2024

1. Dinas Kesehatan

NO.	URAIAN	LRA	PIUTANG AWAL	PIUTANG AKHIR	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN LALU	PENDAPATAN-LO
1	Pendapatan BLUD	2.929.942.412,52	0,00	0,00	58.333.333,33	2.988.275.745,85
	Jumlah	2.929.942.412,52	0,00	0,00	58.333.333,33	2.988.275.745,85



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	URAIAN	LRA	PIUTANG AWAL	PIUTANG AKHIR	PENDAPATAN-LO
1	Pendapatan denda retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah	5.415.900,00	0,00	0,00	5.415.900,00
2	Pendapatan BLUD	727.323.474,36	0,00	0,00	727.323.474,36
	Jumlah	732.739.374,36	0,00	0,00	732.739.374,36

3. Dinas Lingkungan Hidup

NO.	URAIAN	LRA	PIUTANG AWAL	PIUTANG AKHIR	PENDAPATAN-LO
1	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	68.362.800,00	0,00	0,00	68.362.800,00
	Jumlah	68.362.800,00	0,00	0,00	68.362.800,00

4. Dinas Koperasi, UKM, Perindag

NO.	URAIAN	LRA	PIUTANG AWAL	PIUTANG AKHIR	KOREKSI	PENDAPATAN-LO
1	Pendapatan denda Retribusi Jasa Umum	9.307.351,00	40.517.572,26	55.569.992,26	0,00	24.359.771,00
2	Pendapatan denda Retribusi Jasa Usaha	82.400,00	1.230.120,00	1.147.720,00	0,00	0,00
		9.389.751,00		56.717.712,26	0,00	24.359.771,00

5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO.	URAIAN	LRA	PIUTANG AWAL	PIUTANG AKHIR	KOREKSI PIUTANG	LEBIH BAYAR	PENDAPATAN-LO
1	Pendapatan denda Ret. Jasa perijinan tertentu	196.527.576,76	3.596.933.508,58	3.605.261.699,26	(194.585.248,00)	0,00	10.270.519,44
2	Hasil eksekusi atas jambong reklame	334.282.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.282.414,00
		530.809.990,76	3.596.933.508,58	3.605.261.699,26	(194.585.248,00)	0,00	344.552.933,44

6. Dinas Perikanan

NO.	URAIAN	LRA	PIUTANG AWAL	PIUTANG AKHIR	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KOREKSI PIUTANG	PENDAPATAN-LO
1	Hasil pemanfaatan BMD	166.045.000,00	26.666.666,67	40.000.000,00	5.000.000,00	(33.500.000,00)	150.878.333,33
		166.045.000,00	26.666.666,67	40.000.000,00	5.000.000,00	(33.500.000,00)	150.878.333,33



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

7. BPPKAD

NO.	URAIAN	OPD	LRA	KOREKSI	PENDAPATAN-LO
1	Hasil Penjualan BMD yg tidak Dipisahkan :				
	Hasil penjualan peralatan dan mesin	BPPKAD	308.578.200,00	0,00	308.578.200,00
	Hasil penjualan gedung dan bangunan	BPPKAD	97.414.430,76	0,00	97.414.430,76
	Hasil penjualan jalan, irigasi dan jaringan				0,00
2	Jasa Giro :				
	Jasa giro kasda	BPPKAD	1.788.423.811,72	0,00	1.788.423.811,72
	Jasa giro pemegang kas	BPPKAD	769.835.979,87	0,00	769.835.979,87
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemda				
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemda		0,00	0,00	0,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
	TGR thd PNS bukan bendahara	BPPKAD	42.922.812,01	(20.172.612,01)	22.750.200,00
5	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	BPPKAD	473.640.356,12	0,00	473.640.356,12
6	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				
	Hasil Eksekusi atas Jaminan Pekerjaan	BPPKAD	12.664.355,00		12.664.355,00
7	Pendapatan Dari Pengembalian Belanja				
	Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	BPPKAD	312.570.723,00	0,00	312.570.723,00
	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas	BPPKAD	920.105.733,65	0,00	920.105.733,65
8	Pendapatan dari Pelanggaran Perda/perbup :				
	Pendapatan dari Pelanggaran Perda/perbup :	BPPKAD	1.500.000,00		1.500.000,00
	Jumlah		4.727.656.402,13	(20.172.612,01)	4.707.483.790,12

Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA yang sebesar Rp294.284.303.516,86 maka terdapat selisih lebih besar sebesar Rp8.235.597.299,33 dengan penjelasan sebagai berikut :



Tabel 199 Penjelasan Selisih Lain-lain PAD yg Sah – LRA dan LO

Uraian		Jumlah
Lain2 PAD yg Sah - LO		302.519.900.816,19
Lain2 PAD yg Sah - LRA		294.284.303.516,86
Selisih		8.235.597.299,33
<u>Penjelasan selisih :</u>		
a.	Saldo Piutang Akhir	88.290.490.326,16
	Saldo Piutang Awal	79.869.968.500,15
	Sub total (a)	8.420.521.826,01
b.	Koreksi saldo awal piutang denda (Dinas PM dan PTSP)	610.336.193,80
	Koreksi saldo awal piutang denda (Dinas PM dan PTSP) pengurangan atas piutang denda tahun sebelumnya	(415.750.945,80)
	Pembayaran atas TGR tahun sebelumnya yang piutangnya dicatat pada TGR - Aset Lainnya	0,00
	Reklasifikasi Piutang Dinas Perikanan)	33.500.000,00
	Sub total (b)	228.085.248,00
c.	Saldo Piutang Akhir TGR yang dicatat pada Bagian Lancar TGR	34.615.047,99
	Saldo Piutang Awal TGR yang dicatat pada Bagian Lancar TGR	54.787.660,00
	Sub total (c)	(20.172.612,01)
d.	Pendapatan diterima dimuka tahun 2024	23.750.000,00
	Pendapatan diterima dimuka tahun 2023	87.083.333,33
	Sub total (d)	(63.333.333,33)
Jumlah (a-b+c-d)		8.235.597.299,33
		0,00

5.4.1.2. Pendapatan Transfer

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Pendapatan Transfer –LO	1.998.244.101.676,00	1.936.263.122.261,00

Pendapatan Transfer–LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.998.244.101.676,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.980.979.415,00 atau 3,20% dari jumlah pendapatan per 31 Desember 2023, terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 200 Realisasi Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.657.007.609.125,00	1.597.933.161.611,00	59.074.447.514,00
Dana Bagi Hasil	227.748.506.000,00	226.139.791.000,00	1.608.715.000,00
Dana Alokasi Umum	976.604.015.000,00	915.176.119.975,00	61.427.895.025,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	98.720.516.184,00	122.396.553.183,00	(23.676.036.999,00)
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	353.934.571.941,00	334.220.697.453,00	19.713.874.488,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	36.385.778.000,00	0,00	36.385.778.000,00
Insentif Fiskal	36.385.778.000,00	0,00	36.385.778.000,00
Transfer Antar Daerah	304.850.714.551,00	338.329.960.650,00	(33.479.246.099,00)
Pendapatan bagi hasil	289.414.392.200,00	322.242.857.500,00	(32.828.465.300,00)
Bantuan keuangan propinsi	15.436.322.351,00	16.087.103.150,00	(650.780.799,00)
Jumlah Pendapatan Transfer	1.998.244.101.676,00	1.936.263.122.261,00	61.980.979.415,00

Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LRA yang sebesar Rp2.345.205.328.325,00 maka terdapat selisih lebih kecil sebesar Rp346.216.682.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 201 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer-LRA dan LO

Uraian	Jumlah
Pendapatan Transfer - LO	1.998.244.101.676,00
Pendapatan Transfer - LRA	2.345.205.328.325,00
Selisih	(346.961.226.649,00)
Penjelasan :	
a. Piutang tahun berjalan	0,00
Piutang tahun sebelumnya	0,00
Sub total (a)	0,00
b. TDF tahun 2024	23.772.449.000,00
TDF tahun 2023	48.481.956.000,00
Sub total (b)	(24.709.507.000,00)
c. Dana Desa	321.507.175.000,00
d. Sisa Bantuan Keuangan yang harus dikembalikan	(744.544.649,00)
Jmlah (a+b+c+d)	(346.961.226.649,00)
	0,00



5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	386.260.549.517,62	581.381.126.054,37

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp386.260.549.517,62 terdiri atas :

Tabel 202 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian Pendapatan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah	386.260.549.517,62	581.381.126.054,37	(195.120.576.536,75)
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	37.996.936.652,62	12.556.716.039,00	25.440.220.613,62
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	348.263.612.865,00	568.824.410.015,37	(220.560.797.150,37)
	Jumlah	386.260.549.517,62	581.381.126.054,37	(195.120.576.536,75)

Pendapatan hibah Rp386.260.549.517,62 terdiri atas pendapatan hibah berupa uang sebesar Rp186.000.000,00 dan berupa barang sebesar Rp386.074.549.517,62. Hibah berupa uang sebesar Rp186.000.000,00 yang termasuk dalam APBD TA 2024, sedangkan hibah berupa barang sebesar Rp386.074.549.517,62 merupakan hibah barang dari pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya yang diterima oleh beberapa OPD sebagai berikut :

1. Hibah kepada Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa Alat Bantu, Alat Rumah Tangga, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium dan Komputer sebesar Rp32.140.603.698,00 sesuai dengan :
 - BAST Nomor KN.02.07/I.3/0933/2020 tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp6.732.000.000,00
 - BAST Nomor KN.02.07/I.3/0935/2020 tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp7.365.600.000,00
 - BAST Nomor KN.02.07/I.3/6955/2020 tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp8.287.400.000,00
 - BAST Nomor KN.02.07/I.3/7069/2020 tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp7.742.645.651,00
 - BAST Nomor KN.01.08/C.I/4861.344/2023 tanggal 7 Juni 2024 sebesar Rp1.755.405.299,00



- SK Hibah Nomor HK.02.03/B.I/2492/2024 tanggal 23 April 2024 sebesar Rp257.552.748,00.
- 2. Hibah kepada Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berupa Kendaraan Roda 4 sebesar Rp214.549.500,00 sesuai dengan BAST Nomor : 000.1.7/16284/402.1/2024 tanggal 24 September 2024.
- 3. Hibah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa 1 (satu) set Instrumen Alat Peringatan Dini Bencana Banjir sebesar Rp320.701.200,00 sesuai dengan BAST Nomor : BAST.462/BNPB/DII/RT.03.03/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.
- 4. Hibah kepada Dinas Sosial dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI sebesar Rp496.120.100,00, yang terdiri dari :
 - Mobil Dapur Umum Lapangan (DUM LAP) sebesar Rp465.693.000,00 sesuai dengan BAST Nomor : /3.2/KS.01.02/2023 tanggal 20 Mei 2023; dan
 - Sepeda Motor Trail sebesar Rp30.427.100,00 sesuai dengan BAST Nomor : /3.2/KS.01.02/05/2023 tanggal 22 Mei 2023
- 5. Hibah kepada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur berupa Alat Kontrasepsi sebesar Rp1.181.933.279,00, yang terdiri dari :
 - BAST Nomor 20/A/BAST/III-2022 tanggal 2 Maret 2022 sebesar Rp7.507.500,00;
 - BAST Nomor 40/A/B/BAST/III-2022 tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp232.191.400,00;
 - BAST Nomor 183/A/B/IX/2022 tanggal 8 September 2022 sebesar Rp61.093.360,00;
 - BAST Nomor 186/A/IX/2022 tanggal 8 September 2022 sebesar Rp7.980.000,00;
 - BAST Nomor 262/AIXI/BAST/2022 tanggal 10 November 2022 sebesar Rp2.360.665,00;
 - BAST Nomor 45/A/B/IV/BAST/2024 tanggal 24 April 2024 sebesar Rp84.185.740,00;
 - BAST Nomor 86/A/VI/BAST/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebesar Rp374.221.288,00; dan
 - BAST Nomor 156/A/B/IX/BAST/2024 tanggal 18 September 2024 sebesar Rp412.393.326,00.



6. Hibah kepada Dinas Perhubungan dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi berupa PJU sebesar Rp3.477.357.901,62 sesuai dengan Naskah Hibah Nomor 269/NH/BN.07/KPB/2024 tanggal 8 November 2024
7. Hibah kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dari PT Smelting, Tbk berupa Alat Angkutan sebesar Rp90.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Donasi Mobil antara PT Smelting dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor SAD-1921/OL-O/IV/2024 tanggal 7 Mei 2024
8. Hibah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa Pojok Baca Digital (POCADI) sebesar Rp194.220.474,00 sesuai dengan BAST Nomor 5672/4.02/PLK.03.07/XI.2022 tanggal 30 November 2022.
9. Hibah kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuanagn dan Aset Daerah dari Pengembang Perumahan Pongangan Indah PT Aneka Jasa Grhadika berupa Tanah PSU pada Perumahan Pongangan Indah di Desa Pongangan, Desa Suci dan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar seluas 121.353,51 m² dengan nilai sebesar Rp190.889.063.365,00 sesuai dengan BAST Nomor 5098/09/TU.04.05/AJG.05/2024 tanggal 23 September 2024.
10. Hibah kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuanagn dan Aset Daerah dari Pengembang Perumahan Bukit Randu Agung Indah PT Trimurti Nusaperdana berupa Tanah PSU pada Perumahan Bukit Randu Agung Indah di Desa Randuagung Kecamatan Kebomas seluas 121.353,51 m² dengan nilai sebesar Rp60.246.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 03/FASUM/XI/2024 tanggal 18 November 2024
11. Hibah kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuanagn dan Aset Daerah dari PT Maspion Industrial Estate berupa Tanah Hasil Reklamasi seluas 52.000 m² dengan nilai sebesar Rp96.824.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 109/SK.MP/U.V/GEN/VII/23 tanggal 17 Juli 2024.



5.4.2 BEBAN

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Beban	<u>3.339.788.451.047,52</u>	<u>3.064.899.918.786,44</u>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban per 31 Desember 2023 maka jumlah beban per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.339.788.451.047,52 mengalami kenaikan sebesar Rp274.888.532.261,08 atau 8,97% dengan rincian beban per OPD sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 203 Rincian Saldo Beban per OPD per 31 Desember 2024

NO.	OPD	JUMLAH BEBAN
1	Dinas Pendidikan	986.775.839.988,80
2	Dinas Kesehatan	751.491.758.292,10
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	178.841.894.176,56
4	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman	92.777.639.693,51
5	Satuan Polisi Pamong Praja	26.957.678.838,36
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.822.165.352,66
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.112.176.921,26
8	Dinas Sosial	24.545.532.708,62
9	Dinas Tenaga Kerja	10.397.280.366,03
10	Dinas Lingkungan Hidup	46.088.186.740,81
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.273.329.946,35
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.956.193.030,56
13	Dinas KB, PP dan PA	23.881.831.598,30
14	Dinas Perhubungan	77.385.044.816,03
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.963.335.549,72
16	Dinas Koperasi, UM, Perindag	12.170.577.517,42
17	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	12.975.796.023,93
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.211.994.067,02
19	Dinas Perikanan	10.444.194.600,43
20	Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	32.877.444.453,79
21	Dinas Pertanian	45.609.444.456,98
22	Sekretariat Daerah	95.331.244.548,92
23	Sekretariat DPRD	82.954.380.077,14
24	BAPPEDA	12.951.262.408,71
25	Badan PPKAD	536.079.447.970,26
26	Badan Kepegawaian dan PSDM	13.795.833.900,30
27	Inspektorat	13.620.647.871,21
28	Kecamatan Gresik	23.058.742.633,93
29	Kecamatan Kebomas	15.267.601.881,41
30	Kecamatan Manyar	3.786.367.982,70
31	Kecamatan Cerme	3.239.253.429,95
32	Kecamatan Benjeng	4.182.131.832,88
33	Kecamatan Balongpanggang	4.266.712.698,53
34	Kecamatan Dudusampeyan	3.710.723.359,06
35	Kecamatan Driyorejo	3.295.763.720,43
36	Kecamatan Wringinanom	3.532.069.800,24
37	Kecamatan Kedamean	3.374.546.400,80
38	Kecamatan Menganti	3.611.721.040,74
39	Kecamatan Sidayu	3.622.929.388,90
40	Kecamatan Ujungpangkah	3.373.829.077,60
41	Kecamatan Panceng	3.916.319.199,44
42	Kecamatan Bungah	4.165.051.107,93
43	Kecamatan Dukun	4.262.203.262,20
44	Kecamatan Sangkapura	3.286.559.992,63
45	Kecamatan Tambak	3.076.160.367,60
46	Badan Kesbangpol	79.467.607.954,77
Jumlah		3.339.788.451.047,52



5.4.2.1 Beban Pegawai

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Beban Pegawai	1.079.810.599.624,03	1.013.247.235.774,42

Beban pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.079.810.599.624,03 meliputi beban gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, insentif pajak dan retribusi, beban penunjang operasional serta uang lembur selama tahun anggaran 2024.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban pegawai per 31 Desember 2023 maka jumlah beban pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp 66.563.363.849,61 atau 6,57% dengan rincian pemakaian beban pegawai per OPD sebagaimana dalam **Lampiran 17**.

Terdapat perbedaan/selisih lebih kecil sebesar Rp5.738.197.617,42 antara Beban Pegawai pada Laporan Operasional dan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran yang sebesar Rp1.085.548.797.241,45 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 204 Penjelasan Selisih antara Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA

Uraian	Jumlah
Beban Pegawai - LO	1.079.810.599.624,03
Belanja Pegawai - LRA	1.085.548.797.241,45
Selisih	Selisih (5.738.197.617,42)
Penjelasan Selisih :	
Utang belanja pegawai tahun 2024	6.362.546.331,09
Utang belanja pegawai tahun 2023	12.100.743.948,51 -
	(5.738.197.617,42)
Selisih	0,00

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Beban Barang dan Jasa	1.026.650.849.749,03	906.110.091.345,22

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.026.650.849.749,03 dan Rp906.110.091.345,22, dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 205 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Persediaan	309.629.297.341,34	275.423.830.873,28	34.205.466.468,06
2	Beban Jasa	557.985.198.285,96	484.470.655.854,72	73.514.542.431,24
3	Beban Pemeliharaan	47.604.503.426,77	63.922.583.670,22	(16.318.080.243,45)
4	Beban Perjalanan Dinas	67.686.911.353,96	47.327.108.827,00	20.359.802.526,96
5	Beban Uang dan/Jasa yg diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	43.744.939.341,00	34.965.912.120,00	8.779.027.221,00
	Jumlah	1.026.650.849.749,03	906.110.091.345,22	120.540.758.403,81

6.4.2.2.1. Beban Persediaan

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Beban Persediaan	309.629.297.341,34	275.423.830.873,28

Beban persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp309.629.297.341,34 dan Rp275.423.830.873,28 terdiri dari :

Tabel 206 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Barang Pakai Habis	300.838.629.771,34	275.287.617.873,28	25.551.011.898,06
2	Barang Tak Habis Pakai	45.870.000,00	136.213.000,00	(90.343.000,00)
3	Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.744.797.570,00	0,00	8.744.797.570,00
		309.629.297.341,34	275.423.830.873,28	34.205.466.468,06

Jika dibandingkan dengan saldo beban persediaan per 31 Desember 2023 maka saldo beban persediaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp34.205.466.468,06 atau 12,42%. Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp309.629.297.341,34 terdiri atas beban barang pakai habis Rp300.838.629.771,34, beban barang tak habis pakai Rp45.870.000,00 dan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Rp 8.744.797.570,00 . Adapun rincian pemakaian beban persediaan pada setiap OPD dapat dilihat pada **lampiran 18**.

Apabila Beban Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp309.629.297.341,34 dibandingkan dengan Belanja Persediaan pada LRA yang sebesar Rp 281.352.652.783,66 maka terdapat selisih lebih besar sebesar Rp28.276.644.557,68. Selisih dengan LRA tersebut terdapat pada barang pakai habis, dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 207 Rincian Barang Pakai Habis pada LO dan LRA

Uraian	Beban (LO)	Belanja (LRA)	Selisih
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	12.686.966.433,00	13.429.669.826,75	(742.703.393,75)
Beban Bahan-Bahan Kimia	3.622.692.332,00	3.795.216.233,00	(172.523.901,00)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.961.832.332,00	14.287.640.877,00	(325.808.545,00)
Beban Bahan-Bahan/ Bibit Tanaman	429.866.574,00	427.566.574,00	2.300.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	89.506.940,00	81.606.940,00	7.900.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	327.528.550,00	333.917.550,00	(6.389.000,00)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	97.848.000,00	97.848.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	45.910.739.096,37	36.899.437.390,18	9.011.301.706,19
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.165.910.978,00	1.194.007.478,00	(28.096.500,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	139.496.250,00	139.496.250,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	349.718.419,00	281.225.548,00	68.492.871,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	204.773.733,00	218.898.210,00	(14.124.477,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	64.989.510,00	64.989.510,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.604.375,00	1.604.375,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	28.121.500,00	28.121.500,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	49.662.200,00	49.662.200,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.796.507.687,76	9.684.001.620,74	112.506.067,02
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.691.097.236,00	6.800.491.036,00	(109.393.800,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.299.993.159,00	33.931.442.951,00	368.550.208,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	523.631.665,92	521.990.550,00	1.641.115,92
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.924.692.791,00	7.123.477.523,00	(198.784.732,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	12.078.325.127,00	11.976.402.116,50	101.923.010,50
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat listrik	6.056.568.460,57	6.034.289.209,50	22.279.251,07
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.874.249.608,00	2.955.443.608,00	(81.194.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.176.672.366,00	1.160.417.666,00	16.254.700,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.069.287.947,00	2.081.051.397,00	(11.763.450,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	556.315.469,00	406.297.285,00	150.018.184,00
Beban Obat-Obatan-Obat	50.484.489.716,94	39.902.995.965,62	10.581.493.751,32
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.323.156.250,00	2.995.113.250,00	1.328.043.000,00
Beban Persediaan untuk Dijual /Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.525.684.492,03	33.680.436.803,12	(1.154.752.311,09)
Beban Natura dan Pakan-Natura	8.235.899.768,00	8.534.369.591,00	(298.469.823,00)
Beban Natura dan Pakan-Pakan	46.437.000,00	46.437.000,00	0,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	7.960.600,00	7.960.600,00	0,00
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	57.873.900,00	57.873.900,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	23.959.785.623,00	24.305.834.623,00	(346.049.000,00)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.401.602.191,00	4.401.602.191,00	0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.348.126.100,00	3.348.126.100,00	0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.280.324.107,75	4.798.120.497,25	1.482.203.610,50
Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	97.990.000,00	97.990.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.880.758.468,00	2.912.378.468,00	(31.620.000,00)
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	571.030.000,00	571.030.000,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00		0,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	144.062.000,00	170.651.400,00	(26.589.400,00)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	756.116.560,00	756.116.560,00	0,00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	521.600,00	521.600,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
Beban Pakaian Adat Daerah	118.722.555,00	118.722.555,00	0,00
Beban Pakaian Batik Nasional	78.752.300,00	78.752.300,00	0,00
Beban Pakaian Olahraga	299.387.800,00	299.387.800,00	0,00
Jumlah	300.838.629.771,34	281.131.984.628,66	19.706.645.142,68



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 208 Rincian Barang Tak Habis Pakai pada LO dan LRA

Uraian	Beban (LO)	Belanja (LRA)	Selisih
Beban Komponen-Komponen Rambu2	11.260.000,00	11.260.000,00	0,00
Beban Komponen-Komponen Lainnya			0,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00
Beban Pipa-Pipa Baja	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00
	45.870.000,00	45.870.000,00	0,00

Tabel 209 Rincian Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada LO dan LRA

Uraian	Beban (LO)	Belanja (LRA)	Selisih
Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.744.797.570,00	174.798.155,00	8.569.999.415,00
	8.744.797.570,00	174.798.155,00	8.569.999.415,00

Penjelasan selisih untuk masing-masing barang pakai habis adalah sebagai berikut:

Beban Bahan Bangunan dan Kontruksi		12.686.966.433,00	
Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi		13.429.669.826,75	
		(742.703.393,75)	
Penjelasan selisih :			
a.	Saldo Awal Persediaan	2.746.812.768,00	
	Saldo Akhir Persediaan	1.285.834.818,00	-
		1.460.977.950,00	
b.	Utang Tahun 2024	0,00	
	Utang Tahun 2023	4.170.109.268,75	-
		(4.170.109.268,75)	
c.	Koreksi dari Aset Dinas PUTR	1.938.738.150,00	
	Koreksi dari Aset Dinas CKPKP	27.689.775,00	
		1.966.427.925,00	
	Jumlah a + b + c	(742.703.393,75)	
		0,00	

Beban Bahan Kimia		3.622.692.332,00	
Belanja Bahan Kimia		3.795.216.233,00	
		(172.523.901,00)	
Penjelasan Selisih :			
	Saldo Awal Persediaan	51.699.920,00	
	Saldo Akhir Persediaan	312.636.469,00	-
		(260.936.549,00)	
	Utang Tahun 2024	88.412.648,00	
	Utang Tahun 2023	0,00	
		88.412.648,00	
		0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Bahan Bakar Pelumas	13.961.832.332,00	
Belanja Bahan Bakar Pelumas	14.287.640.877,00	
		(325.808.545,00)
Penjelasan Selisih :		
a. Utang Tahun 2024	146.669.177,00	
Utang Tahun 2023	396.014.442,00	
		(249.345.265,00)
b. Saldo Awal	0,00	
Saldo Akhir	76.463.280,00	-
		(76.463.280,00)
		(325.808.545,00)
		0,00

Beban Bahan/Bibit Tanaman	429.866.574,00	
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	427.566.574,00	
		2.300.000,00
Penjelasan Selisih :		
Saldo Awal Persediaan	2.300.000,00	
Saldo Akhir Persediaan	0,00	-
		2.300.000,00
		0,00

Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran	89.506.940,00	
Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	81.606.940,00	
		7.900.000,00
Penjelsan Selisih :		
a. Saldo Awal Persediaan	0,00	
Saldo Akhir Persediaan	0,00	-
		0,00
b. Utang Tahun 2024	7.900.000,00	
		7.900.000,00
		0,00

Beban Isi Tabung Gas	327.528.550,00	
Belanja Isi Tabung Gas	333.917.550,00	
		(6.389.000,00)
Penjelsan Selisih :		
Saldo Awal Persediaan	585.000,00	
Saldo Akhir Persediaan	6.974.000,00	-
		(6.389.000,00)
		0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Bahan-bahan Lainnya		45.910.739.096,37
Belanja Bahan-bahan Lainnya		36.899.437.390,18
		<u>9.011.301.706,19</u>
Penjelasan Selisih :		
a.	Saldo Awal Persediaan	3.218.588.894,00
	Saldo Akhir Persediaan	3.124.814.942,17 -
	Sub total (a)	<u>93.773.951,83</u>
b.	Utang Tahun 2024	10.969.336.326,09
	Utang Tahun 2023	69.052.500,00 -
		<u>10.900.283.826,09</u>
	Reklas utang dari Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Dinas Kesehatan - BLUD)	(1.982.756.071,73) +
	Jumlah (a+b+c)	<u>9.011.301.706,19</u>
		0,00

Beban Suku Cadang Alat Angkutan		1.165.910.978,00
Belanja Suku Cadang Alat Angkutan		1.194.007.478,00
		<u>(28.096.500,00)</u>
Penjelasan Selisih :		
a.	Saldo Akhir Persediaan	0,00
	Saldo Awal Persediaan	5.537.500,00 +
		<u>(5.537.500,00)</u>
b.	Koreksi dari Aset Dinas Kesehatan	5.080.000,00
c.	Koreksi ke Aset Dinas CKPKP (BLUD)	(27.639.000,00)
	Jumlah (a+b+c)	<u>(28.096.500,00)</u>
		0,00

Beban Suku Cadang Alat Kedokteran		349,718,419.00
Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran		281,225,548.00
		<u>68,492,871.00</u>
Penjelasan Selisih :		
a.	Saldo Awal Persediaan	103,197,998.00
	Saldo Akhir Persediaan	33,374,046.00 -
		<u>69,823,952.00</u>
b.	Reklas utang tahun 2023 Dinas Kesehatan (BLUD) - pada tahun 2023 dicatat sebagai utang belanja modal alat kedokteran umum	(1,331,081.00)
	Jumlah (a+b)	<u>68,492,871.00</u>
		0.00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	204.773.733,00
Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium	218.898.210,00
	(14.124.477,00)
Penjelasan Selisih :	
Saldo Awal Persediaan	0,00
Saldo Akhir Persediaan	14.124.477,00 +
	(14.124.477,00)
	0,00

Beban Alat Tulis Kantor	9.796.507.687,76
Belanja Alat Tulis Kantor	9.684.001.620,74
	112.506.067,02
a. Saldo Awal Persediaan	1.051.598.083,38
Saldo Akhir Persediaan	721.596.457,36 -
Sub total (a)	330.001.626,02
b. Utang Tahun 2024	67.904.900,00
Utang Tahun 2023	285.400.459,00 -
Sub total (b)	(217.495.559,00)
Jumlah (a+b)	112.506.067,02
	0,00

Beban Bahan Kertas dan Cover	6.691.097.236,00
Belanja Bahan Kertas dan Cover	6.800.491.036,00
	(109.393.800,00)
a. Saldo Awal Persediaan	293.369.351,00
Saldo Akhir Persediaan	360.063.151,00 -
Sub total (a)	(66.693.800,00)
b. Utang Tahun 2024	-
Utang Tahun 2023	42.700.000,00 -
Sub total (b)	(42.700.000,00)
Jumlah (a+b)	(109.393.800,00)
	0,00

Beban Bahan Cetak	34.299.993.159,00
Belanja Bahan Cetak	33.931.442.951,00
	368.550.208,00
a. Saldo Awal Persediaan	908.118.500,07
Saldo Akhir Persediaan	433.778.292,07 -
Sub total (a)	474.340.208,00
b. Utang Tahun 2024	189.219.000,00
Utang Tahun 2023	295.009.000,00 -
Sub total (b)	(105.790.000,00)
Jumlah (a+b)	368.550.208,00
	0,00

Beban Benda Pos	523.631.665,92
Belanja Benda Pos	521.990.550,00
	1.641.115,92
Penjelasan Selisih :	
Saldo Awal Persediaan	6.981.115,92
Saldo Akhir Persediaan	5.340.000,00 -
	1.641.115,92
	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Bahan Komputer		6,924,692,791.00	
Belanja Bahan Komputer		7,123,477,523.00	
			(198,784,732.00)
a.	Saldo Awal Persediaan	762,179,987.00	
	Saldo Akhir Persediaan	813,299,719.00	-
	Sub total (a)	(51,119,732.00)	
b.	Utang Tahun 2024	-	
	Utang Tahun 2023	160,240,000.00	-
	Sub total (b)	(160,240,000.00)	
c.	Reklas dari Aset :		
	Dinas Kesehatan	2,900,000.00	
	Dinas PUTR	915,000.00	
	BKPSDM	5,960,000.00	
	Dinas Pertanian	2,800,000.00	
		12,575,000.00	
	Jumlah (a+b+c)		(198,784,732.00)
			0.00

Beban Perabot Kantor		12.078.325.127,00	
Belanja Perabot Kantor		11.976.402.116,50	
			101.923.010,50
	Penjelasan Selisih :		
a.	Saldo Awal Persediaan	410.903.016,50	
	Saldo Akhir Persediaan	179.559.456,00	-
	Sub total (a)	231.343.560,50	
b.	Utang Tahun 2024	0,00	
	Utang Tahun 2023	303.024.550,00	-
		(303.024.550,00)	
c.	Koreksi dari Aset		
	BKPSDM	185.370.000,00	
d.	Koreksi ke Aset		
	Dinas CKPKP	(11.766.000,00)	
	Jumlah (a+b+c+d)		101.923.010,50
			0,00

Beban Alat Listrik		6.056.568.460,57	
Belanja Alat Listrik		6.034.289.209,50	
			22.279.251,07
a.	Saldo Awal Persediaan	215.624.402,57	
	Saldo Akhir Persediaan	253.142.357,00	-
	Sub total (a)	(37.517.954,43)	
b.	Utang Tahun 2024	33.515.300,00	
	Utang Tahun 2023	29.918.094,50	-
	Sub total (b)	3.597.205,50	
c.	Reklas dari Aset		
	Dinas Kesehatan	56.200.000,00	
		56.200.000,00	
	Jumlah (a+b+c)		22.279.251,07
			(0,00)



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Perlengkapan Dinas	2.874.249.608,00
Belanja Perlengkapan Dinas	2.955.443.608,00
	(81.194.000,00)
a. Saldo Awal Persediaan	
Saldo Akhir Persediaan	22.644.000,00 -
Sub total (a)	(22.644.000,00)
b. Utang Tahun 2024	
Utang Tahun 2023	58.550.000,00 -
Sub total (b)	(58.550.000,00)
Jumlah (a+b)	(81.194.000,00)
	0,00

Beban Perlengkapan Olahraga	1.176.672.366,00
Belanja Perlengkapan Olahraga	1.160.417.666,00
	16.254.700,00
Penjelasan Selisih :	
Saldo Awal Persediaan	22.880.000,00
Saldo Akhir Persediaan	6.625.300,00 -
Jumlah	16.254.700,00
	0,00

Beban Souvenir/Cendera Mata	2.069.287.947,00
Belanja Souvenir/Cendera Mata	2.081.051.397,00
	(11.763.450,00)
a. Saldo Awal Persediaan	168.047.000,00
Saldo Akhir Persediaan	- -
Sub total (a)	168.047.000,00
b. Utang Tahun 2024	16.655.550,00
Utang Tahun 2023	196.466.000,00 -
Sub total (b)	(179.810.450,00)
Jumlah (a+b)	(11.763.450,00)
	0,00

Beban Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor Lainnya	556.315.469,00
Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor Lainnya	406.297.285,00
	150.018.184,00
Penjelasan Selisih :	
a. Saldo Awal Persediaan	123.111.131,00
Saldo Akhir Persediaan	72.423.827,00 -
Sub total (a)	50.687.304,00
b. Utang Tahun 2024	107.330.880,00
Utang Tahun 2023	1.982.756.071,73 -
	(1.875.425.191,73)
c. Koreksi ke Aset	+
Dinas Kesehatan	(8.000.000,00)
	(8.000.000,00)
d. Reklas utang ke bahan lainnya	
Dinas Kesehatan (BLUD)	1.982.756.071,73
	1.982.756.071,73
Jumlah (a+b+c+d)	150.018.184,00
	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Obat		50.484.489.716,94	
Belanja Obat		39.902.995.965,62	
			10.581.493.751,32
a.	Saldo Awal Persediaan	19.522.748.050,31	
	Saldo Akhir Persediaan	16.253.043.488,74	-
	Sub total (a)	3.269.704.561,57	
b.	Utang Tahun 2024	10.581.757.646,77	
	Utang Tahun 2023	3.269.968.457,02	-
	Sub total (b)	7.311.789.189,75	
	Jumlah (a+b)		10.581.493.751,32
			0,00

Beban Obat-obatan Lainnya		4.323.156.250,00	
Belanja Obat-obatan Lainnya		2.995.113.250,00	
			1.328.043.000,00
a.	Saldo Awal Persediaan	3.846.688,00	
	Saldo Akhir Persediaan	473.688,00	-
	Sub total (a)	3.373.000,00	
b.	Utang Tahun 2024	1.940.290.000,00	
	Utang Tahun 2023	615.620.000,00	-
	Sub total (b)	1.324.670.000,00	
	Jumlah (a+b)		1.328.043.000,00
			0,00

Beban Barang utk Dijual/Diserahkan Masyarakat		32.525.684.492,03	
Belanja Barang utk Dijual/Diserahkan Masyarakat		33.680.436.803,12	
			(1.154.752.311,09)
Penjelasan Selisih :			
a.	Saldo Awal Persediaan	8.864.115.576,28	
	Saldo Akhir Persediaan	3.416.542.354,00	-
	Sub total (a)	5.447.573.222,28	
b.	Utang Tahun 2024	0,00	
	Utang Tahun 2023	515.240.000,00	-
		(515.240.000,00)	
c.	Reklas Persediaan Dinas CKPKP	(7.501.645.812,37)	
d.	Reklas dari Aset		
	Dinas Pendidikan	232.627.000,00	
d.	Hibah Persediaan		
	Dinas KB, PP, PA	1.181.933.279,00	
	Jumlah (a+b+c+d)		(1.154.752.311,09)
			0,00

Beban Natura		8.235.899.768,00	
Belanja Natura		8.534.369.591,00	
			(298.469.823,00)
Penjelasan Selisih :			
	Saldo Awal Persediaan	42.645.020,00	
	Saldo Akhir Persediaan	341.114.843,00	-
			(298.469.823,00)
			0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Makanan dan Minuman Rapat	23.959.785.623,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.305.834.623,00
	(346.049.000,00)
a. Saldo Awal Persediaan	0,00
Saldo Akhir Persediaan	0,00 -
Sub total (a)	0,00
b. Utang Tahun 2024	9.963.000,00
Utang Tahun 2023	356.012.000,00 -
Sub total (b)	(346.049.000,00)
Jumlah (a+b)	(346.049.000,00)
	0,00

Beban Mamin pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.280.324.107,75
Belanja Mamin pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.798.120.497,25
	1.482.203.610,50
a. Saldo Awal Persediaan	0,00
Saldo Akhir Persediaan	0,00 -
Sub total (a)	0,00
b. Utang Tahun 2024	1.582.687.878,95
Utang Tahun 2023	100.484.268,45 -
Sub total (b)	1.482.203.610,50
Jumlah (a+b)	1.482.203.610,50
	0,00

Beban Mamin Aktivitas Lapangan	2.880.758.468,00
Belanja Mamin Aktivitas Lapangan	2.912.378.468,00
	(31.620.000,00)
a. Saldo Awal Persediaan	0,00
Saldo Akhir Persediaan	0,00 -
Sub total (a)	0,00
b. Utang Tahun 2024	0,00
Utang Tahun 2023	31.620.000,00 -
Sub total (b)	(31.620.000,00)
Jumlah (a+b)	(31.620.000,00)
	0,00

Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	144.062.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	170.651.400,00
	(26.589.400,00)
a. Saldo Awal Persediaan	0,00
Saldo Akhir Persediaan	0,00 -
Sub total (a)	0,00
b. Utang Tahun 2024	50.250.000,00
Utang Tahun 2023	76.839.400,00 -
Sub total (b)	(26.589.400,00)
Jumlah (a+b)	(26.589.400,00)
	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.744.797.570,00
Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi)	174.798.155,00
	8.569.999.415,00
a. Koreksi dari Aset (Ekstrakomptabel)	
Dinas Pendidikan	7.979.489.325,00
Dinas Kesehatan	356.637.150,00
Dinas CKPKP	25.914.940,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.564.000,00
Dinas Kependudukan dan Capil	12.345.000,00
Dinas Perhubungan	125.640.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	580.000,00
Sekretariat DPRD	20.480.000,00
Kecamatan Gresik	29.692.500,00
Kecamatan Kebomas	10.774.000,00
Kecamatan Sangkapura	892.500,00
Kecamatan Tambak	4.990.000,00
	Jumlah (a) 8.569.999.415,00
Jumlah (a+b)	8.569.999.415,00
	0,00

6.4.2.2.2. Beban Jasa

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Beban Jasa	557.985.198.285,96	484.470.655.854,72

Beban jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp557.985.198.285,96 mengalami kenaikan sebesar Rp73.514.542.431,24 atau 15,17% apabila dibandingkan dengan jumlah beban jasa per 31 Desember 2023.

Beban jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp557.985.198.285,96 dan Rp484.470.655.854,72, terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 210 Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)
1	Beban jasa kantor	358.724.160.792,32	354.390.164.081,45	4.333.996.710,87
2	Beban premi asuransi	155.497.207.668,96	91.720.582.615,00	63.776.625.053,96
3	Beban sewa tanah	91.700.000,00	172.100.000,00	(80.400.000,00)
4	Beban sewa peralatan dan mesin	9.821.349.187,00	8.676.238.273,00	1.145.110.914,00
5	Beban sewa gedung	188.153.950,00	270.488.750,00	(82.334.800,00)
6	Beban sewa aset tetap lainnya	752.900,00	4.575.000,00	(3.822.100,00)
7	Beban sewa aset tak berwujud	1.203.572.905,00	840.100.952,00	363.471.953,00
8	Beban konsultasi konstruksi	9.028.942.115,63	7.293.578.164,34	1.735.363.951,29
9	Beban konsultasi non konstruksi	13.195.783.711,05	13.377.500.056,93	(181.716.345,88)
10	Beban beasiswa pendidikan	620.800.000,00	342.900.000,00	277.900.000,00
11	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek	9.612.775.056,00	7.382.427.962,00	2.230.347.094,00
	Jumlah	557.985.198.285,96	484.470.655.854,72	73.514.542.431,24

Rincian beban jasa per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 19** .

Terdapat selisih lebih kecil sebesar Rp1.051.949.897,68 antara Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional dengan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran yang sebesar Rp599.037.148.183,64, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 211 Selisih Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA per 31 Desember 2023

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban jasa kantor	358.724.160.792,32	356.820.414.642,50	1.903.746.149,82
2	Beban premi asuransi	155.497.207.668,96	155.506.586.553,96	(9.378.885,00)
3	Beban sewa tanah	91.700.000,00	91.700.000,00	0,00
4	Beban sewa peralatan dan mesin	9.821.349.187,00	9.732.455.637,00	88.893.550,00
5	Beban sewa gedung	188.153.950,00	188.153.950,00	0,00
6	Beban sewa aset tetap lainnya	752.900,00	752.900,00	0,00
7	Beban sewa aset tak berwujud	1.203.572.905,00	1.203.572.905,00	0,00
8	Beban konsultasi konstruksi	9.028.942.115,63	10.402.922.995,30	(1.373.980.879,67)
9	Beban konsultasi non konstruksi	13.195.783.711,05	14.857.013.543,88	(1.661.229.832,83)
10	Beban beasiswa pendidikan	620.800.000,00	620.800.000,00	0,00
11	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek	9.612.775.056,00	9.612.775.056,00	0,00
	Jumlah	557.985.198.285,96	559.037.148.183,64	(1.051.949.897,68)



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 212 Penjelasan Selisih antara Beban Jasa- LO dan Belanja Jasa-LRA

Beban Jasa kantor	358.724.160.792,32
Belanja Jasa kantor	356.820.414.642,50
Selisih	1.903.746.149,82
a. Utang Jasa Kantor Tahun 2024	6.585.753.920,48
Utang Jasa Kantor Tahun 2023	4.682.007.770,66 -
Sub total (a)	1.903.746.149,82
Jumlah (a+b)	1.903.746.149,82
	0,00

Beban Premi Asuransi	155.497.207.668,96
Belanja Premi Asuransi	155.506.586.553,96
Selisih	(9.378.885,00)
a. Utang Premi Asuransi Tahun 2024	1.125.349,00
Utang Premi Asuransi Tahun 2023	10.504.234,00 -
Jumlah (a)	(9.378.885,00)
	-

Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.821.349.187,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.732.455.637,00
Selisih	88.893.550,00
a. Utang Jasa Kantor Tahun 2024	223.730.000,00
Utang Jasa Kantor Tahun 2023	134.836.450,00 -
Sub total (a)	88.893.550,00
Jumlah (a+b)	88.893.550,00
	0,00

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi	9,028,942,115.63
Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	10,402,922,995.30
Selisih	(1,373,980,879.67)
Penjelasan Selisih :	
a. Utang jasa konsultansi 2024	0.00
Utang jasa konsultansi 2023	1,400,700,466.67
Sub total (a)	(1,400,700,466.67)
b. Koreksi ke Aset Dinas Kesehatan	57,329,835.00
c. Koreksi dari Aset Badan PPKAD	84,049,422.00
Jumlah (a-b+c)	(1,373,980,879.67)
	(0.00)



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi	13.195.783.711,05
Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	14.857.013.543,88
Selisih	(1.661.229.832,83)
Penjelasan Selisih :	
a. Utang jasa konsultansi 2024	0,00
Utang jasa konsultansi 2023	1.661.229.832,83
Sub total (a)	(1.661.229.832,83)
b. Koreksi ke aset tetap :	0,00
Jumlah (a-b)	(1.661.229.832,83)
	0,00

6.4.2.2.3. Beban Pemeliharaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan	47.604.503.426,77	63.922.583.670,22

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 47.604.503.426,77 mengalami penurunan sebesar Rp16.325.730.243,45 atau 25,53% apabila dibandingkan dengan jumlah beban pemeliharaan per 31 Desember 2023.

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.604.503.426,77 terdiri atas beban pemeliharaan pada OPD se-Kabupaten Gresik dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 20**.

Apabila dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran yang sebesar Rp58.681.633.762,83 maka terdapat selisih lebih kecil sebesar Rp11.077.130.336,06 dengan penjelasan sebagai berikut :



Tabel 213 Penjelasan Selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan – LRA

Beban Pemeliharaan	47.604.503.426,77
Belanja Pemeliharaan	58.681.633.762,83
Selisih	(11.077.130.336,06)
Penjelasan Selisih :	
a. Utang Belanja pemeliharaan Tahun 2024	3.282.827.843,00
Utang Belanja pemeliharaan Tahun 2023	18.812.743.371,77 -
sub total (a)	(15.529.915.528,77)
b. Koreksi ke aset:	
Dinas Pendidikan	279.056.707,00
Sekretariat DPRD	237.745.632,13
Kecamatan Gresik	24.420.000,00
sub total (b)	541.222.339,13
c. Koreksi dari Aset	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.889.563.959,69
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	27.303.067,15
Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan	22.311.505,00
Kepemudaan dan Olahraga	
Kecamatan Bungah	54.829.000,00
sub total (c)	4.994.007.531,84
Jumlah (a-b+c)	(11.077.130.336,06)
	0,00

6.4.2.2.4. Beban Perjalanan Dinas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Beban Perjalanan Dinas	67.686.911.353,96	47.327.108.827,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.686.911.353,96 terdiri atas beban perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada OPD se-Kabupaten Gresik dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 21**.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2023 maka jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.359.802.526,96 atau 43,02%.

Apabila dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas – Laporan Realisasi Anggaran yang sebesar Rp67.876.281.353,96 maka terdapat selisih sebesar Rp189.370.000,00 antara belanja perjalanan dinas dan beban perjalanan dinas, selisih tersebut merupakan Utang Tahun 2023 pada Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.000.000,00.



Tabel 214 Penjelasan Selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA

Beban Perjalana Dinas	67.686.911.353,96
Belanja Perjalanan Dinas	67.876.281.353,96
Selisih	(189.370.000,00)
Penjelasan Selisih :	
a. Utang Belanja Perjalanan Dinas Th 2024	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas Th 2023	189.370.000,00 -
Jumlah (a-b+c)	(189.370.000,00)
	0,00

6.4.2.2.5. Beban Uang dan/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Beban Uang/Jasa yg Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	43.744.939.341,00	34.965.912.120,00

Beban Uang dan/Jasa yang diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.744.939.341,00 terdiri atas beban uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga dan atau/masyarakat yang rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga dan/atau masyarakat per 31 Desember 2023 maka jumlah beban uang dan/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.779.027.221,00 atau 25,11%.

Apabila dibandingkan dengan belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat yang sebesar Rp43.744.939.341,00 maka tidak terdapat selisih antara beban dan belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

5.4.2.3 Beban Bunga

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Beban Bunga	964.120.370,60	0,00

Beban bunga adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga atas pinjaman atau utang. Beban Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp964.120.370,60 merupakan beban bunga yang harus dibayarkan oleh RSUD Ibnu Sina akibat Pinjaman Jangka Pendek kepada Lembaga Keuangan (PT Bank Jatim).



5.4.2.4 Beban Hibah

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Beban Hibah	382.505.675.850,32	303.449.432.672,69

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp382.505.675.850,32 merupakan beban hibah yang dianggarkan dalam APBD, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp8.345.402.957,00;
- Beban hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp5.671.126.746,32;
- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp62.417.550.775,00;
- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp170.350.648.900,00;
- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp41.317.504.205,00;
- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp10.243.825.968,00;
- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp58.275.000,00;
- Beban hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp5.767.045.100,00.
- Beban Hibah Uang Dana BOSP yang diterima oleh Satdiknas Swasta sebesar Rp78.334.296.199,00.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban hibah per 31 Desember 2023 maka beban hibah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp79.056.243.177,63 atau 26,05%.

Apabila dibandingkan dengan Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran yang sebesar Rp382.505.675.850,32 maka tidak terdapat selisih antara Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban bantuan sosial pada Laporan Operasional.



5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Beban Bantuan Sosial	15.651.445.000,00	20.473.066.972,00

Beban Bantuan Sosial adalah beban uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban bantuan sosial per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.651.445.000,00 merupakan beban bantuan sosial yang direncanakan kepada individu berupa uang sebesar Rp15.420.000.000,00 dan berupa barang sebesar Rp231.445.000,00.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban bantuan sosial per 31 Desember 2023 maka jumlah beban bantuan sosial per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.821.621.972,00 atau 23,55%.

Apabila dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran yang sebesar Rp15.651.445.000,00 maka tidak terdapat selisih antara belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban bantuan sosial pada Laporan Operasional.

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Beban Penyisihan Piutang	30.821.189.381,05	9.672.096.950,48

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.821.189.381,05 merupakan beban penyisihan atas piutang pada OPD sebagaimana dalam **Lampiran 23**.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban penyisihan piutang per 31 Desember 2023 maka beban penyisihan piutang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp21.149.092.430,57 atau 218,66%.

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.821.189.381,05 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 215 Rincian Beban Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis Piutang

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan :	30.821.100.631,05
	Beban Penyisihan Piutang Pajak	13.268.048.963,76
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.275.088.108,12
	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah	15.277.963.559,17
2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya :	88.750,00
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	88.750,00
	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00
	Beban Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00
	Jumlah Total (1 + 2)	30.821.189.381,05

5.4.2.7 Beban Lain-lain

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	53.375.389.867,97

Beban lain-lain adalah beban yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam beban yang tersebut diatas, yang mempengaruhi kegiatan operasional pemerintah. Beban lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan beban yang terjadi karena adanya reklasifikasi terhadap aset tetap ke aset ekstrakomptabel dikarenakan nilainya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset. Pada tahun 2024 reklasifikasi aset tetap ke aset ekstrakomptabel dicatat pada akun Beban Barang – Beban Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Apabila dibandingkan dengan beban lain-lain per 31 Desember 2023 maka beban lain-lain per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp53.375.389.867,97 atau 100,00%.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	347.243.733.580,11	293.438.924.612,66

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp347.243.733.580,11 merupakan beban penyusutan terhadap aset tetap dan amortisasi



terhadap asset tak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus, dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 24**.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban penyusutan per 31 Desember 2023 maka beban penyusutan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp53.804.808.967,45 atau 18,34%.

Beban penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp347.243.733.580,11 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 216 Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	156.049.353.941,99
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.596.745.897,42
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.852.272.608,59
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	926.195.939,07
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	819.165.193,04
	Jumlah	347.243.733.580,11

5.4.2.9 Beban Transfer

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Beban Transfer	454.217.902.850,00	464.846.521.391,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp454.217.902.850,00 merupakan beban transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah desa sebesar Rp99.090.915.050,00, bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp16.322.812.800,00, transfer bantuan keuangan khusus kepada desa sebesar Rp166.087.175.000,00 dan bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp172.717.000.000,00.

Apabila dibandingkan dengan jumlah beban transfer per 31 Desember 2023 maka beban transfer per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.628.618.541,00 atau 2,29%.

Apabila dibandingkan dengan belanja tranfer pada LRA per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp775.725.077.850,00 maka terdapat selisih antara belanja transfer dengan beban transfer sebesar Rp321.507.175.000,00 yang merupakan dana desa.



5.4.2.10 Beban Tak Terduga

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Beban Tak Terduga	1.922.934.642,38	287.159.200,00

Beban Tak Terduga per 31 Desember 2023 sebesar 1.922.934.642,38 adalah beban tak terduga yang dianggarkan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan belanja tak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp2.026.255.613,38 maka terdapat selisih sebesar Rp103.320.971,00 yang merupakan pengembalian dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ke Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	491.257.357.231,39	639.453.190.532,51

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp491.257.357.231,39 merupakan selisih kurang dari pendapatan operasional sebesar Rp3.831.045.808.278,91 dikurangi beban operasi sebesar Rp3.339.788.451.047,52.

Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit kegiatan operasional per 31 Desember 2023 maka surplus/defisit kegiatan operasional per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp148.195.833.301,12 atau 23,18%.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT dari KEGIATAN NON OPERASIONAL

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(54.083.950.932,28)	(6.979.923.750,99)

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional, termasuk didalamnya adalah surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non



operasional lainnya, defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 sebesar (Rp54.083.950.932,28) berasal dari Surplus kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp18.318.324.952,54 ditambah dengan defisit kegiatan non operasional lainnya sebesar (Rp72.402.275.884,82).

Surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.318.324.952,54 berasal surplus dari kegiatan operasional lainnya yang terdiri dari :

Tabel 217 Surplus dari kegiatan non operasional

Uraian	2024	2023
Koreksi Piutang	2.095.377.109,80	1.092.995.345,84
Koreksi Penyisihan Piutang	780.459.584,57	2.588.610.093,47
Koreksi Persediaan	0,00	15.016.574.152,65
Koreksi Nilai Investasi	18.796.992,00	485.902.125,47
Koreksi Nilai Aset	1,22	0,52
Akumulasi penyusutan atas aset yang dihapus	0,00	10.232.860.798,44
Akumulasi penyusutan atas aset yang dihibahkan	0,00	0,00
Akumulasi penyusutan atas aset yang dikoreksi ke Beban	0,00	31.626.672.291,78
Koreksi Nilai Utang	0,00	1.101.251,00
Inventarisasi Aset	15.423.691.264,95	417.611.500,00
Jumlah	18.318.324.952,54	61.462.327.559,17

Surplus kegiatan non operasional per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 sebesar (Rp72.402.275.884,82) berasal dari :

Tabel 218 Defisit dari kegiatan non operasional

Uraian	2024	2023
Koreksi Piutang	(421.462.767,30)	650.867.869,66
Koreksi saldo awal dan beban investasi	(62.387.324.189,00)	50.949.403.606,61
Penghapusan aset	(9.593.488.928,52)	16.841.979.833,44
Koreksi Nilai aset	0,00	0,44
Koreksi Nilai Utang	0,00	0,01
Jumlah	(72.402.275.884,82)	68.442.251.310,16

Defisit kegiatan non operasional per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 maka surplus/defisit kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.104.027.181,29 atau 674,85%.



5.4.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Surplus/Defisit Sebelum		
Pos Luar Biasa	437.173.406.299,11	632.473.266.781,52

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan dari surplus/defisit kegiatan non operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp437.173.406.299,11 berasal dari:

- a. Defisit dari kegiatan operasional Rp491.257.357.231,39
 - b. Defisit dari kegiatan non operasional (Rp 54.083.950.932,28)
- Rp437.173.406.299,11

Apabila dibandingkan dengan saldo surplus/defisit sebelum pos luar biasa per 31 Desember 2023, maka surplus/defisit sebelum pos luar biasa per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp195.299.860.482,41 atau 30,88 %.

5.4.6 POS LUAR BIASA

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Pos Luar Biasa	0,00	0,00

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. tidak kejadian yang dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 selisih antara pendapatan luar biasa Rp0,00 dan beban luar biasa sebesar Rp0,00.



5.4.7 SURPLUS/DEFISIT – LO

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Surplus/Defisit-LO	437.173.406.299,11	632.473.266.781,52

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp437.173.406.299,11 adalah penjumlahan dari surplus kegiatan operasional sebesar Rp491.257.357.231,39, defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp54.083.950.932,28) dan surplus dari pos luar biasa sebesar Rp0,00.

Apabila dibandingkan dengan surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 maka Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp195.299.860.482,41 atau 30,88 %.



5.5. KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Laporan Arus Kas ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode laporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	456.899.992.944,16	428.283.111.653,48

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp456.899.992.944,16 dan Rp428.283.111.653,48 yang berasal dari:

Tabel 219 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	3.730.014.020.295,00	3.415.580.068.097,09
Arus Kas Keluar	3.273.114.027.350,84	2.987.296.956.443,61
Arus Kas Bersih	456.899.992.944,16	428.283.111.653,48

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	3.730.014.020.295,00	3.415.580.068.097,09

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp3.730.014.020.295,00 dan Rp3.415.580.068.097,09, terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 220 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	960.468.393.710,00	793.322.673.442,23
Penerimaan Retribusi Daerah	401.465.003.530,69	87.430.225.680,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.267.234.269,30	13.425.554.336,30
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	10.422.060.460,01	276.033.012.672,56
Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	252.458.013.000,00	200.617.875.334,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	976.604.015.000,00	915.176.119.975,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	452.655.088.125,00	456.617.250.636,00
Penerimaan Dana Desa	321.507.175.000,00	318.788.865.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	36.385.778.000,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	289.414.392.200,00	334.088.066.900,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	16.180.867.000,00	16.190.424.121,00
Penerimaan Hibah	186.000.000,00	3.890.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	3.730.014.020.295,00	3.415.580.068.097,09

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	3.273.114.027.350,84	2.987.296.956.443,61

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp3.273.114.027.350,84 dan Rp2.987.296.956.443,61, terdiri dari :

Tabel 221 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pembayaran Pegawai	1.085.548.797.241,45	1.009.787.854.448,88
Pembayaran Barang	1.010.692.655.425,09	868.397.712.028,13
Pembayaran Bunga	964.120.370,60	0,00
Pembayaran Hibah	382.505.675.850,32	303.819.808.881,60
Pembayaran Bantuan Sosial	15.651.445.000,00	20.473.066.972,00
Pembayaran Tak Terduga	2.026.255.613,38	1.183.127.722,00
Pembayaran Bagi Hasil	115.413.727.850,00	96.552.366.600,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	660.311.350.000,00	687.083.019.791,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	3.273.114.027.350,84	2.987.296.956.443,61



5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(424.205.954.947,63)	(430.529.388.378,35)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar (Rp424.205.954.947,63) dan (Rp430.529.388.378,35) yang berasal dari :

Tabel 222 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	405.992.630,76	810.889.868,00
Arus Kas Keluar	424.611.947.578,39	431.340.278.246,35
Arus Kas Bersih	(424.205.954.947,63)	(430.529.388.378,35)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	405.992.630,76	810.889.868,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp405.992.630,76 dan Rp810.889.868,00 terdiri dari :

Tabel 223 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penjualan atas Aset Lainnya (atas Tindak Lanjut Penghapusan Aset)	405.992.630,76	810.889.868,00
Arus Kas Bersih	405.992.630,76	810.889.868,00



5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	424.611.947.578,39	431.340.278.246,35

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp424.611.947.578,39 dan Rp431.340.278.246,35 terdiri dari :

Tabel 224 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Tanah	1.727.306.005,00	11.021.176.466,00
Belanja Peralatan dan Mesin	86.126.274.741,00	123.664.589.654,00
Belanja Gedung dan Bangunan	118.169.885.080,81	149.832.834.297,05
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	208.508.996.188,58	133.679.243.538,30
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.617.485.563,00	10.702.434.291,00
Belanja Aset Lainnya	1.312.000.000,00	2.440.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	150.000.000,00	0,00
Jumlah	424.611.947.578,39	431.340.278.246,35

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(19.993.000.000,00)	20.045.925.000,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023 sebesar (Rp19.993.000.000,00) dan Rp20.045.925.000,00 yang berasal dari :

Tabel 225 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	7.000.000,00	20.045.925.000,00
Arus Kas Keluar	20.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih	(19.993.000.000,00)	20.045.925.000,00



5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.000.000,00	20.045.925.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp7.000.000,00 dan Rp20.045.925.000,00, terdiri dari :

Tabel 226 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	20.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	7.000.000,00	45.925.000,00
Jumlah	7.000.000,00	20.045.925.000,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	20.000.000.000,00	0,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Rp0,00, terdiri dari :

Tabel 227 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman	20.000.000.000,00	0,00
Jumlah	20.000.000.000,00	0,00

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS / NON ANGGARAN

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	826.334.220,00	(1.956.362.086,28)

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan



pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp826.334.220,00 dan (Rp1.956.362.086,28) yang berasal dari:

Tabel 228 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	177.597.576.732,00	206.424.049.331,00
Arus Kas Keluar	176.771.242.512,00	208.380.411.417,28
Arus Kas Bersih	826.334.220,00	(1.956.362.086,28)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	177.597.576.732,00	206.424.049.331,00

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp177.597.576.732,00 dan Rp206.424.049.331,00 merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK).



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 229 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023		
	PFK	Titipan	Jumlah	PFK	Titipan	Jumlah
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	130.844.581.609,00	1.652.995.123,00	132.497.576.732,00	158.557.102.599,00	166.946.732,00	158.724.049.331,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	71.622.330.319,00	0,00	71.622.330.319,00	68.746.316.682,00	0,00	68.746.316.682,00
Uang Jaminan Bongkar Reklame	0,00	148.942.623,00	148.942.623,00	0,00	102.401.732,00	102.401.732,00
Uang Titipan atas jaminan sewa rusunawa	0,00	16.895.000,00	16.895.000,00	0,00	13.025.000,00	13.025.000,00
Uang titipan pasien RSUD Ibnu Sina	0,00	72.310.000,00	72.310.000,00	0,00	51.520.000,00	51.520.000,00
Uang Titipan dari Dinas Koperasi, Um, Perindag (Kejari)	0,00	1.414.847.500,00	1.414.847.500,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pajak Transaksi	59.222.251.290,00	0,00	59.222.251.290,00	89.810.785.917,00	0,00	89.810.785.917,00
Penerimaan UP Bendahara Pengeluaran	45.100.000.000,00	0,00	45.100.000.000,00	47.700.000.000,00	0,00	47.700.000.000,00
Penerimaan Kembali UP Tahun 2024 dari Bendahara Pengeluaran	22.550.000.000,00	0,00	22.550.000.000,00	23.850.000.000,00	0,00	23.850.000.000,00
Penerimaan UP (SKPD) dari BUD - 2024	22.550.000.000,00	0,00	22.550.000.000,00	23.850.000.000,00	0,00	23.850.000.000,00
Jumlah	175.944.581.609,00	1.652.995.123,00	177.597.576.732,00	206.257.102.599,00	166.946.732,00	206.424.049.331,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	176.771.242.512,00	208.380.411.417,28

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp176.711.242.512,00 dan Rp208.380.411.417,28 merupakan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK).



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 230 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024				Tahun 2023			
	PFK	Titipan	Koreksi	Jumlah	PFK	Titipan	Koreksi	Jumlah
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	130.844.581.609,00	581.660.903,00	245.000.000,00	131.671.242.512,00	159.651.925.940,00	833.251.371,00	195.234.106,28	160.680.411.417,28
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	71.622.330.319,00	0,00	0,00	71.622.330.319,00	68.855.193.219,00	0,00	0,00	68.855.193.219,00
Uang Jaminan Pemeliharaan	0,00	168.741.989,00	0,00	168.741.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uang Jaminan Bongkar Reklame	0,00	342.668.914,00	0,00	342.668.914,00	0,00	809.911.371,00	0,00	809.911.371,00
Pengeluaran Tapera	0,00	0,00	0,00	0,00	36.524.743,00	0,00	0,00	36.524.743,00
Uang Jaminan Sewa Rusunawa	0,00	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	0,00	1.040.000,00	8.909.106,28	9.949.106,28
Uang Titipan Pasien RSUD Ibnu Sina	0,00	51.520.000,00	0,00	51.520.000,00	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
Koreksi Silpa BOS - 2022	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	186.325.000,00	186.325.000,00
Pembayaran utang pajak BOS tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	949.422.061,00	0,00	0,00	949.422.061,00
Pengeluaran Pajak Transaksi	59.222.251.290,00	0,00	0,00	59.222.251.290,00	89.810.785.917,00	0,00	0,00	89.810.785.917,00
Pengeluaran UP Bendahara								
Pengeluaran	45.100.000.000,00	0,00	0,00	45.100.000.000,00	47.700.000.000,00	0,00	0,00	47.700.000.000,00
Pengeluaran UP untuk Bendahara	22.550.000.000,00	0,00	0,00	22.550.000.000,00	23.850.000.000,00	0,00	0,00	23.850.000.000,00
Pengeluaran pada Awal Tahun								
Pengeluaran/Pengembalian UP (SKPD) ke BUD- 2023	22.550.000.000,00	0,00	0,00	22.550.000.000,00	23.850.000.000,00	0,00	0,00	23.850.000.000,00
Jumlah	175.944.581.609,00	581.660.903,00	245.000.000,00	176.771.242.512,00	207.351.925.940,00	833.251.371,00	195.234.106,28	208.380.411.417,28

Dari tabel 227 dan tabel 228, dapat diketahui bahwa Utang PFK Tahun 2024 sebesar Rp3.213.155.792,26 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 231 Utang PFK Tahun 2024

Uraian	Jumlah
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023	2.141.821.572,26
- Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023	20.103.320.971,00
Utang Jangka Pendek Lainnya - Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank pada RSUD Ibnu Sina	(20.000.000.000,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya - Kelebihan Bantuan Keuangan Provinsi Jatim Tahun 2023 (tidak masuk dalam arus kas aktivitas transitoris)	(103.320.971,00) (+)
Jumlah setelah dikurangi Utang Sisa BK Provinsi Jawa Timur	2.141.821.572,26
- Penambahan (Penerimaan) Arus Kas Transitoris	177.597.576.732,00
- Pengurangan (Pengeluaran) Arus Kas Transitoris	(176.771.242.512,00)
koreksi saldo BOS/BOP (tidak dicatat pada utang jangka pendek lainnya)	245.000.000,00 (+)
	(176.526.242.512,00)
	3.213.155.792,26



Tabel 232 Rincian Kas menurut SiLPA Laporan Realisasi Anggaran, Saldo Akhir Laporan Arus Kas dan Neraca

Rincian Kas	LRA	LAK	Neraca
Kas di Kas Daerah	81.791.696.381,85	84.932.542.174,11	81.791.696.382,11
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.970.286.980,32	6.042.596.980,32	5.970.286.980,32
Kas BOK Puskesmas	1.277.352.222,00	1.277.352.222,00	1.277.352.222,00
Kas di Bendahara BOS	32.371.142,83	32.371.142,83	32.371.142,83
Kas di Bendahara BOP	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Kas di Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00	3.213.155.792,00
Jumlah	89.071.896.727,00	92.285.052.519,26	92.285.052.519,26

Tabel 233 Selisih SiLPA Laporan Realisasi Anggaran dan Saldo Akhir Laporan Arus Kas

SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran	Rp	89.071.896.727,00
Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas	Rp	92.285.052.519,26
Selisih	Rp	(3.213.155.792,26)
Penjelasan :		
Aset yang dibatasi penggunaannya, terdiri dari :		
Saldo IWP di RKUD	Rp	0,26
Uang titipan jaminan pelaksanaan pekerjaan	Rp	560.826.624,00
Uang titipan jaminan bongkar reklame	Rp	579.435.968,00
Uang titipan jaminan atas sewa retribusi rusunawa	Rp	154.960.000,00
Uang titipan WP Badan PPKAD	Rp	65.778.600,00
Uang titipan dana bergulir Provinsi Jawa Timur	Rp	364.997.100,00
Uang titipan pasien pada BLUD RSUD Ibnu Sina	Rp	72.310.000,00
Uang titipan Dinas Koperasi, UM, Perindag	Rp	1.414.847.500,00
Jumlah	Rp	3.213.155.792,26
Selisih	Rp	0,00



Tabel 234 Selisih Kenaikan/Penurunan Kas pada Laporan Arus Kas dan Neraca

Kenaikan/Penurunan Kas di Kas Daerah pada Neraca	Rp	21.386.906.362,07
Kenaikan/Penurunan Kas pada Laporan Arus Kas	Rp	13.527.372.216,53
Selisih	Rp	7.859.534.145,54
Penjelasan :		
Kenaikan/Penurunan kas di bendahara penerimaan	Rp	(200.000,00)
Kenaikan/Penurunan kas di bendahara pengeluaran	Rp	0,00
Kenaikan/Penurunan kas BLUD	Rp	(9.023.903.992,54)
Kenaikan/Penurunan kas Kapitasi	Rp	0,00
Kenaikan/Penurunan kas BOK	Rp	433.225.100,00
Kenaikan/Penurunan kas BOS	Rp	(91.397.821,00)
Kenaikan/Penurunan kas di kas lainnya	Rp	(3.591.652,00)
Kenaikan/Penurunan kas yang dibatasi penggunaannya	Rp	1.071.334.220,00
Koreksi Dana BOS Kinerja SMP Swasta yang sebelumnya belum dikeluarkan dari LAK	Rp	(245.000.000,00)
Jumlah	Rp	(7.859.534.145,54)
Selisih	Rp	0,00

Saldo Akhir Kas Tahun 2024

Saldo Awal Kas sebesar Rp78.757.680.302,73

Saldo Akhir Kas sebesar Rp92.285.052.519,26 terdiri dari :

1. Saldo Akhir Kas di Rekening Umum Kas Daerah sebesar Rp84.932.542.174,11, terdiri dari :
 - 1) Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp81.791.696.382,11 dan
 - 2) Saldo Aset yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp3.140.845.792,00.
2. Saldo Akhir Kas di BLUD sebesar Rp6.042.596.980,32 terdiri dari :
 - 1) Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Ibnu Sina sebesar Rp278.731.546,90, saldo tersebut termasuk uang titipan pasien yang dicatat pada aset yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp72.310.000,00
 - 2) Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Umar Mas'ud sebesar Rp376.690.337,49
 - 3) Saldo Akhir Kas di BLUD - Puskesmas sebesar Rp5.318.607.494,88
 - 4) Saldo Akhir Kas di BLUD UPT PLCD – Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp68.567.601,05
3. Saldo Akhir Kas BOK Puskesmas sebesar Rp1.277.352.222,00
4. Saldo Akhir Kas di Rekening BOS sebesar Rp32.561.142,83.



5.6 KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1 Ekuitas Awal

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Ekuitas Awal	6.728.905.682.222,45	6.084.349.535.572,12

Ekuitas awal per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp6.728.905.682.222,45 dan Rp6.084.349.535.572,12 merupakan ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas periode tahun sebelumnya.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Surplus/Defisit-LO	437.173.406.299,11	632.473.266.781,52

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp437.173.406.299,11 dan Rp632.473.266.781,52 berasal dari Laporan Operasional per 31 Desember 2024 dan dari Laporan Operasional per 31 Desember 2023.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2.266.412.561,77	12.082.879.868,81

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat perubahan nilai pada neraca yang dikarenakan adanya perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan Koreksi atas Laporan Keuangan periode sebelumnya.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.266.412.561,77 dan Rp12.082.879.868,81 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



5.6.3.1 Koreksi Saldo Kas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Koreksi Saldo Kas	0,00	(186.325.000,00)

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp186.325.000,00).

5.6.3.2 Koreksi atas Penggunaan Aplikasi (Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Koreksi ats Penggunaan Aplikasi	2.266.412.561,77	12.269.204.868,81

Koreksi atas Penggunaan Aplikasi (Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi) per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.266.412.561,77 dan Rp12.269.204.868,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 235 Koreksi Atas Perhitungan Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	162.371.221,07	412.753.979,16
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.037.985.312,73	6.699.246.839,27
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.404.409,30	5.157.204.050,38
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	59.651.618,67	0,00
	Jumlah	2.266.412.561,77	12.269.204.868,81

Rincian Koreksi atas Penggunaan Aplikasi (Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi) per OPD dapat dilihat pada **lampiran 27**.

5.6.4 Ekuitas Akhir

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Ekuitas Akhir	7.168.345.501.083,33	6.728.905.682.222,45

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.168.345.501.083,33 dan Rp6.728.905.682.222,45 atau mengalami kenaikan sebesar Rp439.439.818.860,88 atau 6,53 % jika dibandingkan per 31 Desember 2023.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Domisili dan Bentuk Hukum suatu Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas Tersebut Berada

Kabupaten Gresik sebelumnya bernama Kabupaten Surabaya yang memiliki perkantoran di Jl. Gentengkali Surabaya, dan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974, maka seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Saat ini pusat perkantoran Kabupaten Gresik berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik.

4.2 Penjelasan Mengenai Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Kegiatan pokok Pemerintah Kabupaten Gresik adalah melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang diimplementasikan dalam urusan wajib dan urusan pilihan, yang dituangkan dalam rencana strategik, RPJMD, dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan berdasarkan APBD Kabupaten Gresik setiap tahunnya.

4.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Kegiatan Operasionalnya

Secara garis besar yang menjadi dasar operasional Pemerintah Kabupaten Gresik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan turunannya;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan turunannya.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah merupakan laporan konsolidasi, yaitu suatu laporan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan laporan keuangan entitas-entitas akuntansi (SKPD) yang ada dibawah entitas pelaporan dengan proses sistimatis dan berjenjang. Laporan Keuangan ini terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengaplikasikan SAP berbasis akrual. Walaupun demikian, beberapa hal mungkin masih harus mendapat perhatian untuk dilakukan penyempurnaan. Untuk itu kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak akan dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan ditahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, dapat bermanfaat bagi Pengguna Laporan termasuk seluruh masyarakat Gresik.


H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB.